

KATA PENGANTAR

Patutlah pujian syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Baik, karena dengan berkat dan anugerahNya jualah, sehingga Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah) Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, perlu pula disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Teknis yang ditugaskan untuk menyusun dokumen ini di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Dogiyai.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik, maka paling lama 6 (enam) bulan setelahnya, visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai terpilih harus dapat diterjemahkan ke dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022. Oleh sebab itu, kehadiran dokumen RPJMD ini merupakan wujud nyata yang patut diapresiasi. Dalam penyusunannya, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai terpilih yang dijadikan sebagai bahan dasar, telah disinkronisasi dengan berbagai dokumen perencanaan Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi Papua, serta memperhatikan masukan dari masyarakat dan stakeholders. Selain itu, penyusunannya dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspirasi stakeholder pembangunan lainnya, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, dokumen RPJMD ini merupakan dokumen pokok perencanaan pembangunan di daerah ini yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Kepada setiap SKPD wajib mengacu dokumen ini dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dogiyai. Dan, oleh karena sifatnya sebagai dokumen publik, maka dokumen ini menjadi milik seluruh komponen masyarakat, sehingga semua pihak dapat membentuk kesamaan pandang dalam menyikapi pembangunan Kabupaten Dogiyai ke depan. Sangat diharapkan untuk sungguh-sungguh dipedomani dalam rangka mewujudkan masyarakat "***Dogiyai Bahagia***".

Terima kasih.

Dogiyai.....2018

BUPATI DOGIYAI

.....

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD	4
1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Dogiyai Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya	9
1.3.1. Keterkaitan RPJMD dan RPJPD.....	10
1.3.2. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 Dengan RPJM Nasional Tahun 2015-2019	11
1.3.3. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 dengan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018.....	11
1.3.4. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 dengan RTRW Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2034	12
1.3.5. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten Yang Berbatasan.....	13
1.3.6. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 dengan RENSTRA OPD	14
1.3.7. Keterkaitan RPJMD dengan RKPD	14
1.4. Maksud Dan Tujuan.....	15
1.5. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	18
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi	18
2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah.....	18
2.1.1.1. Letak Geografis.....	18
2.1.1.2. Kondisi Topografi.....	20
2.1.1.3. Kondisi Hidrologi.....	21

2.1.1.4.	Kondisi Iklim dan Curah Hujan	22
2.1.1.5.	Tanah dan Geologi.....	23
2.1.1.6.	Penggunaan Lahan.....	25
2.1.1.7.	Kondisi Kebencanaan	28
2.1.2.	Kondisi Demografi	35
2.1.3.	Kehidupan Sosial Budaya.....	38
2.1.3.1.	Mata Pencaharian Hidup	39
2.1.3.2.	Pembatas Lahan-Tapal Batas Mude..	40
2.1.3.3.	Tanah.....	41
2.1.4.	Potensi Pengembangan Wilayah.....	42
2.1.4.1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	44
2.1.4.2.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	44
2.1.4.3.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ...	44
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	47
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	47
2.2.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	47
2.2.1.2.	Struktur Ekonomi	48
2.2.1.3.	Inflasi.....	50
2.2.1.4.	PDRB Per Kapita	50
2.2.1.5.	Persentase Penduduk Miskin.....	51
2.2.1.6.	Sarana dan Prasarana Ketertiban Umum.....	52
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Masyarakat	53
2.2.2.1.	Pendidikan	53
2.2.2.2.	Kesehatan	56
2.2.2.3.	Ketenagakerjaan.....	61
2.2.2.4.	Pembangunan Gender	63
2.2.3.	Fokus Seni Budaya Dan Olahraga	65
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	68
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib.....	68
2.3.1.1.	Pendidikan	68
2.3.1.2.	Kesehatan	69
2.3.1.3.	Pekerjaan Umum.....	72
2.3.1.4.	Perhubungan dan Telekomunikasi ...	74
2.3.1.5.	Sosial	77
2.3.1.6.	Kependudukan dan Catatan Sipil	77
2.3.1.7.	Keluarga Berencana	79
2.3.1.8.	Ketenagakerjaan.....	81

2.3.1.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	82
2.3.2. Fokus Layanan Pilihan	86
2.3.2.1. Pertanian	86
2.3.2.2. Perkebunan.....	91
2.3.2.3. Peternakan.....	91
2.3.2.4. Kehutanan	93
2.3.2.5. Perikanan.....	95
2.3.2.6. Sumber Daya Mineral.....	96
2.3.2.7. Perdagangan	97
2.3.2.8. Perindustrian	98
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	100
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	100
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	102
2.4.2.1. Sarana Transportasi.....	102
2.4.2.2. Fasilitas Jasa Perbankan.....	102
2.4.2.3. Ketersediaan Hotel dan Penginapan..	102
2.4.2.4. Indeks Kemahalan Kontruksi	102
2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia.....	103
2.4.3.1. Kualitas Tenaga Kerja.....	103
2.4.3.2. Tingkat Ketergantungan Penduduk ..	104
2.4.3.3. Kapasitas Aparatur Pemerintahan	105
2.5. Aspek Pembangunan Kewilayahan.....	106
2.5.1. Fokus Pendidikan.....	106
2.5.2. Fokus Kesehatan.....	124
2.5.3. Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi	127

**BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN KERANGKA PENDANAAN 129**

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	129
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	129
3.1.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah	129
3.1.1.2. Realisasi Belanja Daerah	132
3.1.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah	136
3.1.2. Neraca Daerah.....	138
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	142
3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah	142
3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah	144
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	152
3.3. Kerangka Pendanaan	154

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah	154
3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah	155
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan	156
3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran	157
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	159
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	159
4.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah	172
4.2.1. Isu Strategis Internasional	173
4.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional	175
4.2.3. Isu Pembangunan Regional	176
4.3. Telaah Dokumen Perencanaan Terkait	178
4.3.1. Telaah RPJP Nasional, RPJPD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten	178
4.3.2. Telaah RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Papua	180
4.3.3. Telaah RTRW Provinsi Papua Dan RTRW Kabupaten Dogiyai	181
4.3.3. Telaah RPJMD Kabupaten Lainnya Yang Berbatasan	183
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	168
5.1. Visi	168
5.2. Misi	189
5.3. Tujuan Dan Sasaran	204
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	226
6.1. Strategi Kebijakan	223
6.2. Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan	232
6.3. Program Pembangunan Daerah Dan Kerangka Pendanaannya	252
6.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	465
6.4.1. Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai	465
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	482
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	507
BAB IX PENUTUP	557
9.1. Kaidah Transisi	557
9.2. Kaidah Pelaksanaan	558

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.2.1. Luas Wilayah Kabupaten Dogiyai Menurut Distrik.....	20
Tabel.2.2. Tingkat Kerawanan Gempa Bumi Di Provinsi Papua.....	34
Tabel.2.3. Skor Indeks Rawan Bencana Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 dan 2013 ...	35
Tabel.2.4. Perkembangan Kependudukan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016	36
Tabel.2.5 Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Dogiyai (dalam %) 2014 – 2016	48
Tabel.2.6 Kontribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Dogiyai (Persen) Tahun 2012-2016.....	50
Tabel.2.7 Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas Kabupaten Dogiyai (dalam %) Tahun 2017.....	64
Tabel.2.8 Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas Kabupaten Dogiyai (dalam %) Tahun 2017.....	65
Tabel.2.9 Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Tempat Baung Air Besar (BAB) Di Kabupaten Dogiyai (dalam %) 2017	65
Tabel.2.10 Banyaknya Distrik yang Memiliki Lapangan/ Gelanggang Olahraga menurut Kode/ Nama Distrik dan Jenis Lapangan Tahun 2016	66
Tabel.2.11 Banyaknya Distrik yang Memiliki Kelompok Kegiatan Olahraga menurut Kode/ Nama Distrik dan Jenis Kegiatan Tahun 2016	67
Tabel.2.12 Indikator-Indikator Pendidikan Sekolah Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016.....	68
Tabel.2.13 Panjang Jalan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016.....	72
Tabel.2.14 Kondisi Jalan Menurut Permukaan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016.....	73
Tabel.2.15 Aktivitas Angkutan Udara Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2016.....	76
Tabel.2.16 Kondisi Perkemabangan Koperasi Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2017	82

Tabel.2.17	Surat Perijinan Usaha Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2015.....	86
Tabel.2.18	Luas Panen dan Produksi Komoditi Tanaman Pangan di Kabupaten Dogiyai, 2016	87
Tabel.2.19	Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran menurut Jenis Sayuran di Kabupaten Dogiyai Tahun 2016 (Ton).....	89
Tabel.2.20	Luas Panen dan Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Buah di Kabupaten Dogiyai Tahun 2016 (Ton)	90
Tabel.2.21	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Dogiyai Tahun 2016.....	91
Tabel.2.22	Produksi Daging Ternak Akhir Tahun menurut Jenis Ternak di Kabupaten Dogiyai Tahun 2015.....	93
Tabel.2.23	Produksi Ternak Unggas Akhir Tahun menurut Jenis Unggas di Kabupaten Dogiyai Tahun 2015.....	93
Tabel.2.24	Luas Hutan menurut Peta Paduserasi Kabupaten Dogiyai Tahun 2016 (Ha)	95
Tabel.2.25	Perkembangan Gedung Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	107
Tabel.2.26	Perkembangan Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	108
Tabel.2.27	Perkembangan Guru Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016	109
Tabel.2.28	Perkembangan Siswa/i Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	109
Tabel.2.29	Perkembangan Rasio Guru-murid Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	110
Tabel.2.30	Perkembangan Rasio Murid-Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	111
Tabel.2.31	Perkembangan Gedung Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	112
Tabel.2.32	Perkembangan Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	113
Tabel.2.33	Perkembangan Guru Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	113

Tabel.2.34	Perkembangan Siswa/i Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016	114
Tabel.2.35	Perkembangan Rasio Guru-murid Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	115
Tabel.2.36	Perkembangan Rasio Murid-Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016	116
Tabel.2.37	Perkembangan Gedung Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	117
Tabel.2.38	Perkembangan Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	117
Tabel.2.39	Perkembangan Guru Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	118
Tabel.2.40	Perkembangan Siswa/i Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	119
Tabel.2.41	Perkembangan Rasio Guru-murid Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	119
Tabel.2.42	Perkembangan Rasio Murid-Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	120
Tabel.2.43	Perkembangan Gedung Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016	121
Tabel.2.44	Perkembangan Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016	121
Tabel.2.45	Perkembangan Guru Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	122
Tabel.2.46	Perkembangan Siswa/i Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016	122
Tabel.2.47	Perkembangan Rasio Guru-murid Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	123
Tabel.2.48	Perkembangan Rasio Murid-Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016	124
Tabel.2.49	Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016	124

Tabel.2.50	Perkembangan Puskesmas Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	125
Tabel.2.51	Perkembangan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016	126
Tabel.2.52	Perkembangan Posyandu Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016.....	127
Tabel.2.53	Perkembangan Ketersediaan Fasilitas Penunjang Perekonomian Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014 ..	128
Tabel.3.1	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam %).....	131
Tabel.3.2	Tingkat Efektifitas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam %)	131
Tabel.3.3	Struktur Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam %).....	133
Tabel.3.4	Daya Serap Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam %).....	135
Tabel.3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam rupiah)	137
Tabel.3.6	Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam rupiah)	138
Tabel.3.7	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016.....	140
Tabel.3.8	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam juta rupiah).....	152
Tabel.3.9	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)	154
Tabel.3.10	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)	155
Tabel.3.11	Perhitungan Kapasitas Riil Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)	157
Tabel.3.12	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah).....	158
Tabel 4.1.	Telaah RPJP Nasional, RPJD Provinsi dan RPJPD Kabupaten	179
Tabel.4.2.	Telaah RPJM Nasional 2015-2019 Dan RPJMD Provinsi Papua 2013-2018.....	180
Tabel.4.3.	Telaah RTRW Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2034.....	182
Tabel.4.4.	Telaah RPJMD Kabupaten Berbatasan Yang Masih Berlaku Di Wilayah Papua.....	184
Tabel.5.1.	Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	212

Tabel.5.2.	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD	215
Tabel.6.1.	Keselarasan Misi dengan Strategi Kebijakan	228
Tabel.6.2.	Kesesuaian Arah Kebijakan Terhadap Sasaran, Tujuan dan Misi Pembangunan	234
Tabel 6.3.	Pemetaan Waktu Arah Kebijakan.....	247
Tabel.6.4.	Perumusan Program Pembangunan Daerah.....	253
Tabel.6.5.	Perumusan Program Prioritas	313
Tabel.6.6.	Perhitungan Pagu Program	355
Tabel.6.7.	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	385
Tabel.6.8.	Rumusan Usulan Program Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Dogiyai	469
Tabel.7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Dogiyai.....	482
Tabel.7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	483
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama	530
Tabel.8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dogiyai 2017-2022	534

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar.1.1.	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	10
Gambar.1.2.	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 Dengan RPJPD Tahun 2005-2025	20
Gambar.2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Dogiyai.....	19
Gambar.2.2.	Struktur Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Di Kabupaten Dogiyai.....	21
Gambar.2.3.	Sistem Wilayah Sungai Di Kabupaten Dogiyai	22
Gambar.2.4.	Kondisi Eksisting Geologi Di Kabupaten Dogiyai	24
Gambar.2.5.	Tata Guna Lahan Di Kabupaten Dogiyai	25
Gambar.2.6.	Tutupan Lahan Di Kabupaten Dogiyai	26
Gambar.2.7.	Kondisi Eksisting Kawasan Hutan Dan Perairan.....	27
Gambar.2.8.	Kondisi Eksisting Rawan Bencana Kabupaten Dogiyai.....	29
Gambar.2.9.	Kondisi Eksisting Rawan Bencana Longsor Kabupaten Dogiyai.....	31
Gambar.2.10.	Kondisi Eksisting Rawan Bencana Banjir Kabupaten Dogiyai.....	32
Gambar.2.11.	Kondisi Eksisting Rawan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Dogiyai.....	33
Gambar.2.12.	Piramida Penduduk Kabupaten Dogiyai Tahun 2016	37
Gambar.2.13.	Sistem Perwilayahan Di Kabupaten Dogiyai	45
Gambar.2.14.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam %)	47
Gambar.2.15.	Inflasi Deflator PDRB Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam %)	50
Gambar.2.16.	PDRB Per Kapita Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam juta rupiah per kapita).....	51
Gambar.2.17.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam %)	51
Gambar.2.18.	Gini Ratio Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam index)	52
Gambar.2.19.	Rasio Satpol PP Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam Per 10.000 penduduk)	53

Gambar.2.20. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam index)	54
Gambar.2.21. Angka Melek huruf > 15 tahun Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam persen)	54
Gambar.2.22. Rata2 lama Sekolah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam tahun)	55
Gambar.2.23. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam persen)	55
Gambar.2.24. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam persen)	56
Gambar.2.25. Angka Harapan Hidup Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam tahun)	56
Gambar.2.26. Persentase Gizi Balita Kabupaten Dogiyai Tahun 2016 (dalam tahun)	57
Gambar.2.27. Persentase Bayi Yang Mendapat Asi Eksklusif Dan Balita 0-59 Bulan Dapat Vit-A Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2016 (dalam tahun)	57
Gambar.2.28. Persentase Balita yang mempunyai KMS/buku KIA Kabupaten Dogiyai Tahun 2016 (dalam tahun)	58
Gambar.2.29. Persentase Bumil KEK Dapat PMT Kabupaten Dogiyai Tahun 2016 (dalam tahun)	59
Gambar.2.30. Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam persen)	59
Gambar.2.31. Persentase Balita Mendapat Imunisasi Kabupaten Dogiyai Tahun 2015-2016 (dalam persen)	60
Gambar.2.32. Persentase Ibu Melahirkan Pertama Menurut Tenaga Yang Menolong Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2015-2016 (dalam persen)	60
Gambar.2.33. Jumlah Orang Bekerja Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015 (dalam orang)	61
Gambar.2.34. Jumlah Angkatan Kerja Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015 (dalam orang)	61
Gambar.2.35. Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015 (dalam persen)	62
Gambar.2.36. Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015 (dalam persen)	62
Gambar.2.37. Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Tinggi Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015 (dalam persen)	63
Gambar.2.38. Capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015	64

Gambar.2.39. Rasio Puskesmas Per 30 ribu penduduk Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016	70
Gambar.2.40. Rasio Dokter Per 100 ribu penduduk Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016	70
Gambar.2.41. Rasio Tenaga Medis Per 100 ribu penduduk Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016	71
Gambar.2.42. Persentase Balita Yang Mengikuti Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam persen)	71
Gambar.2.43. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam persen)	72
Gambar.2.44. Rasio Aksesibilitas Wilayah Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam panjang jalan Km/Km2)	74
Gambar.2.45. Rasio Mobilitas Penduduk Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam panjang jalan km/jiwa).....	74
Gambar.2.46. Rasio Tempat Ibadah per 1000 penduduk Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016	77
Gambar.2.47. Persentase Jumlah Keluarga Menurut Klasifikasi Keluarga Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam persen)	78
Gambar.2.48. Persentase Penduduk 17 Tahun Ke Atas yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota, , 2017	79
Gambar.2.49. Rasio Akseptor KB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam persen)	79
Gambar.2.50. Persentase Perempuan 15 - 49 Tahun Pernah Kawin yang Tidak ber-KB dan Alasan Utama Tidak Menggunakan Alat/Cara KB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 (dalam persen)	80
Gambar.2.51. Persentase Perempuan usia 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin dan kelompok Umur Kawin Pertama (UKP) Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 (dalam persen)	81
Gambar.2.52. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015	82
Gambar.2.53. Klasifikasi UMKM Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 (Jenis Usaha)	83
Gambar.2.54. Sektor Yang Bergerak Bidang UMKM Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2017	84
Gambar.2.55. Pembiayaan UMKM Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2017	84
Gambar.2.56. Asset dan Omzet UMKM Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2017	85

Gambar.2.57. Partisipasi Masyarakat Terhadap UMKM Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2017	85
Gambar.2.58. Kontribusi Tanaman Pangan Terhadap PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016	87
Gambar.2.59. Kontribusi Sektor Tanaman Hortikultura Semusim dan Tahunan lainnya Terhadap PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam %)	88
Gambar.2.60. Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam %).....	92
Gambar.2.61. Kontribusi Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan Terhadap PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam %).....	92
Gambar.2.62. Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam %)	94
Gambar.2.63. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam %).....	96
Gambar.2.64. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam %).....	96
Gambar.2.65. Kontribusi Sektor Perdagangan Mobil, Motor dan Reparasi Terhadap Total PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam %).....	97
Gambar.2.66. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam %)	98
Gambar.2.67. Industri Makanan dan Minuman Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016	99
Gambar.2.68. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus Dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Tahun 2014-2016.....	99
Gambar.2.69. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan Tahun 2014-2016	100
Gambar.2.70. Kontribusi Kabupaten Dogiyai Terhadap Total PDRB Wilayah Papua Tahun 2013-2015 (dalam persen)	100
Gambar.2.71. Angka konsumsi Rumah tangga per kapita Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam rupiah)	101
Gambar.2.72. Tingkat Kemandirian Fiskal Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015 (dalam persen)	101

Gambar.2.73. Persentase PAD terhadap Transfer Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015.....	102
Gambar.2.74. Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam indeks)	103
Gambar.2.75. Produktifitas Tenaga Kerja Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015 (dalam juta PDRB/TK org)	104
Gambar.2.76. Persentase Angkatan Kerja Yang Berpendidikan Tinggi Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam persen)	104
Gambar.2.77. Rasio Ketergantungan Penduduk Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016	105
Gambar.2.78. Kapasitas PNS Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016	106
Gambar.3.1. Realisasi Dan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016	129
Gambar.3.2. Realisasi Dan Tingkat Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016.....	132
Gambar.3.3. Komposisi Belanja Operasi Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016	133
Gambar.3.4. Komposisi Belanja Modal Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016	134
Gambar.3.5. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016	136
Gambar.3.6. Komposisi Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Ekonomi Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam %)	151
Gambar.5.1. Kebahagian Dalam Visi Kabupaten Dogiyai	189

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi kerakyatan. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum diimplementasikan.

Penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal ini kemudian lebih dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang diwujudkan dalam dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang merupakan rencana pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun. Sedangkan untuk jangka menengah dituangkan dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang memiliki jangka waktu 5 tahun. Terakhir, untuk jangka pendek, didokumentasikan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan waktu 1 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Kemudian RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan daerah adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Setelah dilantiknya Yakobus Dumupa sebagai Bupati dan Oskar Makai sebagai Wakil Bupati Dogiyai masa bakti periode 2017-

2022 pada tanggal 18 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-3120 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Dogiyai Provinsi Papua, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-3121 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Dogiyai Provinsi Papua, maka melekat kewajiban bupati dan wakil bupati baru terlantik untuk menyusun RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa penetapan Perda RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 digunakan oleh pemerintah daerah untuk menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dimana tujuan dan sasaran tersebut dirumuskan ke dalam program-program prioritas yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan arah kebijakan, tema pembangunan dan strategi tertentu, yang diformulasi menggunakan 4 (empat) pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, demokratis dan partisipatif, serta *top down* dan *bottom up*, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018. Dalam hal ini pendekatan politik berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sebelum dipilih oleh rakyat, calon kepala daerah merumuskan visi dan misinya sebagai janji yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala daerah. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama kepala daerah terpilih memimpin daerah. Namun dalam penyusunan RPJM Daerah tersebut harus tetap mengacu kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJP Nasional.

Pendekatan teknokratik berkaitan dengan profesionalisme dan keahlian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang

diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif.

Pendekatan partisipatif merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pergeseran pemahaman bahwa masyarakat bukan sekedar obyek tetapi juga merupakan pelaku pembangunan mendorong pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat bawah (kampung/kelurahan). Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang belakangan ini juga disebut dengan istilah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pendekatan *top-down* (atas-bawah) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan Bappeda dan OPD. Bappeda sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan ini merumuskan rancangan awal dengan masukan dari rancangan Rencana Strategis OPD. Rancangan awal tersebut nantinya akan dibahas dalam kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Sedangkan pendekatan *bottom-up* (bawah atas) dilakukan mulai dari pengusulan program atau proyek dari tingkat bawah (desa/kelurahan) oleh masyarakat. Penyelenggaraan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang dimaksudkan sebagai wahana menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang kemudian hasilnya akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan dan selanjutnya Musrenbang tingkat kabupaten/kota.

Ini berarti, dokumen RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 merupakan komitmen dan kehendak bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Dogiyai untuk mewujudkan arah dan tindakan mencapai tujuan dan sasaran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik yang dilandasi dengan semboyan motivasi "*hidup dan berkarya untuk memuliakan Tuhan, menghormati sesama manusia, dan menghargai alam semesta*".

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);.
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
16. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
19. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 21. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 22. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 23. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 24. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 25. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

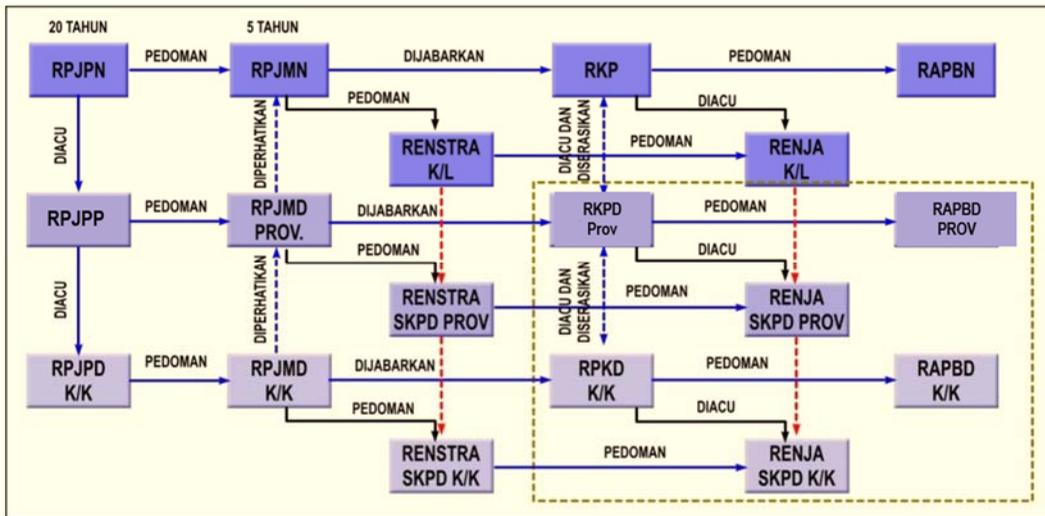
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
29. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-3120 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Dogiyai Provinsi Papua;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-3121 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Dogiyai Provinsi Papua;
35. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2014 Nomor 06);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Dogiyai Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD).

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

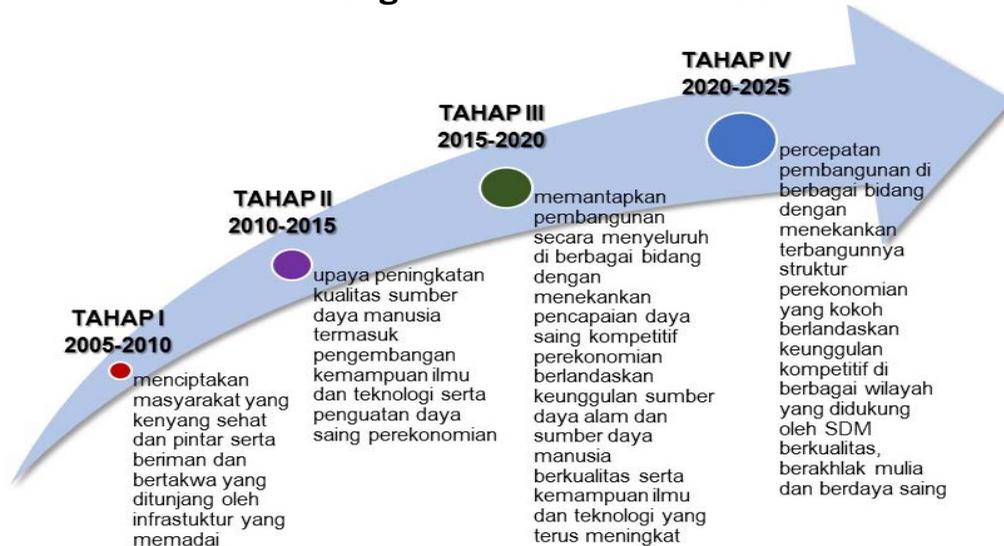


RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPd dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra OPD, Renja OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. RKPd dan RKA-OPD selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dijelaskan lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

1.3.1. Keterkaitan RPJMD dan RPJPD

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, Kabupaten Dogiyai merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Nabire (Daerah Induk). Hingga pelaksanaan pembangunan jangka menengah kedua (2012-2017) berakhir, Kabupaten Dogiyai belum memiliki dokumen RPJPD sendiri. Sehingga dalam menyusun RPJMD selama ini masih berpedoman pada RPJPD kabupaten induk yaitu Kabupaten Nabire. Termasuk juga untuk RPJMD periode 2017-2022 ini masih berpedoman pada RPJPD Induk, yang sekarang masuk dalam tahap III pelaksanaan RPJPD 2005-2025 dengan agenda pembangunan jangka panjang sebagai berikut.

Gambar 1.2.
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022
Dengan RPJPD Tahun 2005-2025



1.3.2. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 Dengan RPJM Nasional Tahun 2015-2019

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 memperhatikan 9 prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Hal ini untuk menjamin terlaksananya paradigma baru dalam pendekatan perencanaan yang terfokus pada pendekatan *Holistik-Tematik, Integratif* dan *Spasial*, sehingga prioritas-prioritas nasional dapat tersinkronisasi dan bersinergi dengan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Dogiyai secara optimal. Adapun prioritas pembangunan nasional 2015-2019 yang diberi nama NAWA CITA yang perlu diperhatikan dalam RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

1.3.3. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 dengan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dogiyai tahun 2017-2022 tidak terlepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Papua yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018. Dalam hal ini RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 juga memperhatikan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018 yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, dengan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia;
4. Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal;
5. Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

1.3.4. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 dengan RTRW Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2034

Sebagai bagian dari pendekatan *spasial*, RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 dilaksanakan dengan berpedoman pada RTRW yang memiliki lingkup substansial pada rencana struktur

ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Dimana tujuan RTRW yang dipedomani adalah “Mewujudkan Kabupaten Dogiyai yang berbasis potensi dan keunggulan komoditas lokal melalui pembangunan infrastruktur dengan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan serta memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan, serta kebijakan penataan ruang wilayah yang menjadi acuan yaitu :

- a. Pengembangan infrastruktur secara merata yang menjangkau seluruh wilayah untuk membentuk struktur ruang dan membuka akses wilayah-wilayah yang terisolasi serta mendukung distribusi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pertambangan;
- b. Percepatan pembangunan ekonomi wilayah yang berbasis sektor unggulan (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan, termasuk pertambangan) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan serta tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
- d. Pelestarian, peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya;
- e. Pengembangan sistem adaptasi dan mitigasi bencana;
- f. Pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya lokal dan menghubungkan dengan kawasan pusat pertumbuhan;
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

1.3.5. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten Yang Berbatasan

Secara geografis wilayah Kabupaten Dogiyai dikelilingi oleh 5 (lima) kabupaten lainnya yang berdekatan, yaitu di sebelah utara dengan Kabupaten Nabire, sebelah Timur dengan Kabupaten Paniai dan Deiyai, sebelah selatan dengan Kabupaten Mimika, dan sebelah barat dengan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan letak geografis seperti ini sudah tentu segala pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten yang berbatasan secara tidak langsung akan berdampak terhadap dinamika pembangunan wilayah Kabupaten Dogiyai. Oleh sebab itu RPJMD dan RTRW kelima kabupaten tersebut juga menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022, sehingga dapat tercipta sinkronisasi pembangunan antarwilayah yang baik, khususnya untuk mewujudkan kestabilan sosial politik dan ekonomi wilayah, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah, mengantisipasi kemajuan modernisasi, mengawasi arus migrasi dan mobilitas tenaga kerja, meningkatkan kerjasama ekonomi antardaerah, menjaga ketertiban dan keamanan umum bersama, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah.

1.3.6. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 dengan RENSTRA OPD

Sesuai dengan paradigma baru dalam pendekatan perencanaan yang salah satunya mengedepankan perencanaan terintegrasi, maka RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA OPD yang berperspektif 5 (lima) tahunan. Disini Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah di bawah koordinasi dan kendali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Dogiyai. Renstra OPD memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

RENSTRA OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja OPD (Renja OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana untuk pelaksanaan program/kegiatan 1 tahun masa pembangunan.

1.3.7. Keterkaitan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Dogiyai yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung, Distrik hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran, serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih fokus sebagai uraian dari Visi, Misi Pemerintah Daerah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. Menjadi dokumen perencanaan sebagai rumusan kebijakan umum dan program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah kabupaten dalam 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra OPD;
4. Sebagai perwujudan komitmen antara pemerintah daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai dengan APBD kabupaten;

5. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dogiyai, secara spesifik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Dogiyai sampai tahun 2022 yang direncanakan perwujudannya melalui upaya-upaya yang sistematis dengan perencanaan anggaran yang rasional. Sehubungan dengan hal itu, maka tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang *holistik-tematik, integratif* dan *spatial*, serta terfokus, terukur dan dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menjadi rujukan seluruh OPD di Kabupaten Dogiyai dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD, landasan sinkronisasi/sinergi antara pencapaian sasaran program pembangunan daerah Kabupaten Dogiyai dengan pencapaian program prioritas Nasional yang akan didanai bersumber dari APBN dan/atau sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan melalui kepala daerah;
3. Mempermudah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap OPD dilingkup pemerintahan Kabupaten Dogiyai;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan;
5. Membangun komitmen melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan pada tingkatan pemerintahan kabupaten;
6. Menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan OPD dalam melaksanakan implementasi program pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
7. Menjadi acuan dalam fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan

daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD;

8. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tahunan mulai dari RENJA OPD, RKA OPD, DPA OPD, hingga penyusunan APBD;
9. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 disusun secara sistematis, terstruktur dan terintegrasi antar setiap bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bab ini menjelaskan kondisi umum daerah Kabupaten Dogiyai yang meliputi aspek-aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, dan penelaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

Bab III Gambaran Umum Keuangan Daerah. Bab ini menjelaskan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan secara rinci yang terdiri atas kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Bab ini memuat berbagai isu strategis yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah yang dirinci menurut urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, pilihan dan penunjang. Selain itu juga memuat isu-isu strategis internasional, kebijakan nasional, pembangunan daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Dogiyai.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Merupakan bab yang menjelaskan mengenai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

terpilih, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah. Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dogiyai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu selama periode 2017-2022.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan program Perangkat Daerah. Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bab ini menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif yang menjadi tanggungjawab OPD.

Bab IX Penutup. Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

2.1.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Dogiyai adalah kabupaten yang wilayahnya terletak di pegunungan tengah Pulau Papua, memiliki posisi strategis bagi lalu lintas perdagangan dan transportasi antara kabupaten di daerah pesisir dan daerah pegunungan di wilayah Papua. Kabupaten Dogiyai terletak pada posisi 3^o57'-4^o15' Lintang Selatan dan 135^o20'-136^o37' Bujur Timur. Secara administratif batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

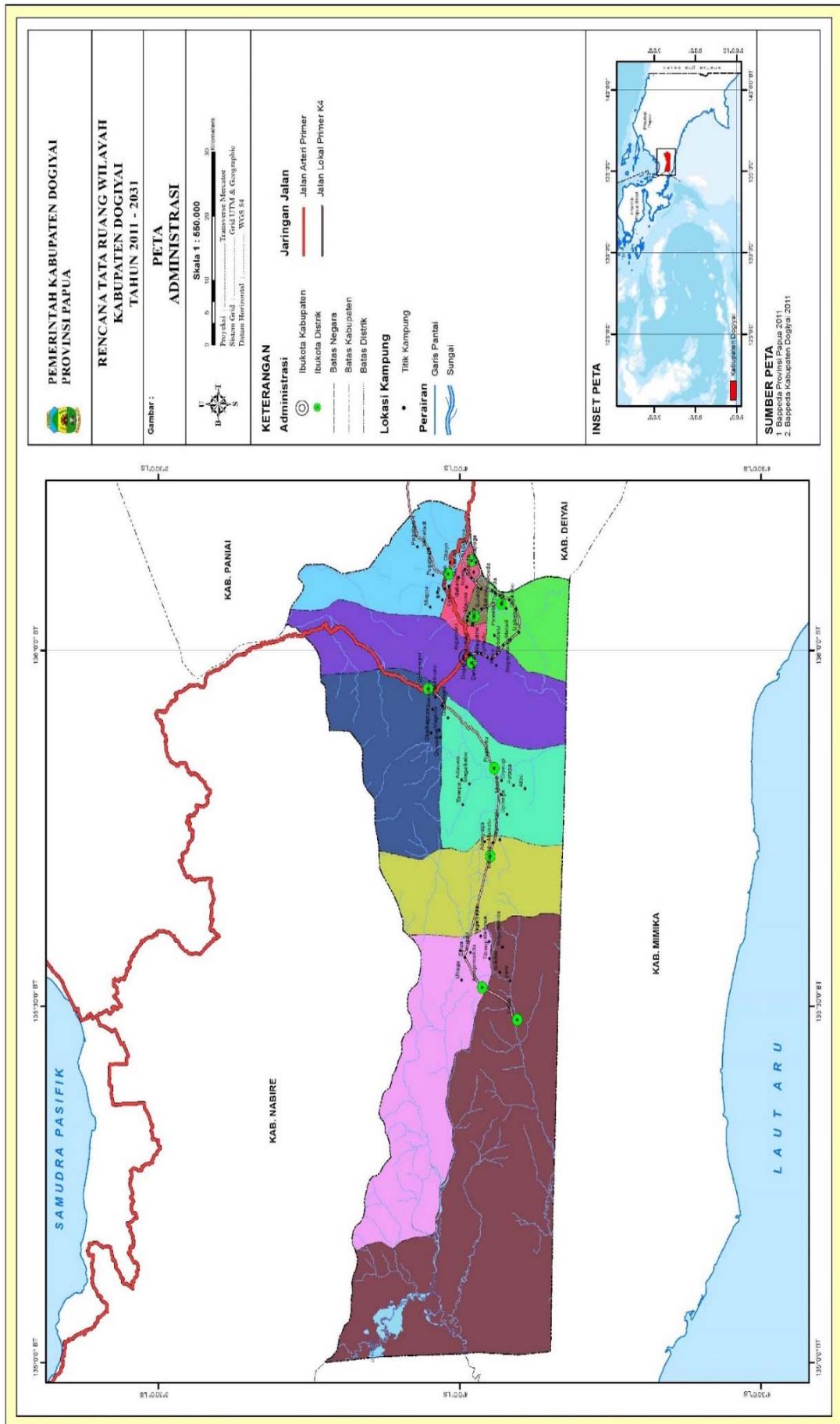
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

Selengkapnya batas-batas administrasi Kabupaten Dogiyai dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Luas wilayah Kabupaten Dogiyai berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua adalah seluas ±4.237,4 km² dan mengalami perubahan seluas ± 7.052,92 km² yang semuanya adalah daerah pegunungan dan daratan. Distrik dengan luas wilayah terbesar adalah Distrik Mapia Tengah kurang lebih sekitar 28,56 persen dari total luas wilayah. Menyusul kemudian

Distrik Mapia sebesar 21,72 persen dan Distrik Piyaye sebesar 19,13 persen. Sedangkan distrik dengan luas wilayah terkecil adalah Distrik Kamu, Kamu Utara, Kamu Selatan, Kamu Timur dan Dogiyai, rata-rata diantara 77,60-144,48 Km² atau dibawah 2,05 persen dari seluruh total wilayah. Selengkapnya semua ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Dogiyai



Sumber : Bappeda Kabupaten Dogiyai (2017)

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten Dogiyai Menurut Distrik

No	Distrik	Jumlah Kampung	Luas Wilayah (km ²)	Persen
1	Kamu	8	77,60	1,10
2	Mapia	7	1.531,75	21,72
3	Kamu Utara	10	92,67	1,31
4	Piyaiye	8	1.349	19,13
5	Mapia Barat	4	760	10,78
6	Kamu Selatan	12	144,48	2,05
7	Sukikai Selatan	4	887	12,58
8	Kamu Timur	7	80	1,13
9	Mapia Tengah	10	2.041,50	28,56
10	Dogiyai	9	115,92	1,64
Jumlah		79	7.052,92	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Dogiyai (2017)

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kabupaten Dogiyai memiliki topografi yang bervariasi mulai dataran bergelombang, berbukit dan pegunungan. Wilayah perbukitan dan pegunungan mendominasi hampir 85% wilayah Kabupaten Dogiyai serta masih dipenuhi hutan alami.

Berdasarkan perbedaan geomorfologinya wilayah Kabupaten Dogiyai dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) zona agroekologi, yaitu:

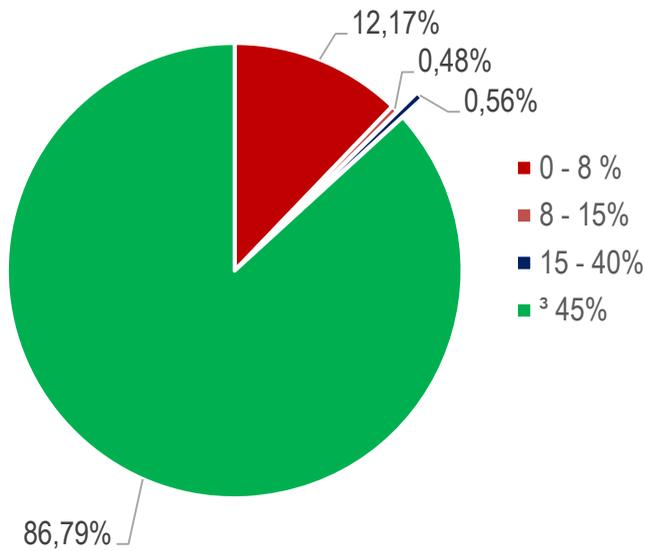
1. Zona ketinggian rendah kurang dari 1000 mdpl;
2. Zona ketinggian sedang 1000-3000 mdpl;
3. Zona dataran tinggi diatas 3000 mdpl.

Sebagian besar perkampungan di Kabupaten Dogiyai terdapat di daerah dengan ketinggian 1.000-3.000 mdpl yang terutama terkonsentrasi di sebelah timur memanjang di bagian tengah wilayah kabupaten.

Kabupaten Dogiyai memiliki daerah dengan ketinggian < 1000 mdpl sebanyak 35,3% yang tersebar di bagian barat Distrik Piyaiye dan bagian selatan Distrik Sukikai Selatan. Untuk daerah dengan ketinggian 1000-3000 mdpl ada sebanyak 60,7% dari total luas Kabupaten Dogiyai yang tersebar di seluruh Distrik. Kemudian untuk di bagian timur daerah dengan ketinggian > 3000 mdpl ada di bagian utara Distrik Mapia, dan Mapia Barat.

Kondisi topografi Kabupaten Dogiyai didominasi oleh daerah dengan tingkat kemiringan lahan diatas 45% yaitu sebesar 86,79% dari total luas wilayah. Hanya sekitar 12,17% yang merupakan daerah dengan kemiringan 0-8%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daerah yang layak bangun dilihat dari kelerengannya hanya sekitar 12%. Daerah ini terutama ada di Lembah Kamu yang sekarang menjadi pusat kegiatan Kabupaten Dogiyai dan yang terluas ada di Distrik Sukikai Selatan, lihat Gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Struktur Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan
Di Kabupaten Dogiyai

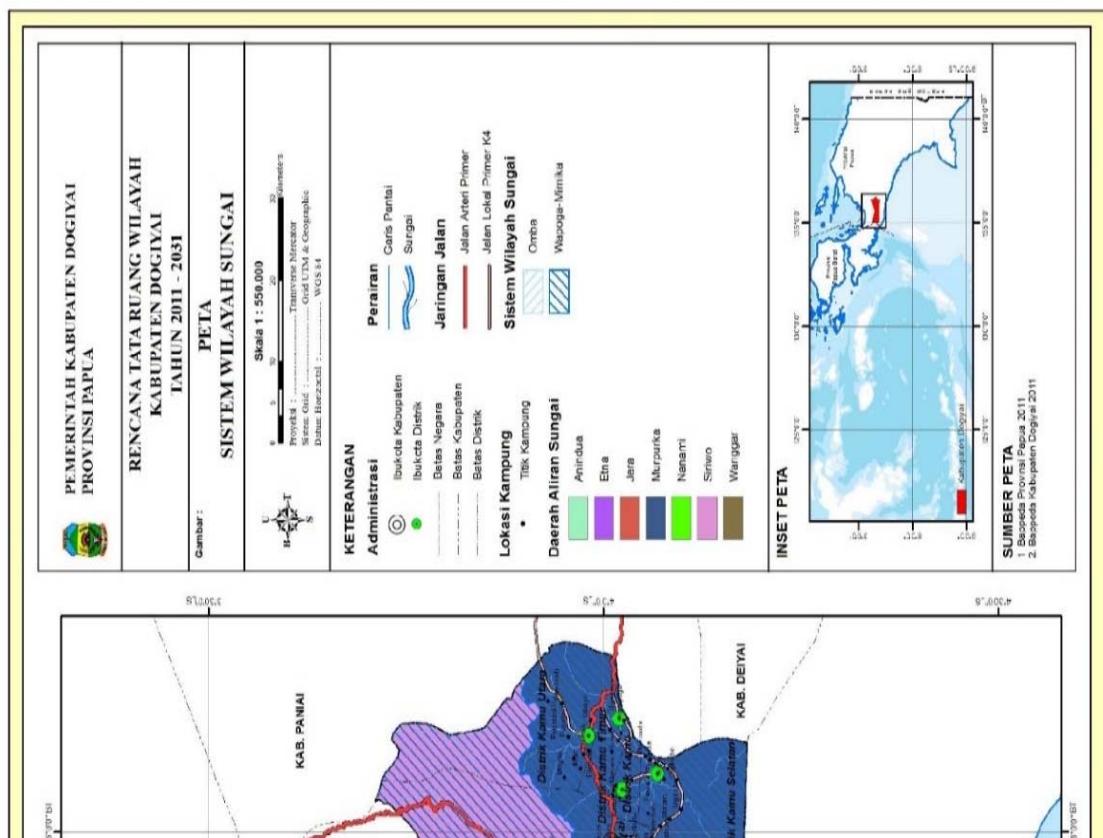


Sumber : Bappeda Kabupaten Dogiyai (2017)

2.1.1.3. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Dogiyai dialiri oleh beberapa sungai kecil maupun besar. Sungai yang ada termasuk dalam 2 SWS (satuan wilayah sungai), yaitu SWS Wapoga-Simuga dan SWS Wais-Kais dan Omba. Sedangkan DPS yang masuk wilayah kabupaten Dogiyai meliputi DPS Wanggar dan DPS Omba. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3.
Sistem Wilayah Sungai Di Kabupaten Dogiyai



Sumber : Bappeda Kabupaten Dogiyai (2017)

2.1.1.4. Kondisi Iklim dan Curah Hujan

Pada umumnya Kabupaten Dogiyai beriklim tropis basah dengan curah hujan hampir sepanjang tahun. Suhu udara dipengaruhi oleh ketinggian letak dimana setiap kenaikan 100 m dari permukaan laut mengalami penurunan suhu rata-rata sebesar 0,60°C, sehingga dengan topografi yang bervariasi di dataran tinggi maka suhu udara di Kabupaten Dogiyai berkisar antara 22,6°C sampai dengan 33,1°C dengan suhu rata-rata pada tahun 2017 mencapai 27°C.

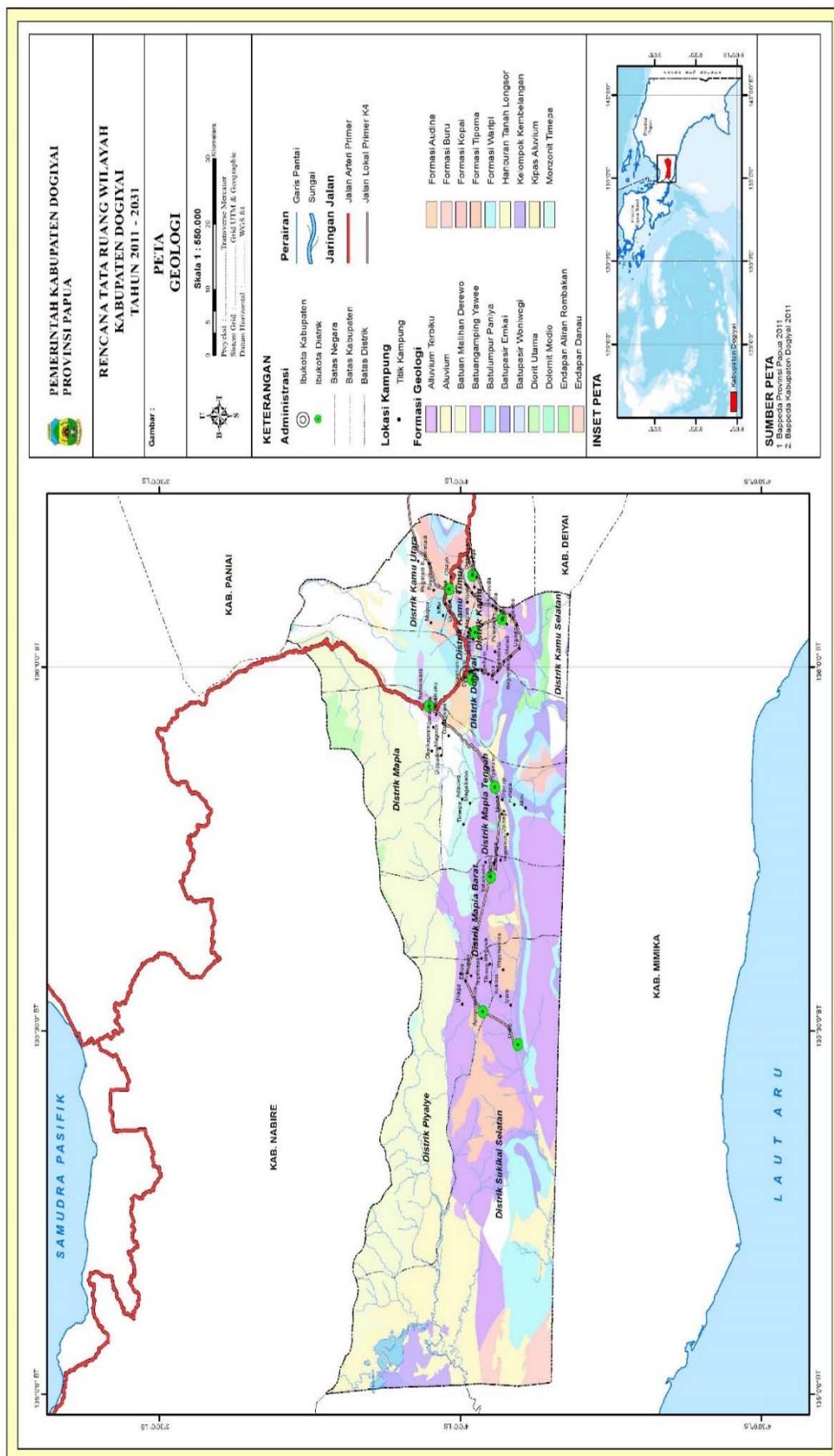
Kabupaten Dogiyai secara geografis terletak di daerah khatulistiwa yang menyebabkan daerah ini beriklim tropis, juga karena Kabupaten Dogiyai bagian dari Pulau Papua yang terletak di antara Benua Australia dan Benua Asia yang iklimnya dipengaruhi oleh angin musim yang bertiup secara bergantian setiap enam bulan sekali. Curah hujan di Kabupaten Dogiyai berkisar 2.250-2750 mm/tahun. Wilayah yang memiliki curah hujan 2.250 mm/tahun meliputi Distrik Piyaiye, wilayah yang memiliki curah hujan 2.500 mm/tahun meliputi Sukikai, Mapia Tengah, Kamu Selatan dan Mapia Tengah dan wilayah yang memiliki curah hujan 2.750 mm/thn meliputi daerah Distrik Mapia, Dogiyai, Kamu Utara dan Kamu Timur.

2.1.1.5. Tanah dan Geologi

Kondisi kedalaman tanah di kabupaten Dogiyai sangat bervariasi. Sebagian besar Distrik di Kabupaten Dogiyai memiliki kedalaman tanah 51-100 cm, kecuali Distrik Piyaiye yang memiliki kedalaman tanah > 100 cm.

Adapun secara geologi, Kabupaten Dogiyai terdiri dari batuan malihan berumur tersier, batuan sedimen tua paleozik dan batuan intrusi asam berumur lebih dari tersier. Batuan malihan berumur tersier tersebar di Distrik Distrik Mapia Tengah, Kamu Selatan dan Sukikai. Batuan sedimen tua paleozik tersebar di Piyaiye. Batuan intrusi asam berumur lebih dari tersier tersebar di Distrik Mapia, Mapia Barat, Dogiyai, Kamu, Kamu Timur dan Kamu Utara. Selengkapnya dapat di lihat pada Gambar 2.4 berikut ini.

Gambar 2.4.
Kondisi Eksisting Geologi Di Kabupaten Dogiyai



Sumber : Bappeda Kabupaten Dogiyai (2017)

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Luas lahan Kabupaten Dogiyai tercatat sebesar 446.659,30 ribu hektar, yang dominan digunakan untuk hutan lindung, yaitu seluas 241,73 hektar atau sekitar 54,12% dari total luas lahan yang tersedia.

Selain menjadi hutan lindung, dalam tata guna lahan Kabupaten Dogiyai juga terdapat Hutan Produksi dengan luas kurang lebih mencapai 73.144 ribu hektar (16,37%) yang disebar masing-masing untuk penggunaan Hutan Produksi Tetap seluas 17.366,90 ribu hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas 36.981,86 ribu hektar, dan Hutan Produksi Konversi seluas 18.795,28 ribu hektar.

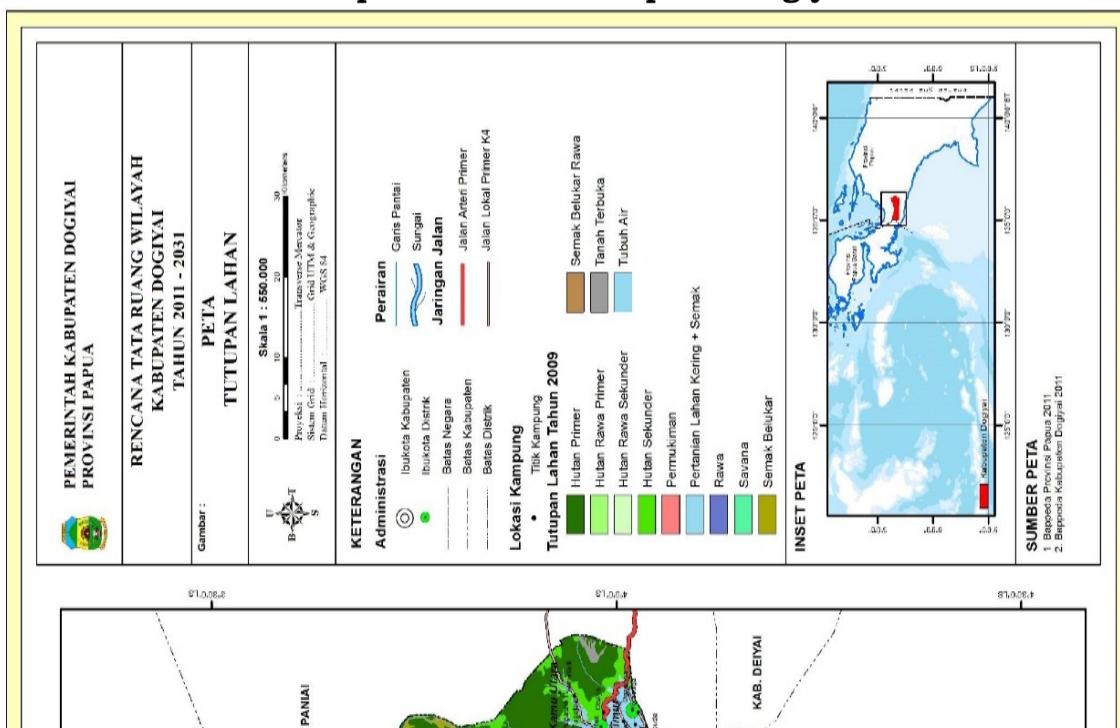
Gambar 2.5.
Tata Guna Lahan Di Kabupaten Dogiyai



Sumber : BPS Kabupaten Dogiyai (2016)

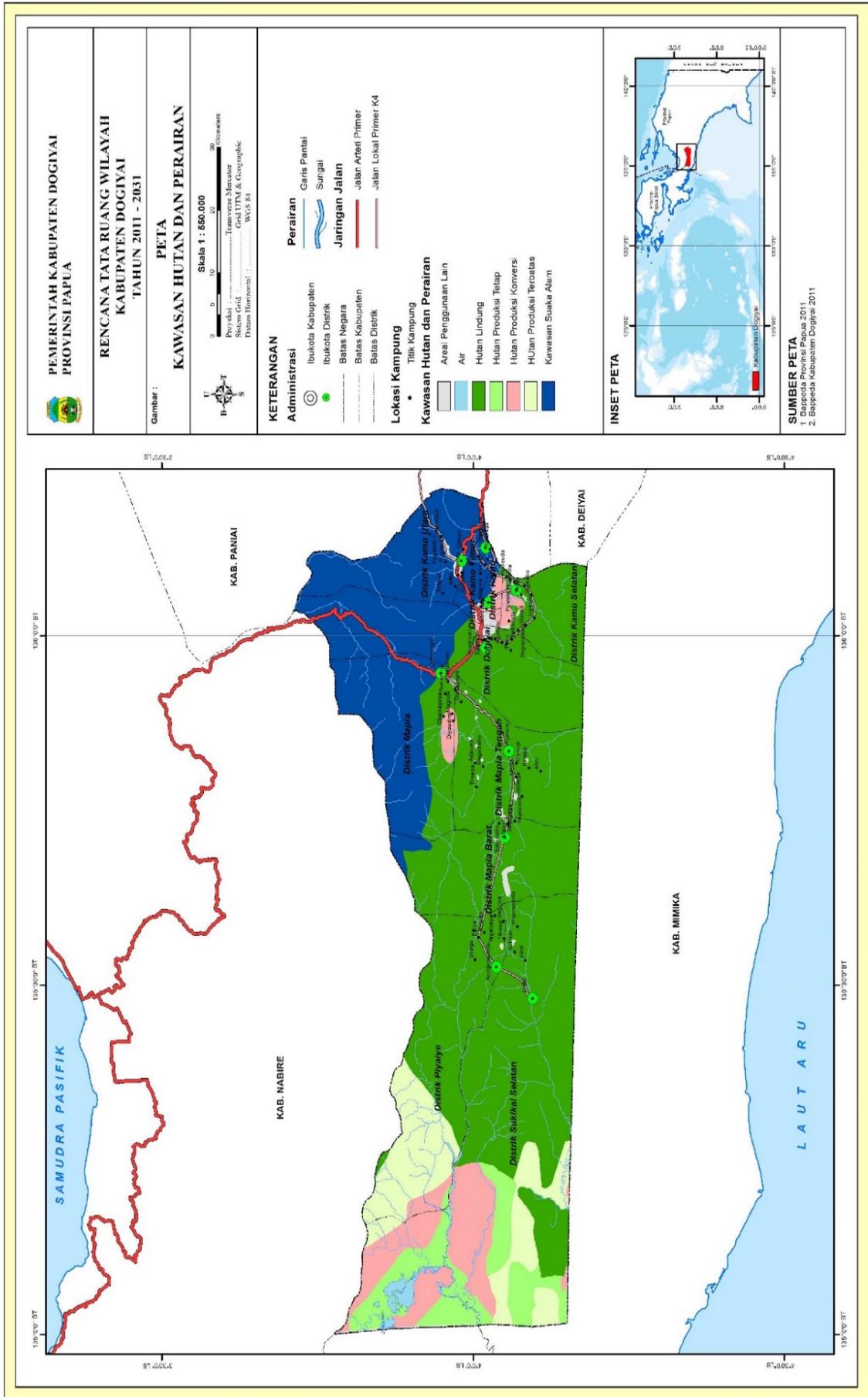
Hampir sebagian besar daratan wilayah Kabupaten Dogiyai ditutupi oleh hutan. Karenanya perlu dilestarikan dan dijaga keasriannya agar tidak berubah menjadi lahan kritis. Selengkapny luas tutupan hutan berdasarkan kondisi eksisting dapat dilihat pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7 berikut ini.

Gambar 2.6.
Tutupan Lahan Di Kabupaten Dogiyai



Sumber : Bappeda Kabupaten Dogiyai (2017)

Gambar 2.7.
Kondisi Eksisting Kawasan Hutan Dan Perairan



Sumber : Bappeda Kabupaten Dogiyai (2017)

Berikutnya penggunaan lahan yang juga besar adalah untuk Kawasan Sempadan Sungai yang mencapai 94,71 ribu hektar (21,20%). Daerah sempadan sungai adalah daerah sepanjang kiri kanan sungai dihitung dari tepi sungai sampai garis sempadan sungai termasuk sungai buatan yg mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan pelestarian fungsi sungai, baik yang telah dibebaskan maupun yang tidak dibebaskan.

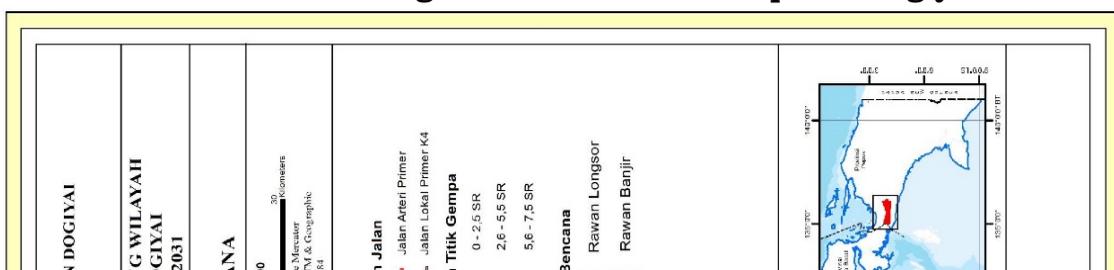
Pengelolaan kawasan sempadan sungai diarahkan untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai dan kondisi fisik tepi dan dasar sungai. Kawasan ini berada 100 meter dikiri kanan sungai besar dan 50 meter dikiri kanan sungai kecil untuk kawasan non permukiman. Kenyataan di lapangan, sungai-sungai tersebut sudah mulai terganggu fungsinya akibat aktivitas yang berkembang di sekitarnya, terutama akibat pembuangan sampah ke sungai. Akibat dari terganggunya ekosistem sungai tersebut dapat dilihat pada saat sekarang ini kualitas air sungai yang terus menurun dan memburuk.

2.1.1.7. Kondisi Kebencanaan

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Sedangkan rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Sebagai kawasan yang mempunyai kondisi topografi yang bervariasi mulai dataran bergelombang, berbukit dimana wilayah perbukitan dan pegunungan mendominasi wilayah, Kabupaten Dogiyai mempunyai kerentanan terhadap beberapa bencana alam. Seperti banjir bandang, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya. Kondisi eksisting bencana alam dan kerawanannya untuk Kabupaten Dogiyai dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut ini.

Gambar 2.8.
Kondisi Eksisting Rawan Bencana Kabupaten Dogiyai



Sumber : Bappeda Kabupaten Dogiyai (2017)

a) Longsor

Kawasan rawan bencana alam rawan longsor merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Kabupaten Dogiyai merupakan kawasan yang memiliki kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Distrik Mapia, Distrik Dogiyai, Distrik Kamu, dan Distrik Kamu Utara. Lihat Gambar 2.9.

(b) Banjir

Banjir menjadi masalah tersendiri bagi Kabupaten Dogiyai. Posisinya yang berada di lembah sehingga menjadi tempat penampung aliran air dari daerah lain, berada di tanah rawa, serta ditambah tidak adanya sistem drainase yang baik menyebabkan Kabupaten Dogiyai, khususnya yang berada di daerah Lembah Kamu menjadi rawan banjir. Kawasan rawan banjir terdapat di Distrik Mapia, Distrik Dogiyai, Distrik Kamu, Distrik Kamu Timur, Distrik Kamu Utara dan Distrik Kamu Selatan. Lihat Gambar 2.10.

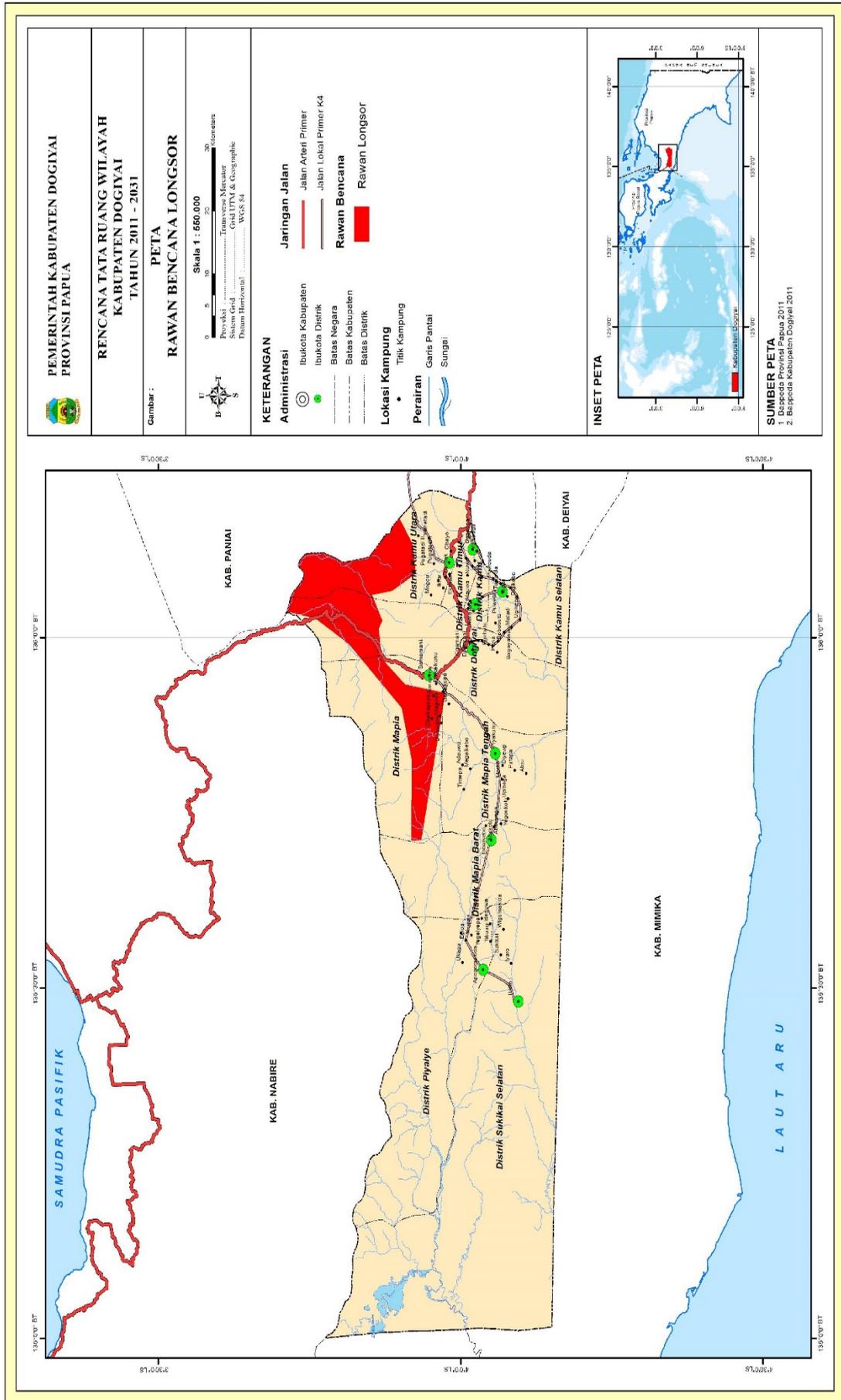
(c) Gempa

Selain potensi bencana alam rawan longsor dan banjir di Kabupaten Dogiyai juga mempunyai potensi gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi tektonik yang diakibatkan oleh tubrukan 2 lempeng, yaitu lempeng Samudera Pasifik dan Lempeng Benua Australia. Tipe gempa bumi tektonik berhubungan dengan aktivitas sesar (patahan) yang berada di jalur pegunungan tengah maupun sesar Ransiki dan Tarera-Aiduna yang berpengaruh di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai. Lihat Gambar 2.11.

Berdasarkan kelompok tingkat kerawanan gempa bumi yang telah dirumuskan dalam RTRW Provinsi Papua Kabupaten Dogiyai masuk dalam tingkat yang cukup tinggi. Data ini merupakan hasil analisa yang tercatat di Balai Besar BMKG Wilayah V Jayapura. Kawasan rawan gempa bumi, terdapat di seluruh Kabupaten Dogiyai terutama di Distrik Piyaiye, dan Kamu Selatan.

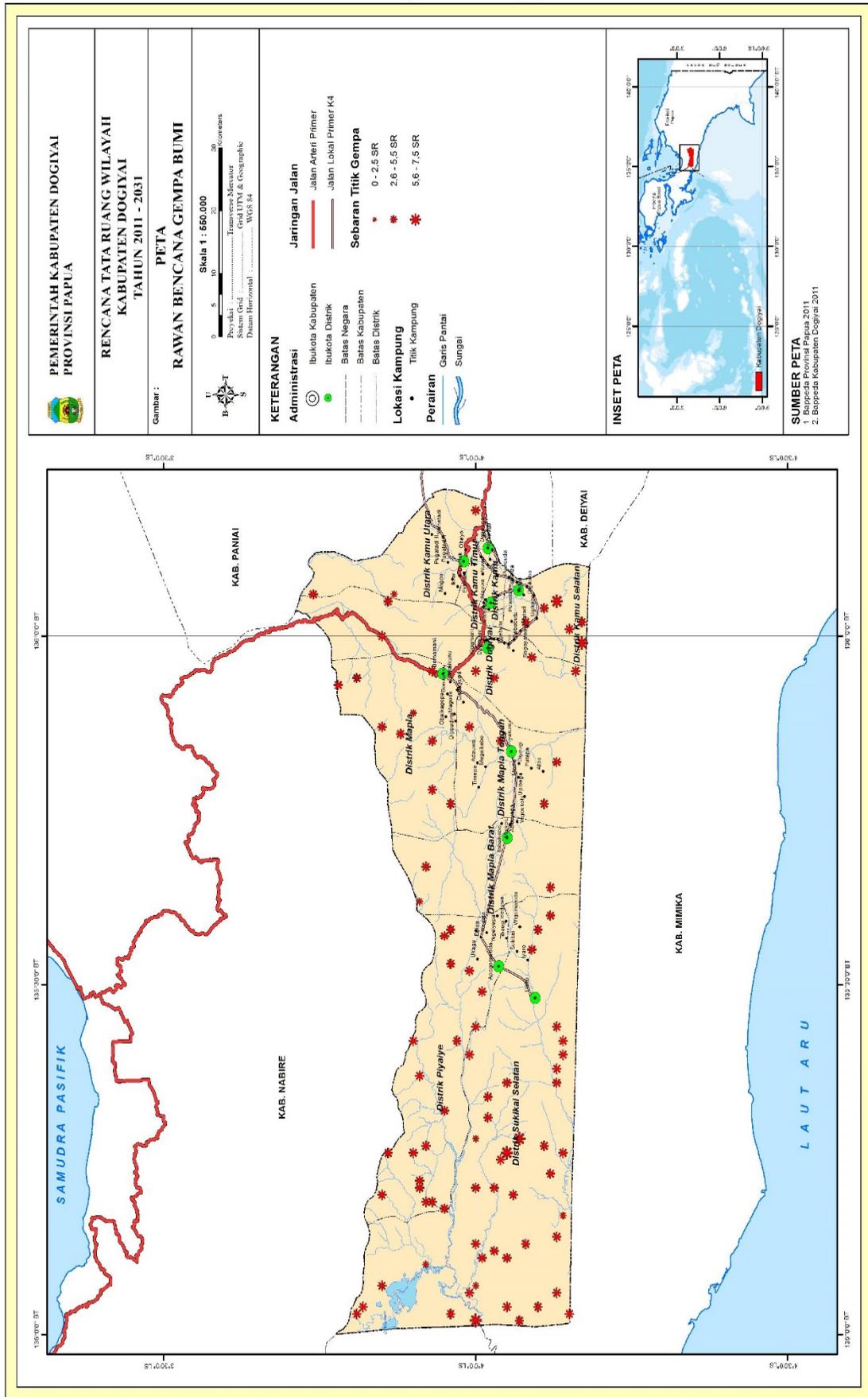
Kondisi eksisting Rawan Bencana Longsor untuk Kabupaten Dogiyai dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut ini.

Gambar 2.9.
Kondisi Eksisting Rawan Bencana Longsor Kabupaten Dogiyai



Sumber : Bappeda Kabupaten Dogiyai (2017)

Gambar 2.11.
Kondisi Eksisting Rawan Bencana Gempa Bumi
Di Kabupaten Dogiyai



Sumber : Bappeda Kabupaten Dogiyai (2017)

Tabel 2.2.
Tingkat Kerawanan Gempa Bumi Di Provinsi Papua

Kekuatan Gempa (SR)	Frekuensi Gempa	Persen (%)	Kabupaten
< 5	2236	85,3	Biak, Jayapura, Mamberamo Raya, Nabire, Sarmi
5 – 6	343	13,1	Sarmi, Nabire, Jayapura, Mamberamo, Biak,
6 – 7	36	1,4	Nabire, Mimika, Sarmi, Jayapura, Biak

Sumber : Bappeda Provinsi Papua (2009)

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) telah melakukan penilaian tentang Indeks Kerawanan Bencana Indonesia (2009) yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia (2011). Indeks ini selalu diperbaharui setiap dua tahun sekali, mengingat dinamisnya indikator kerawanan yang diperhitungkan. Pada perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (2013), indeks yang dikaji adalah risiko bencana bukan lagi tingkat kerawanan bencana. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dengan demikian perhitungan tahun 2013 ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (exposure) dari setiap bahaya (hazard) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada (multi hazard). Perubahan terminologi dari Indeks Rawan Bencana pada edisi tahun 2009 dan 2011 menjadi Indeks Risiko Bencana pada edisi 2013 didasarkan atas penyesuaian yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan berkembangnya metoda dan pengkajian risiko bencana, maka dalam penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia ini telah menggunakan parameter-parameter bahaya, kerentanan dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana (BNPB, 2013).

Berdasarkan Skor Indeks Rawan Bencana tersebut terlihat bahwa Kabupaten Dogiyai termasuk pada kawasan yang memiliki kerawanan bencana dalam kategori sedang, yang mana banjir bandang merupakan bencana yang sering mengancam penduduk Dogiyai selama ini.

Tabel 2.3.
Skor Indeks Rawan Bencana Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 dan 2013

Kabupaten	2011		2013	
	Skor	Kelas Rawan	Skor	Kelas Rawan

Kabupaten	2011		2013	
	Skor	Kelas Rawan	Skor	Kelas Rawan
Jayapura	81	Tinggi	203	Tinggi
Jayawijaya	65	Tinggi	115	Sedang
Nabire	62	Tinggi	181	Tinggi
Biak Numfor	57	Tinggi	138	Sedang
Mimika	45	Tinggi	139	Sedang
Merauke	41	Tinggi	170	Tinggi
Yapen Waropen	39	Tinggi	117	Sedang
Kota Jayapura	34	Sedang	157	Tinggi
Keerom	34	Sedang	127	Sedang
Tolikara	31	Sedang	114	Sedang
Mappi	29	Sedang	126	Sedang
Yahukimo	26	Sedang	133	Sedang
Pegunungan Bintang	24	Sedang	126	Sedang
Paniai	10	Sedang	117	Sedang
Puncakjaya	10	Sedang	117	Sedang
Nduga	10	Sedang	96	Sedang
Mamberamo Tengah	10	Sedang	45	Sedang
Dogiyai	10	Sedang	96	Sedang
Deiyai	10	Sedang	108	Sedang
Boven Digoel	5	Rendah	133	Sedang
Asmat	5	Rendah	123	Sedang
Sarmi	5	Rendah	172	Tinggi
Waropen	5	Rendah	140	Sedang
Supiori	5	Rendah	92	Sedang
Mamberamo Raya	5	Rendah	166	Tinggi
Lanny Jaya	5	Rendah	91	Sedang
Puncak	5	Rendah	100	Sedang
Dogiyai	5	Rendah	124	Sedang
Intan Jaya	5	Rendah	67	Sedang

Sumber : BNPB Indonesia (2011 dan 2013)

2.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Dogiyai setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun dengan tingkat pertumbuhan yang selalu terkendali, dimana selama tahun 2013-2016 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 1,66% per tahun, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2016 mencapai 1,76%, perhatikan Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4.
Perkembangan Kependudukan Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016

Indikator Kependudukan	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk (jiwa)	89.327	90.822	92.190	93.809
Pertumbuhan Penduduk (%)	1.70	1.67	1.51	1.76
Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	19.75	20.08	18.77	20.74
Jumlah RT (kk)	22.280	22.653	22.994	23.398
Kepadatan RT (jiwa/kk)	4.01	4.01	4.01	4.01
Rasio Sex	101.12	100.4	99.19	99.2

Sumber : BPS Dogiyai, 2017 (data diolah)

Adapun kepadatan penduduk di Kabupaten Dogiyai dikatakan sangat rendah, karena hanya sebesar 19,88 jiwa/km² per tahun selama periode 2013-2016. Ini berarti untuk setiap 1 km² luas wilayah hanya terdapat 20 jiwa penduduk. Hal ini cukup menyulitkan dalam pemberian pelayanan publik secara optimal dikarenakan jaranganya jumlah penduduk yang terkonsentrasi pada suatu wilayah.

Sementara untuk kepadatan rumahtangga rata-rata sebesar 4,10 jiwa/kk, dengan kata lain untuk setiap Kepala Keluarga di Kabupaten Dogiyai terdapat 4 jiwa yang menetap bersama. Dengan asumsi dalam satu pasang keluarga ada satu isteri, satu suami dan dua anak, maka kondisi keluarga di Kabupaten Dogiyai dapat diindikasikan umumnya telah sejalan dengan program keluarga sejahtera 2 anak dalam satu pasang keluarga.

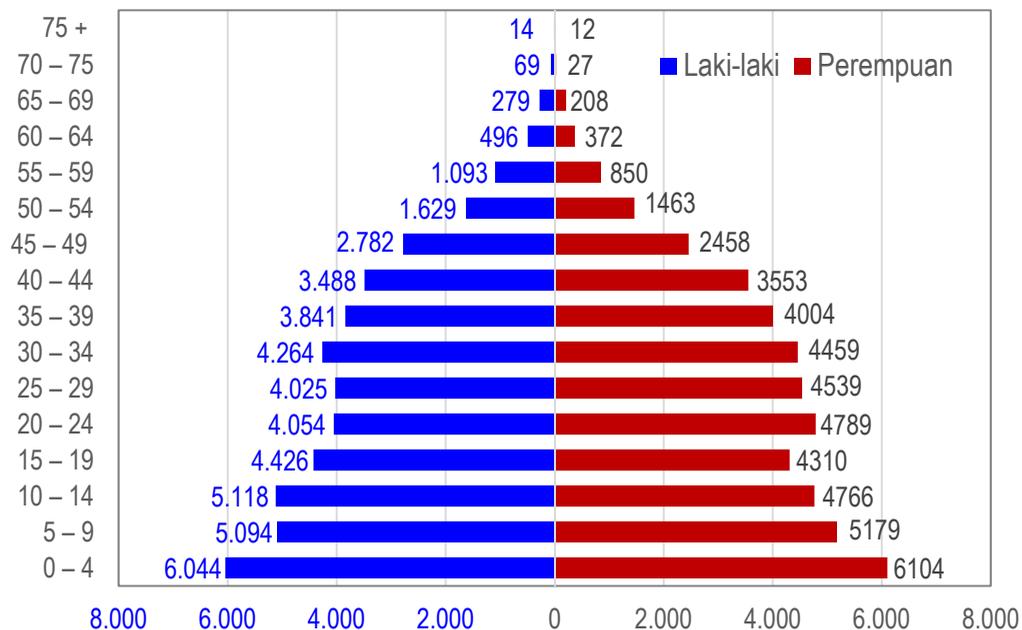
Indikator kependudukan lainnya yang juga penting adalah Sex Ratio. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Jika sex ratio dikalikan 100 maka dapat diartikan bahwa tiap 100 penduduk perempuan terdapat sekian penduduk laki-laki. Pada umumnya sex ratio nilainya dibawah 100. Hal ini dikarenakan penduduk perempuan lebih tinggi angka harapan hidupnya sehingga penduduk perempuan menjadi lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Sex ratio dipakai untuk melihat perubahan penduduk menurut jenis kelaminnya. Dengan membandingkan besarnya sex ratio dari tahun sebelumnya akan membawa kita pada sebuah pertanyaan mengapa perubahan itu terjadi. Perubahan itu bisa terjadi karena kelahiran, kematian dan migrasi. Sebagai contoh di Kabupaten Dogiyai angka sex ratio pada tahun 2013 adalah 101,12, kemudian mengalami penurunan di tahun

2016 menjadi 99,20. Menurunnya angka sex ratio ini bisa disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Telah terjadi kelahiran dimana bayi perempuan lebih banyak daripada bayi laki-laki.
2. Banyak penduduk laki-laki yang keluar daerah untuk satu alasan tertentu.
3. Banyak pendatang yang masuk ke daerah tersebut berjenis kelamin perempuan.
4. Tingkat kematian penduduk laki-laki lebih tinggi daripada penduduk perempuan.

Dilihat berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Kabupaten Dogiyai selama ini adalah struktur penduduk muda dengan angka kelahiran yang tinggi dan rendahnya angka kematian. Penduduk usia muda (0-14 tahun) masih dominan. Selain itu, bentuk piramida yang gemuk, terutama di antara usia 10-44 tahun mengindikasikan bahwa penduduk usia yang sangat produktif lebih dominan dibandingkan yang non produktif. Adapun bentuk kerucut piramida yang tajam memvisualisasikan bahwa usia harapan hidup di Kabupaten Dogiyai masih berkisar diantara 65-69 tahun.

Gambar 2.12.
Piramida Penduduk Kabupaten Dogiyai Tahun 2016



Sumber : BPS Dogiyai, 2017 (data diolah)

2.1.3. Kehidupan Sosial Budaya

Kelompok masyarakat di Kabupaten Dogiyai terdapat satu suku masyarakat Papua yang cukup besar yaitu Suku Mee dengan ciri-ciri budaya lokal adalah sebagai berikut:

- a. Hidupnya berkelompok dan berpencar berdasar sukunya serta bergantung pada alam sehingga ada yang sering berpindah tempat.
- b. Tali persaudaraan antara sesama suku sangat kuat
- c. Mengenal sistem keturunan garis ayah
- d. Memiliki tata cara adat

Kebudayaan dan norma dan adat istiadat di Kabupaten Dogiyai hampir sama dengan wilayah lain di Papua. Sistem kepemimpinan yang ada sangat erat kaitannya dengan kepemilikan dan kekuasaan atas tanah. Sistem ini menentukan perkembangan individu-individu atau kelompok-kelompok etnis yang ada di Papua pada umumnya dan Dogiyai pada khususnya. Bagi seluruh etnis di Papua hubungan dengan tanah sangatlah sakral, karena tanah yang mereka tempati adalah milik leluhur. Kegiatan ritual yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok diadakan untuk memelihara keharmonisan hubungan antara manusia dan supranatural tanpa melupakan kelestarian alam yang ada.

Setiap bagian dari wilayah yang terdiri dari gunung, hutan, rawa dan sungai sudah merupakan kepemilikan dan kekuasaan masing-masing individu dan kelompok. Batas-batas wilayah kekuasaan dari masing-masing kelompok dan individu biasanya ditetapkan dengan menggunakan batas-batas alam seperti, gunung, batu, pohon, sungai atau batas alam lainnya. Batas-batas tersebut tetap dipertahankan dari generasi ke generasi.

Mobilitas yang dilakukan oleh penduduk Papua di masa lampau menandakan adanya suatu kegiatan untuk mencari wilayah penguasaan baru, adanya perpecahan dan pemisahan dalam struktur sosial, adanya peperangan dan perebutan wilayah. Hak Ulayat adalah hak kepemilikan atas tanah oleh suatu kelompok masyarakat dalam wilayahnya. Bagi masyarakat Papua, pengertian Hak Ulayat tidak terbatas pada tanah saja, akan tetapi juga

termasuk segala sesuatu yang terkandung didalamnya dan yang tumbuh/berada diatasnya.

Besar/luasnya Hak Ulayat ditentukan secara tradisional, ukuran yang digunakan adalah sejarah dimana nenek moyang mereka mencapai suatu wilayah untuk mencari makan atau mengusahakan sesuatu diatas tanah tersebut.

Kesenian di Papua pada umumnya tumbuh dan berkembang sejalan dengan adat istiadat serta peradaban mereka. Kelangsungan seni didasari oleh kehidupan dan adat istiadat serta kepercayaan mereka. Peranan kesenian bagi masyarakat Papua pada umumnya disamping sebagai sarana hiburan, juga berfungsi sebagai unsur mempererat keharmonisan, pemerkuat homoginitas, mempertebal keyakinan, meningkatkan semangat kerja, berperang dan untuk keperluan lainnya.

Orang Mee merupakan salah satu golongan etnik yang mendiami Pegunungan Tengah dan lembah-lembah disekitarnya. Tersebar di lima kecamatan, yaitu Paniai Timur, Paniai Barat, Tigi, Kamuu, dan Aradide. Lembah-lembah yang terdapat orang Mee antara lain adalah lembah Kamuu, Debei, Agadide, lembah Tage, lembah Tigi, dan Okomodide.

Letak wilayah persebaran yang didiami oleh orang Mee berbatasan langsung juga dengan beberapa suku tetangga, diantaranya adalah:

- Wilayah Timur berbatasan dengan suku Moni, Dauwa, Wolani, Kabupaten Paniai, dan suku Amungme, Nduga, Damal, Kabupaten Mimika;
- Wilayah Barat berbatasan dengan suku Meer, Iresim, Wate, Yaur, Moor-Mambor, Kabupaten Nabire, dan Kamoro, Kabupaten Mimika;
- Wilayah Selatan berbatasan dengan suku Kamoro, Kabupaten Mimika;
- Wilayah Tenggara berbatasan dengan suku Amungme, Damal, Moni, Kabupaten Mimika;
- Wilayah Utara berbatasan dengan suku Auye, Waropen, Kabupaten Nabire, dan suku asli lainnya di Kabupaten Waropen

2.1.3.1. Mata Pencaharian Hidup

Orang Mee memiliki beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik untuk digunakan secara pribadi ataupun untuk diperdagangkan. Untuk menopang kehidupannya, orang Mee melakukan kegiatan, seperti bertani, berladang, beternak babi, berburu, menangkap udang dan ikan ke danau, sungai, kali dan berdagang dalam komunitasnya. Pertanian dan beternak babi adalah kegiatan utama mereka. Sementara itu, berburu dan berdagang yang biasa dilakukan kaum pria dan mencari ikan untuk kaum perempuan adalah kegiatan sampingan mereka.

Orang Mee menyebut pertanian dengan sebutan bugi atau ladang. Orang Mee berladang di sekitar perbukitan lereng, lembah, pesisir danau atau pinggir sungai. Bugi merupakan sumber penghidupan bagi orang Mee. Terdapat pembagian tugas kerja ladang secara jelas antara kaum pria dan kaum wanita orang Mee. Tugas kaum laki-laki adalah membuka ladang, sedangkan tugas perempuan membakar sisa daun dan ranting, bercocok tanam, memelihara tanaman, dan memungut hasil tanaman di ladang. Tanaman yang ditanam di bugida (lahan atau kebun) berupa ubi jalar, sayur – mayur, pisang, dan tebu.

Dalam proses membuka ladang, orang Mee saling membantu. Dengan adanya proses saling membantu ini kemudian timbul kebutuhan jasa bantuan. Bantuan biasanya diharapkan datang dari orang yang memiliki kemampuan berladang, yang kemudian pembayaran jasa bantuan tersebut berupa kulit bia atau berupa piutang. Dalam proses pembayaran piutang tidak harus selalu dibayarkan dengan kulit bia, tetapi dengan memberi bantuan langsung, ikut membantu membuka ladang, atau membagi hasil kebun, atau memberi daging babi, sesuai dengan kesepakatan awal.

2.1.3.2. Pembatas Lahan – Tapal Batas Mude

Dalam proses penggunaan lahan, orang Mee mengenal norma dasar atau hukum adat. Norma dasarnya ini berupa pembatasan lahan atau mude. Pohon yang digunakan sebagai pembatas lahan adalah mai pia, ida, dan ude. Tanam batas ini berguna untuk membuat jelas atas kepemilikan lahan antar marga/klen. Dengan adanya pembatas lahan mude ini serta kesepakatan antar para

pemilik lahan yang berbatasan, menghindari adanya masalah atau konflik yang terjadi bagi orang Mee, karena lahan terawat dan ada saling mengakui antar satu pihak dan yang lain.

Namun demikian adanya pembatasan lahan ini juga memungkinkan terjadinya konflik atau perang. Kepemilikan lahan berdasarkan atas marga atau klen ini juga dapat mengakibatkan perang antar tuma. Perang ini timbul antara lain karena adanya monopoli atas tanah tuma oleh tuma lain. Apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai kepemilikan lahan berdasarkan pembatasan lahan dapat mengakibatkan perang. Akan tetapi, perang ini cepat terjadi damai tanpa saling membalas dendam apabila telah terjadi perundingan damai melalui membayar denda sebagai solusi damai.

2.1.3.3. Tanah

Orang Mee tidak mengenal hidup mengembara akan tetapi selalu menetap dan rajin menanam, memelihara untuk menunjang hidup pribadi dan keluarga. Bagi orang Mee, tanah dipandang sebagai ibu kandung. Dalam pemahaman mereka, tanah adalah tempat mereka lahir, hidup dan mati. Mereka hidup oleh tanah, dan matipun diterima kembali ke tanah. Orang Mee memiliki keterikatan sangat tinggi dengan tanah. Mereka dilarang untuk memperjualbelikan tanah kepada orang luar maupun dalam kalangan sendiri. Kecuali dipinjamkan sebagai hak pakai tanah kosong. Namun hal ini berubah seiring adanya keharusan dari pemerintah untuk melepas tanah tanpa bayar, dan setelah itu banyak lahan yang diperjualbelikan dengan mahal. Masalah lainnya yang timbul adalah pemetaan tanah yang tidak jelas setelah adanya campur tangan pemerintah.

Pelepasan tanah bagi orang Mee bagaikan melepaskan Ibu Kandung. Hal ini pun berakibat semakin lunturnya keterikatan orang Mee terhadap tanah tempat mereka hidup. Seiring dengan perkembangan ini konflik yang terjadi pun semakin kompleks.

Budaya Mee secara tegas mengakui atas tanah yang dimiliki oleh fam (tuma) tertentu. Tanah ini kemudian akan dimiliki secara turun temurun oleh keluarga besar (fam-tuma). Tanah milik diperoleh sebagai warisan dari bapak. Setiap anak laki-laki dan

keluarga mendirikan rumah dan berkebun di atas tanah warisan tersebut.

Kepemilikan lahan atau tanah bagi orang Mee mengalami pergeseran seiring dengan masuknya pendatang dari luar pulau. Setelah hadirnya agama dan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah, urbanisasi, transmigrasi, mengakibatkan wilayah yang didiami orang Mee pun semakin padat. Kebutuhan orang Mee akan tanah dalam kegiatan berkeluarga, membangun rumah, bertani dan sebagainya, berbenturan dengan kebutuhan keluarga pendatang. Keluarga pendatang ini juga membutuhkan tanah untuk keberlangsungan hidup pribadi dan keluarga mereka. Hal inilah yang mengakibatkan pembatasan lahan yang dulunya luas menjadi semakin sempit karena para pendatang ikut mendirikan rumah dan menggunakan tanah.

2.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Merujuk pada RTRW Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2034, pengembangan wilayah di Kabupaten Dogiyai diarahkan pada pengembangan kawasan untuk hutan produksi, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, dan pariwisata. Wilayah-wilayah yang berpotensi untuk pengembangan kawasan tersebut masing-masing adalah :

(1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

- a. Kawasan hutan produksi terdapat di Distrik Sukikai, dan Distrik Piyaiye;
- b. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Distrik Sukikai, dan Distrik Piyaiye;
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Distrik Dogiyai, Distrik Kamu, Distrik Kamu Selatan, Distrik Kamu Timur, Distrik Kamu Utara, Distrik Mapia, Distrik Mapia Tengah, dan Distrik Piyaiye

(2) Kawasan Peruntukan Pertanian

- a. Kawasan peruntukan tanaman pangan terdapat di Distrik Piyaiye, yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan
- b. Kawasan peruntukan hortikultura terdapat di Distrik Piyaiye.
- c. Kawasan peruntukan perkebunan terdiri atas :

- kawasan peruntukan perkebunan *kopi* terdapat di Distrik Mapia dan Kamu Utara
- kawasan peruntukan perkebunan *markisa* terdapat di seluruh Distrik dengan bentuk perkebunan rakyat; dan
- kawasan peruntukan perkebunan *buah merah* terdapat di Distrik Mapia dan Distrik Kamu.

(3) Kawasan peruntukan peternakan

Kawasan peruntukan peternakan terdapat di Distrik Sukikai Selatan.

(4) Kawasan Peruntukan Perikanan

- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Distrik Kamu Timur dan Mapia Tengah
- b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdapat di Distrik Kamu dengan memanfaatkan air dari Kali Tuka dan Kali Mauwa.

(5) Kawasan Peruntukan Pertambangan

- a. Kawasan pertambangan emas terdapat di Distrik Mapia Barat dan Sukikai Selatan.
- b. Kawasan pertambangan batubara terdapat di Distrik Piyaiye, Distrik Mapia Barat, Mapia Tengah, dan Sukikai Selatan.
- c. Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan terdapat di Distrik Kamu Timur, Distrik Kamu dan Distrik Mapia.

(6) Kawasan Peruntukan Perindustrian

Kawasan peruntukan industri berupa industri kecil tersebar di Distrik Kamu, Mapia, dan Kamu Selatan.

(7) Kawasan Peruntukan Parawisata

- a. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di Kawasan Lembah Kamu.
- b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdapat di Kawasan Lembah Kamu.

Dalam rangka mengoptimalkan skenario pengembangan wilayah Kabupaten Dogiyai serta memberikan arahan dalam penyusunan struktur ruang wilayah kabupaten, maka dilakukan penetapan pusat-pusat

pelayanan yang juga didasarkan kepada kebijakan struktur ruang di atasnya. Adapun rencana penetapan pusat pelayanan kegiatan di Kabupaten Dogiyai adalah sebagai berikut :

2.1.4.1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal ditentukan di ibukota kabupaten yaitu di Kigamani yang terletak di distrik Dogiyai. Adapun fungsi dari PKL Kigamani adalah sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan distrik, pusat pelayanan sosial, dan pusat pendidikan.

PKL di Aboyaga, Distrik Mapia Barat sebagai pusat pelayanan wilayah bagian barat Kabupaten Dogiyai, pusat distrik, pusat pelayanan sosial, dan pusat pendidikan.

2.1.4.2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Terdapat tiga kawasan yang akan ditunjuk sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu PPK Moanemani, PPK Bomomani dan PPK Apogomakida.

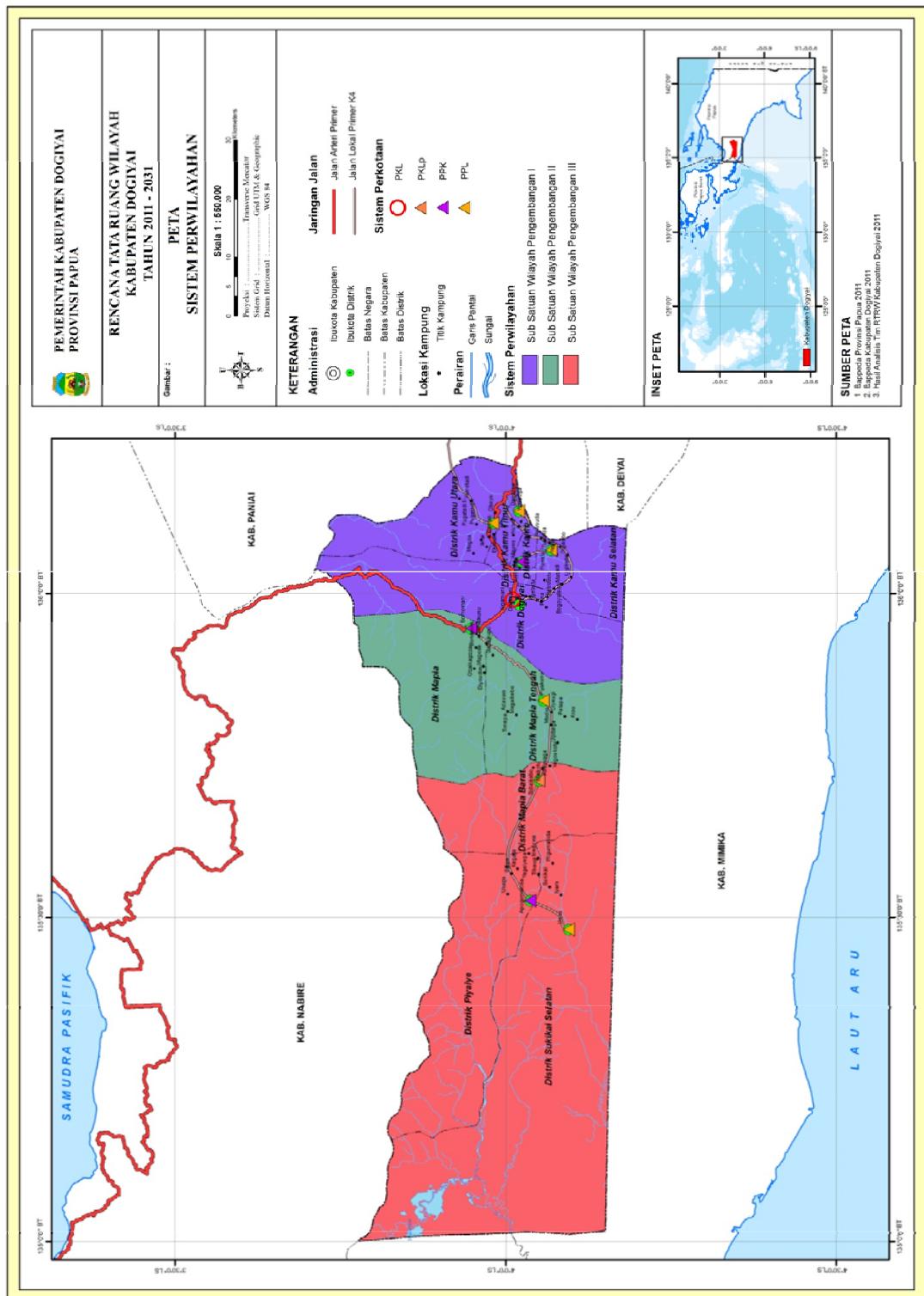
- a. PPK Moanemani terletak di Distrik Kamu, adapun fungsi dari PPK Moanemani adalah sebagai pusat perdagangan regional, pusat pendidikan, pusat pelayanan sosial, dan sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala distrik.
- b. PPK Bomomani, terletak di Distrik Mapia, adapun fungsi dari PPK Bomomani adalah sebagai pusat pemerintahan skala distrik, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan sebagai pusat perdagangan skala lokal dan regional.
- c. PPK Apogomakida, terletak di Distrik Piyaiye diarahkan fungsinya sebagai pusat pengembangan pelayanan pemerintah skala distrik, Pusat pendidikan, pusat kesehatan, serta sebagai pusat pengembangan agroindustri dan agroforestry.

2.1.4.3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat pelayanan lingkungan di Kabupaten Dogiyai terdiri dari ibukota distrik yang tidak termasuk kedalam PKL maupun PPK, adapun ibukota distrik tersebut adalah Idakebo (Distrik Kamu Utara), Puweta I (Distrik Kamu Selatan), Unito (Sukikai Selatan), Ugapuga (Distrik Kamu Timur), Piyakunu (Distrik Mapia Tengah), Dogimani (Distrik Dogiyai). Pusat pelayanan lingkungan mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan distrik, perdagangan skala distrik, pendidikan, dan kesehatan

Sistem perkotaan selanjutnya digunakan untuk mengarahkan pengembangan wilayah di Kabupaten Dogiyai melalui pembagian satuan wilayah pengembangan (SWP). Penentuan SWP ini dilakukan dengan mempertimbangkan pola keterkaitan dan kesamaan (homogenitas) setiap kawasan. Berdasarkan hirarki yang ada serta potensi dan permasalahan masing-masing wilayah, maka pembagian SWP dalam kerangka pengembangan wilayah adalah sebagai berikut (perhatikan Gambar 2.13):

Gambar 2.13.
Sistem Perwilayahan Di Kabupaten Dogiyai



Sumber : Bappeda Kabupaten Dogiyai (2017)

a) Sub Satuan Wilayah Pengembangan I

Pusat pengembangan dan pelayanan SSWP I di wilayah Kabupaten Dogiyai adalah di Kigamani (Distrik Dogiyai) dengan daerah pelayanannya meliputi Distrik Dogiyai, Kamu Utara, Kamu Timur dan Kamu Selatan. SSWP I mempunyai sektor prioritas di bidang sektor listrik dan air bersih, sektor angkutan/komunikasi dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor penggalian, sektor industri dan sektor perdagangan.

SSWP I ini diarahkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Dogiyai, pusat pelayanan kesehatan tingkat kabupaten, pelayanan pendidikan tingkat kabupaten, serta pusat perdagangan baik secara regional dan lokal.

b) Sub Satuan Wilayah Pengembangan II

Pusat pengembangan dan pelayanan SSWP II di wilayah Kabupaten Dogiyai adalah di Bomomani (Distrik Mapia) dengan daerah pelayanannya meliputi Distrik Mapia Tengah. SSWP II mempunyai sektor prioritas di bidang pertanian, sektor industri dan sektor Kehutanan. Sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor angkutan/komunikasi.

SSWP II ini diarahkan sebagai pusat pelayanan tingkat lokal yang meliputi pusat kegiatan perdagangan lokal dan regional, pusat kesehatan, serta pusat pendidikan yang melayani antar distrik.

c) Sub Satuan Wilayah Pengembangan III

Pusat pengembangan dan pelayanan SSWP III di wilayah Kabupaten Dogiyai adalah di Apogomakida (Distrik Piyaiyei) dengan daerah pelayanannya meliputi Distrik Mapia Barat dan Sukikai Selatan. SSWP III mempunyai sektor prioritas di bidang Kehutanan dan penggalian. Sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor industri, sektor listrik, angkutan/komunikasi, gas dan air bersih. SSWP III ini merupakan wilayah

yang kedepannya akan diarahkan sebagai pusat agrindustry dan agroforestry.

Kegiatan yang ada di SSWP III ini meliputi kesehatan, pendidikan, perdagangan serta *agrindustry* dan *agroforestry*. Pembagian wilayah pengembangan tersebut bertujuan agar mampu mempengaruhi perkembangan daerah disekitarnya baik perkembangan secara ekonomi, sosial maupun budaya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan berupa penambahan akses maupun fasilitas-fasilitas pendukung sehingga dalam kedudukannya sebagai ibu kota Kabupaten Dogiyai yaitu Kigamani mampu melayani kebutuhan masyarakat dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya di wilayah itu sendiri maupun wilayah disekitarnya.

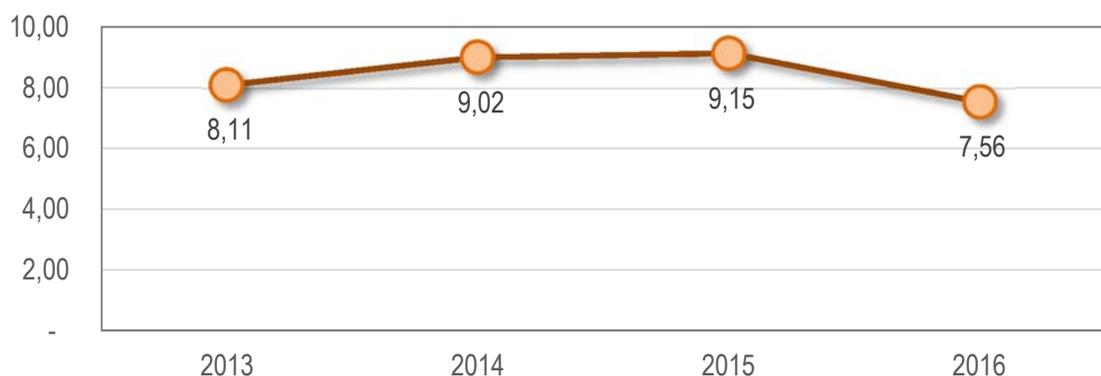
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Dogiyai mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Terlihat pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kabupaten Dogiyai mencapai 8,11 persen meningkat menjadi 9,02 persen pada tahun 2014. Peningkatan ekonomi tersebut terus meningkat pada tahun 2015 sebesar 9,15 persen, namun terjadi penurunan yang cukup dalam di tahun 2016 dengan nilai 7,56 persen. Penurunan laju pertumbuhan di tahun 2016 dipengaruhi oleh penurunan di sektor pertanian sebesar 2,15 persen, disektor perdagangan sebesar 11,71 persen, pada sektor transportasi, pergudangan sebesar 5,87 persen dan pada sektor jasa sebesar 6,20 persen.

Gambar 2.14.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam %)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ini, diantaranya yang paling utama adalah akibat

menurunnya nilai tambah produksi sektoral. Dalam hal terindikasi terjadi penurunan nilai tambah di sektor pertanian, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta di sektor jasa. Kondisi ini akhirnya mengakibatkan akselerasi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang dominan berada di sektor pertanian menjadi terhambat.

2.2.1.2. Struktur Ekonomi

Dilihat dari kontribusi sektoral menunjukkan bahwa sektor tersier berkontribusi paling besar dibanding sektor yang lain. Pada kurun 2013-2016 jika diurai, sub sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi paling besar pada sektor tersier. Ini menunjukkan bahwa sub sektor perdagangan dan jasa menjadi bagian aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor primer pada sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi semakin menurun pada kurun 2014-2016. Angkanya mulai dari 31,70 persen menjadi 29,01 persen. Penurunan kontribusi sektor primer bergeser kepada sektor tersier. Sementara, kontribusi sektor sekunder relatif stabil.

Tabel. 2.5
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Dogiyai (dalam %) 2014 – 2016

No	Uraian	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,704	30,382	29,014
B	Pertambangan dan Penggalian	2,959	2,855	2,768
C	Industri Pengolahan	0,061	0,058	0,055
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,004	0,004	0,003
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,001	0,001	0,001
F	Konstruksi	9,861	9,905	9,970
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,353	10,704	11,117
H	Transportasi, Pergudangan	1,011	0,987	0,972
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	0,286	0,279	0,281
J	Informasi dan Komunikasi	0,465	0,448	0,442
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,000	0,000	0,000
L	Real Estate	9,650	9,468	9,551
M, N	Jasa Perusahaan	0,000	0,000	0,000
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30,278	31,663	32,638
P	Jasa Pendidikan	0,686	0,674	0,666
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,296	2,205	2,160
R,S,T, U	Jasa lainnya	0,384	0,368	0,361
PDRB		100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016

Dominannya sektor tersier untuk wilayah yang sedang berkembang seperti Dogiyai ini sebenarnya kurang menguntungkan perekonomian

wilayah. Sektor-sektor tersier ini kurang banyak menyerap lapangan kerja, dan hasil produksinya tidak banyak mengandung muatan lokal (*local content*), sehingga sedikit sekali berdampak kebelakang (*backward linkage effect*) terhadap produksi regional.

Dari sisi pengeluaran, komponen pembentuk PDRB Kabupaten Dogiyai selama ini didominasi oleh pengeluaran rumahtangga. Peran pengeluaran rumahtangga dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dogiyai sangat besar namun cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni dari 81,63% di tahun 2012 menjadi 76,30 persen pada tahun 2016. Dengan kata lain, rata-rata per tahun kontribusinya berkurang -1,67 persen. Selanjutnya yang juga dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dogiyai adalah komponen pembentukan modal tetap bruto, rata-rata per tahun andilnya sebesar 40,95 persen. Kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 33,09 persen per tahun, pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 02,06 persen per tahun. dan Inventori sebesar 0,06 persen per tahun. Adapun komponen yang paling rendah kontribusinya adalah Net Ekspor sebesar -55 persen per tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel. 2.6.
Kontribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Dogiyai (Persen), Tahun 2012-2016

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	81,63	80,07	79,16	77,01	76,30
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,07	2,05	2,11	2,04	2,05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	30,67	30,97	32,91	34,54	36,37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	41,55	41,06	41,06	40,64	40,46
Perubahan Inventori	0,18	0,29	-0,25	0,16	-0,08
Net Ekspor	-56,10	-54,44	-54,99	-54,40	-55,09
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016

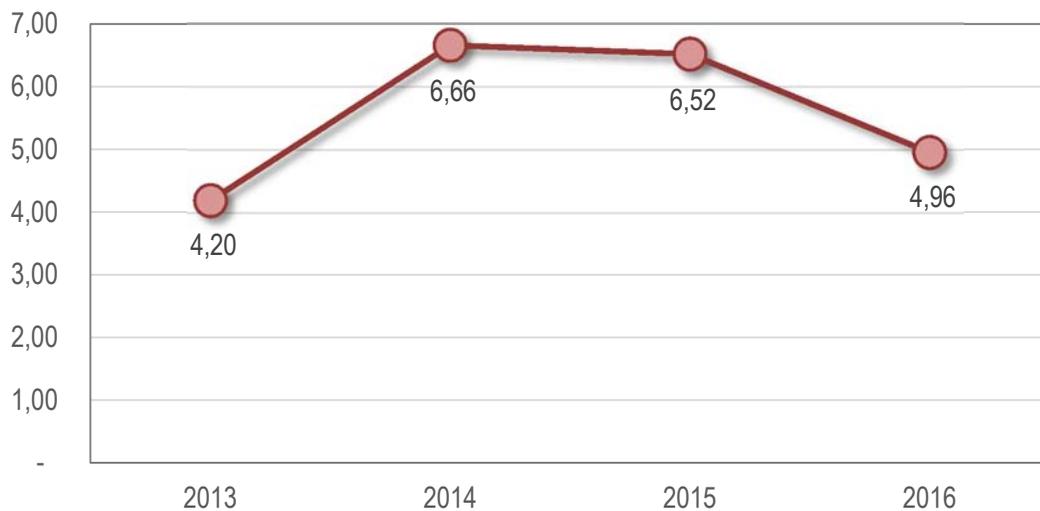
Kondisi faktual di atas mengindikasikan perekonomian wilayah Dogiyai sampai sekarang belum memiliki daya saing yang baik. Oleh karena dari sisi pengeluaran, komponen pembentuk PDRB Kabupaten Dogiyai selama ini didominasi oleh pengeluaran rumahtangga. Sedangkan dari sisi Pertambahan Modal Tetap Bruto dan perdagangan ekspor selama ini keduanya sangat rendah sekali berkontribusi terhadap perekonomian wilayah. Dimana belum optimalnya upaya promosi investasi pada investor domestik maupun asing menjadi salah satu penyebab rendahnya daya tarik investor untuk berinvestasi di kabupaten Dogiyai. Selain itu

rendahnya daya saing daerah juga disebabkan belum tersedianya komoditi unggulan lokal yang dapat diekspor ke luar daerah.

2.2.1.3. Inflasi

Secara kumulatif inflasi di Kabupaten Dogiyai, yang merepresentasikan kondisi inflasi Kabupaten Dogiyai, selama ini selalu terkendali. Tingkat pergerakan harga paket barang dan jasa secara kumulatif selama tahun 2013-2016 misalkan terlihat meningkat signifikan sejak tahun 2014, namun dengan besaran inflasi dibawah 10 persen, dengan rata-rata sebesar 5,58 persen per tahun. Meskipun tingkat inflasi masih rendah, tetapi kecenderungan yang meningkat dan tidak stabil akan berpengaruh kepada pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 2.15.
Inflasi Deflator PDRB Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam %)

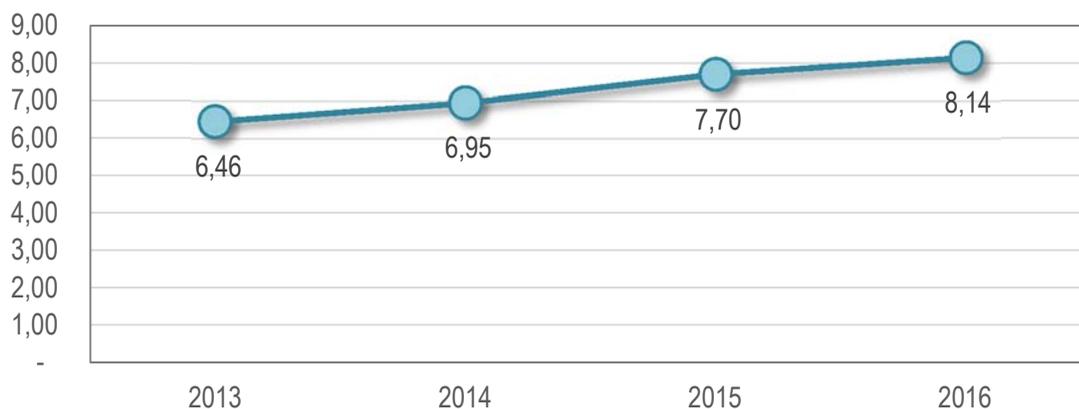


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.2.1.4. PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi Kabupaten Dogiyai melalui upaya menaikkan pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Terlihat bahwa capaian PDRB perkapita Kabupaten Dogiyai secara umum mengalami peningkatan positif. Pada tahun 2013 pendapatan per kapita Rp 6,46 juta rupiah meningkat menjadi Rp 8,14 juta rupiah pada tahun 2016.

Gambar 2.16.
PDRB Per Kapita Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam juta rupiah per kapita)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Namun demikian jika pendapatan per kapita tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang setara yang berada di wilayah Mee Pago, cenderung pendapatan per kapita Dogiyai masih jauh di bawah kabupaten lain, terutama dengan Kabupaten Mimika (tanpa tambang). Kondisi ini mengindikasikan kenaikan pendapatan per kapita yang terjadi belum begitu cepat, yang mana diakibatkan pertumbuhan ekonominya yang begitu fluktuatif selama ini, serta tidak ditopang oleh sektor-sektor yang banyak menyerap lapangan kerja, yaitu sektor pertanian dan perkebunan.

2.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin

Untuk angka kemiskinan di Kabupaten Dogiyai terdapat kecenderungan mengarah penurunan cukup cepat yaitu dari 32,25 persen di tahun 2013 menurun angkanya menjadi 29,19 persen di tahun 2014, namun kembali meningkat menjadi 31,21 persen pada tahun 2016.

Gambar 2.17.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam %)

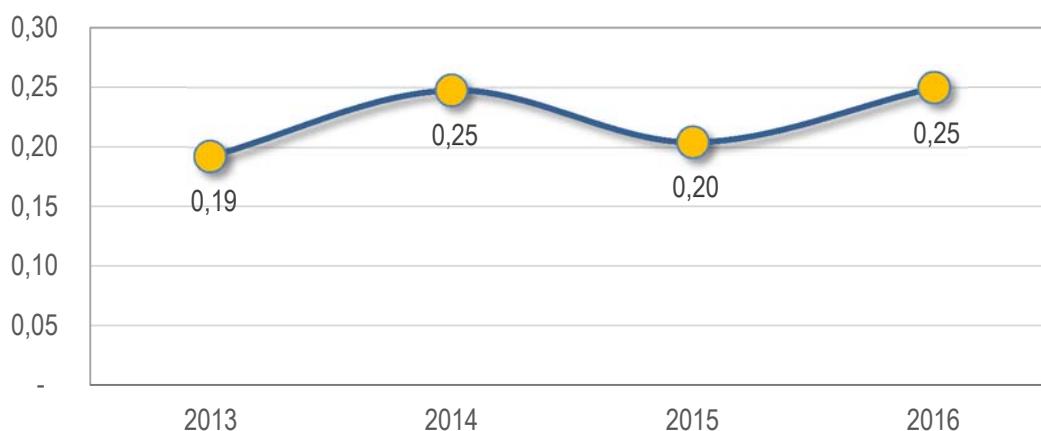


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Adanya fenomena tingkat kemiskinan yang turun naik seperti di atas mengindikasikan program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini kurang efektif untuk selalu menurunkan kemiskinan, terdapat indikasinya program yang dijalankan selama ini tidak berkelanjutan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan.

Untuk ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan angka gini ratio menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketimpangan distribusi pendapatan mengalami fluktuasi yang mengarah dari ketimpangan rendah ke ketimpangan sedang yaitu dari 0,19 di tahun 2013 menjadi 0,25 di tahun 2016.

Gambar 2.18.
Gini Ratio Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

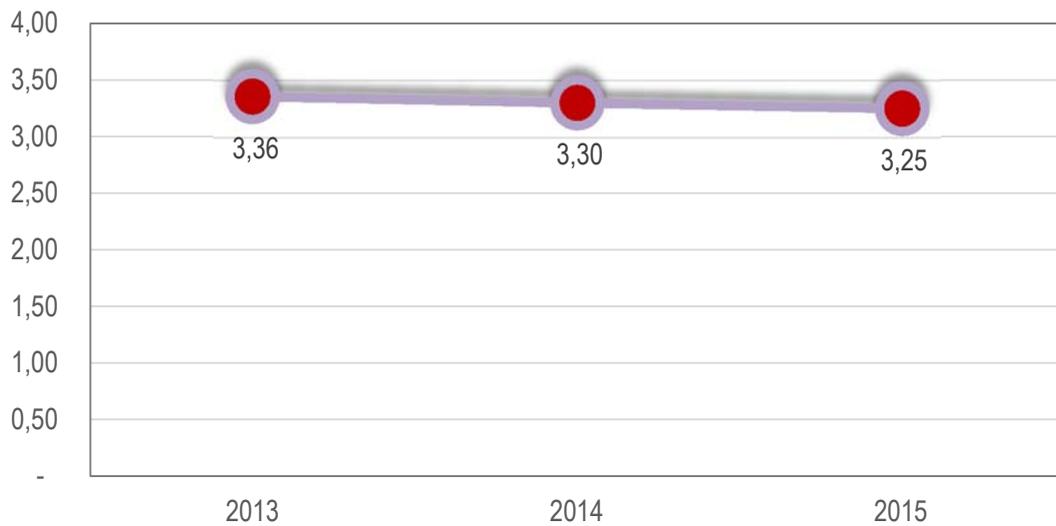
Ini berarti terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan yang begitu tinggi. Walaupun masih dalam kategori sedang, namun adanya peningkatan tersebut mengindikasikan *transfer payment* yang dihasilkan dalam perekonomian selalu lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang berpenghasilan menengah ke atas. Tidak terjadi *trickle down effect* yang baik antarwilayah. Kondisi ini jika dibiarkan berlarut dapat menimbulkan kompleksitas masalah yang lebih tinggi di masa mendatang seperti terjadinya pengurusan sumber daya, disintegrasi bangsa, dan konflik horisontal.

2.2.1.6. Sarana dan Prasarana Ketertiban Umum

Dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat di Kabupaten Dogiyai, merupakan tugas penting dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Karenanya diperlukan jumlah Satpol PP yang memadai untuk mendukung dan melaksanakan tugas tersebut di setiap daerah. Dan berdasarkan

Permendagri Nomer 60 Tahun 2012 mengenai Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, jumlah Satpol PP yang ideal antara 250-450 sesuai dengan tipenya. Kondisi faktual Satpol PP di Kabupaten Dogiyai sangat memperhatikan, dalam kurun waktu 2013-2015 rata-rata Kabupaten Dogiyai memiliki 3 orang berbanding 10.000 penduduk.

Gambar 2.19.
Rasio Satpol PP Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam Per 10.000 penduduk)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

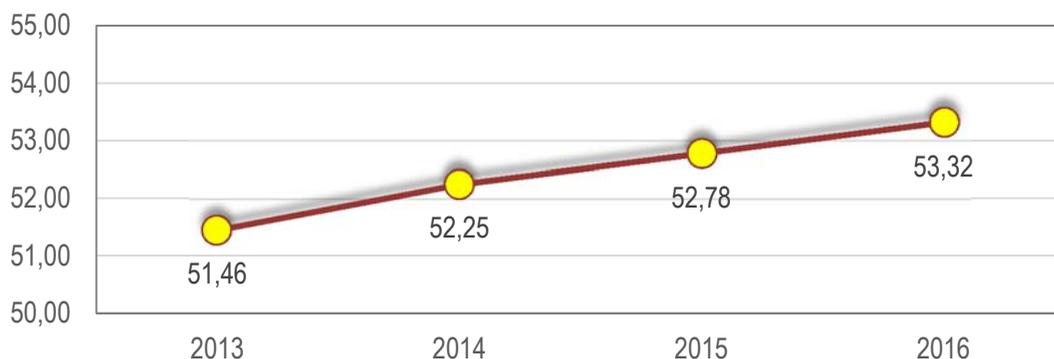
Kondisi faktual di atas mengindikasikan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama ini masih sangat tidak memadai. Untuk itu memang sangat diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan yang memadainya di setiap kampung/Distrik untuk meningkatkan keamanan di seluruh distrik, serta penting juga untuk meningkatkan sarana dan prasarana tenaga keamanan Polri dan TNI, Satpol PP dan Linmas.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1. Pendidikan

IPM di Kabupaten Dogiyai pada tahun 2013-2016 menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan. Namun demikian IPM kabupaten Dogiyai masih masuk dalam kategori IPM rendah. IPM Kabupaten Dogiyai sebesar 51,46 pada tahun 2013 meningkat menjadi 53,32 pada tahun 2016. Dengan kata lain meningkat 3,61 persen, yang tercatat merupakan kenaikan tertinggi sepanjang tahun 2013-2015.

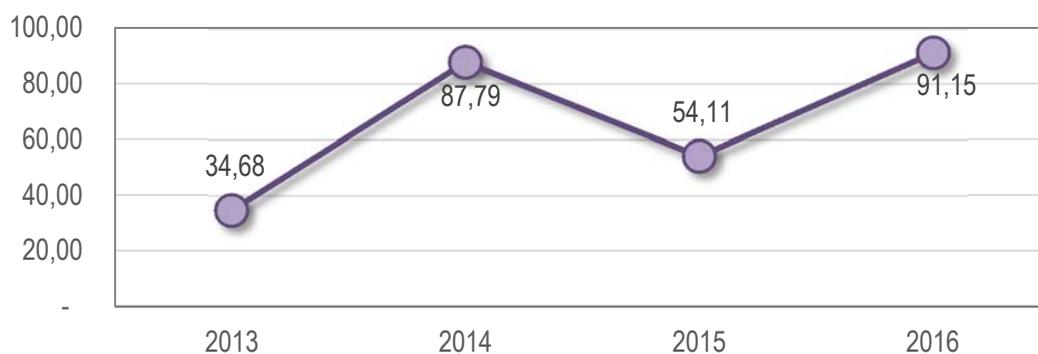
Gambar 2.20.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam index)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Angka melek huruf pada usia lebih dari 15 tahun di Kabupaten Dogiyai menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2013 angka melek huruf usia lebih dari 15 tahun sebesar 34,68 persen meningkat menjadi 87,79 persen pada tahun 2014, kemudian menurun pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 91,15 persen pada tahun 2016.

Gambar 2.21.
Angka Melek Huruf > 15 Tahun Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam persen)

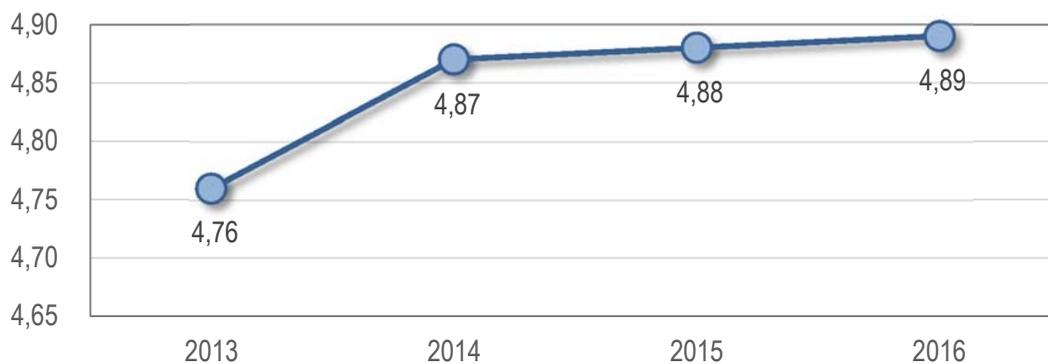


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Adanya kecenderungan yang begitu fluktuatif dalam perkembangan Angka Melek Huruf mengindikasikan bahwa program-program pengentasan buta huruf selama ini sepertinya belum berjalan kontinu dan berkelanjutan. Tingkat kemangkiran guru dalam mengajar terindikasi masih sangat tinggi juga menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten Dogiyai dalam meningkatkan IPM maupun angka melek huruf. Selain itu belum memadainya tenaga guru sesuai jumlah bidang mata pelajaran di sekolah juga menjadi masalah tidak optimalnya pengentasan buta huruf.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dogiyai pada tahun 2013-2016 menunjukkan pertumbuhan yang sangat lambat, rata-rata tidak lebih dari 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya masyarakat yang mengenyam pendidikan, hanya mencapai kelas 5 Sekolah Dasar, masih jauh dibawah target Wajib Belajar 9 Tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah kabupaten dogiyai, maka perlu dukungan untuk program-program bidang pendidikan.

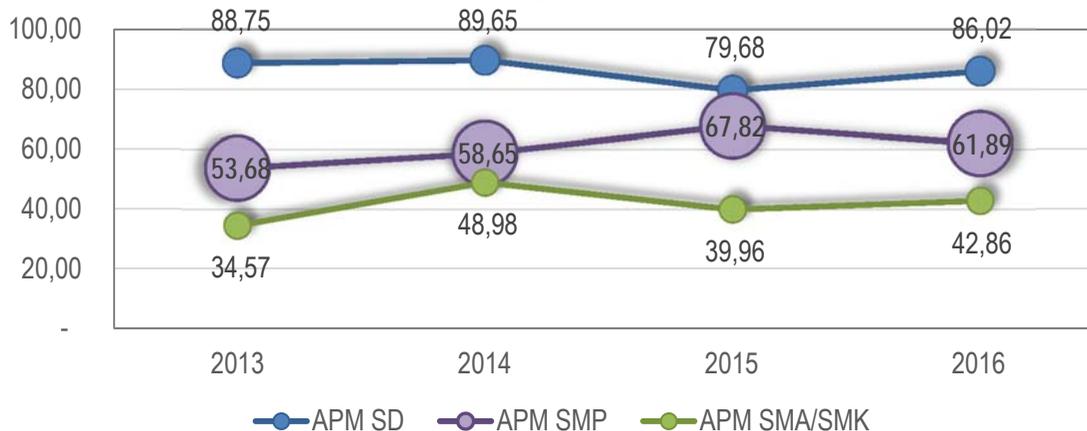
Gambar 2.22.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam tahun)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Jika dilihat Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Dogiyai yang paling tinggi pada tahun 2013 adalah APM SD sebesar 88,75 persen sedangkan APM SMP sebesar 59,65 persen dan APM SMA sebesar 48,98 persen, begitupun pada tahun-tahun sesudahnya. Hal ini menunjukkan anak yang masuk pendidikan di bangku SD di Kabupaten Dogiyai cukup tepat waktu. Sedangkan untuk APM SMP dan SMA sebagian besar tidak tepat waktu.

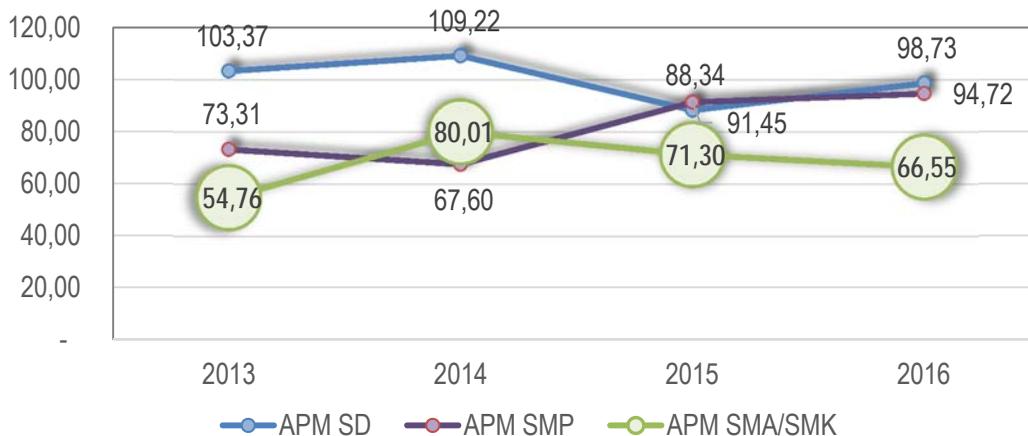
Gambar 2.23.
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Dogiyai yang paling tinggi pada tahun 2013 adalah APM SD sebesar 103,37 persen sedangkan APM SMP sebesar 73,31 persen dan APM SMA sebesar 54,76 persen, begitu pun pada tahun-tahun sesudahnya. Hal ini menunjukkan anak yang masuk pendidikan di bangku SD tidak tepat waktu atau di luar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan. Sedangkan untuk APM SMP dan SMA memiliki nilai terendah menunjukkan masih banyak anak usia sekolah yang tidak tepat waktu pada jenjang yang telah ditetapkan. Semua ini kondisi ini mengindikasikan telah terjadi ketidakmerataan akses pendidikan antar jenjang pendidikan.

Gambar 2.24.
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam persen)

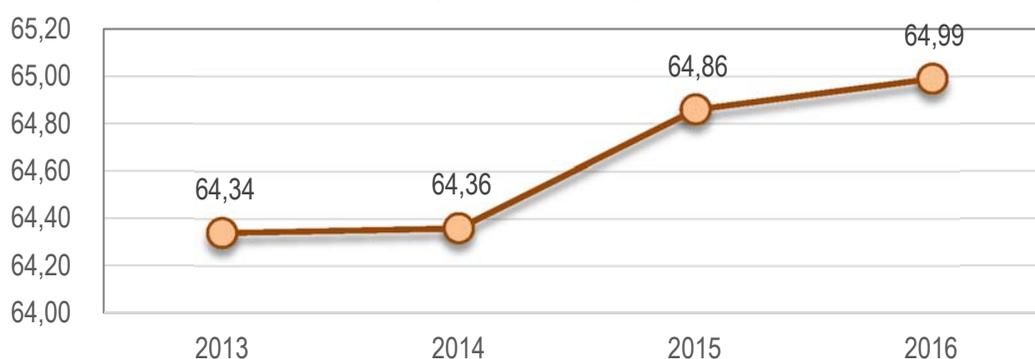


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.2.2.2. Kesehatan

Peningkatan angka harapan hidup di kabupaten Dogiyai tidak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Dogiyai sebesar 64,34 tahun, dan pada tahun 2016 hanya sebesar 65 tahun.

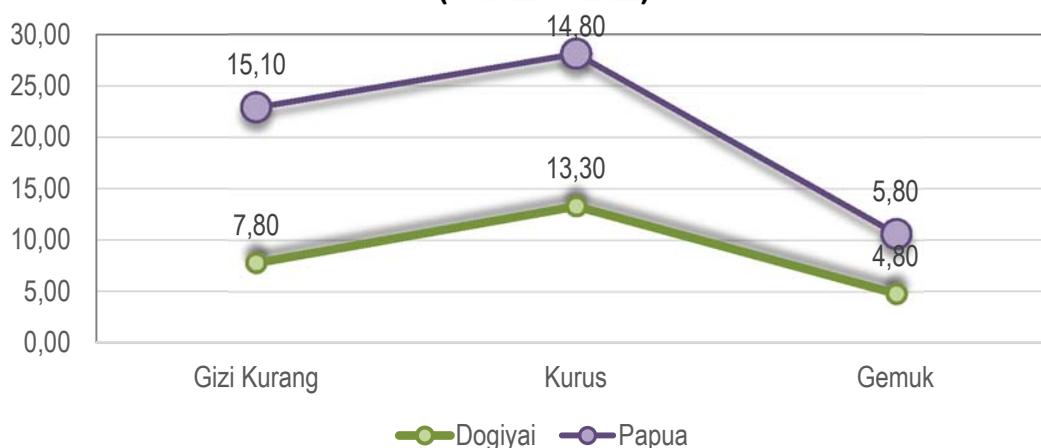
Gambar 2.25.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam tahun)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Salah satu penyebab rendahnya angka harapan hidup di Dogiyai adalah asupan gizi pada balita yang masih sangat rendah. Sebagaimana divisualisasikan oleh data statistik menunjukkan bahwa di tahun 2016 jumlah balita yang mengalami gizi kurang dan berbadan kurus cukup tinggi mencapai 21,10 persen. Program-program yang menangani urusan kesehatan kiranya dapat lebih serius dalam menekan angka kurang gizi di kabupaten Dogiyai.

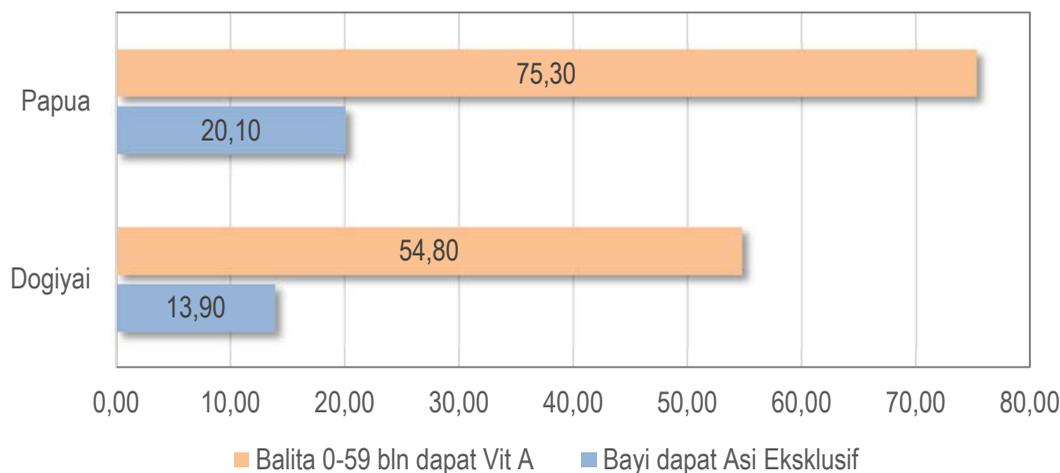
Gambar 2.26.
Persentase Gizi Balita Kabupaten Dogiyai Tahun 2016
(dalam tahun)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Di kabupaten Dogiyai balita 0-59 bulan yang mendapat vitamin A menunjukkan angka yang cukup positif sebesar 54,80 persen, namun masih ada sekitar 45,20 persen balita yang belum mendapatkan vitamin A.

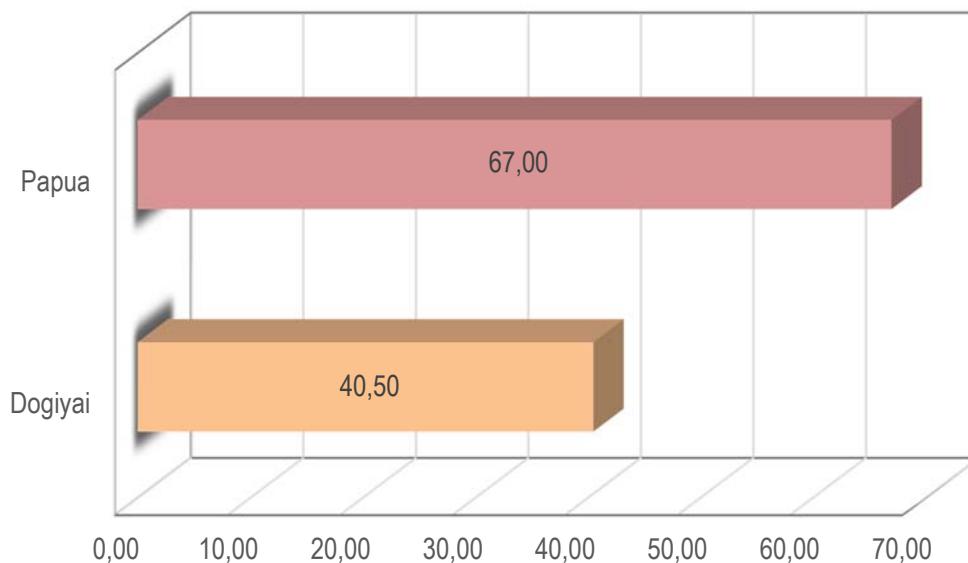
Gambar 2.27.
Persentase Bayi Yang Mendapat Asi Eksklusif Dan Balita 0-59 Bulan
Dapat Vit-A Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2016
(dalam tahun)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Jumlah persentase bayi yang mendapatkan Asi eksklusif di kabupaten Dogiyai masih sangat rendah hanya mencapai 13,90 persen. Pemberian Asi kepada bayi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan daya tahan tubuh bayi sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberian Asi eksklusif kepada bayi. Ini juga merupakan salah satu petunjuk kenapa gizi balita di Kabupaten Dogiyai terindikasi sangat kurang.

Gambar 2.28.
Persentase Balita yang mempunyai KMS/buku KIA
Kabupaten Dogiyai Tahun 2016
(dalam tahun)

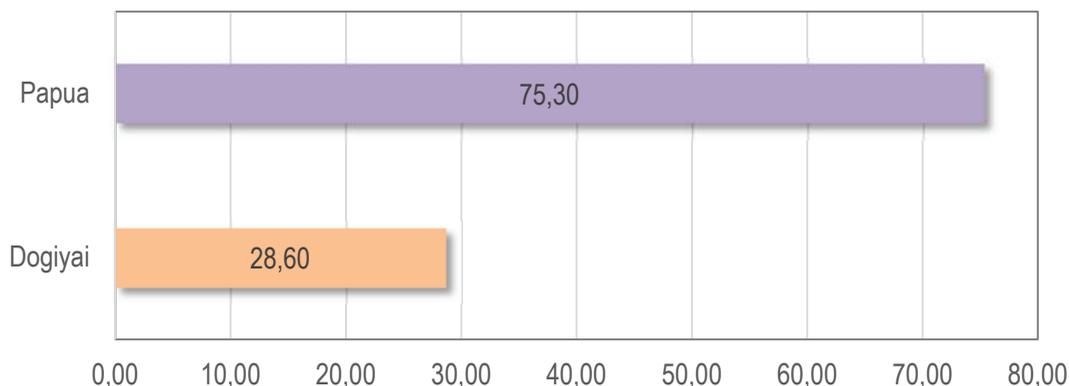


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, persentase balita yang mempunyai kartu KMS/buku KIA di kabupaten Dogiyai sebesar 40,50 persen. Angka tersebut menunjukkan masih banyak bayi yang belum memiliki kartu PMS/buku KIA sehingga perlunya dilakukan pendataan kepada seluruh bayi yang ada di kabupaten Dogiyai agar dapat memiliki kartu KMS/buku KIA.

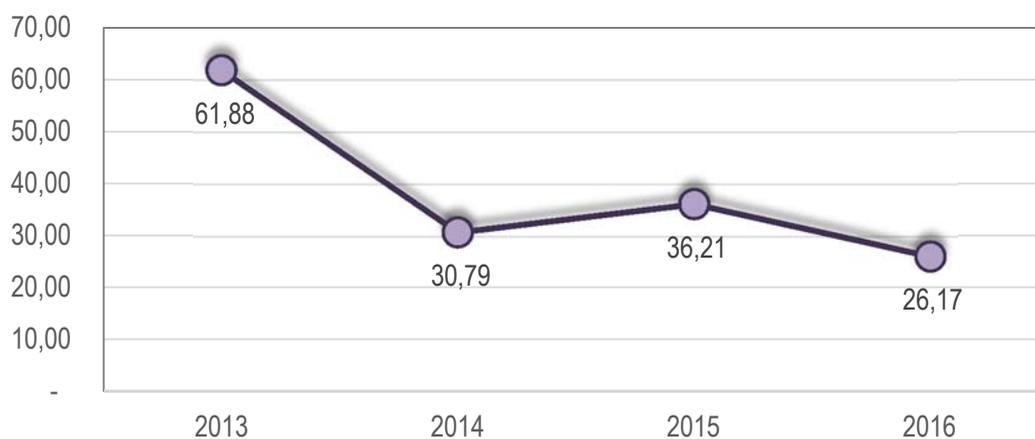
Pemerintah kabupaten Dogiyai perlu mengoptimalkan kinerja OPD terkait urusan kesehatan dalam menyiapkan data dan informasi yang terbaru secara berkala, sehingga dalam menetapkan program-program pemerintah kabupaten Dogiyai dapat mengakomodir kebutuhan kesehatan dan untuk memecahkan masalah kesehatan yang selama ini belum dapat terselesaikan.

Gambar 2.29.
Persentase Bumil KEK Dapat PMT
Kabupaten Dogiyai Tahun 2016
(dalam tahun)



Secara keseluruhan, terlihat dalam Gambar 2.30 cenderung persentasi balita yang mendapat imunisasi mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari 61,88 persen di tahun 2013 menjadi 26,17 persen di tahun 2016. Fenomena ini merupakan masalah yang patut diperhatikan serius oleh pemerintah daerah, terutama keseriusan dalam melaksanakan program-program promosi kesehatan, yang sepertinya belum optimal karena kurang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat setempat untuk membawa bayinya ke tempat-tempat pelayanan imunisasi.

Gambar 2.30.
Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi
Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam persen)

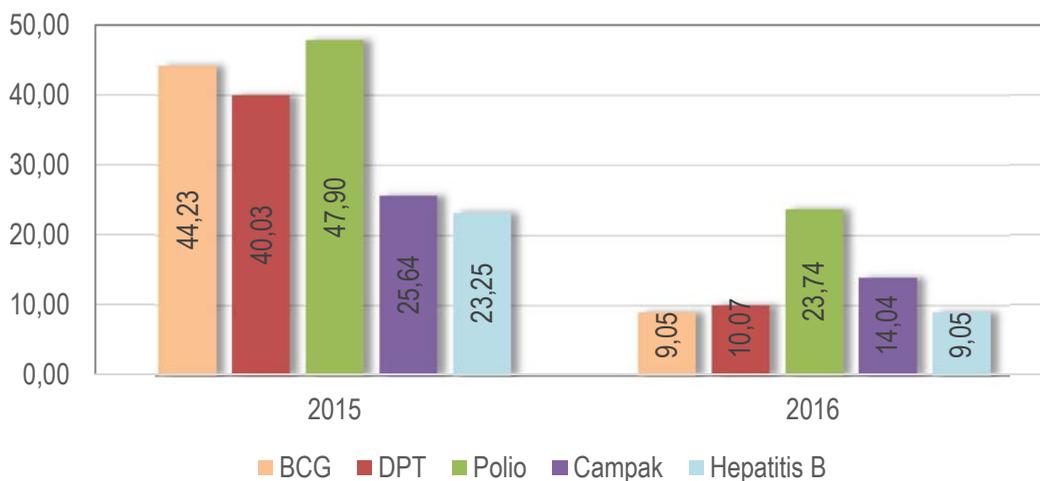


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Di Kabupaten Dogiyai persentase balita yang mendapat imunisasi BCG pada tahun 2015 sebesar 44,23 persen kemudian menurun menjadi 9,05 persen. Penurunan tersebut juga terjadi untuk imunisasi DPT, Polio, Campak maupun Hepatitis B. Hal tersebut menunjukkan semakin rentannya balita terhadap penyakit-penyakit menular yang dapat

menyerang setiap saat. Apabila hal ini dibiarkan berlarut dapat menjadi epidemi yang berbahaya bagi kehidupan seluruh balita di Dogiyai.

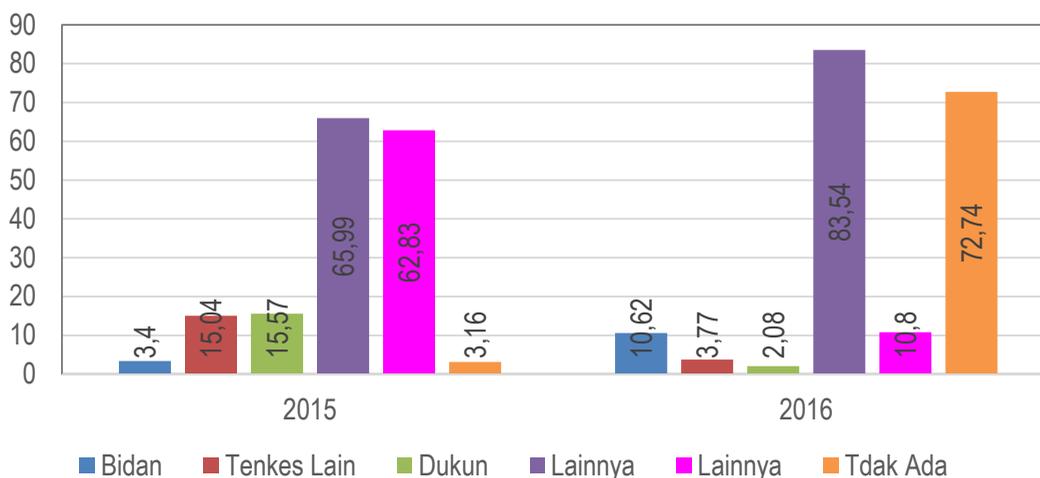
Gambar 2.31.
Persentase Balita Mendapat Imunisasi Kabupaten Dogiyai
Tahun 2015-2016
(dalam persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Persentase Pertolongan Kelahiran di Kabupaten Dogiyai oleh bidan menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 sebesar 3,4 persen meningkat menjadi 10,62 persen. Namun untuk pertolongan kelahiran oleh tenaga lainnya diluar tenaga kesehatan masih menunjukkan angka yang tinggi yaitu 65,99 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 83,54 persen.

Gambar 2.32.
Persentase Ibu Melahirkan Pertama Menurut Tenaga Yang Menolong
Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2015-2016
(dalam persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

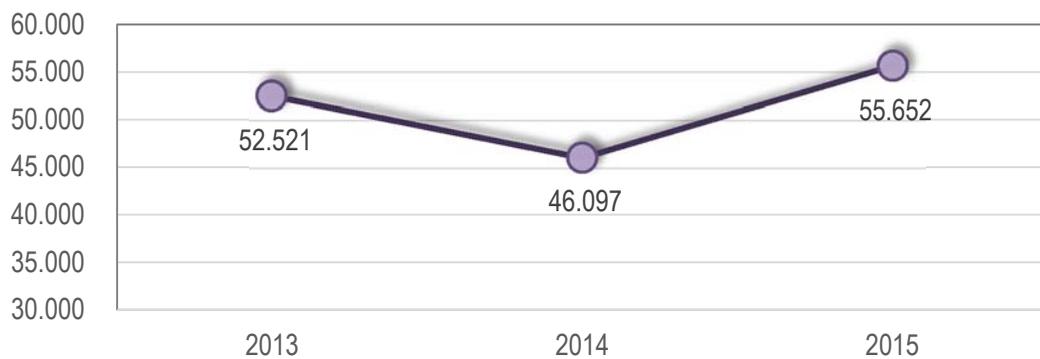
Kecenderungan di atas menunjukkan masih rendahnya pertolongan kelahiran oleh tenaga medis, dimana salah satunya disebabkan karena

terbatasnya tenaga bidang kesehatan di unit pelayanan puskesmas dan pustu. Selain itu juga belum memadainya sarana dan prasarana puskesmas dan pustu, termasuk sistem pendataan dan informasi yang kurang berkualitas dan tidak memadai selama ini.

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Di Kabupaten Dogiyai jumlah orang bekerja menunjukkan peningkatan yang cukup positif dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Namun pada tahun 2014 terlihat mengalami penurunan jumlah orang bekerja.

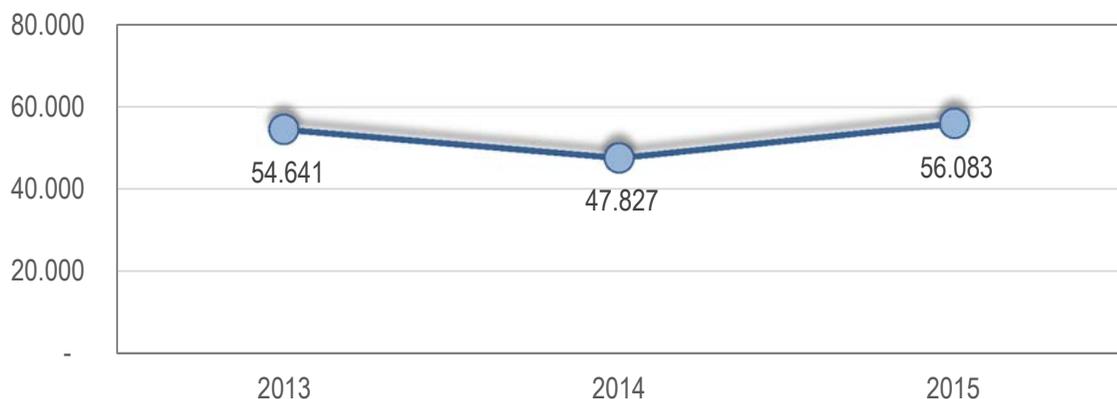
Gambar 2.33.
Jumlah Orang Bekerja Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015
(dalam orang)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Begitu juga dengan jumlah angkatan kerja menunjukkan peningkatan yang cukup positif dari tahun 2013 sebesar 54.641 orang meningkat menjadi 56.083 orang pada tahun 2015.

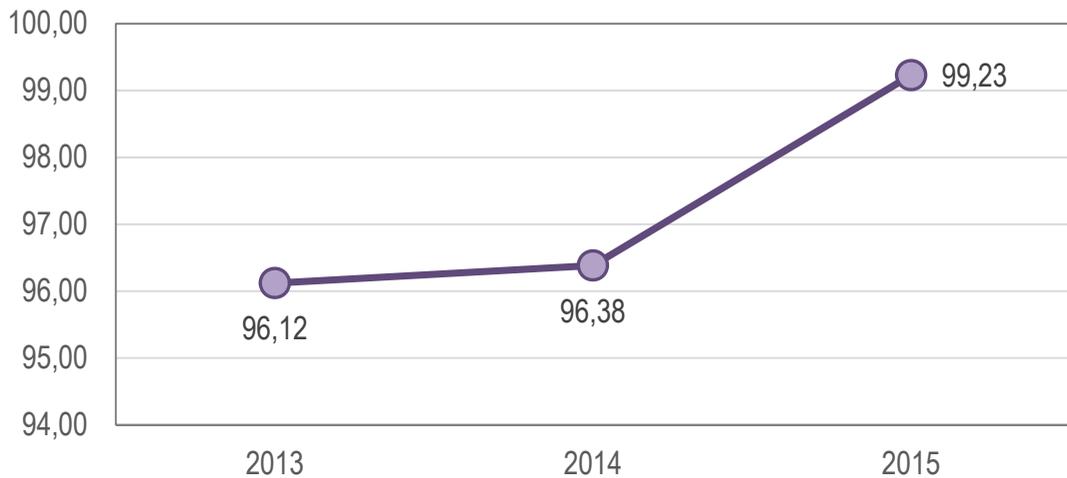
Gambar 2.34.
Jumlah Angkatan Kerja Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015
(dalam orang)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Adapun tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Dogiyai juga menunjukkan peningkatan positif dari tahun 2013 sebesar 96,12 terus meningkat hingga 99,23 persen pada tahun 2015.

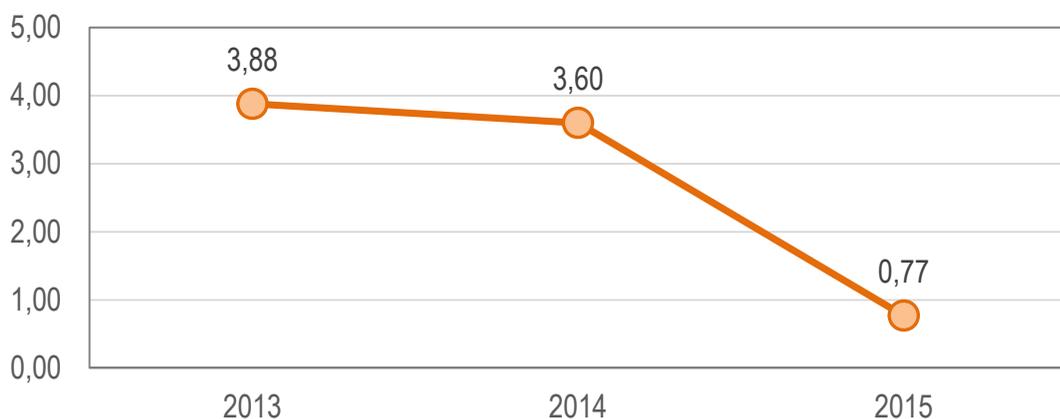
Gambar 2.35.
Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015
(dalam persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Meningkatnya kesempatan kerja di Kabupaten Dogiyai mendorong penurunan tingkat pengangguran yang menunjukkan perkembangan positif dari tahun 2013 sebesar 3,88 persen terus menunjukkan penurunan hingga 0,77 persen pada tahun 2015.

Gambar 2.36.
Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2015
(dalam persen)



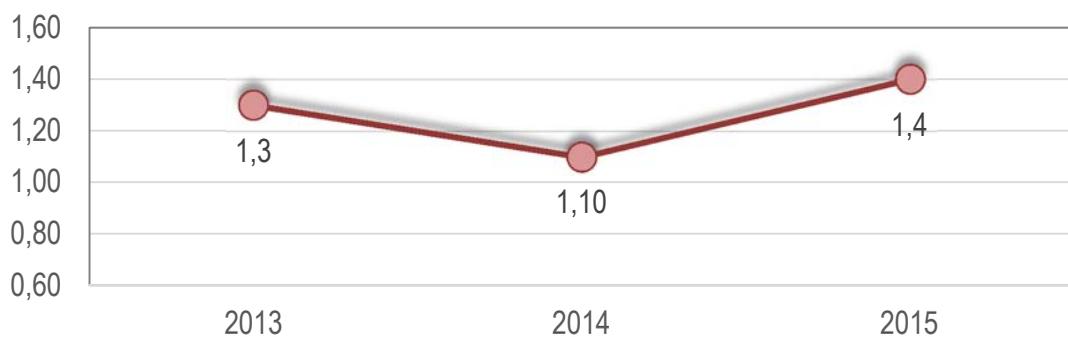
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Jika memperhatikan kecenderungan berbagai angka indikator ketenagakerjaan yang disajikan di atas, terlihat bahwa pemerintah kabupaten selama ini cukup berhasil mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, jika hal ini dikaitkan dengan tingkat kemiskinan

yang masih sangat tinggi, maka ada indikasi bahwa kapasitas lapangan kerja yang disediakan selama ini sangat rendah sekali, karena kurang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di atas garis kemiskinan. Dengan kata lain *transfer payment* yang dihasilkan oleh lapangan kerja yang tersedia masih dibawah standar pemenuhan kebutuhan hidup yang minimal, akibatnya meskipun sudah bekerja namun masyarakat Dogiyai masih tetap miskin.

Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi adalah sebagian tenaga kerja di Kabupaten Dogiyai memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Atau yang berpendidikan tinggi sangat rendah. Seperti yang disajikan dalam Gambar 2.37 berikut, dimana angkatan kerja yang berpendidikan tinggi di Kabupaten Dogiyai tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Rata-rata hanya 1,4 persen saja angkatan kerja yang memiliki pendidikan tinggi.

Gambar 2.37.
Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Tinggi
Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015
(dalam persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

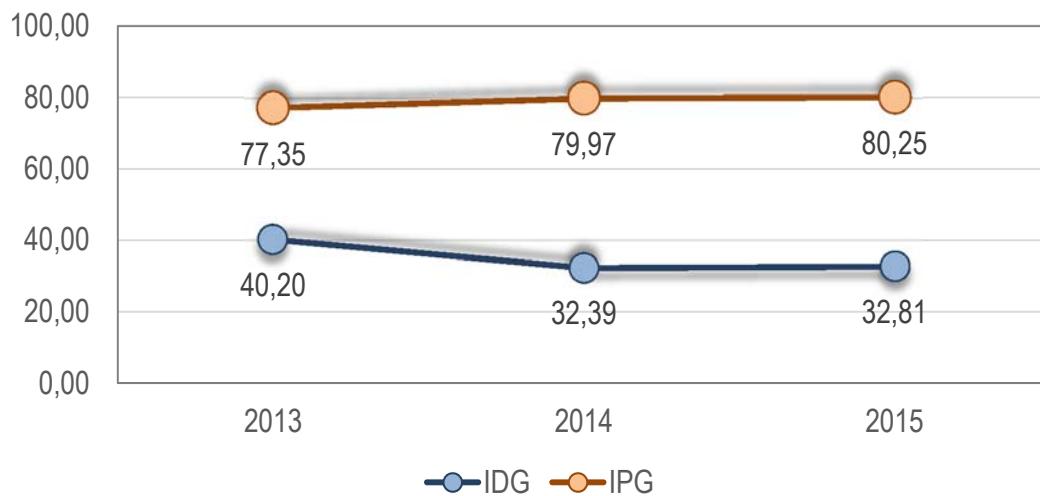
Rendahnya angkatan kerja yang memiliki pendidikan tinggi, membuat tingkat keahlian dan pendidikan tenaga kerja lokal selama ini belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu juga menjadi penyebab produktifitas tenaga kerja yang dihasilkan masih rendah. Termasuk juga menciptakan ketimpangan kesempatan kerja antara penduduk lokal dengan pendatang atau penduduk luar. Karena pada umumnya tenaga kerja yang datang dari luar memiliki keterampilan dan keahlian yang lebih baik. Kondisi ini menyebabkan pula sektor formal lebih didominasi oleh pekerja luar.

2.2.2.4. Pembangunan Gender

Indeks pembangunan gender di kabupaten Dogiyai digunakan untuk melihat bagaimana penduduk di kabupaten Dogiyai mempunyai

kesempatan untuk dapat mengakses hasil pembangunan, dan memanfaatkan haknya untuk mendapatkan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Semakin tinggi IPG di kabupaten Dogiyai menunjukkan bahwa capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah setara di kabupaten Dogiyai. Dari data yang ada terlihat bahwa IPG kabupaten Dogiyai mengalami perkembangan, yang mana tahun 2013 tercatat dengan angka 77,35 poin meningkat 2,9 poin menjadi 80,25 poin di tahun 2015. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di kabupaten Dogiyai

Gambar 2.38.
Capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016

2.2.2.5. Perumahan Rakyat

Kondisi rumah tangga menurut bahan bangunan utama atap terluas di Kabupaten Dogiyai menunjukkan sudah menggunakan seng sebanyak 65,10 persen. Namun masih banyak rumah tangga di Kabupaten Dogiyai yang masih menggunakan atap rumah dari jerami/ijuk/daun/rumbia.

Tabel. 2.7
Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 (dalam %)

Kab/Kota	Beton	Genteng	Asbes	Seng	Bambu/ Kayu/Sirap	Jerami/Ijuk/ Daun/Rumbia	Lainnya
Dogiyai	0,00	0,00	0,36	65,10	2,67	31,87	0,00
Papua	0,68	0,59	1,54	65,14	0,70	29,61	1,75

Sumber : susenas 2017

Kondisi rumah tangga di Kabupaten Dogiyai yang lantai rumah terluas menggunakan kayu/papan dengan kualitas tinggi sebanyak 51,66 persen, tetapi masih banyak rumah tangga di Kabupaten Dogiyai yang lantai rumah terluasnya masih beralaskan tanah dengan persentase 44,86 persen.

Tabel. 2.8
Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas Kabupaten Dogiyai (dalam %) 2017

Kab/ Kota	Marmer/ Granit	Keramik	Parket/Vinil/ Permadani/ Ubin/ Tegel/ Teraso	Kayu/ Papan Kualitas Tinggi	Semen/ Bata Merah	Bambu/ Kayu/ Papan Kualitas Rendah	Tanah	Lainnya
Dogiyai	0,54	0,00	0,30	51,66	2,20	0,44	44,86	0,00
Papua	0,53	13,48	3,52	36,70	19,20	1,42	23,35	1,81

Sumber : susenas 2017

Untuk fasilitas tempat buang air besar di Kabupaten Dogiyai masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar sebanyak 50,68 persen rumah tangga tetapi sudah ada juga rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar.

Tabel. 2.9
Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Tempat Baung Air Besar (BAB) Di Kabupaten Dogiyai 2017 (dalam %)

Kab/Kota	Fasilitas BAB				
	Ada, digunakan hanya ART sendiri	Ada, digunakan bersama ART rumah tangga lain tertentu	Ada, di MCK Umum/siapapun menggunakan	Ada, ART tidak menggunakan	Tidak ada fasilitas
Dogiyai	48,67	0,00	0,00	0,65	50,68
Papua	55,73	8,19	4,87	0,37	30,84

Sumber : susenas 2017

2.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Pelestarian budaya menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Dogiyai, dari sumber Papua Pos Nabire menyatakan tim seni budaya kabupaten Dogiyai pada festival seni budaya di tingkat nasional yang berhasil menjuarai festival tersebut sebanyak dua kali dan mewakili Indonesia untuk mengikuti festival seni budaya di Prancis pada tahun 2012. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Dogiyai memiliki komitmen untuk terus meningkatkan dan melestarikan seni budaya yang ada di kabupaten Dogiyai.

Dalam rangka mempertahankan budaya leluhur masyarakat Mee serta menjaga nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat maka perlu dipromosikannya budaya dan seni suku Mee dikalangan nasional maupun inter nasional.

Namun yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai seni dan budaya suku Mee dan melakukan pembinaan kepada generasi muda tentang etika dan berdasarkan budaya daerah dalam pembentukan kepribadian dan etika dalam kehidupan social.

Peranan kepala suku dan dewan adat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sangatlah penting untuk terus mengangkat budaya dan seni suku Mee serta peran lembaga adat sebagai pemilik budaya dan hak ulayat yang dapat terus melestarikan kebudayaan dan seni leluhur suku Mee.

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel. 2.10
Banyaknya Distrik yang Memiliki Lapangan/ Gelanggang Olahraga
menurut Kode/Nama Distrik dan Jenis Lapangan
Tahun 2016

Distrik	Sepak Bola	Bola Voli	Bulu Tangkis	Bola Basket
Dogiyai	1	2		
Kamu	5	10		
Kamu Selatan	1	5		
Kamu Timur	1	7		
Kamu Utara		4		
Mapia Barat	4	4		
Mapia	1	1		
Mapia Tengah	10	10		
Piyaiye				
Sukikai Selatan				
Jumlah	23	43	0	0

Sumber : BPS Kabupaten Nabire 2017

Dari data yang ada dapat dilihat jumlah lapangan olah raga pada Tahun 2016 di Kabupaten Dogiyai sudah mencapai 23 lapangan sepak bola

dan 43 lapangan bola voli. Namun pemerintah perlu menambah lapangan untuk cabang olah raga lain untuk merangsang para pemuda di Kabupaten Dogiyai dalam meningkatkan kemampuan/skill dibidang olahraga lainnya seperti cabang olahraga bulu tangkis, bola basket, tenis meja dan tenis lapangan.

Tabel. 2.11
Banyaknya Distrik yang Memiliki Kelompok Kegiatan Olahraga
menurut Kode/ Nama Distrik dan Jenis Kegiatan
Tahun 2016

Distrik	Sepak Bola	Bola Voli	Bulu Tangkis	Bola Basket
Dogiyai	2	2		
Kamu	5	8		
Kamu Selatan	1	4		
Kamu Timur				
Kamu Utara		4		
Mapia Barat	4	4		
Mapia				
Mapia Tengah	10			
Piyaiye				
Sukikai Selatan				
Jumlah	22	22	0	0

Sumber : BPS Kabupaten Nabire 2017

Kelompok olahraga di Kabupaten Dogiyai pada tahun 2016 sudah mencapai 22 kelompok olahraga untuk sepak bola dan 22 kelompok olahraga untuk bola voli. Perlu adanya peran pemerintah untuk terus meningkatkan skill para pemuda di Kabupaten Dogiyai agar dapat bersaing dengan daerah lain dibidang olahraga yang sudah ada di kabupaten Dogiyai. Namun pemerintah juga perlu memberikan fasilitas untuk cabang olahraga lainnya seperti bulu tangkis dan bola basket untuk meningkatkan minat para atlit muda untuk dapat bersaing di cabang olahraga tersebut.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dapat meningkatkan atau memacu semangat pemuda untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

Selain itu perlunya pembinaan pemuda dalam rangka tergarapnya potensi dan partisipasi pemuda dalam percepatan pembangunan daerah. Pemerintah perlu melakukan pencegahan-pencegahan dari pengaruh budaya luar yang dapat mempengaruhi moral pemuda

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan terbagi menjadi beberapa jenjang pendidikan yaitu pendidikan sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Terdapat juga beberapa indikator dalam mengukur kinerja pembangunan di bidang pendidikan yaitu angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, dan rasio guru terhadap murid per jenjang pendidikan Di Kabupaten Dogiyai seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.12.
Indikator-Indikator Pendidikan Sekolah Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016

Indikator Pendidikan Sekolah	2013	2014	2015	2016
a. Pendidikan Sekolah Dasar				
1. Angka Partisipasi Sekolah SD	89,21	89,65	83,95	88,8
2. Rasio Sekolah Murid SD	221,41	156,97	217	279,87
3. Rasio Guru Murid SD	94,89	67,27	36,5	43,22
b. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
1. Angka Partisipasi Sekolah SMP	86,57	90,85	85,6	89,62
2. Rasio Sekolah Murid SMP	139,39	148,69	123,56	196,42
3. Rasio Guru Murid SMP	60,40	15,84	13,73	16,03
c. Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan				
1. APS SMA/SMK	65,89	68,71	79,02	77,59
2. Rasio Sekolah Murid SMA/SMK	193	193	207,5	433
3. Rasio Guru Murid SMA/SMK	21,44	7,72	11,53	10,31

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Angka partisipasi sekolah SD di Kabupaten Dogiyai sepanjang 4 (empat) tahun terakhir mengalami perubahan yang cenderung menurun setiap tahunnya. Rata-rata angka partisipasi sekolah untuk SD sepanjang tahun 2013-2016 adalah sebesar 87.90 persen dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,65 persen. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMP terlihat bahwa APS cenderung meningkat setiap tahunnya dan rata-rata APS SMP tahun 2013-2016 adalah sebesar 88 murid per sekolah. Sedangkan APS SMA sepanjang tahun 2013-2016 memiliki perkembangan setiap tahun yang terus meningkat mulai dari 86 murid per sekolah di

tahun 2013 menjadi 89 murid per sekolah di tahun 2016. Begitu juga pada jenjang pendidikan SMA yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata mencapai 72 murid per sekolah sepanjang 2013-2016.

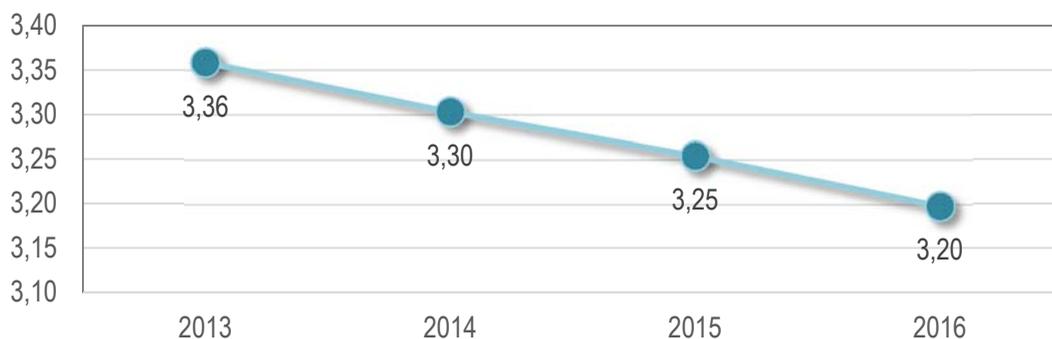
Dengan semakin pesatnya perkembangan tingkat partisipasi sekolah ini juga berdampak terhadap ketersediaan sekolah di Kabupaten Dogiyai. Rasio sekolah murid di tingkat SD, SMP dan SMA tahun 2013-2016 terlihat bergerak naik. Untuk SD mulai dari 221 murid per sekolah di tahun 2013, menjadi 279 murid per sekolah pada tahun 2016. Dengan nilai rata-rata sebesar 218 murid per sekolah. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP di tahun 2013 adalah sebesar 139 murid per sekolah menjadi 196 murid per sekolah pada tahun 2016 dengan rata-rata mencapai 152 murid per sekolah setiap tahunnya. Perkembangan rasio sekolah pada jenjang pendidikan SMA juga terus meningkat, mulai dari 193 murid per sekolah di tahun 2013 hingga 433 murid per sekolah pada tahun 2016 dengan rata-rata per tahun adalah sebesar 256 murid per sekolah.

Rasio guru murid untuk setiap jenjang pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Dogiyai terlihat masih cukup tinggi dengan angka rasio yang terlihat mengalami penurunan. Rasio guru murid untuk jenjang SD tahun 2013 sebesar 94 murid per guru, turun menjadi 67 murid per guru tahun 2014 dan turun lagi menjadi 36 murid per guru di tahun 2015. Namun sampai dengan tahun 2016, kembali mengalami peningkatan menjadi 43 murid per satu orang guru. Dengan nilai rata-rata sebesar 60 murid per satu orang guru. Sedangkan perkembangan rasio guru murid pada jenjang pendidikan SMP dan SMA terlihat sudah cukup ideal di Kabupaten Dogiyai sepanjang tahun 2013-2016.

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Perkembangan ketersediaan puskesmas di Kabupaten Dogiyai sepanjang tahun 2013-2016 yang berdampak terhadap rasio puskesmas terhadap penduduk yang cenderung mengalami penurunan, meskipun tidak begitu signifikan. Rata-rata sebanyak 3,28 puskesmas di Kabupaten Dogiyai mampu melayani 30 ribu penduduk setiap tahunnya. Perubahan tersebut terlihat mulai tahun 2013 rasionya mencapai 3,36 puskesmas yang melayani 30 ribu penduduk menjadi 3,20 puskesmas pada tahun 2016.

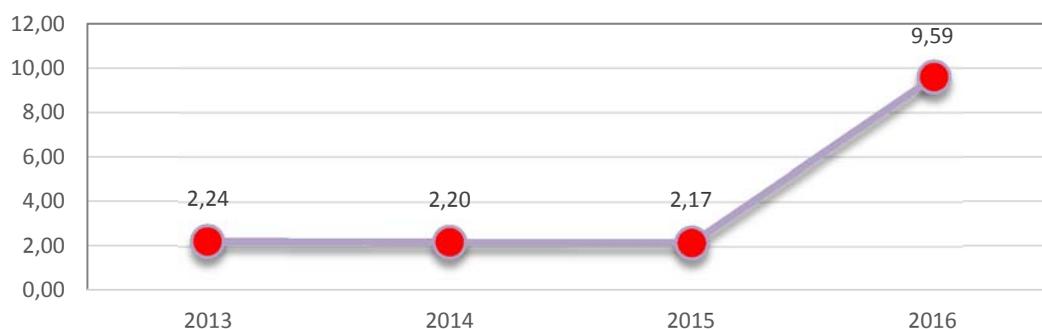
Gambar 2.39.
Rasio Puskesmas Per 30 Ribu Penduduk Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Sedangkan indikator kesehatan lainnya yaitu rasio dokter terhadap pelayanan masyarakat di Kabupaten Dogiyai sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan meskipun masih terlalu rendah. Sampai dengan tahun 2016 rasio dokter terhadap pelayanan masyarakat di Kabupaten Dogiyai adalah sebesar 10 dokter per 100 ribu penduduk.

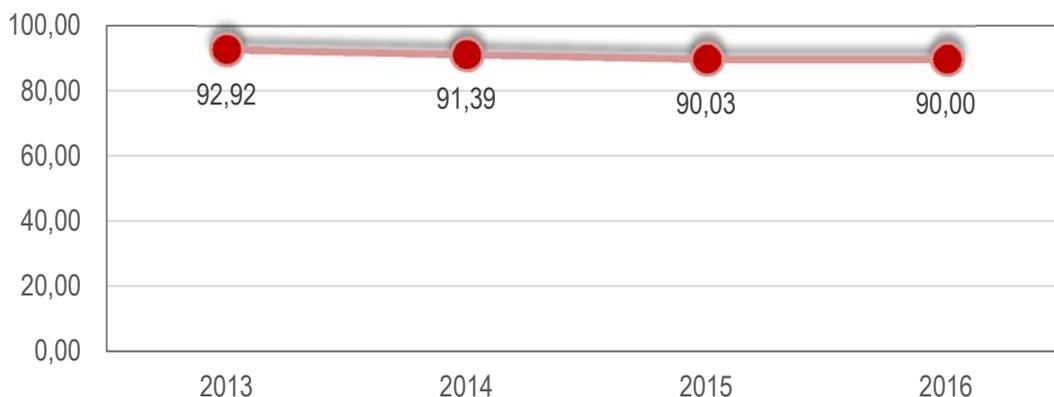
Gambar 2.40.
Rasio Dokter Per 100 Ribu Penduduk Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Selanjutnya, perkembangan rasio tenaga medis untuk 100 ribu penduduk di Kabupaten Dogiyai tahun 2013-2016 cenderung mengalami penurunan. Rasio tenaga medis terhadap masyarakat di tahun 2013 adalah sebesar 93 tenaga medis per 100 ribu penduduk, terus menurun sampai dengan tahun 2016 yaitu 90 tenaga medis yang melakukan pelayanan terhadap 100 ribu penduduk, dengan rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 91 tenaga medis untuk 100 ribu penduduk sepanjang tahun 2013-2016.

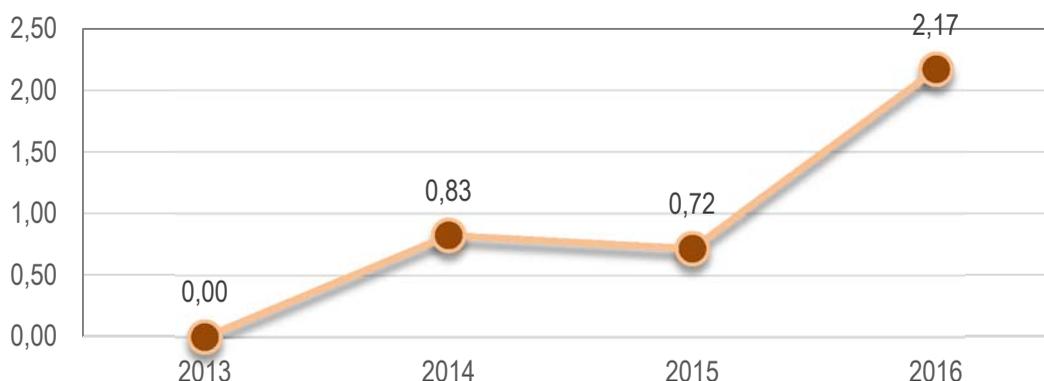
Gambar 2.41.
Rasio Tenaga Medis Per 100 Ribu Penduduk Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Adapun indikator kesehatan lainnya yaitu persentase balita yang mengikuti pelayanan kesehatan di Kabupaten Dogiyai juga terlihat memiliki perkembangan yang cukup baik, meskipun memiliki angka yang sangat rendah. Sampai dengan tahun 2016 hanya 2,17 persen balita yang mengikuti pelayanan kesehatan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh salah satunya adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah.

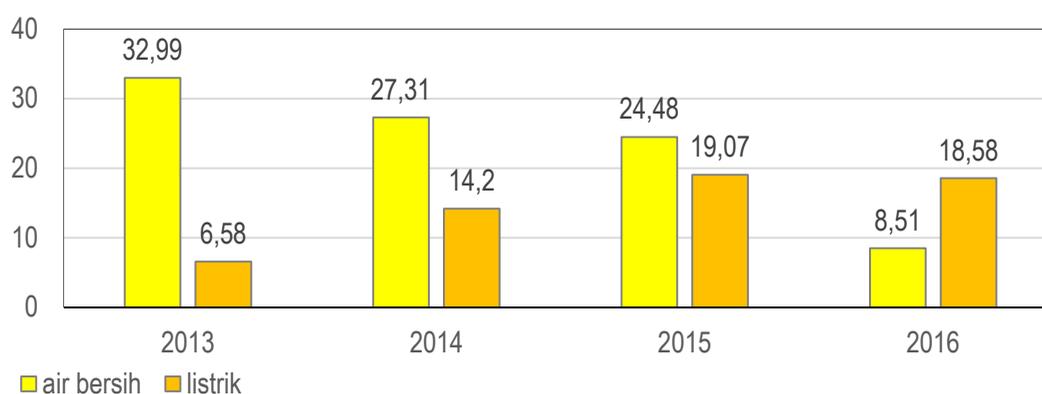
Gambar 2.42.
Persentase Balita Yang Mengikuti Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Dalam mengakses ketersediaan air bersih di Kabupaten Dogiyai selama empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Rata-rata persentasi penduduk yang dapat mengakses air bersih adalah sebesar 23 persen. Penurunan tersebut terlihat dari tahun 2013 sebesar 32 persen masyarakat terakses air bersih menurun hingga tahun 2016 sebesar 8 persen.

Gambar 2.43.
Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Dan Menggunakan Listrik Di
Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Sedangkan jika dilihat dari pemenuhan listrik rumah tangga, ada kecenderungan mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun dalam taraf yang rendah, dimana rata-rata per tahun akses rumah tangga terhadap listrik hanya mencapai 14,61persen.

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum

Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten/kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle neck* di Wilayah Papua yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Panjang jalan dalam periode 2013-2016 di Kabupaten Dogiyai mengalami peningkatan yang signifikan, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Panjang jalan provinsi dalam tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang cukup besar, sampai dengan tahun 2016 panjang jalan provinsi sebesar 3 km. sedangkan jika dilihat panjang jalan Kabupaten Dogiyai sampai dengan tahun 2016 secara keseluruhan mengalami perubahan yang cukup besar yaitu meningkat sebesar 228,72 km.

Tabel 2.13.
Panjang Jalan Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016

Panjang Jalan	2013	2014	2015	2016
Jalan Provinsi	3	3	3	3
Jalan Kabupaten	17,9	17,9	18,7	225,72
Jumlah	20,9	20,9	21,7	228,72

Sumber : BPS Kabupaten Dogiyai (2017)

Selain itu, kondisi permukaan jalan di Kabupaten Dogiyai sepanjang tahun 2013-2016 baik dalam kondisi jalan yang sudah teraspal maupun masih dalam kondisi belum teraspal mengalami perubahan yang cenderung terus meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14.
Kondisi Jalan Menurut Permukaan Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016

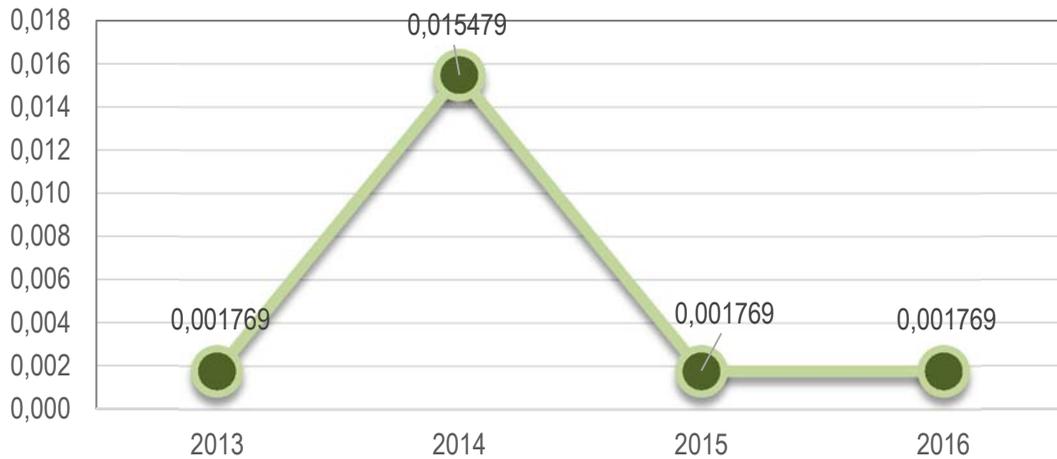
Kondisi Jalan	2013	2014	2015	2016
Jalan Provinsi				
Aspal	3	3	3	3
Kerikil				
Tanah				
Jalan Kabupaten				
Aspal	1.7	1.7	3.5	12.86
Kerikil				
Tanah	16.2	16.2	18.7	18.2

Sumber : BPS Kabupaten Dogiyai (2017)

Kondisi permukaan jalan di Kabupaten Dogiyai berdasarkan data tahun 2013-2016 masih didominasi oleh permukaan jalan masih belum teraspal. Panjang jalan Kabupaten Dogiyai dengan permukaan jalan beraspal yaitu sebesar 15,86 km, dengan rincian panjang jalan provinsi 3 km dan jalan kabupaten 12,86 km, sedangkan permukaan jalan di Kabupaten Dogiyai dengan permukaan jalan belum beraspal 18,2 km.

Adapun pembangunan infrastruktur jalan selama ini belum mampu menaikkan rasio aksesibilitas penduduk secara maksimal di Kabupaten Dogiyai dan rasionya cenderung menurun meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2014. Peningkatan jalan dari tahun 2013-2016 hanya dapat menaikkan rasio aksesibilitas sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 0,001769 Km/Km². Rata-rata penduduk dapat mengakses jalan adalah sebesar 0,005 Km/Km².

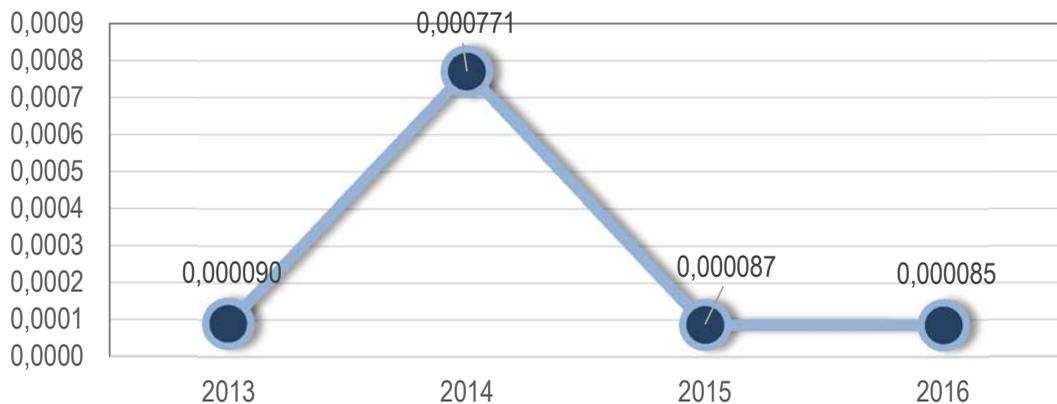
Gambar 2.44.
Rasio Aksesibilitas Wilayah Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam panjang jalan Km/Km²)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Pembangunan infrastruktur jalan selama ini belum mampu menaikkan rasio mobilitas penduduk secara maksimal di Kabupaten Dogiyai. Peningkatan jalan dari tahun 2013-2016 hanya dapat menaikkan rasio mobilitas dari tahun 2013 sebesar 0,000090 Km/jiwa menjadi 0,000085 Km/jiwa di tahun 2016. Rata-rata penduduk dapat mengakses jalan adalah sebesar 0,000258 Km/jiwa.

Gambar 2.45.
Rasio Mobilitas Penduduk Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam panjang jalan km/jiwa)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Aksesibilitas dan mobilitas penduduk yang sangat rendah menyebabkan banyak Distrik/kampung yang masih terisolasi, dan belum diterobos oleh jalan dan jembatan. Banyaknya jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat jumlah jalan dalam kondisi mantap dan fungsional masih sedikit.

2.3.1.4. Urusan Perhubungan dan Telekomunikasi

Secara Topografi Kondisi Kabupaten Dogiyai merupakan daerah pegunungan yang mempunyai bentuk topografi datar, landai, agak curam sampai sangat curam dengan tingkat kemiringan lereng yang bervariasi. Kondisi ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur khususnya jalan masih mengalami kendala yang cukup berat. Sehingga akses ke beberapa Distrik maupun kampung masih menggunakan Transportasi Udara. Namun untuk akses transportasi perhubungan darat yang menghubungkan kabupaten Dogiyai dengan kabupaten Nabire, Mimika, Deiyai maupun Paniai telah terbangun, akses jalan ini merupakan akses utama dari serta penghubung kabupaten-kabupaten di pegunungan tengah khususnya di wilayah adat Mee Pago.

a) Angkutan darat

Adapun akses Perhubungan Darat yang dilalui kendaraan umum angkutan darat merupakan salah satu Akses yang dimiliki Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai yaitu Akses jalan Dogiyai Nabire, Dogiyai-Deiyai, Dogiyai-Mimika dan Dogiyai-Paniai. Untuk mencapai wilayah Kabupaten Dogiyai saat ini sudah terhubung dengan Kabupaten Nabire dengan jalur darat yang ditempuh kurang lebih 7 (tujuh) jam, dengan jarak tempuh kurang lebih 200 km (sumber: Wikipedia). Adapun penggunaan transportasi darat ke beberapa distrik dan kampung yaitu menggunakan jenis roda 4 (empat) dan roda dua (ojek).

Belum memadainya moda transportasi darat dan udara untuk keluar masuk wilayah kabupaten Dogiyai berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut juga akan mempengaruhi harga barang oleh karena itu perlu ada program-program yang dapat memecahkan masalah transportasi di kabupaten Dogiyai.

Selain itu belum tersedianya terminal transportasi darat yang memadai serta kurangnya armada angkutan yang bergerak dari titik asal ibukota kabupaten mengakibatkan lambatnya aktivitas bongkar muat di kabupaten Dogiyai.

b) Angkutan udara

Secara umum di Kabupaten Dogiyai terdapat satu lapangan terbang yaitu bandara Maonamani yang berada di Distrik Kamu, kemudian bandara ini memiliki ukuran landasan pacu 2.089 meter. Aktivitas bandara

Maonamani di Kabupaten Dogiyai antara lain melakukan aktivitas angkutan penumpang datang dan pergi, bongkar muat barang maupun bagasi. Dengan adanya fasilitas angkutan udara tersebut dapat diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Dogiyai. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS, aktivitas bandar udara Maonamani di tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.15.
Aktivitas Angkutan Udara Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2016

Indikator	Datang/Bongkar	Berangkat/Muat
Pesawat yang melintas	174	227
Penumpang	2.490	2.121
Bagasi	1.542	n.a
Barang	5.892	180

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Untuk meningkatkan aktivitas bongkar/muat di bandara Monamani perlu ditingkatkan sarana dan prasarana perhubungan udara yang memadai di kabupaten Dogiyai.

Tingginya biaya transportasi udara dan darat penghubung antar kabupaten menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah di kabupaten Dogiyai, sehingga perlu dukungan pemerintah terkait urusan perhubungan yang dapat menekan biaya transportasi udara maupun darat.

c) Telekomunikasi

Kondisi pembangunan Kabupaten Dogiyai juga masih terkendala dengan sarana telekomunikasi, di Kabupaten Dogiyai hanya memiliki satu Tower sarana telekomunikasi yang terletak di ibu kota Kabupaten Dogiyai. Sarana telekomunikasi di Kabupaten Dogiyai sampai dengan saat ini belum tersedia di beberapa Distrik dan Kampung, sehingga masih sulit dalam mengakses informasi. Sampai sejauh ini tercatat hanya terdapat 1 (satu) warung telekomunikasi (wartel) yang terletak di Kampung Ekemanida. (BPS Kabupaten Dogiyai, 2017)

Belum memadainya cakupan dan akses pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat serta belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informatika memperlambat dalam mengekspos informasi yang terjadi di kabupaten Dogiyai sehingga masyarakat yang ada di distrik maupun kampung-kampung akan tetap hidup terisolasi dengan lingkungannya.

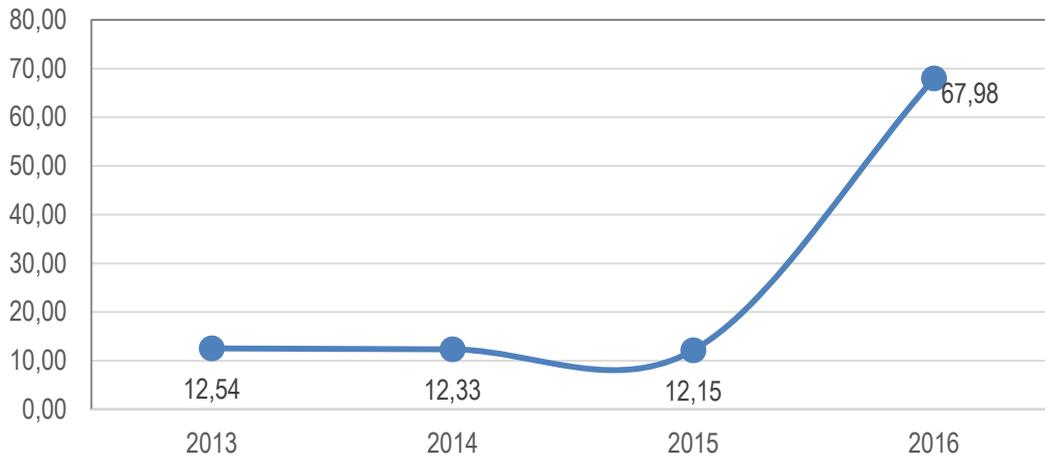
Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan daerah juga menghambat pemberitaan mengenai permasalahan-permasalahan maupun keberhasilan-keberhasilan yang terjadi di daerah. Hal tersebut juga menyebabkan masyarakat sulit dalam berinteraksi dengan dunia luar serta masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses atau mendapatkan perkembangan informasi mau pun pengetahuan yang ada diluar kabupaten Dogiyai.

2.3.1.5. Urusan Sosial

Tempat ibadah yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk di 29 kabupaten/kota Provinsi Papua dapat dilihat dari rasio tempat ibadah per satuan penduduk.

Secara keseluruhan rasio ketersediaan sarana beribadah di Kabupaten Dogiyai selama kurun waktu 2013-2016 cenderung mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2016 tercatat rata-rata rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk di Kabupaten Dogiyai mencapai 67,98 tempat ibadah untuk 1000 penduduk.

Gambar 2.46.
Rasio Tempat Ibadah per 1000 penduduk
Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016

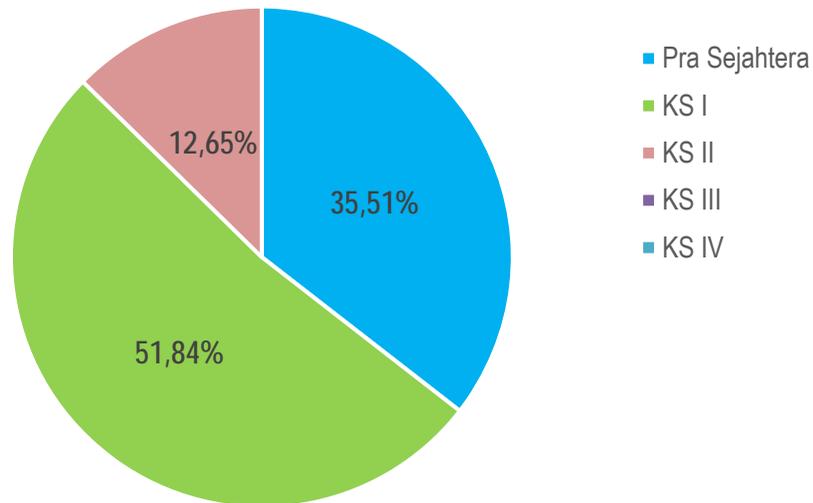


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.3.1.6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Persentase jumlah keluarga yang pra sejahtera masih sangat tinggi di Kabupaten Dogiyai, hal tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat di Kabupaten Dogiyai yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Gambar 2.47.
Persentase Jumlah Keluarga Menurut Klasifikasi Keluarga
Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

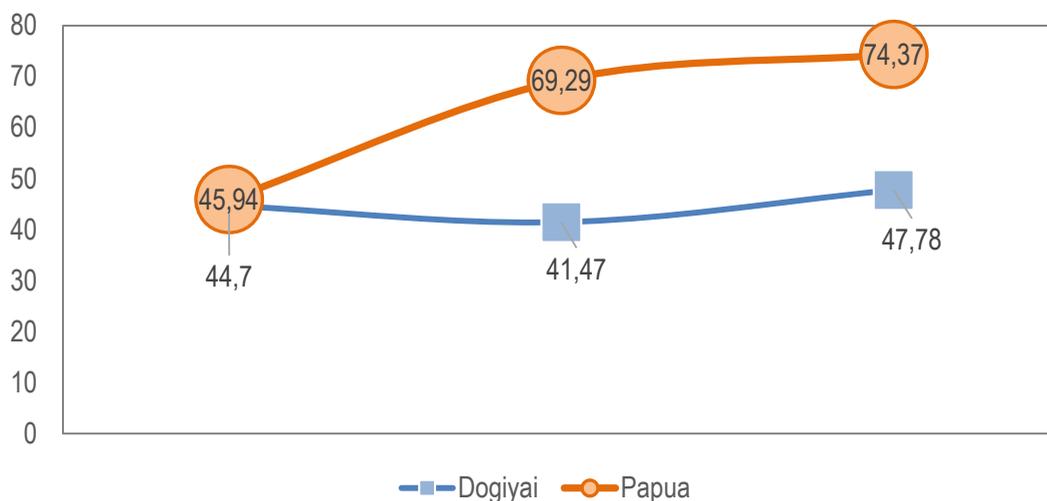
Tingginya jumlah penduduk miskin, fakir miskin dan keluarga prasejahtera salah satunya disebabkan minimnya kualitas dan kuantitas data dan informasi mengenai jumlah fakir miskin, keluarga prasejahtera, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan lain-lain sehingga pemerintah kabupaten Dogiyai perlu melakukan pendataan bagi masyarakat miskin secara menyeluruh.

Masih belum optimalnya pelayanan dokumen kependudukan, dan minimnya sarana dan prasarana terhadap pelayanan publik di kabupaten Dogiyai menyebabkan rendahnya masyarakat Dogiyai yang mempunyai dokumen-dokumen kependudukan.

Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat di kabupaten Dogiyai terhadap dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil. Pada tahun 2016 terlihat hanya 41,47 persen masyarakat Dogiyai yang mempunyai nomor induk kependudukan hingga tahun 2017 meningkat menjadi 47,78 persen yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dokumen kependudukan.

Cukup tingginya tingkat urbanisasi ke pusat kabupaten seiring dengan pembangunan yang lebih berfokus di pusat kabupaten Dogiyai menyebabkan meningkatnya keluarga miskin di kampung-kampung karena perputaran perekonomian hanya terfokus di pusat kabupaten.

Gambar 2.48.
Persentase Penduduk 17 Tahun Ke Atas yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kabupaten Dogiyai Dan Papua 2017



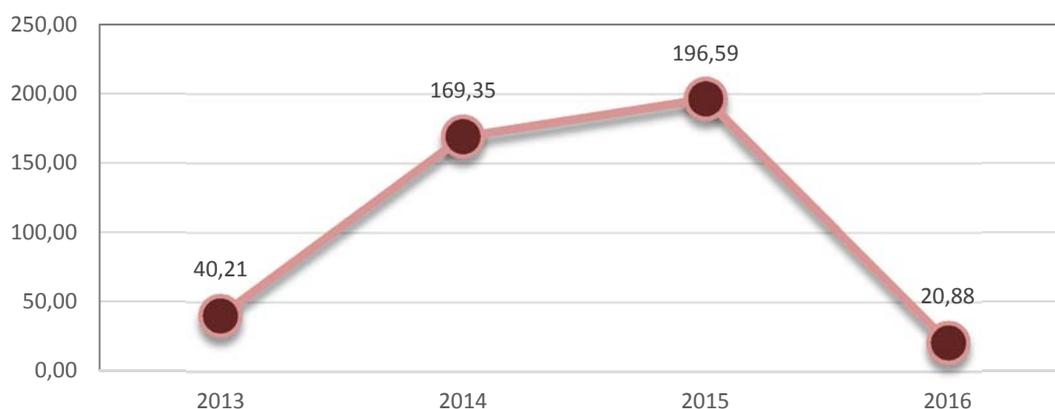
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.3.1.7. Urusan Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Secara umum angka rasio perlu ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah pandangan generasi tentang pentingnya KB.

Berdasarkan data tahun 2013-2016, Kabupaten Dogiyai menunjukkan rasio akseptor KB yang cenderung menurun, meskipun sempat mengalami peningkatan dari tahun 2014-2015.

Gambar 2.49.
Rasio Akseptor KB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Persentasi perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin dan tidak ber-KB dan alasan utama tidak menggunakan KB di Kabupaten Dogiyai banyak yang menyatakan tidak tahu dengan adanya program KB sebesar 26,09 persen pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan keadaan di provinsi Papua perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin dan tidak ber-KB menyatakan alasan lainya atau kurang setuju dengan penggunaan KB.

Gambar 2.50.
Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Tidak ber-KB dan Alasan Utama Tidak Menggunakan Alat/Cara KB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 (dalam persen)

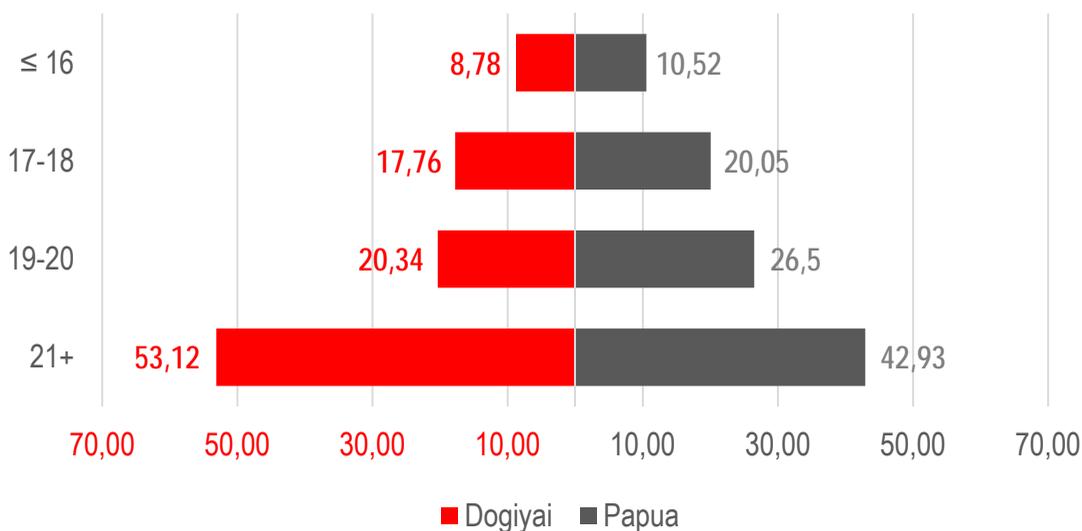


Sumber : susenas 2017

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan keluarga yang sejahtera ditunjukkan dengan belum optimalnya kesehatan reproduksi pada perempuan seperti masih banyaknya perempuan yang tidak tahu atau tidak mau menggunakan alat KB. Hal tersebut mungkin disebabkan belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Persentase perempuan usia 10 tahun keatas di kabupaten Dogiyai menunjukkan hal yang cukup baik dimana usia 21+ sebesar 53,12 persen. Pada usia tersebut perempuan sudah dapat dikatakan dewasa sehingga layak untuk berumah tangga, namun masih banyak perempuan yang umurnya masih dibawah usia dewasa yang pernah menikah. Sehingga perlu adanya pelatihan, pembinaan dan pendampingan yang memadai untuk mewujudkan kemandirian perempuan

Gambar 2.51.
Persentase Perempuan usia 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin dan
kelompok Umur Kawin Pertama (UKP) Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2017 (dalam persen)



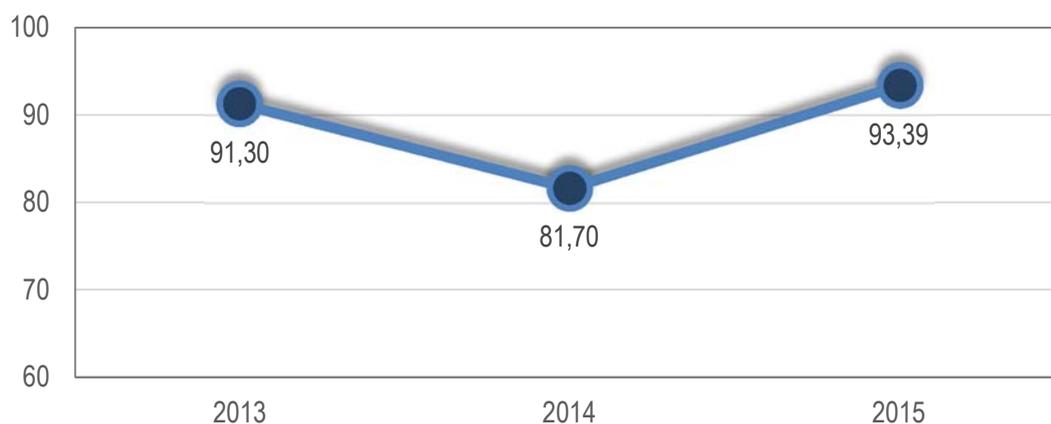
Sumber : susenas 2017

2.3.1.8. Urusan Ketenagakerjaan

Dari hasil publikasi ILO (International Labour Organization), pengelompokan penduduk menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Dogiyai cenderung berkembang stabil. Rata-rata TPAK Kabupaten Dogiyai tahun 2013-2015 sebesar 88,79 persen dengan rata-rata pertumbuhan 1 persen setiap tahunnya.

Gambar 2.52.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2015



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.3.1.9. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a) Perkembangan Koperasi

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua tahun 2017, perkembangan koperasi di Kabupaten Dogiyai terdapat 21 unit, 3 (tiga) di antaranya termasuk kategori koperasi aktif dan 18 lainnya di anggap koperasi tidak aktif. Kemudian jumlah anggota koperasi secara keseluruhan adalah sebanyak 630 orang, yang didominasi oleh anggota laki-laki sebanyak 502 orang dan perempuan sebanyak 128 orang. Namun sampai dengan tahun 2017, koperasi di Kabupaten Dogiyai belum ada yang masuk Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Tabel 2.16.
Kondisi Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2017

Indikator	Sub Indikator	Jumlah
Koperasi	Aktif (unit)	3
	Tidak aktif (unit)	18
	Total (unit)	21
Anggota	Laki-Laki (orang)	502
	Perempuan (orang)	128
	Jumlah (orang)	630
Modal sendiri	Nilai Modal (Rp.)	60.000.000
Modal luar	Nilai Modal (Rp)	197.000.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

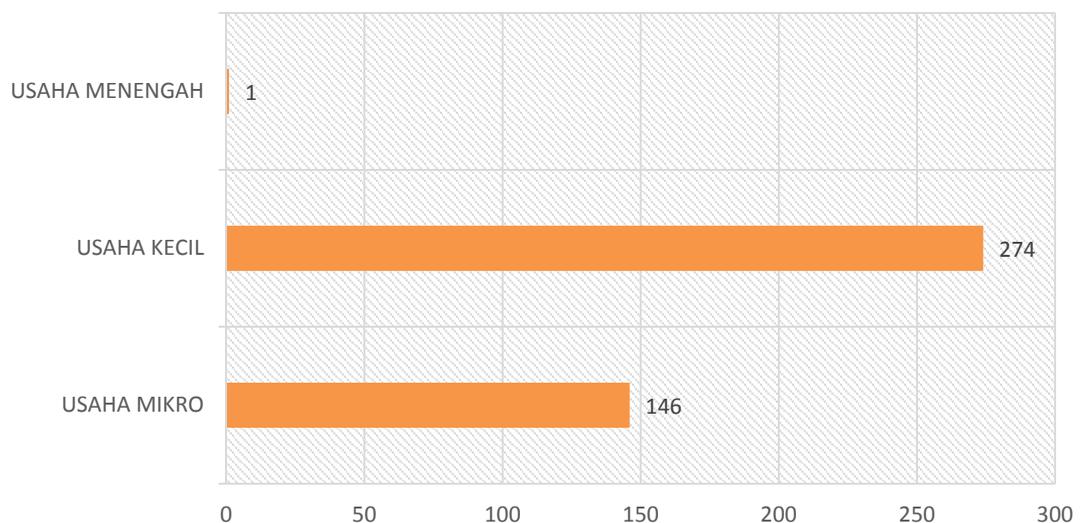
Selanjutnya, pemodal koperasi sampai dengan tahun 2017 masih didominasi oleh modal luar. Untuk modal sendiri yaitu mencapai Rp60 juta, sedangkan modal luar adalah sebesar Rp197 juta.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap koperasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan koperasi di kabupaten Dogiyai dan perlu dibentuk badan usaha kampung yang kiranya dapat menggenjot perekonomian masyarakat yang ada dikampung sehingga hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya OPD yang terkait urusan koperasi dan usaha kecil menengah.

b) Perkembangan UMKM

Perkembangan UMKM di Kabupaten Dogiyai sampai dengan tahun 2017 dinilai sangat bervariasi baik dari indikator klasifikasi UMKM, sektor yang bergerak di bidang UMKM, jenis pembiayaan UMKM sampai pada surat ijin usaha. Dalam melihat perkembangan tersebut secara rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

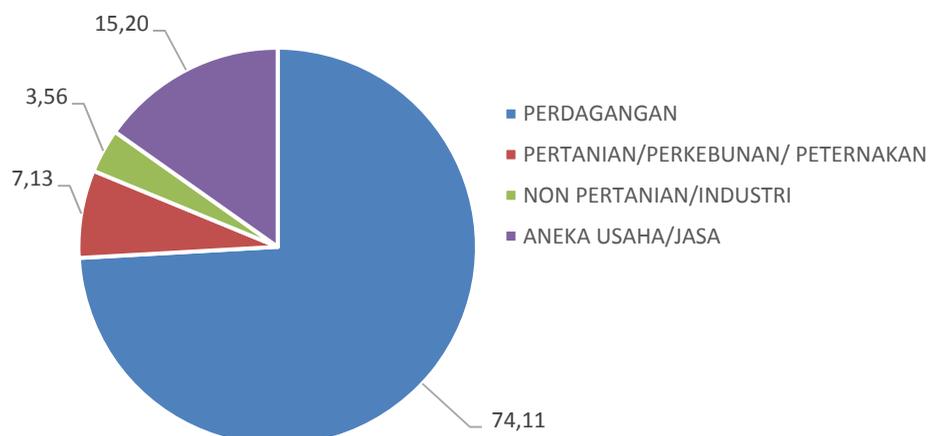
Gambar 2.53.
Klasifikasi UMKM Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2017 (Jenis Usaha)



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Klasifikasi jenis usaha yang masuk dalam kategori UMKM didominasi oleh usaha kecil yaitu mencapai 274 jenis usaha, kemudian diikuti usaha mikro sebesar 146 jenis usaha, dan yang paling sedikit adalah usaha menengah. Selain klasifikasi jenis usaha UMKM, sektor yang bergerak dalam bidang UMKM dapat dilihat pada sajian data berikut ini:

Gambar 2.54.
Sektor Yang Bergerak Bidang UMKM Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2017

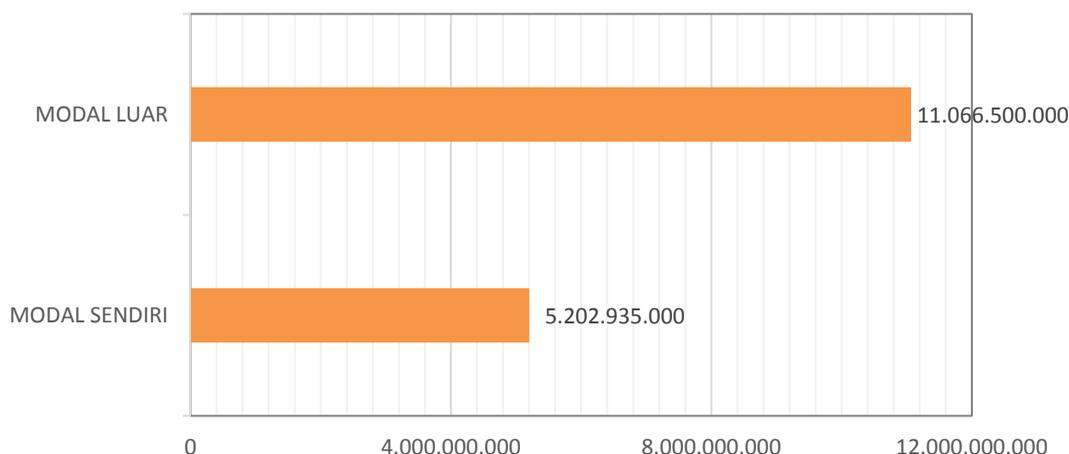


Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Belum berkembangnya usaha-usaha mikro dan kecil yang memanfaatkan potensi unggulan daerah salah satunya diakibatkan belum tersedianya data dan informasi mengenai potensi UMKM yang dapat diunggulkan.

Jenis usaha UMKM di Kabupaten Dogiyai sampai dengan tahun 2017 didominasi oleh sektor perdagangan yaitu mencapai 74,11 persen, sedangkan yang lainnya terbagi dalam jenis usaha sektor pertanian/perkebunan/peternakan, non pertanian/industri dan aneka usaha/jasa. Selanjutnya, pembiayaan UMKM di Kabupaten Dogiyai lebih besar yang bersumber dari modal luar dari pada modal sendiri, berikut sajian uraianannya:

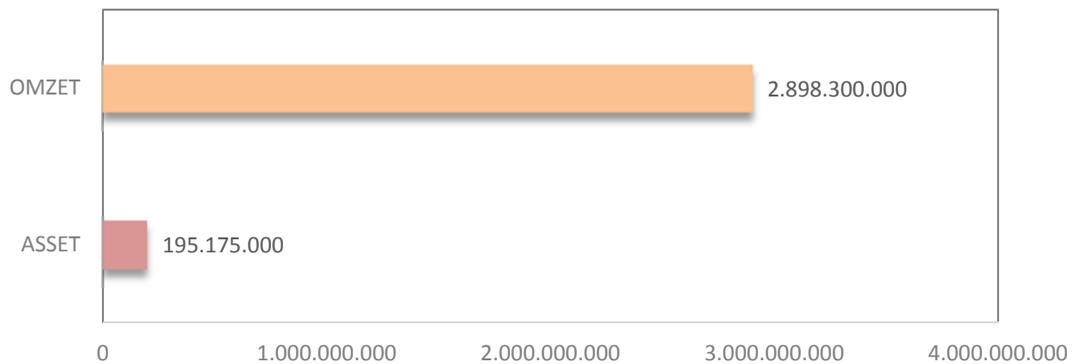
Gambar 2.55.
Pembiayaan UMKM Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2017



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Selain itu, omzet untuk UMKM di tahun 2017 adalah sebesar Rp2,898 miliar, sedangkan aset UMKM di tahun 2017 yaitu sebanyak Rp195 juta lebih yang dapat ditunjukkan pada sajian data berikut ini:

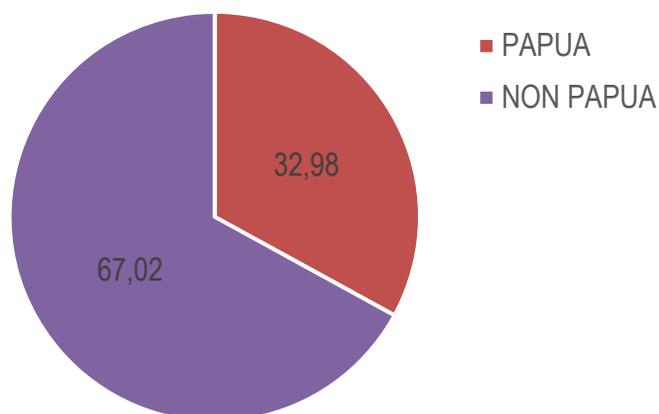
Gambar 2.56.
Asset dan Omzet UMKM Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2017



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Partisipasi masyarakat UMKM cenderung lebih banyak orang non Papua sebagai pelaku UMKM. Perkembangan partisipasi masyarakat dalam UMKM didominasi oleh masyarakat non Papua yaitu sebesar 67.02 persen, sedangkan untuk masyarakat asli Papua hanya berkisar 32.98 persen di tahun 2017.

Gambar 2.57.
Partisipasi Masyarakat Terhadap UMKM Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2017



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Selain perkembangan tersebut di atas, berikut ini juga akan diuraikan mengenai Surat Ijin Usaha (SIU) dari berbagai golongan UMKM. Surat ijin usaha golongan K tercatat sebanyak 192 SIU di 2014, dan di tahun 2015 ada penambahan sebesar 26 SIU, kemudian jenis surat ijin usaha M pada tahun 2014 ada sebanyak 155 SIU, dan terakhir adalah

surat izin usaha yang masuk dalam kategori usaha B adalah sebanyak 42 SIU dan di tahun 2015 sebesar 3 SIU.

Tabel 2.17.
Surat Perijinan Usaha Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2014-2015

Golongan	Tahun 2014	Tahun 2015
Surat izin usaha K	192	26
Surat izin usaha M	155	32
Surat izin usaha B	42	3
Total	179	61

Sumber : BPS Kabupaten Dogiyai, 2017 (data diolah)

2.3.2. Fokus Layanan Pilihan

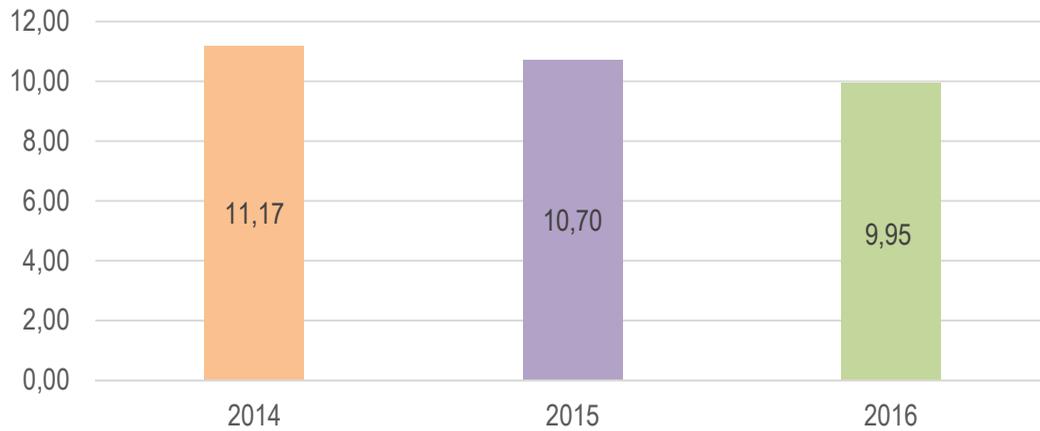
2.3.2.1. Urusan Pertanian

Kabupaten Dogiyai memiliki potensi pengembangan sektor pertanian yang tinggi mengingat adanya ketersediaan lahan yang besar. Akan tetapi, mengingat teknologi pertanian yang digunakan oleh masyarakat masih tradisional dan belum bersifat komersial, maka sektor pertanian di Kabupaten Dogiyai dapat dikatakan masih belum berkembang. Ditilik dari penggunaan lahan, dari lahan seluas 446,66 ribu hektar, sebagian besar lahan di Kabupaten Dogiyai merupakan hutan dimana lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan masih relatif kecil (kurang dari 1 persen).

a) Pertanian Tanaman Pangan

Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dogiyai dalam periode 2014-2016 terlihat mengalami penurunan setiap tahunnya. Jika diperhatikan kontribusi sektor tanaman pangan di tahun 2014 adalah sebesar 11,17 persen, kemudian turun di tahun 2015 menjadi 10,70 persen dan sampai pada tahun 2016 kembali lagi mengalami penurunan hingga mencapai 9,95 persen. Berdasarkan kondisi tersebut perlu menjadi catatan bagi pemerintah adalah meningkatkan budidaya pertanian bagi masyarakat di Kabupaten Dogiyai mengingat luasan lahan yang tersedia masih berpotensi untuk dikembangkan ke depannya. Berikut ini merupakan gambaran mengenai kontribusi tanaman dalam periode 2014-2016:

Gambar 2.58.
Kontribusi Tanaman Pangan Terhadap PDRB Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2014-2016
(dalam persen)



Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016 (data diolah)

Jenis tanaman pangan yang dibudidayakan oleh masyarakat di kabupaten Dogiyai antara lain adalah komoditi Padi, Jagung, Ubi Jalar, Ubi kayu, Kacang Tanah, Kacang Kedelai, Kacang Hijau, Keladi, dan Kentang. Dari data yang ada terlihat produktivitas tertinggi yaitu, ubi kayu sebesar 40 ton/ha dan keladi sebesar 20 ton/ha. Berikut ini adalah sajian data perkembangan beberapa jenis tanaman pangan di Kabupaten Dogiyai tahun 2016:

Tabel. 2.18
Luas Panen dan Produksi Komoditi Tanaman Pangan di Kabupaten Dogiyai, 2016

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton /Ha)
1	Padi/Paddy	4,00	8,00	2.00
2	Jagung/Maize	45,00	180,00	4.00
3	Ubi Jalar/Sweet Potatoe	370,00	7.000,00	18.92
4	Ubi kayu/Cassava	38,00	1.520,00	40.00
5	Kacang Tanah/Peanuts	69,00	276,00	4.00
6	Kacang Kedelai/Soy Beans	9,00	18,00	2.00
7	Kacang Hijau/Green Peanuts	1,50	3,00	2.00
8	Keladi/Black Radish	38,00	760,00	20.00
9	Kentang/Potatoe	4,60	46,00	10.00

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dogiyai

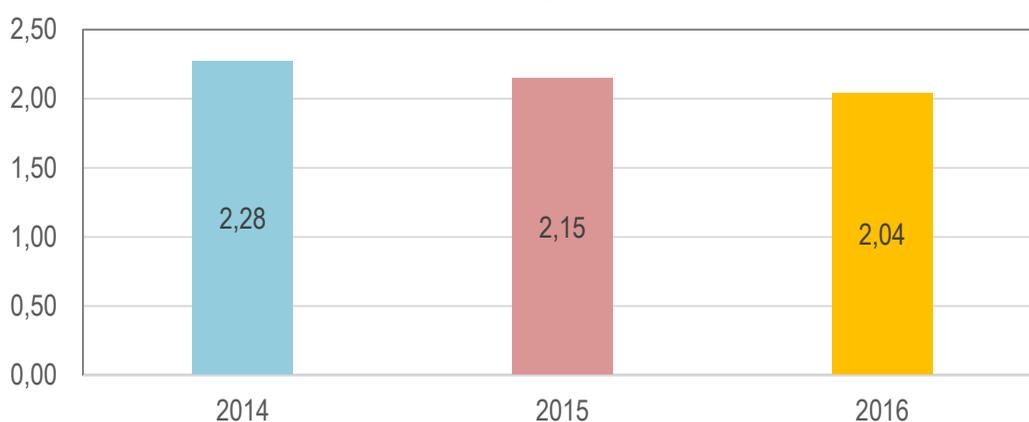
Berdasarkan data BPS, terdapat beberapa jenis komoditi yang terlihat produktivitasnya cukup tinggi diantaranya adalah tanaman ubi jalar, ubi kayu, keladi dan kentang dimana dari ke empat komoditi tersebut memiliki nilai produktivitas di atas 10 ton/ha di tahun 2016. Sedangkan jenis komoditi lainnya memiliki nilai produktivitas masih di bawah 10 ton/ha.

b) Pertanian Hortikultura

Pertanian hortikultura di Kabupaten Dogiyai berada di dataran tinggi di hampir seluruh wilayah distrik. Berbagai macam sayuran dan buah-buahan dihasilkan di Kabupaten Dogiyai meskipun dalam skala yang belum begitu besar. Dengan demikian, pertanian hortikultura di Kabupaten Dogiyai dapat dikatakan belum berorientasi komersial dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan subsisten masyarakat.

Selain itu, adapun kontribusi sektor tanaman hortikultura terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dogiyai dalam periode 2014-2016 terlihat mengalami penurunan. Jika diperhatikan kontribusi sektor tanaman hortikultura memberikan kontribusi setiap tahunnya masih di bawah 5 (lima) persen, dimana pada tahun 2014 adalah sebesar 2,28 persen, kemudian turun di tahun 2015 menjadi 2,15 persen dan sampai pada tahun 2016 kembali lagi mengalami penurunan hingga mencapai 2,04 persen. Berdasarkan kondisi tersebut perlu menjadi catatan bagi pemerintah adalah meningkatkan budidaya tanaman hortikultura bagi masyarakat di Kabupaten Dogiyai mengingat luasan lahan yang tersedia masih berpotensi untuk dikembangkan ke depannya. Berikut ini merupakan gambaran mengenai kontribusi tanaman hortikultura dalam periode 2014-2016.

Gambar 2.59.
Kontribusi Sektor Tanaman Hortikultura Semusim dan Tahunan lainnya Terhadap PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam persen)



Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016 (data diolah)

Perlunya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan produksi di sektor pertanian. Skala usaha pertanian masyarakat yang masih subsistem belum dapat meningkatkan produksi pertanian serta kurang memadainya sarana dan prasarana produksi

pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan juga menjadi salah satu faktornya.

Pemerintah kabupaten Dogiyai perlu melakukan pendampingan kepada para petani dengan cara menyiapkan tenaga penyuluh pertanian tanamanan pangan, perkebunan memadai.

c) Jenis Sayur-Sayuran

Komoditas sayuran yang dihasilkan Kabupaten Dogiyai terdiri dari berbagai jenis diantaranya komoditi Bawang merah, Bawang putih, Bawang daun, Bayam, Buncis, Cabai, Ketimun, Kubis, Lobak, Sawi, Terung, Tomat, Wortel, Kacang merah. Berikut ini adalah sajian data perkembangan beberapa jenis tanaman sayur di Kabupaten Dogiyai tahun 2016.

Tabel. 2.19
Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur-sayuran
menurut Jenis Sayuran di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2016 (Ton)

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton /Ha)
1	Bawang merah/Shallots	4,00	40,00	10.00
2	Bawang putih/Garlic	2,50	25,00	10.00
3	Bawang daun/Spring Onion	37,00	304,00	8.22
4	Bayam/Spinach	5,00	2,50	0.50
5	Buncis/Beans	7,00	35,00	5.00
6	Cabe/Chilli	4,50	3,60	0.80
7	Kacang panjang/Beanchs	-	-	
8	Kangkung/Frog	-	-	
9	Ketimun/Cucumber	4,50	135,00	30.00
10	Kubis/Cabbage	47,00	1.222,00	0.03
11	Lobak/Chinese Radish	0,50	1,50	3.00
12	Sawi/Mustard Greens	4,00	3,00	0.75
13	Terung/Eggplant	5,00	30,00	6.00
14	Tomat/Tomatoes	6,50	195,00	30.00
15	Wortel/Carrot	19,00	380,00	20.00
16	Kacang merah/Red Beans	3,50	14,00	4.00

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dogiyai

Berdasarkan data BPS, terdapat beberapa jenis komoditi yang terlihat produktivitasnya cukup tinggi diantaranya adalah jenis sayuran Bawang merah, Bawang putih, Ketimun, Tomat dan Wortel dimana dari ke lima komoditi tersebut memiliki nilai produktivitas di atas 10 ton/ha di tahun 2016. Sedangkan jenis komoditi lainnya memiliki nilai produktivitas masih di bawah 10 ton/ha.

d) Jenis Buah-Buahan

Komoditas buah yang dihasilkan Kabupaten Dogiyai terdiri dari berbagai jenis diantaranya komoditi Terong Belanda, Markisa, Alpukat, Nenas, Nangka, Jambu Air, Pisang, Labu Siam, Jeruk Kecil, Jeruk Besar dan Pepaya. Berikut ini adalah sajian data perkembangan beberapa jenis tanaman buah di Kabupaten Dogiyai tahun 2016.

Tabel. 2.20
Luas Panen dan Produksi Buah-buahan menurut Jenis
Buah di Kabupaten Dogiyai Tahun 2016 (Ton)

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton /Ha)
1	Terong Belanda/Dutch Eggplant	60,00	1.200,00	20.00
2	Markisa/Passionfruit	5,00	50,00	10.00
3	Alpukat/Avocado	3,70	14,80	4.00
4	Nenas/Pineapple	7,00	70,00	10.00
5	Nangka/Jackfruit	2,00	52,00	26.00
6	Jambu Air/ Water Apple	2,50	15,00	6.00
7	Pisang/Banana	8,00	90,00	11.25
8	Labu Siam/Chayote	23,00	184,00	8.00
9	Jeruk Kecil/Small Orange	3,00	24,00	8.00
10	Jeruk Besar/Large Orange	2,00	32,00	16.00
11	Pepaya/Papaya	2,00	40,00	20.00

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dogiyai

Berdasarkan data BPS, terdapat beberapa jenis komoditi yang terlihat produktivitasnya cukup tinggi diantaranya adalah jenis buah Terong Belanda, Markisa, Nenas, Nangka, Pisang, Jeruk Besar dan Pepaya dimana dari ke tujuh komoditi tersebut memiliki nilai produktivitas di atas 10 ton/ha di tahun 2016. Sedangkan jenis komoditi lainnya memiliki nilai produktivitas masih di bawah 10 ton/ha.

Rendahnya tingkat ketahanan pangan yang teridentifikasi dengan masih adanya kerentanan dan kerawanan pangan di daerah-daerah distrik/kampung pelosok sehingga perlu perubahan sistem dalam menangani pangan di daerah dengan menggunakan teknologi pangan yang ramah lingkungan.

Perlunya upaya mengembangkan keanekaragaman atau diversifikasi pangan lokal untuk menciptakan aneka produk yang dapat menjadi komoditas unggulan serta untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menciptakan swasembada pangan di kabupaten Dogiyai.

2.3.2.2. Urusan Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Dogiyai diantaranya adalah Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Cengkeh, Tebu, Kapok Randu, Kayu Manis dan Buah Merah.

Tabel. 2.21
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut
Jenis Tanaman di Kabupaten Dogiyai tahun 2016

No	Jenis Tanaman/	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa Dalam/ Coconut	1,00	-3,00
2	Kelapa Sawit/ Oil Palm	-	1,10
3	Kelapa Hibrida/ Coconut Hibrida	1,00	-
4	Kakao/ Cocoa	3,00	6,70
5	Kopi/ Coffee	150,00	7,50
6	Cengkeh/ Clove	-	75,00
7	Tebu/ SugarCane	50,00	-
8	Kapok Randu/ Kapok	-	70,00
9	Kayu Manis/ Cinnamon	1,00	4,00
10	Jambu Mete/ Cashew nut	-	-
11	Lada/ Pepper	-	-
12	Pala/ Nutmeg	1,00	-
13	Sagu/ Sago	-	-
14	Pinang/ Areca nut	-	-
15	Buah Merah/ Red Fruit	46,00	2.300,00

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dogiyai

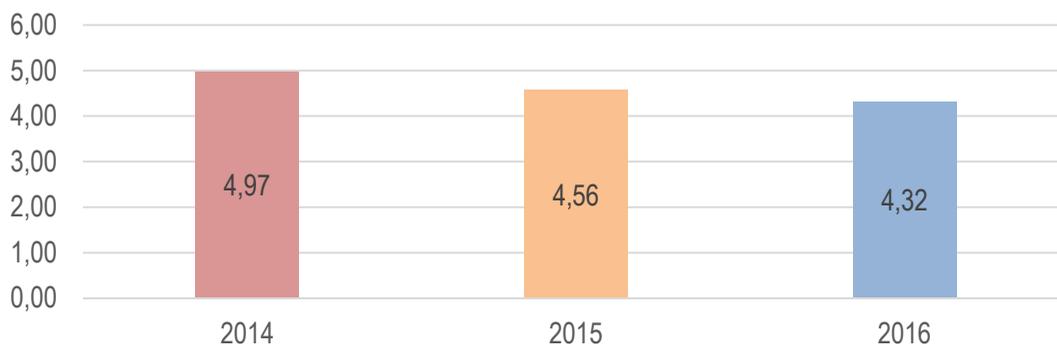
Dari berbagai komoditas tanaman perkebunan yang dibudidayakan masyarakat, komoditas kopi dan buah merah merupakan komoditas utama tanaman perkebunan dilihat dari sisi luas area dan produksinya. Kedua komoditas tersebut tersebar merata di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Dogiyai. Luas area tanaman kopi di Kabupaten Dogiyai pada tahun 2016 adalah seluas 150 ha dengan produksi mencapai 7,5 ton, sedangkan luas tanaman buah merah adalah seluas 46 ha dengan produksi mencapai 2.300 ton di tahun 2016.

2.3.2.3. Urusan Peternakan

Adapun kontribusi sektor Peternakan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dogiyai dalam periode 2014-2016 terlihat terjadi penurunan. Jika diperhatikan kontribusi sektor peternakan memberikan kontribusi setiap tahunnya masih di bawah 10 (sepuluh) persen, dimana pada tahun 2014 adalah sebesar 4,97 persen, kemudian turun di tahun 2015 menjadi 4,56 persen dan sampai pada tahun 2016 kembali lagi mengalami penurunan hingga mencapai 4,32 persen. Berdasarkan kondisi tersebut perlu menjadi catatan bagi pemerintah dalam meningkatkan budidaya peternakan bagi

masyarakat di Kabupaten Dogiyai. Berikut ini adalah kontribusi sektor peternakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

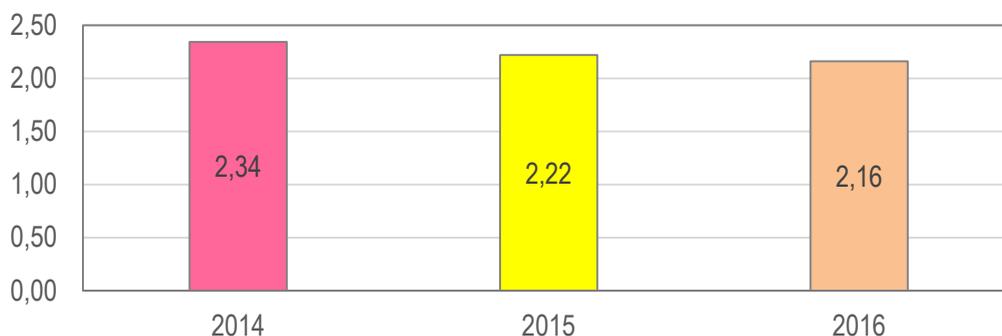
Gambar 2.60.
Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam persen)



Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016 (data diolah)

Selain itu, kontribusi jasa pertanian dan perburuan Kabupaten Dogiyai juga masih di bawah 5 persen, bahkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Dimana pada tahun 2014 kontribusinya adalah sebesar 2,34 dan sampai dengan tahun 2016 turun menjadi 2,16 persen.

Gambar 2.61.
Kontribusi Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan Terhadap PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam persen)



Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016 (data diolah)

Subsektor peternakan merupakan subsektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Dogiyai. Ketersediaan rumput sebagai pakan ternak yang cukup melimpah, sehingga relatif mudah dan cepat diperoleh serta dengan biaya yang sangat murah. Ternak yang banyak diproduksi oleh masyarakat di Kabupaten Dogiyai antara lain adalah Sapi, Kambing dan Babi. Perkembangan kinerja aktivitas usaha ternak yang dikelola oleh masyarakat di Kabupaten Dogiyai selama periode 2014-2016 yang terlihat pada tabel dibawah adalah produksi ternak babi lebih banyak

dibanding ternak lainnya. Sampai dengan tahun 2016 produksi daging babi mencapai 193,54 ton, kemudian di urus ke dua yaitu produksi daging sapi sebesar 57,30 ton dan terakhir adalah produksi daging kambing sebesar 3,54 ton.

Tabel. 2.22
Produksi Daging Ternak Akhir Tahun menurut Jenis Ternak di Kabupaten Dogiyai Tahun 2015

No	Komoditi	Produksi (Ton)
1	Sapi	57,30
2	Kerbau	-
3	Kuda	-
4	Kambing	3,54
5	Domba	-
6	Babi	193,54

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dogiyai

Selain produksi ternak besar di atas, produksi daging ternak unggas juga terdapat di Kabupaten Dogiyai antara lain ayam kampung dan itik. Perkembangan ternak unggas sampai dengan tahun 2015 terlihat produksi ternak ayam kampung lebih dominan jika dibandingkan dengan produksi daging itik yang hanya sekitar 6,7 ton.

Tabel. 2.23
Produksi Ternak Unggas Akhir Tahun menurut Jenis Unggas di Kabupaten Dogiyai Tahun 2015

No	Komoditi	Produksi (Ton)
1	Ayam kampung	30,81
2	Ayam ras pedaging	-
3	Ayam ras petelur	-
4	Itik/Entok	6,74

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dogiyai

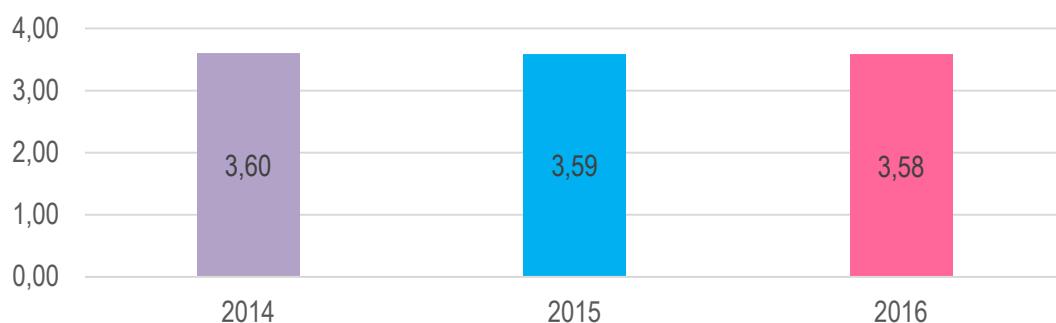
2.3.2.4. Urusan Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan mencakup semua upaya memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan ekologi, dan sosial masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat terutama masyarakat tempatan. Oleh karena itu, potensi sektor kehutanan harus diolah sebaik mungkin sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Dogiyai. Pengembangan sektor kehutanan harus melingkupi berbagai usaha pemanfaatan hutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup dalam arti luas, pada hakekatnya harus berprinsip dapat memberikan manfaat optimal jangka panjang,

meliputi sistem dan manajemen pengelolaan kawasan hutan beserta isinya sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat agar sejahtera dan berkeadilan. Namun pada kenyataannya banyak dijumpai kejanggalkan-kejanggalkan dalam sistem dan manajemen pengelolaan hutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdampak negatif bahkan sudah mencapai pada taraf “ancaman hari depan”. Untuk itu perlu adanya peninjauan terhadap sistem dan manajemen pengelolaan hutan beserta peraturan dan pengaturan yang berlaku baik langsung maupun yang saling terkait.

Sampai dengan tahun 2016, kontribusi sektor kehutanan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dogiyai mencapai 3,58 persen. Perkembangan kontribusi dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan.

Gambar 2.62.
Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam persen)



Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016 (data diolah)

Luas lahan hutan sampai dengan tahun 2016 mencapai 446,6 Ha, dengan komposisi lahan terdiri dari Kawasan suaka alam dan pelestarian alam, Hutan lindung, Hutan produksi terbatas, Hutan produksi dan Hutan produksi yang dapat dikonversi. Berikut ini adalah sajian data penggunaan lahan hutan di tahun 2016:

Tabel. 2.24
Luas Hutan Menurut Peta Paduserasi Kabupaten Dogiyai Tahun 2016 (Ha)

No	Jenis Fungsi Hutan	Luas Area (Ha)	%
1	Kawasan suaka alam dan pelestarian alam/ Natural Reserve Area and Nature Conservation	98,078.46	21.96
2	Hutan cagar alam/Forest Nature Reserve	-	

No	Jenis Fungsi Hutan	Luas Area (Ha)	%
3	Hutan taman nasional/Forest National Park	-	-
4	Hutan wisata alam/Forest Tourism Nature	-	-
5	Suaka alam laut dan Daratan/Marine Sanctuary and Mainland	-	-
6	Suaka alam perairan/Sanctuary Bodies	-	-
7	Hutan lindung/Protected Forest	4,416.42	0.99
8	Hutan produksi terbatas/Limited Production Forest	242,729.73	54.35
9	Hutan produksi/Production Forest	38,524.42	8.63
10	Hutan produksi yang dapat dikonversi/Convertible	62,886.30	14.08
Jumlah/Total		446,635.33	100.00

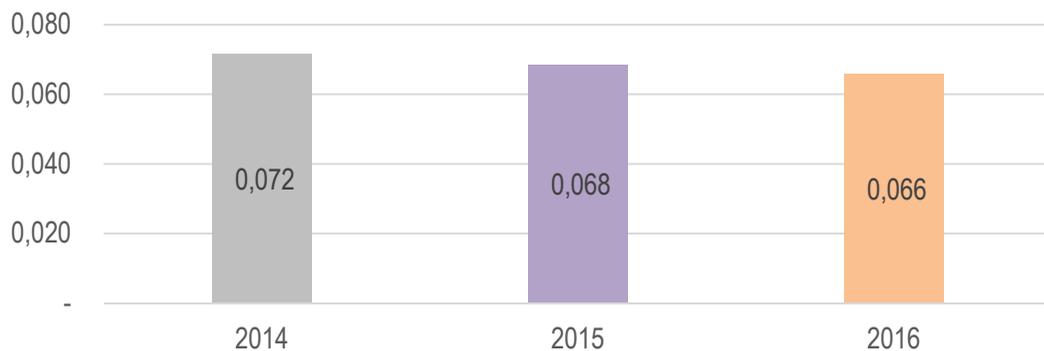
Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Dogiyai

Penggunaan lahan hutan di Kabupaten Dogiyai selama tahun 2016, hutan produksi terbatas masih mendominasi yaitu sebesar 54,35 persen, kemudian Kawasan suaka alam dan pelestarian alam yaitu sebesar 21,96 persen. Sedangkan penggunaan lahan hutan lainnya masih berkisar di bawah 15 persen. Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk budidaya dan konservasi lahan dan pelestarian sumber daya kehutanan sehingga perlu adanya regulasi yang terkait konservasi hutan

2.3.2.5. Urusan Perikanan

Sampai sejauh ini kontribusi sektor perikanan terhadap pergerakan perekonomian di Kabupaten Dogiyai masih di bawah 1 persen. Dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir kontribusi sektor perikanan cenderung mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 0,072 persen, kemudian di tahun 2015 sebesar 0,068 persen dan menurun di tahun 2016 menjadi 0,066 persen.

Gambar 2.63.
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB
Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016
(dalam persen)



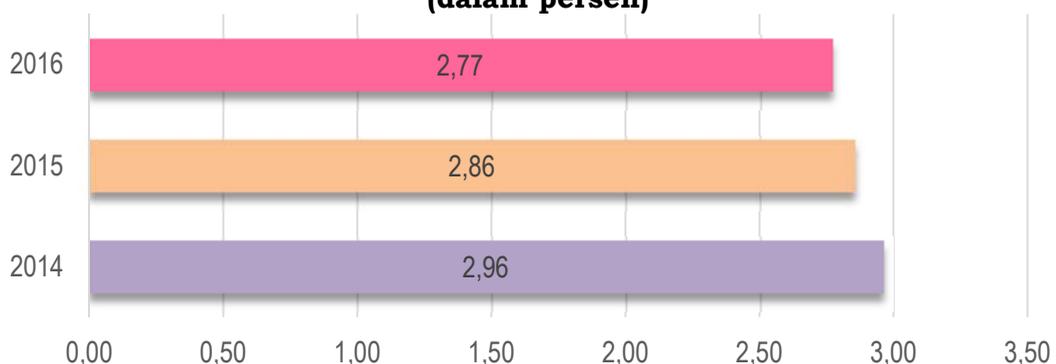
Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016 (data diolah)

Kurangnya sumber benih unggul dapat menurunkan jumlah produksi perikanan serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam budi daya ikan masih sangat rendah dan masih tingginya budaya subsisten dan meramu di sektor perikanan. Perlu adanya pendampingan tenaga penyuluh budi daya ikan yang memadai karena itu pemerintah perlu mendukung program-program yang terkait urusan perikanan juga dalam menyediakan data dan informasi tentang pembudidayaan ikan.

2.3.2.6. Urusan Sumber Daya Mineral

Sampai sejauh ini kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pergerakan perekonomian di Kabupaten Dogiyai masih bergerak lamban dan cenderung mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 2,96 persen, kemudian di tahun 2015 sebesar 2,86 persen dan menurun di tahun 2016 menjadi 2,77 persen.

Gambar 2.64.
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB
Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016
(dalam persen)

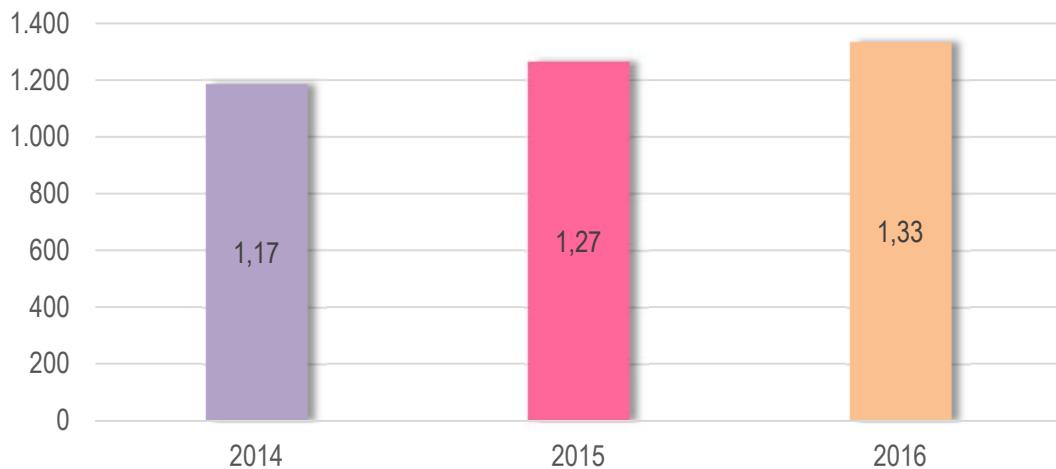


Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016 (data diolah)

2.3.2.7. Urusan Perdagangan

Sub sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dinilai juga masih bergerak lambat, namun kontribusi kontribusinya sepanjang tahun 2014-2016 cenderung bergerak terus meningkat. Meskipun kontribusi sub sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya masih terbilang rendah, namun di antara beberapa sektor lainnya, sub sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya terus mengalami perbaikan (meningkat) dalam perkembangan perekonomian di Kabupaten Dogiyai. Dimana pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 1,17 persen, kemudian di tahun 2015 sebesar 2,27 persen dan terus meningkat di tahun 2016 menjadi 1,33 persen.

Gambar 2.65.
Kontribusi Sektor Perdagangan Mobil, Motor, dan Reparasi Terhadap Total PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam persen)



Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016 (data diolah)

Selain itu, sampai sejauh ini kontribusi sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap pergerakan perekonomian di Kabupaten Dogiyai terbilang cukup pesat dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 10,17 persen, kemudian di tahun 2015 sebesar 10,23 persen dan terus meningkat di tahun 2016 menjadi 10,94 persen.

Kontribusi perdagangan besar dan eceran setiap tahun mengalami peningkatan namun pemerintah juga perlu melakukan pendataan pada seluruh pedagang yang ada di kabupaten Dogiyai serta menata pedagang kecil dan memberikan subsidi pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil lokal dalam upaya menghidupkan usaha mikro dan kecil lokal.

Gambar 2.66.
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016 (dalam persen)



Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016 (data diolah)

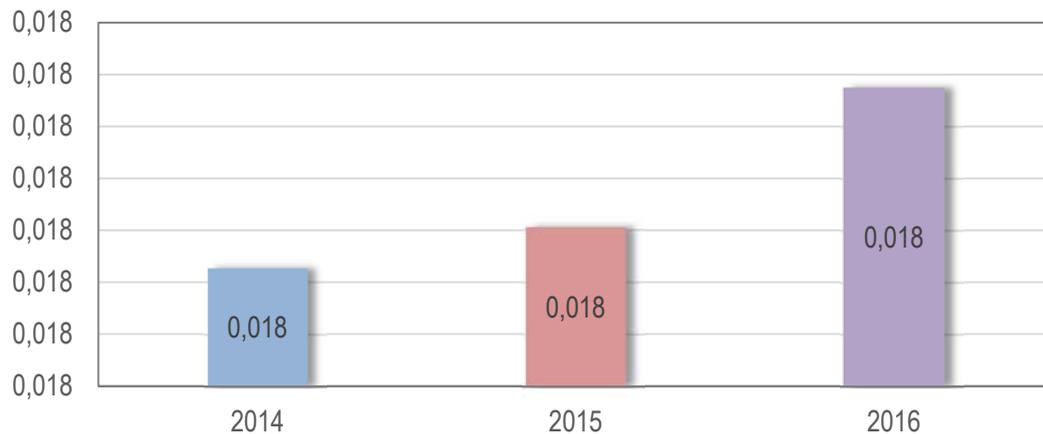
Promosi produk-produk unggulan lokal perlu dioptimalkan untuk mengangkat nilai produk tersebut sehingga memiliki daya saing. Dengan demikian produk-produk lokal tersebut dapat menghidupkan perekonomian masyarakat di kabupaten Dogiyai khususnya bagi usaha mikro dan kecil lokal.

2.3.2.8. Urusan Perindustrian

Pembentuk sektor perindustrian sepanjang tahun 2014-2016 di Kabupaten Dogiyai antara lain adalah sub sektor Industri Makanan dan Minuman, sub sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya dan sub sektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Berdasarkan data yang dihimpun ke tiga sub sektor tersebut berkontribusi masih di bawah 1 persen.

Kontribusi sub sektor Industri Makanan dan Minuman dalam 3 (tiga) tahun terakhir belum mengalami peningkatan, meskipun kontribusi terhadap perekonomian masih terbilang rendah. Sampai dengan tahun 2016 kontribusi sub sektor Industri Makanan dan Minuman hanya mampu memberikan sebesar 0,018 persen.

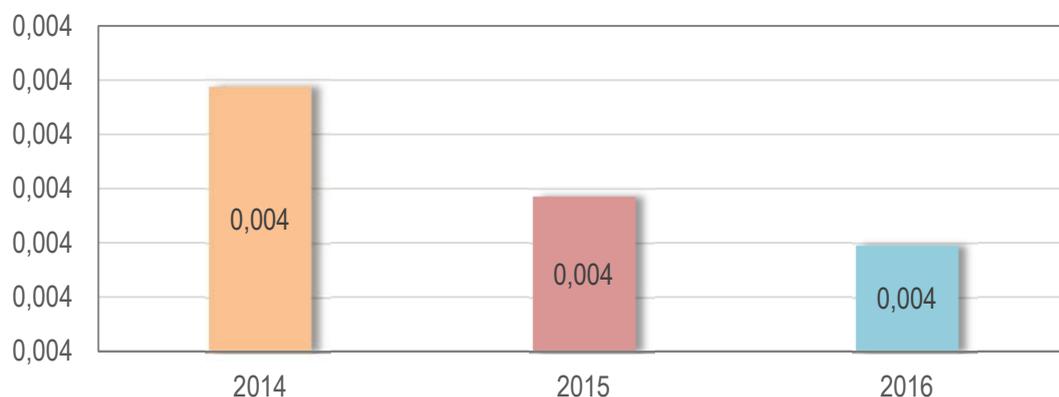
Gambar 2.67.
Industri Makanan dan Minuman Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2014-2016



Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016 (data diolah)

Berbeda dengan sub sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya kontribusinya dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan, dan terbilang rendah. Sampai dengan tahun 2016 kontribusi sub sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya hanya mampu memberikan sebesar 0,004 persen.

Gambar 2.68.
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman
dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
Tahun 2014-2016



Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016 (data diolah)

Selanjutnya, kontribusi sub sektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan dalam periode 2014-2016 mengalami pelambatan dan cenderung terus bergerak turun. Sampai dengan tahun 2016 kontribusi sub sektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan hanya mampu memberikan sebesar 0,033 persen.

Gambar 2.69.
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan Tahun 2014-2016 (dalam persen)



Sumber : PDRB Kabupaten Dogiyai 2016 (data diolah)

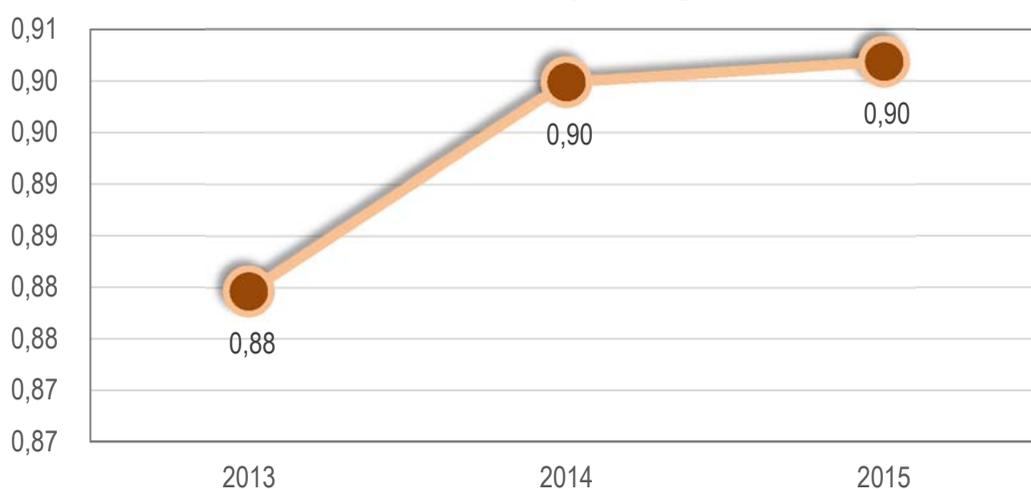
Belum terlaksananya pengembangan pusat-pusat industri mikro dan kecil berbasis kerakyatan sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk mengembangkan industri kecil berbasis kerakyatan

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Jika perekonomian Papua ditinjau secara spasial (kewilayahan), khususnya tanpa melibatkan sektor pertambangan, Kabupaten Dogiyai sepanjang tahun 2013-2015 rata-rata hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 1 persen terhadap pembentukan PDRB Papua. Meskipun kontribusinya tidak begitu besar, namun perkembangannya cukup positif hingga tahun 2015.

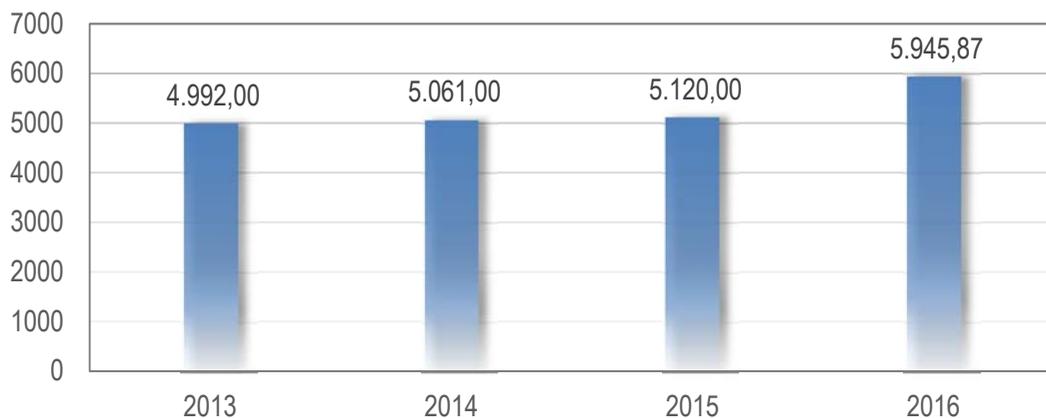
Gambar 2.70.
Kontribusi Kabupaten Dogiyai Terhadap Total PDRB Wilayah Papua Tahun 2013-2015 (dalam persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

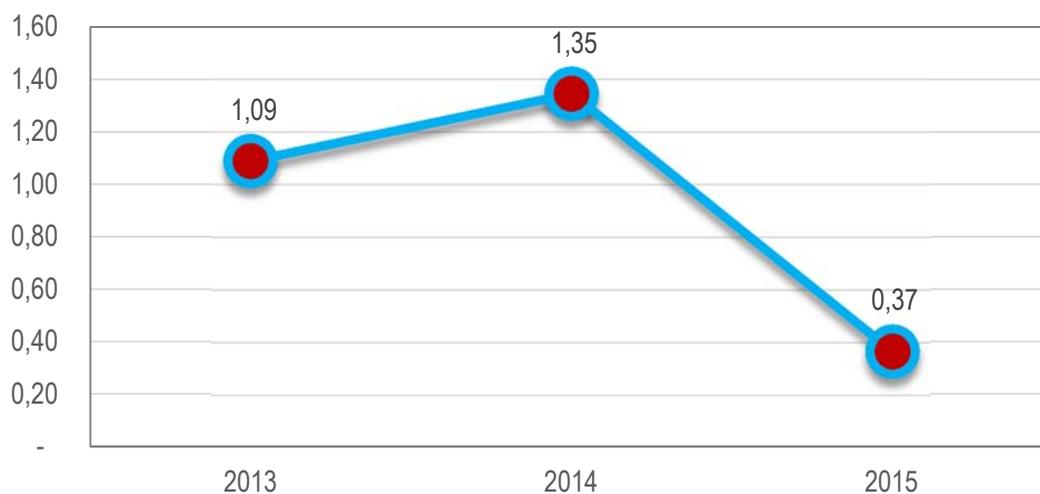
Pengeluaran RT untuk konsumsi di Kabupaten Dogiyai selama kurun waktu empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Rata-rata pengeluaran RT sebesar Rp5.945 juta selama kurun waktu 2013-2016, dengan pertumbuhan yang positif mencapai 6,22 persennya.

Gambar 2.71.
Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016 (dalam rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Gambar 2.72.
Tingkat Kemandirian Fiskal Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015 (dalam persen)

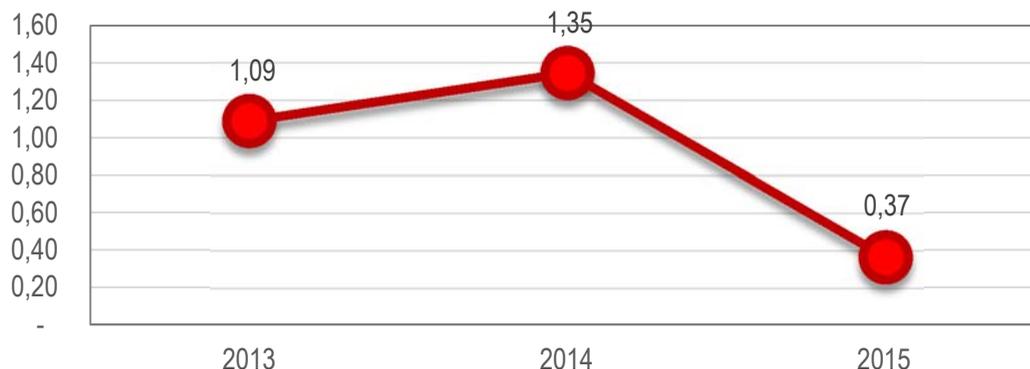


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Kontribusi PAD terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Dogiyai cenderung menurun setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2013 persentase PAD adalah sebesar 1,09 persen, kemudian di meningkat tahun 2014 menjadi 1,35 persen, namun pada tahun 2015 persentase PAD terhadap Dana Perimbangan menurun menjadi sebesar 0,37 persen. Rata-rata dalam kurun waktu tiga tahun belakangan

persentase PAD terhadap Dana Perimbangan menurun sebesar -1 persen pertahunnya.

Gambar 2.73.
Persentase PAD terhadap Transfer
Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Sarana Transportasi

Kabupaten Dogiyai adalah kabupaten yang wilayahnya terletak di pegunungan tengah Pulau Papua, memiliki posisi strategis bagi lalu lintas perdagangan dan transportasi antara kabupaten di daerah pesisir dan daerah pegunungan di wilayah Papua. Sarana moda transportasi yang tersedia sejauh ini adalah angkutan transportasi darat dan angkutan transportasi udara. (BPS Kabupaten Dogiyai, 2017)

2.4.2.2. Fasilitas Jasa Perbankan

Sampai sejauh ini fasilitas jasa perbankan di Kabupaten Dogiyai hanya terdapat satu jasa perbankan yaitu Bank Pembangunan Daerah dan terdiri dari 1 (satu) unit (BPS Kabupaten Dogiyai, 2017).

2.4.2.3. Ketersediaan Hotel dan Penginapan

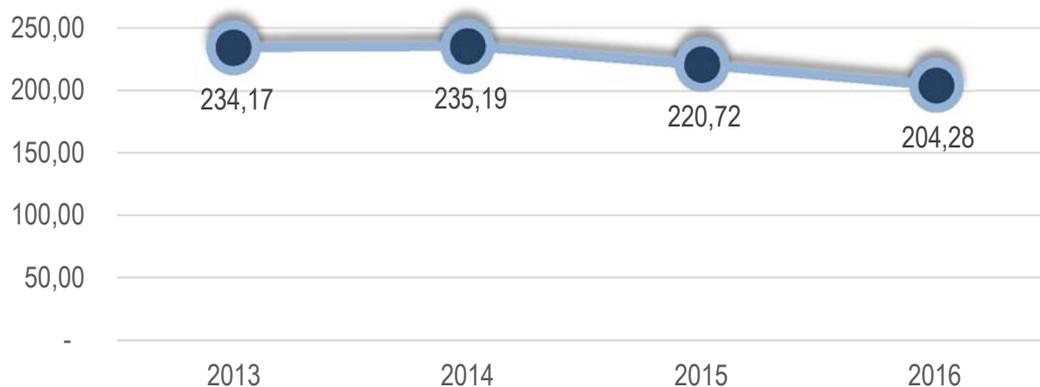
Tercatat sampai dengan tahun 2016, ketersediaan hotel dan penginapan di Kabupaten Dogiyai terbilang sangat minim. Jumlah penginapan yang tersedia di Kabupaten Dogiyai sebanyak 3 (tiga) unit yang terletak di kampung Maonemani dan Ekemanida. (BPS Kabupaten Dogiyai, 2017)

2.4.2.4. Indeks Kemahalan Kontruksi

Kemahalan harga sesungguhnya menjadi isu strategis dalam rangka pembangunan perekonomian di Kabupaten Dogiyai. Hal ini karena masalah tingkat kemahalan harga dianggap sebagai salah satu faktor mengapa

pengentasan kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua menjadi sangat sulit dilaksanakan.

Gambar 2.74.
Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016
(dalam indeks)



Sumber : BPS RI, 2017 (data diolah)

Indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Dogiyai cenderung mengalami penurunan yang cukup besar setiap tahunnya dengan angka rata-rata sebesar 223,59 persen selama kurun waktu empat tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan indeks kemahalan konstruksi di Kabupaten Dogiyai menurun sebesar -4,39 persen setiap tahunnya.

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

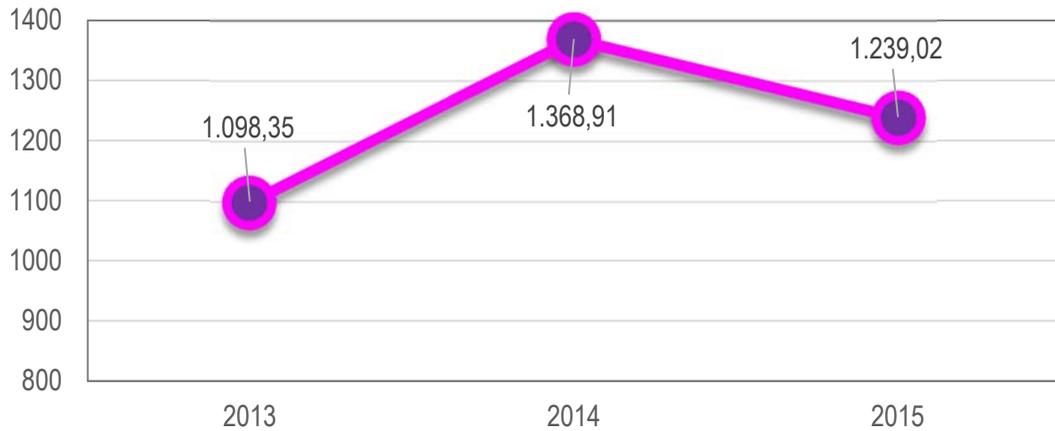
2.4.3.1. Kualitas Tenaga Kerja

Tingkat produktifitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (Labor/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktifitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktifitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor yang memerlukan tenaga kerja yang banyak (*labour intensive*) dan sektor padat modal (*capital intensive*). Tetapi, keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan tidak bisanya indikator ini disajikan pada publikasi kali ini.

Kontribusi tenaga kerja di Kabupaten Dogiyai terhadap pembentukan PDRB selama kurun waktu 2013-2015 cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata kontribusinya terhadap pembentukan nilai PDRB adalah sebesar Rp3.706 juta/TK dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,14 persen

setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, pada tahun 2013 kontribusi tenaga kerja di Kabupaten Dogiyai adalah sebesar Rp1.098,35 juta/TK, dan mengalami peningkatan sebesar 24,63 point atau sebesar Rp1.368,91 juta/TK di tahun 2014, kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2015 sebanyak 9,49 point atau sebesar Rp1.239,02 juta/TK.

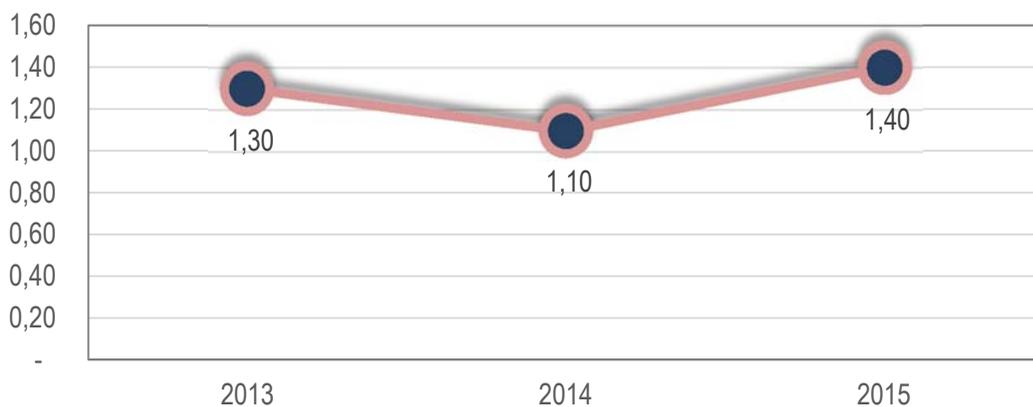
Gambar 2.75.
Produktifitas Tenaga Kerja Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2015
(dalam juta PDRB/TK org)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Persentase angkatan kerja yang berpendidikan tinggi di kabupaten Dogiyai tahun 2013-2015 cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata persentase angkatan kerja yang berpendidikan tinggi mencapai 1,27 persen setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 5,94 persen pertahunnya.

Gambar 2.76.
Persentase Angkatan Kerja Yang Berpendidikan Tinggi
Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam persen)



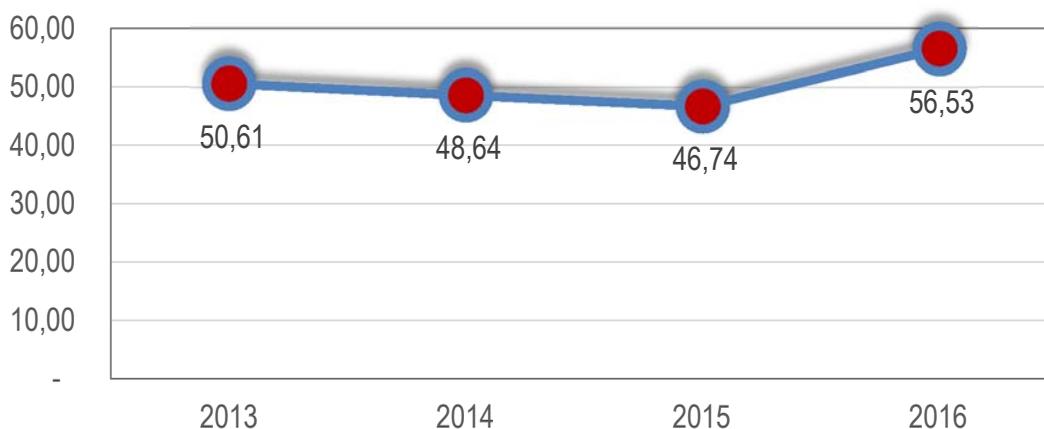
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.4.3.2. Tingkat Ketergantungan Penduduk

Angka beban ketergantungan menunjukkan banyaknya penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Rata-rata rasio ketergantungan penduduk usia non produktif dengan usia produktif di Kabupaten Dogiyai cenderung mengalami peningkatan yang artinya semakin besar beban yang ditanggung usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif atau tidak produktif lagi. Berdasarkan data tahun 2013-2016 tingkat ketergantungan di Kabupaten Dogiyai rata-rata mencapai 50,63 persen dengan rata-rata pertumbuhan hingga 4,38 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2013 tingkat ketergantungan mencapai 50,61 persen, kemudian terjadi penurunan di tahun 2014 dengan rasio sebesar 48,64 persen dan turun lagi sampai pada tahun 2015 sebesar 46,74 persen, kemudian meningkat di tahun 2016 sebesar 56,53 persen.

Gambar 2.77.
Rasio Ketergantungan Penduduk Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016

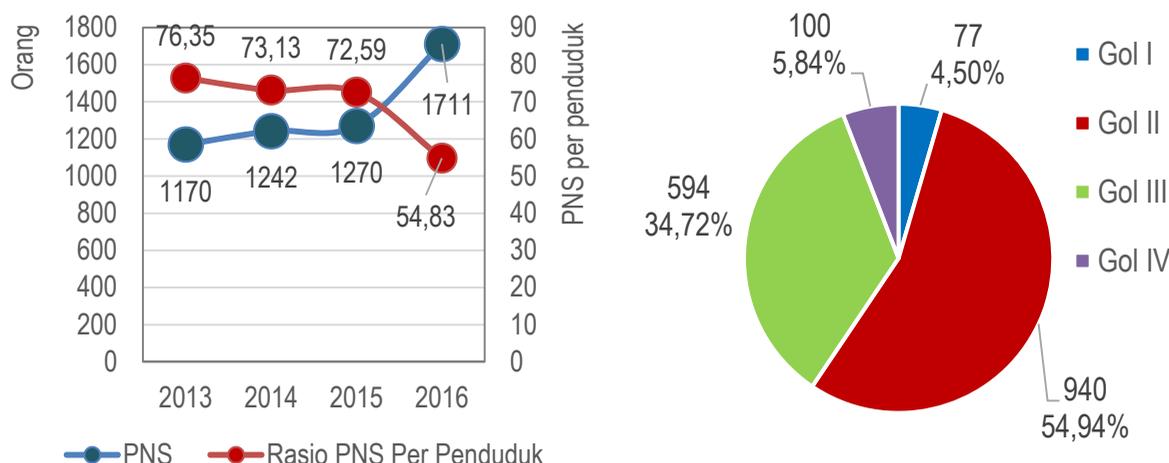


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.4.3.3. Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Berdasarkan data tahun 2013-2016 jumlah PNS di Kabupaten Dogiyai terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan jumlah PNS tahun 2013 sebanyak 1.170 orang menjadi 1.711 orang di tahun 2016. Adapun rasio PNS per satuan penduduk di Kabupaten Dogiyai bergerak terus menurun sepanjang tahun 2013-2016, rasio PNS per satuan penduduk di tahun 2013 adalah sebesar 76,35 orang sampai pada tahun 2016 menurun sebesar 54,38 orang per satuan penduduk.

Gambar 2.78.
Kapasitas PNS Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016



(a) Jumlah PNS dan Rasio PNS Per Penduduk

(b) Komposisi PNS Menurut Golongan

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Selain itu jika dilihat berdasarkan klasifikasi golongan, persentase PNS dengan golongan I yaitu sebesar 4,50 persen atau sebanyak 77 orang, kemudian golongan II sebesar 54,94 persen atau sebanyak 940 orang.

2.5. Aspek Pembangunan Kewilayahan

2.5.1. Fokus Pendidikan

Selain itu, salah satu bentuk layanan umum yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas layanan adalah di bidang pendidikan. Pelaksanaan layanan umum melalui urusan pendidikan ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dalam kapasitasnya sebagai sumberdaya utama yang sangat berperan dan menentukan kemajuan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan. Hal ini sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai mengingat adanya peran ganda yang dimiliki oleh sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pembangunan, yakni sebagai penyelenggara (subyek) dan penikmat (obyek) pembangunan.

Bentuk layanan urusan pendidikan yang telah dilaksanakan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pada bidang pendidikan bagi masyarakat, baik dalam bentuk

pendidikan formal, non formal maupun informal. Layanan pendidikan formal difokuskan pada upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun. Selain itu, juga akan ditingkatkan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi guna meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat. Kemudian pendidikan non formal ditujukan untuk memberikan keterampilan (vokasional), termasuk keterampilan hidup (*life skill*) kepada masyarakat.

Pendidikan non formal ditujukan pula untuk membekali sikap kemandirian dan berwiraswasta bagi masyarakat guna mendorong peningkatan aktivitas usaha yang dikelola secara mandiri dan pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a) Layanan Pendidikan Dasar (SD/MI)

Sarana dan prasarana pendidikan berupa tenaga guru dan sekolah yang memadai merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Layanan pendidikan dasar di Kabupaten Dogiyai telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan infrastruktur, guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), sehingga layanan pendidikan telah mampu diwujudkan dalam bentuk pelayanan pendidikan pada tingkat dasar (SD dan SMP) sampai pada tingkat menengah (SMA sederajat). Perkembangan capaian kinerja layanan pendidikan dasar di Kabupaten Dogiyai selama periode 2014-2016 dapat dilihat pada beberapa indikator, seperti distribusi fasilitas SD, distribusi ruang belajar SD, dan distribusi perpustakaan SD, sebagaimana pada pembahasan berikut:

Tabel 2.25.
Perkembangan Gedung Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan	5	5	5
2	Piyaiye	6	7	6
3	Mapia Barat	5	6	5
4	Mapia Tengah	7	9	7
5	Mapia	9	11	9
6	Dogiyai	4	5	4
7	Kamu Selatan	7	9	7

No	Distrik	2014	2015	2016
8	Kamu	6	10	6
9	Kamu Timur	5	6	5
10	Kamu Utara	9	12	9
Jumlah		63	80	63

Sumber : BPS, 2017

Jumlah gedung Sekolah Dasar di Kabupaten Dogiyai, sebagaimana pada Tabel di atas pada tahun 2014-2016 tidak mengalami peningkatan yang cukup besar. Gedung Sekolah Dasar jika dilihat menurut Distrik, maka dapat dikatakan distribusi SD paling banyak tersebar di distrik Mapia dan yang paling rendah adalah Distrik Dogiyai. Selanjutnya, Jumlah gedung SD mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2013 sebanyak 63 sekolah dan meningkat di tahun 2015 menjadi 80 sekolah, namun sampai pada tahun 2016 jumlah gedung SD secara keseluruhan kembali menurun sebesar 63 sekolah. Selain itu, perkembangan ruang belajar juga dapat dilihat perkembangannya juga pada sajian data pada tabel diatas.

Tabel 2.26.
Perkembangan Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan	20	21	21
2	Piyaiye	12	33	33
3	Mapia Barat	14	31	31
4	Mapia Tengah	26	46	46
5	Mapia	24	54	54
6	Dogiyai	27	28	28
7	Kamu Selatan	26	50	50
8	Kamu	20	43	43
9	Kamu Timur	18	28	28
10	Kamu Utara	50	56	56
Jumlah		237	390	390

Sumber : BPS, 2017

Berdasarkan pada data tahun 2014-2016, perkembangan ruang belajar Sekolah Dasar di Kabupaten Dogiyai mengalami peningkatan. Ruang belajar Sekolah Dasar jika dilihat menurut Distrik, maka dapat dikatakan distribusi Sekolah Dasar paling banyak tersebar di Distrik Mapia dan yang paling rendah adalah Distrik Sukikai Selatan. Selanjutnya, ruang belajar Sekolah Dasar setiap tahun meningkat dimana pada tahun 2014 jumlah fasilitas Sekolah Dasar sebanyak 237 ruang belajar meningkat di tahun 2015 dan 2016 menjadi 390 ruang. Perkembangan tenaga pengajar

di Kabupaten Dogiyai juga dapat dilihat berdasarkan Distrik pada periode 2014-2016 pada tabel diatas.

Tabel 2.27.
Perkembangan Guru Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar
Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan	10	15	14
2	Piyaiye	25	32	29
3	Mapia Barat	30	36	27
4	Mapia Tengah	38	50	42
5	Mapia	65	104	58
6	Dogiyai	33	54	35
7	Kamu Selatan	33	55	36
8	Kamu	64	120	54
9	Kamu Timur	33	38	33
10	Kamu Utara	55	105	65
Jumlah		386	609	393

Sumber : BPS, 2017

Jumlah guru Sekolah Dasar di Kabupaten Dogiyai, sebagaimana pada tabel di atas yaitu pada periode 2014-2016 cenderung mengalami peningkatan. Guru Sekolah Dasar jika dilihat menurut Distrik, maka dapat dikatakan guru Sekolah Dasar paling banyak tersebar di dsitrik Mapia dan yang paling rendah adalah Distrik Sukikai Selatan. Tahun 2014 jumlah guru Sekolah Dasar sebanyak 386 meningkat di tahun 2015 menjadi 609 guru namun di tahun 2016 terlihat menurun menjadi 393 guru. Selanjutnya, perkembangan jumlah siswa/i di Kabupaten Dogiyai juga dapat dilihat menurut Distrik pada periode 2014-2016 pada tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Perkembangan Siswa/i Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar
Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan	505	559	392
2	Piyaiye	1.024	1.233	1.350
3	Mapia Barat	1.087	1.396	1.214
4	Mapia Tengah	1.452	1.549	2.053
5	Mapia	1.424	2.089	1.766
6	Dogiyai	1.043	1.309	1.685
7	Kamu Selatan	1.443	1.957	1.722
8	Kamu	1.687	2.813	2.130
9	Kamu Timur	890	1.233	1.346
10	Kamu Utara	2.021	3.089	2.774
Jumlah		12.576	17.227	16.432

Sumber : BPS, 2017

Jumlah murid Sekolah Dasar di Kabupaten Dogiyai, sebagaimana pada tabel di atas sepanjang tahun 2013-2016 mengalami peningkatan yang cukup besar meskipun terjadi penurunan di tahun 2015-2016. Murid Sekolah Dasar jika dilihat menurut Distrik, terlihat paling banyak tersebar di Distrik Kamu Utara dan yang paling rendah adalah Distrik Sukikai Selatan. Selanjutnya, murid Sekolah Dasar setiap tahun meningkat dimana pada tahun 2014 jumlah murid Sekolah Dasar sebanyak 12.576 siswa/i meningkat di tahun 2015 sebesar 17.227, tetapi pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan menjadi 16.432 siswa/i. Selanjutnya, rasio guru-murid jenjang pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Dogiyai juga dapat dilihat menurut Distrik pada periode 2014-2016 pada tabel di atas.

Rasio siswa-guru berdasarkan Permendikbud No.23 Tahun 2013 adalah Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan SD/MI. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

Tabel 2.29.
Perkembangan Rasio Guru-murid Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan	50,50	37,27	28,00
2	Piyaiye	40,96	38,53	46,55
3	Mapia Barat	36,23	38,78	44,96
4	Mapia Tengah	38,21	30,98	48,88
5	Mapia	21,91	20,09	30,45
6	Dogiyai	31,61	24,24	48,14
7	Kamu Selatan	43,73	35,58	47,83
8	Kamu	26,36	23,44	39,44
9	Kamu Timur	26,97	32,45	40,79
10	Kamu Utara	36,75	29,42	42,68
Rata-rata		35,32	31,08	41,77

Sumber : BPS, 2017

Perkembangan rasio guru-murid dalam tiga tahun terakhir dapat dikatakan tidak ideal, dan penyebarannya belum merata di semua Distrik. Pada Tahun 2014 dan 2016 rasio guru-murid Sekolah Dasar di Kabupaten Dogiyai, dapat dikatakan belum ideal. Jika dilihat menurut Distrik, maka dapat dikatakan Rasio guru-murid Sekolah Dasar paling tinggi tersebar di Distrik Mapia Tengah dan yang paling rendah adalah Distrik Sukikai Selatan.

Adapun ketersediaan fasilitas ruang belajar juga dapat berpengaruh langsung terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah, dampak tersebut

dapat diukur melalui rasio ketersediaan ruang belajar bagi siswa di sekolah. Perkembangan rasio murid ruang belajar dapat dilihat pada sajian data berikut:

Tabel 2.30.
Perkembangan Rasio Murid-Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan	25,25	26,62	18,67
2	Piyaiye	85,33	37,36	40,91
3	Mapia Barat	77,64	45,03	39,16
4	Mapia Tengah	55,85	33,67	44,63
5	Mapia	59,33	38,69	32,70
6	Dogiyai	38,63	46,75	60,18
7	Kamu Selatan	55,50	39,14	34,44
8	Kamu	84,35	65,42	49,53
9	Kamu Timur	49,44	44,04	48,07
10	Kamu Utara	40,42	55,16	49,54
Rata-rata		57,17	43,19	41,78

Sumber : BPS, 2017

Perbandingan murid dengan ruang belajar Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Dogiyai, sebagaimana dimuat pada tabel di atas dapat dikatakan belum ideal dan masih tergolong tinggi sepanjang tahun 2014-2016. Rasio Murid dengan ruang kelas berdasarkan Permendikbud No.23 Tahun 2013 adalah Perbandingan antara jumlah siswa dengan ruang belajar untuk jenjang Sekolah Dasar berkisar antara 25-30 orang siswa.

Walaupun belum menunjukkan kondisi yang ideal dan masih tergolong tinggi namun setiap tahun terus mengalami peningkatan dan menuju kearah ideal, dimana tahun 2014 rasio murid dengan ruang belajar mencapai 57,17 (tinggi), tetapi tahun 2016 mencapai 41,78 meskipun angka tersebut tergolong belum ideal. Tentu kondisi ini merupakan indikator semakin membaiknya fungsi layanan pendidikan dasar yang telah diberikan oleh Pemerintah Dogiyai namun masih perlu dioptimalkan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Dogiyai yang lebih merata di semua Distrik.

b) Layanan Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)

Perkembangan capaian kinerja layanan pendidikan dasar di Kabupaten Dogiyai selama periode 2014-2016 dapat dilihat pada beberapa indikator, seperti distribusi fasilitas SMP, distribusi ruang belajar SMP, dan distribusi perpustakaan SMP, sebagaimana pada pembahasan berikut:

Tabel 2.31.
Perkembangan Gedung Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye	1	1	1
3	Mapia Barat	1	1	1
4	Mapia Tengah	2	2	1
5	Mapia	2	1	2
6	Dogiyai	1	1	1
7	Kamu Selatan	2	2	2
8	Kamu	2	1	2
9	Kamu Timur	1	1	1
10	Kamu Utara	2	1	2
Jumlah		14	11	13

Sumber : BPS, 2017

Jumlah gedung Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Dogiyai, sebagaimana pada Tabel di atas pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Gedung SMP jika dilihat menurut Distrik, maka dapat dikatakan distribusinya cukup merata. Tahun 2014 jumlah gedung SMP sebanyak 14 sekolah dan menurun di tahun 2015 menjadi 11 sekolah, dan kembali mengalami penambahan di tahun 2016 sebanyak 2 sekolah sehingga total Jumlahnya menjadi 13 sekolah. Selain itu, perkembangan ruang belajar juga dapat dilihat perkembangannya juga pada sajian data berikut ini:

Tabel 2.32.
Perkembangan Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye	3	3	3
3	Mapia Barat	3	3	3
4	Mapia Tengah	6	6	6
5	Mapia	11	8	8
6	Dogiyai	3	5	5
7	Kamu Selatan	6	10	10
8	Kamu	9	18	18
9	Kamu Timur	3	3	3
10	Kamu Utara	6	11	11
Jumlah		50	67	67

Sumber : BPS, 2017

Berdasarkan pada data tahun 2014-2016, perkembangan ruang belajar Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Dogiyai mengalami peningkatan meskipun jumlah gedung sekolah sepanjang tiga tahun terakhir semakin berkurang. Ruang belajar Sekolah Menengah Pertama jika dilihat menurut Distrik, maka dapat dikatakan distribusi Sekolah Menengah Pertama paling banyak terdapat di Distrik Kamu dan juga tersebar di 8 (delapan) Distrik lainnya. Secara keseluruhan, ruang belajar Sekolah Menengah Pertama terlihat meningkat dimana pada tahun 2014 terdapat 50 ruang belajar yang menjadi 67 ruang belajar di tahun 2015 dan 2016. Perkembangan tenaga pengajar di Kabupaten Dogiyai juga dapat dilihat berdasarkan Distrik pada periode 2014-2016 di bawah ini:

Tabel 2.33.
Perkembangan Guru Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye	8	8	10
3	Mapia Barat	8	6	6
4	Mapia Tengah	7	15	4
5	Mapia	25	13	19
6	Dogiyai	17	18	19
7	Kamu Selatan	24	25	20
8	Kamu	32	39	38
9	Kamu Timur	1	8	7
10	Kamu Utara	25	27	24
Jumlah		147	159	147

Sumber : BPS, 2017

Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Dogiyai, sebagaimana pada tabel di atas yaitu pada periode 2014-2016 tidak cenderung tidak mengalami peningkatan. Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama jika dilihat persebarannya menurut Distrik, maka dapat dikatakan paling banyak tersebar di distrik Kamu dan yang paling rendah adalah Distrik Mapia Barat. Secara keseluruhan, jumlah guru Sekolah Menengah Pertama terlihat meningkat dari 147 guru pada tahun 2014 meningkat di tahun 2015 menjadi 159 guru namun tahun 2016 terlihat menurun menjadi 147 guru. Selanjutnya, perkembangan jumlah siswa/i di Kabupaten Dogiyai juga dapat dilihat menurut Distrik pada periode 2014-2016 di bawah ini:

Tabel 2.34.
Perkembangan Siswa/i Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye	32	44	60
3	Mapia Barat	130	115	85
4	Mapia Tengah	61	186	73
5	Mapia	362	239	553
6	Dogiyai	201	134	117
7	Kamu Selatan	265	262	364
8	Kamu	545	589	680
9	Kamu Timur	95	106	106
10	Kamu Utara	299	289	326
Jumlah		1.990	1.964	2.364

Sumber : BPS, 2017

Jumlah murid Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Dogiyai, sebagaimana pada tabel di atas sepanjang tahun 2014-2016 cenderung mengalami peningkatan. Jika dilihat persebarannya menurut distrik, maka jumlah murid Sekolah Menengah Pertama paling banyak tersebar di Distrik Mapia dan yang paling rendah adalah Distrik Piyaiye. Pada tahun 2014 jumlah murid Sekolah Menengah Pertama tercatat sebanyak 1.990 siswa/i dan mengalami penurunan di tahun 2015 sehingga menjadi sebesar 1.964 murid namun di tahun 2016 terlihat menjadi 2.364 siswa/i. Selanjutnya, rasio guru-murid jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Dogiyai juga dapat dilihat menurut Distrik pada periode 2014-2016 di bawah ini:

Rasio siswa-guru berdasarkan Permendikbud No.23 Tahun 2013 adalah Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP. Setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

Tabel 2.35.
Perkembangan Rasio Guru-murid Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye	4,00	5,50	6,00

No	Distrik	2014	2015	2016
3	Mapia Barat	16,25	19,17	14,17
4	Mapia Tengah	8,71	12,40	18,25
5	Mapia	14,48	18,38	29,11
6	Dogiyai	11,82	7,44	6,16
7	Kamu Selatan	11,04	10,48	18,20
8	Kamu	17,03	15,10	17,89
9	Kamu Timur	95,00	13,25	15,14
10	Kamu Utara	11,96	10,70	13,58
Rata-rata		21,14	12,49	15,39

Sumber : BPS, 2017

Perkembangan rasio guru-murid dalam tiga tahun terakhir dapat dikatakan sudah cukup ideal kecuali untuk tahun 2014 rasio guru-murid Sekolah Menengah Pertama di distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai yang terlihat belum ideal. Secara keseluruhan sepanjang tahun 2014-2016 menunjukkan distribusi yang cukup merata, dan jika dilihat menurut Distrik maka Rasio guru-murid Sekolah Menengah Pertama paling tinggi terlihat di Distrik Kamu Selatan dan yang paling rendah adalah Distrik Piyaiye.

Adapun ketersediaan fasilitas ruang belajar juga dapat berpengaruh langsung terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah, dampak tersebut dapat diukur melalui rasio ketersediaan ruang belajar bagi siswa di sekolah. Perkembangan rasio murid ruang belajar dapat dilihat pada sajian data berikut:

Tabel 2.36.
Perkembangan Rasio Murid-Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye	10,67	14,67	20,00
3	Mapia Barat	43,33	38,33	28,33
4	Mapia Tengah	10,17	31,00	12,17
5	Mapia	32,91	29,88	69,13
6	Dogiyai	67,00	26,80	23,40
7	Kamu Selatan	44,17	26,20	36,40
8	Kamu	60,56	32,72	37,78
9	Kamu Timur	31,67	35,33	35,33
10	Kamu Utara	49,83	26,27	29,64
Rata-rata		38,92	29,02	32,46

Sumber : BPS, 2017

Perbandingan murid dengan ruang belajar Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Dogiyai periode 2014-2016, sebagaimana dimuat pada tabel di atas dapat dikatakan sudah ideal. Rasio Murid dengan ruang kelas berdasarkan Permendikbud No.23 Tahun 2013 adalah Perbandingan antara jumlah siswa dengan ruang belajar untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama berkisar antara 25-30 orang siswa. Perkembangan rasio murid-ruang belajar tahun 2014 rasio murid dengan ruang belajar mencapai 38.92 (cukup tinggi), kemudian di tahun 2015 memiliki perbandingan sebesar 29.02 dan kembali naik di tahun 2016 sebesar 32.46 murid untuk satu ruang belajar.

c) Layanan Pendidikan Menengah Atas (SMA)

Pada bagian ini diuraikan mengenai perkembangan capaian kinerja layanan pendidikan menengah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai selama periode 2014-2016 yang dapat dilihat pada beberapa indikator, seperti jumlah sekolah, ruang kelas, guru, dan murid Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tabel berikut disajikan data tentang perkembangan Gedung Sekolah Menengah Atas yang terdapat di Kabupaten Dogiyai semenjak Tahun 2014-2016.

Tabel 2.37.
Perkembangan Gedung Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye			
3	Mapia Barat			
4	Mapia Tengah			
5	Mapia	1	1	1
6	Dogiyai			
7	Kamu Selatan			
8	Kamu	1	1	1
9	Kamu Timur			
10	Kamu Utara			
Jumlah		2	2	2

Sumber : BPS, 2017

Perkembangan gedung sekolah menengah tingkat atas di Kabupaten Dogiyai tidak mengalami perubahan yang berarti selama periode 2014-2016, dan sebarannya hanya terbatas pada 2 (dua) Distrik, yakni Distrik

Mapia, dan Distrik Kamu. Walaupun tidak ada penambahan jumlah sekolah pada tingkat pendidikan menengah seiring adanya peningkatan jumlah anak usia 16-18 tahun namun kebutuhan layanan pendidikan menengah masih memenuhi standar ideal. Murid yang dapat mengakses layanan pendidikan menengah telah bertambah selama periode tahun 2014-2016. Tentu kondisi ini merupakan indikator semakin membaiknya fungsi layanan pendidikan menengah yang telah diberikan oleh Pemerintah karena mampu meningkatkan aksesibilitas siswa terhadap layanan pendidikan.

Tabel 2.38.
Perkembangan Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye			
3	Mapia Barat			
4	Mapia Tengah			
5	Mapia	9	7	7
6	Dogiyai			
7	Kamu Selatan			
8	Kamu	9	8	8
9	Kamu Timur			
10	Kamu Utara			
Jumlah		18	15	15

Sumber : BPS, 2017

Perkembangan ruang belajar di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Dogiyai terlihat menurun dari tahun 2014-2015 dan selanjutnya tidak mengalami perubahan jumlah selama periode 2015-2016 dengan sebaran yang hanya terbatas pada dua Distrik saja yaitu Distrik Mapia dan Kamu.

Tabel 2.39.
Perkembangan Guru Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye			
3	Mapia Barat			
4	Mapia Tengah			
5	Mapia	12	19	24

No	Distrik	2014	2015	2016
6	Dogiyai			
7	Kamu Selatan			
8	Kamu	17	17	18
9	Kamu Timur			
10	Kamu Utara			
Jumlah		29	36	42

Sumber : BPS, 2017

Perkembangan jumlah guru SMA di Kabupaten Dogiyai selama periode 2014-2016 terlihat mengalami peningkatan. Tahun 2014 jumlah guru SMA tercatat sebanyak 29 orang guru, yang kemudian meningkat menjadi 36 guru di tahun 2015 dan meningkat lagi jumlahnya menjadi 42 di tahun 2016.

Tabel 2.40.
Perkembangan Siswa/i Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye			
3	Mapia Barat			
4	Mapia Tengah			
5	Mapia	110	121	108
6	Dogiyai			
7	Kamu Selatan			
8	Kamu	198	287	325
9	Kamu Timur			
10	Kamu Utara			
Jumlah		308	408	433

Sumber : BPS, 2017

Perkembangan jumlah siswa/i SMA di Kabuapten Dogiyai sepanjang tahun 2014-2016 terus meningkat. Pada tahun 2014 jumlah siswa/i jenjang pendidikan menengah atas tercatat sebanyak 308 siswa/i, kemudian bertambah di tahun 2015 menjadi sebesar 408 siswa/i dan terus meningkat hingga tahun 2016 sehingga menjadi 433 siswa/I dengan sebaran siswa/i hanya terdapat di dua wilayah yaitu Distrik Mapia dan Kamu. Adapun jumlah terbanyak untuk dua Distrik tersebut adalah berada pada Distrik Kamu dan paling rendah adalah berada di Distrik Mapia. Dampak dari ketersediaan tenaga pengajar dan fasilitas sekolah berikut ini akan dijelaskan rasio perbandingan di antara keduanya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.41.
Perkembangan Rasio Guru-murid Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye			
3	Mapia Barat			
4	Mapia Tengah			
5	Mapia	9,17	6,37	4,50
6	Dogiyai			
7	Kamu Selatan			
8	Kamu	11,65	16,88	18,06
9	Kamu Timur			
10	Kamu Utara			
Rata-rata		10,41	11,63	11,28

Sumber : BPS, 2017

Rasio Guru-Murid Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Dogiyai, selama periode 2014-2016 secara keseluruhan dapat dikatakan ideal dengan perkembangan rasio yang fluktuatif meningkat. Berdasarkan sebarannya di distrik, perkembangan rasio guru murid terlihat variatif, yang mana di distrik Mapia terlihat semakin rendah rasionya, sedangkan di distrik Kamu terlihat sebaliknya.

Demikian pula perbandingan antara ruang belajar-murid di Kabupaten Dogiyai untuk periode 2014-2016 secara keseluruhan rasionya semakin membaik dan dapat dikatakan ideal. Namun jika dilihat sebaran siswa terhadap ketersediaan ruang belajar menurut distrik dapat dikatakan belum ideal di distrik Mapia karena masih di bawah angka minimum 20 murid dalam satu ruang belajar sedangkan di distrik Kamu terlihat meningkat dan mengarah ke kondisi tidak ideal yaitu diatas 36 murid dalam satu ruang belajar.

Tabel 2.42.
Perkembangan Rasio Murid-Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye			
3	Mapia Barat			
4	Mapia Tengah			
5	Mapia	12,22	17,29	15,43
6	Dogiyai			
7	Kamu Selatan			

No	Distrik	2014	2015	2016
8	Kamu	22,00	35,88	40,63
9	Kamu Timur			
10	Kamu Utara			
Rata-rata		17,11	26,58	28,03

Sumber : BPS, 2017

d) Layanan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)

Pada bagian ini diuraikan mengenai perkembangan capaian kinerja layanan pendidikan menengah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai selama periode 2014-2016 yang dapat dilihat pada beberapa indikator, seperti jumlah sekolah, ruang kelas, guru, dan murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berikut pada tabel berikut disajikan data tentang perkembangan Gedung Sekolah Menengah Kejuruan yang terdapat di Kabupaten Dogiyai semenjak Tahun 2014-2016.

Tabel 2.43.
Perkembangan Gedung Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye			
3	Mapia Barat			
4	Mapia Tengah			
5	Mapia			
6	Dogiyai			
7	Kamu Selatan			
8	Kamu	1	1	1
9	Kamu Timur			
10	Kamu Utara	1	1	1
Jumlah		2	2	2

Sumber : BPS, 2017

Perkembangan gedung sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Dogiyai tidak mengalami perubahan yang berarti selama periode 2014-2016, dengan sebarannya hanya terbatas pada 2 (dua) Distrik, yakni Distrik Kamu, dan Distrik Kamu Utara.

Tabel 2.44.
Perkembangan Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
----	---------	------	------	------

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye			
3	Mapia Barat			
4	Mapia Tengah			
5	Mapia			
6	Dogiyai			
7	Kamu Selatan			
8	Kamu	2	2	2
9	Kamu Timur			
10	Kamu Utara	3	3	3
Jumlah		5	5	5

Sumber : BPS, 2017

Perkembangan ruang belajar di Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Dogiyai, tidak mengalami perkembangan dengan total 5 ruang belajar dari tahun 201-2016 dengan persebarannya terdapat di distrik Kamu dan Kamu Utara.

Tabel 2.45.
Perkembangan Guru Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye			
3	Mapia Barat			
4	Mapia Tengah			
5	Mapia			
6	Dogiyai			
7	Kamu Selatan			
8	Kamu	1	3	12
9	Kamu Timur			
10	Kamu Utara	1	22	25
Jumlah		2	25	37

Sumber : BPS, 2017

Perkembangan jumlah guru SMK di Kabupaten Dogiyai selama periode 2014-2016 terlihat meningkat signifikan. Tahun 2014 jumlah guru hanya 1 orang masing-masing di Distrik Kamu dan Kamu Utara, namun di tahun 2015 dan 2016 meningkat pesat. Tahun 2016 jumlah guru SMK

mencapai 12 orang sedangkan di distrik Kamu Utara meningkat menjadi 25 orang.

Tabel 2.46.
Perkembangan Siswa/i Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye			
3	Mapia Barat			
4	Mapia Tengah			
5	Mapia			
6	Dogiyai			
7	Kamu Selatan			
8	Kamu	30	109	155
9	Kamu Timur			
10	Kamu Utara	104	200	218
Jumlah		134	309	373

Sumber : BPS, 2017

Perkembangan jumlah siswa/i di Kabupaten Dogiyai sepanjang tahun 2014-2016 terus meningkat. Tahun 2014 jumlah siswa/i jenjang pendidikan menengah kejuruan tercatat sebanyak 134 siswa/i, kemudian bertambah di tahun 2015 sebesar 309 siswa/i dan terus meningkat hingga tahun 2016 yaitu sebesar 373 siswa/i. Jumlah ruang kelas, jumlah guru terbanyak terdapat di distrik Kamu Utara, demikian juga sebaran siswa/i pada distrik Kamu Utara yang terbanyak dibanding distrik Kamu. Dampak dari ketersediaan tenaga pengajar dan fasilitas sekolah berikut ini akan jelaskan rasio perbandingan di antara keduanya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.47.
Perkembangan Rasio Guru-murid Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye			
3	Mapia Barat			
4	Mapia Tengah			
5	Mapia			
6	Dogiyai			
7	Kamu Selatan			
8	Kamu	30,00	36,33	12,92

9	Kamu Timur			
10	Kamu Utara	104,00	9,09	8,72
Rata-rata		67,00	22.71	10,82

Sumber : BPS, 2017

Rasio Guru-Murid Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Dogiyai tahun 2014-2016 secara keseluruhan dapat dikatakan cukup ideal. Tahun 2014, rasio guru murid di distrik Kamu mencapai 1:30 kemudian menurun menjadi 1:12,9 di tahun 2016.

Demikian pula perbandingan antara ruang belajar-murid di Kabupaten Dogiyai untuk periode 2014-2016 jumlahnya sudah cukup ideal. Data pada tabel di bawah ini, menggambarkan, sebaran siswa terhadap ketersediaan ruang belajar dapat dikatakan sudah merata.

Tabel 2.48.
Perkembangan Rasio Murid-Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan			
2	Piyaiye			
3	Mapia Barat			
4	Mapia Tengah			
5	Mapia			
6	Dogiyai			
7	Kamu Selatan			
8	Kamu	15,00	27,25	38,75
9	Kamu Timur			
10	Kamu Utara	34,67		
Rata-rata		24,83	27,25	38,75

Sumber : BPS, 2017

2.5.2. Fokus Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan pula untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup yang telah menjadi salah satu komponen IPM atau cermin keberhasilan pembangunan manusia. Kondisi kesehatan penduduk Kabupaten Dogiyai merupakan bagian yang erat hubungannya dengan keberhasilan pembangunan manusia dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Urusan wajib bidang kesehatan telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai dengan

mendorong pembangunan infrastruktur kesehatan serta penyediaan tenaga kesehatan pada masing-masing Distrik.

Tabel 2.49.
Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2014-2016

No	Fasilitas Kesehatan/ Distrik	2014	2015	2016
1	Rumah Sakit			
	Kamu	1	1	1
2	Rumah Sakit Bersalin			
	Dogiyai		2	2
	Kamu Timur		1	1
3	Poliklinik			
	Sukikai Selatan		1	1
	Piyaiye	1	1	1
	Mapia Tengah	1		
	Mapia	1	1	1
4	Polindes			
	Mapia Tengah			1
	Mapia			1
	Dogiyai	2	2	2
	Kamu Timur	1	1	1
	Jumlah	7	10	12

Sumber : BPS, 2017

Berdasarkan data BPS tahun 2014-2016, sebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Dogiyai yaitu 1 unit RSUD yang terletak di Distrik Kamu kemudian Rumah Sakit Bersalin yang tersebar di dua Distrik yaitu Dogiyai dan Kamu Timur masing-masing memiliki 1 unit. Selain itu, sebaran Poliklinik terbatas hanya di 4 (empat) Distrik yaitu Sukikai Selatan, Piyaiye, Mapia Tengah dan Mapia. Sedangkan Polindes juga tersebar di 4 (empat) Distrik yaitu Mapia Tengah, Mapia, Dogiyai dan Kamu Timur. Adapun sebaran fasilitas kesehatan lainnya yang tersebar di hampir semua distrik di Kabupaten Dogiyai selama periode 2014-2016, di antaranya puskesmas, puskesmas pembantu (PUSTU) dan posyandu yang disajikan berikut ini:

Tabel 2.50.
Perkembangan Puskesmas Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan	1	1	1
2	Piyaiye	1	1	1

No	Distrik	2014	2015	2016
3	Mapia Barat	1	1	1
4	Mapia Tengah	1	1	1
5	Mapia	2	2	2
6	Dogiyai	1	1	1
7	Kamu Selatan	1	1	1
8	Kamu	1	1	1
9	Kamu Timur	1	1	1
10	Kamu Utara	1	1	1
Rata-rata		11	11	11

Sumber : BPS, 2017

Sejauh ini perkembangan puskesmas yang tersebar di semua distrik sepanjang tahun 2014-2016 tidak mengalami perubahan yang berarti. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebaran puskesmas di Kabupaten Dogiyai dapat dikatakan sudah cukup merata di semua distrik. Sampai dengan tahun 2016 jumlah puskesmas di Kabupaten Dogiyai adalah sebesar 11 unit. Begitupun dengan fasilitas PUSTU yang telah tersebar di semua distrik, hal tersebut menandakan adanya keseriusan pemerintah dalam menjangkau semua masyarakat dalam bidang kesehatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 2.51.
Perkembangan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan	3	2	3
2	Piyaiye	4	5	3
3	Mapia Barat	4	4	4
4	Mapia Tengah	4	5	4
5	Mapia	1	1	1
6	Dogiyai	1	2	2
7	Kamu Selatan	3	4	2
8	Kamu	1	1	2
9	Kamu Timur	1	1	1
10	Kamu Utara	1	1	1
Rata-rata		23	26	23

Sumber : BPS, 2017

Sampai dengan tahun 2016, jumlah puskesmas pembantu secara keseluruhan telah mencapai 23 unit. Demikian juga perkembangan posyandu telah tersebar di semua distrik di Kabupaten Dogiyai. Berikut ini

adalah sebaran posyandu menurut Distrik di Kabupaten Dogiyai selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 2.52.
Perkembangan Posyandu Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2016

No	Distrik	2014	2015	2016
1	Sukikai Selatan	4	5	5
2	Piyaiye	6	7	7
3	Mapia Barat	6	6	6
4	Mapia Tengah	7	12	12
5	Mapia	7	7	7
6	Dogiyai	8	7	7
7	Kamu Selatan	12	12	12
8	Kamu	8	8	8
9	Kamu Timur	8	6	6
10	Kamu Utara	8	10	10
Rata-rata		74	80	80

Sumber : BPS, 2017

Perkembangan posyandu di Kabupaten Dogiyai dinilai sudah merata dan cenderung mengalami penambahan sampai dengan tahun 2016. Di mana pada tahun 2014 jumlah posyandu secara keseluruhan adalah sebanyak 74 unit, kemudian pada tahun 2015-2016 tercatat sebanyak 80 unit. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan posyandu di distrik Sukikai Selatan, Piyaiye, Mapia Tengah dan dan Kamu Utara, sedangkan di Distrik Dogiyai dan Kamu Timur jumlah posyandu menurun.

2.5.3. Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi

Berdasarkan data BPS tahun 2017, ketersediaan pasar (dengan atau tanpa bangunan), toko dan restoran di Kabupaten Dogiyai sampai dengan tahun 2016 tercatat sebanyak 77 unit. Adapun sebaran fasilitas tersebut terdapat di beberapa Distrik di antaranya Distrik Mapia, Dogiyai, Kamu Selatan, Kamu, Kamu Timur dan Kamu Utara. Dengan rincian 3 (tiga) unit pasar dengan bangunan yang tersebar di Distrik Mapia, Kamu dan Kamu Utara. Kemudian pasar tanpa bangunan sebanyak 3 (tiga) unit terletak di Distrik Kamu selatan dan Kamu Utara. Sedangkan toko tersebar di Distrik Mapia (23 unit), Dogiyai (7 unit) dan Kamu (46 unit). Adapun restoran sebanyak 5 (lima) unit yang terdapat hanya di Distrik Kamu.

Tabel 2.53.
Perkembangan Ketersediaan Fasilitas Penunjang Perekonomian
Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2014

No	Distrik	Pasar dengan Bangunan	Pasar tanpa Bangunan	Toko	Restoran
1	Sukikai Selatan				
2	Piyaiye				
3	Mapia Barat				
4	Mapia Tengah				
5	Mapia	1		23	
6	Dogiyai			7	
7	Kamu Selatan		1		
8	Kamu	1		46	5
9	Kamu Timur				
10	Kamu Utara	1	2		
Jumlah		3	3	66	5

Sumber : BPS, 2017

BAB III

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

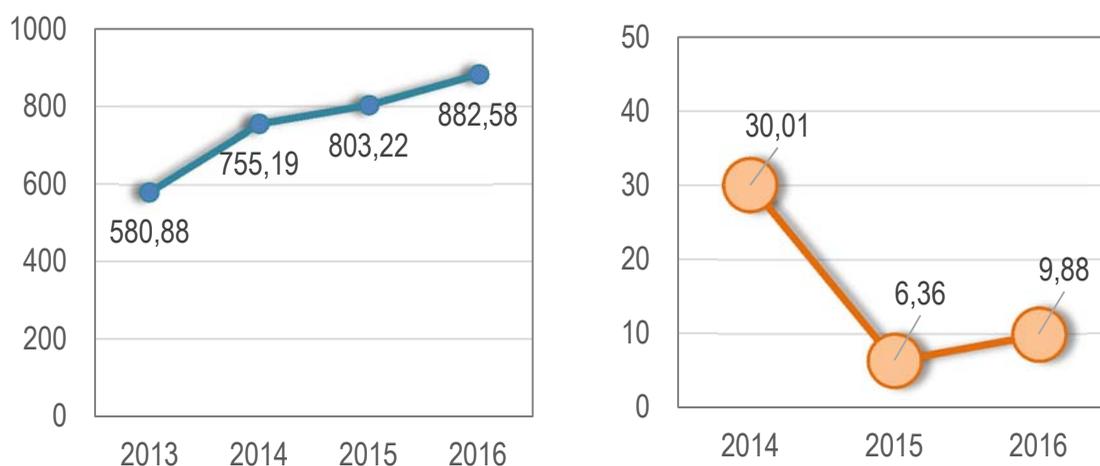
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Kabupaten Dogiyai bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah, bila di lihat tren realisasi pendapatan daerah sejak tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 15,42 persen per tahun.

Gambar 3.1.
Realisasi Dan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016



(a) Realiasi Pendapatan Daerah (milyar rp)

(b) Pertumbuhan (%)

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Pendapatan Kabupaten Dogiyai pada tahun 2013 yaitu Rp580,88 milyar naik menjadi Rp755,19 milyar atau mengalami pertumbuhan sebesar 30,01 persen pada tahun 2014 yang merupakan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sesudahnya. Meskipun demikian pada tahun-tahun sesudahnya juga mengalami peningkatan hingga mencapai Rp882,58 milyar pada tahun 2016.

Sumber pendapatan utama daerah Kabupaten Dogiyai berasal dari pendapatan transfer/dana perimbangan dengan rata-rata proporsi mencapai 80,07 persen per tahun. Proporsi komponen pendapatan transfer daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan pendapatan transfer/dana perimbangan Kabupaten Dogiyai berasal dari dana alokasi umum dengan rata-rata 76,85 persen per tahun.

Proporsi komponen pendapatan daerah menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Proporsi pada komponen pendapatan asli daerah menunjukkan peningkatan sejak tahun 2013 yaitu 0,92 persen naik menjadi 1,04 persen pada tahun 2014 dan naik menjadi 1,03 persen pada

tahun 2015 kemudian pada tahun 2016 menjadi 1,18 persen. Sedangkan proporsi pendapatan daerah untuk komponen pendapatan transfer/dana perimbangan mengalami penurunan dari 84,36 pada tahun 2013 persen menjadi 77,46 persen pada tahun 2014 kemudian kembali meningkat pada tahun 2015 menjadi 79,84 persen dan mengalami penurunan menjadi 78,63 persen pada tahun 2016.

Untuk proporsi pendapatan daerah pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami perubahan proporsi seperti komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer/dana perimbangan misalnya pada tahun 2013 lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki proporsi sebesar 1,16 persen kemudian pada tahun 2014 meningkat tajam menjadi 5,50 persen, namun kembali menurun menjadi 0,30 persen pada tahun 2015 dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 3,75 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah setiap tahunnya memiliki proporsi yang berbeda atau cenderung fluktuatif sepanjang tahun 2013-2016 untuk setiap komponen dalam pendapatan daerah yang merupakan sumber pembiayaan untuk membiayai program/kegiatan pemerintah daerah di kabupaten Dogiyai.

Pendapatan daerah Kabupaten Dogiyai terlihat menunjukkan peningkatan positif sejak tahun 2014 sebesar 101,82 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2014. realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 99,69 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan daerah pada tahun berikutnya 2014, 2015 dan 2016 terus mengalami penurunan dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.1.
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam persen)

Komponen Pendapatan Daerah	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Asli Daerah	0,92	1,04	1,03	1,18
Dana Perimbangan	84,36	77,46	79,84	78,63
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	13,12	15,33	17,02	15,63
Transfer Pemerintah Provinsi	0,44	0,67	1,81	0,81
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1,16	5,50	0,30	3,75

Total	100,00	100,00	100,00	100,00
-------	--------	--------	--------	--------

Sumber : DPKAD Kabupaten Dogiyai, 2017 (data diolah)

Penurunan realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Dogiyai dipengaruhi menurunnya realisasi pada komponen pendapatan daerah yaitu dana perimbangan yang setiap tahun sejak 2013-2016 menurun realisasinya dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.2.
Tingkat Efektifitas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016
(dalam %)

Komponen Pendapatan Daerah	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Asli Daerah	474,36	331,84	142,10	146,33
Dana Perimbangan	99,98	99,61	97,54	92,81
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	106,37	86,77	97,91	83,92
Transfer Pemerintah Provinsi	112,25	111,93	100,00	86,16
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	126,83	138,46	-	157,67
Total Pendapatan Daerah	101,82	99,69	98,27	94,68

Sumber : DPKAD Kabupaten Dogiyai, 2017 (data diolah)

Realisasi PAD pada tahun 2013-2016 dapat dikatakan efektif. Capaian realisasi PAD sejak tahun 2013-2016 diatas target yang ditetapkan. Dapat terlihat realisasi PAD pada tahun 2013 sebesar Rp5.338 milyar dari target sebesar Rp1.125 milyar atau mencapai 474,36 persen peningkatannya. Peningkatan realisasi PAD terus meningkat pada tahun 2014, 2015 maupun 2016.

Realisasi dana perimbangan sejak tahun 2013-2016 terus mengalami penurunan nilai dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2013 realisasi dana perimbangan sebesar Rp490.038 milyar dari target sebesar Rp490.121 milyar atau 99.98 persen yang dapat terealisasi. Juga pada tahun 2014, 2015 dan 2016 realisasi dana perimbangan mengalami penurunan dari target yang ditentukan.

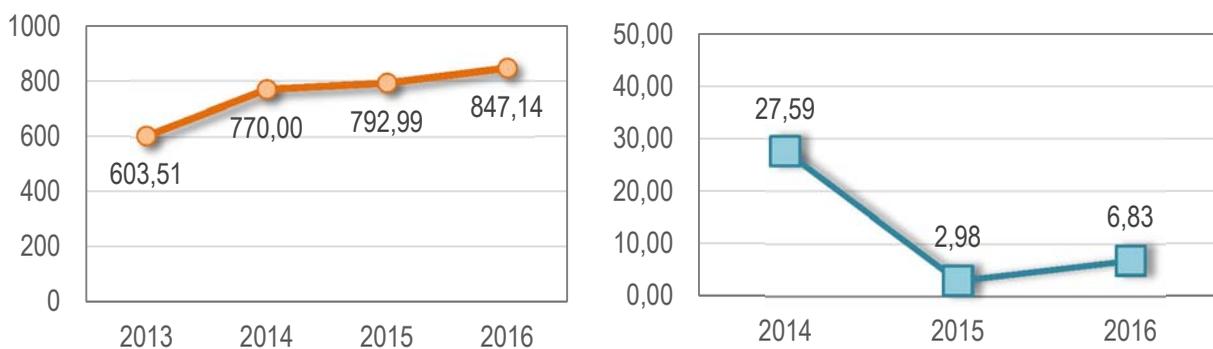
Realisasi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terlihat mengalami peningkatan positif. Pada tahun 2013 realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp6,728 milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,305 milyar atau mencapai 126,83 persen. Pada tahun 2015

realisasi lain-lain pendapatan yang sah turun menjadi Rp2,446 milyar. Tahun 2016 capaian realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar 157,67 persen dari target yang ditentukan dengan kategori sangat efektif.

3.1.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari: (1) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga, (2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, dan (c) Belanja Modal.

Gambar 3.2.
Realisasi Dan Tingkat Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016



(a) Realisasi Belanja Daerah (milyar Rp)

(b) Pertumbuhan (%)

Realisasi belanja daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2013-2016 meningkat positif. Pada tahun 2013 realisasi belanja sebesar Rp603,51 milyar meningkat hingga Rp770,00 milyar dengan persentase pertumbuhan mencapai 27,59 persen namun mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 2,98 persen. Tahun 2016 pertumbuhan belanja daerah

meningkat menjadi 6,83 persen atau Rp847,14 milyar dari tahun sebelumnya sebesar Rp792,99 milyar pada tahun 2015.

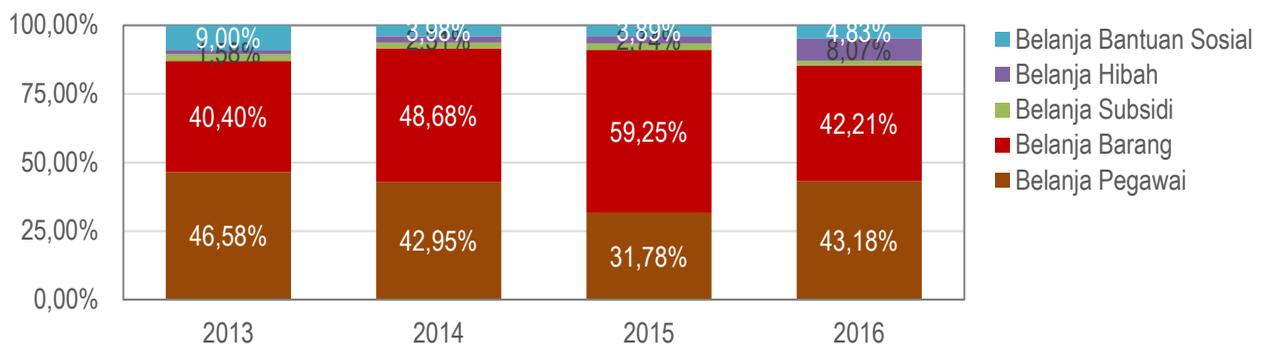
Tabel 3.3.
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam %)

Komponen Pendapatan Daerah	2013	2014	2015	2016
Belanja Operasi	61,49	59,82	59,67	63,04
Belanja Modal	38,26	39,91	40,16	36,78
Belanja Tidak Terduga	0,25	0,27	0,17	0,18
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPKAD Kabupaten Dogiyai, 2017 (data diolah)

Proporsi belanja daerah Kabupaten Dogiyai yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Pada komponen belanja daerah Kabupaten Dogiyai terlihat bahwa yang paling mendominasi proporsi belanja daerah yaitu belanja operasi dengan rata-rata 61,01 persen pertahun. Pada tahun 2013 porsi belanja operasi sebesar Rp371,109 milyar atau sebesar 38,26 persen, belanja modal sebesar Rp230,894 milyar atau 38,26 persen sedangkan belanja tidak terduga hanya sebesar Rp1,501 milyar atau 0,25 persen. Sementara belanja modal juga terus mengalami peningkatan porsi dalam belanja daerah sebesar 40,16 persen pada tahun 2015, sedangkan belanja operasi masih terus mendominasi proporsi dalam belanja daerah di Kabupaten Dogiyai hingga tahun 2016 sebesar Rp534,074 milyar atau 63,64 persen.

Gambar 3.3.
Komposisi Belanja Operasi Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016



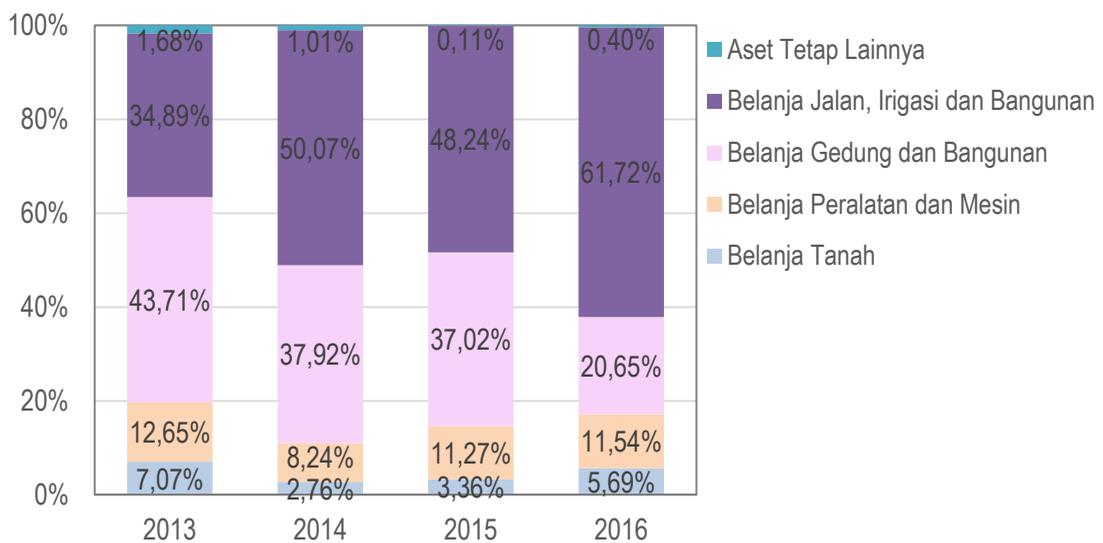
Sumber : DPKAD Kabupaten Dogiyai, 2017 (data diolah)

Bila digali lebih dalam komposisi belanja operasi yang paling tinggi proporsinya yaitu belanja barang dengan rata-rata porsi belanja 47,63 persen pertahun, sedangkan proporsi belanja pegawai rata-rata sebesar 41,12 persen pertahun dan yang terendah yaitu belanja subsidi dengan rata-rata 2,14 persen pertahun. Pada tahun 2013 belanja pegawai mendapat porsi tertinggi sebesar 46,58 persen, belanja pegawai ini merupakan penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai negeri. Untuk porsi belanja barang sebesar 40,40 persen, sedangkan proporsi belanja barang pada tahun 2015 mencapai 59,25 persen.

Proporsi belanja hibah, belanja subsidi dan belanja bantuan sosial mendapat porsi yang paling kecil dibandingkan dengan belanja barang dan belanja pegawai. Untuk proporsi terendah dalam komponen belanja operasi yaitu belanja subsidi dengan rata-rata 2,14 persen pertahun, hal tersebut dikarenakan proporsi belanja subsidi terus mengalami penurunan.

Komposisi belanja modal terdiri dari belanja asset tetap lainnya, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja gedung dan bangunan, belanja peralatan mesin dan belanja tanah.

Gambar 3.4.
Komposisi Belanja Modal Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016



Sumber : DPKAD Kabupaten Dogiyai, 2017 (data diolah)

Realisasi belanja daerah periode 2013-2016 di Kabupaten Dogiyai menunjukkan belum optimalnya OPD dalam menyerap anggaran yang ditetapkan, walaupun masih dibawah 93 persen realisasinya namun terlihat semakin tinggi capaiannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya serap anggaran mengalami perubahan yang cukup baik meskipun belum mampu menyerap anggaran hingga 100 persen.

Tahun 2013, persentase belanja daerah yang terserap hanya mencapai 80,67 persen dari target yang ditetapkan. Nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh komponen belanja operasi dan Belanja tak terduga yang capaiannya hanya di bawah 80 persen. Komponen belanja daerah yang paling rendah dalam penyerapan anggaran yaitu belanja tak terduga hanya mampu menyerap anggaran sebesar Rp603,505 milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp748,081 milyar atau sebesar 74,31 persen dari target, selain itu belanja operasi juga menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran yang nilainya menunjukkan 75,68 persen, sementara belanja modal sudah cukup baik dalam menyerap anggaran yang ditetapkan. Hal itu dapat terlihat dengan jumlah persentase sebesar 90,30 persen anggaran yang terserap untuk belanja modal. Pada tahun 2014 realisasi belanja daerah cenderung sama atau tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2015 kinerja OPD pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai mulai menunjukkan peningkatan dengan jumlah realisasi belanja meningkat menjadi 90,85 persen dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 92,06 persen. Tahun 2016, jika dilihat per komponen Belanja terlihat realisasi penyerapan anggaran tertinggi yaitu untuk Belanja tak terduga yang mencapai 99,93 persen dari target sedangkan yang terendah yaitu Belanja Transfer bantuan keuangan yang hanya mencapai 76,63 persen dari target.

Tabel 3.4.
Daya Serap Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam %)

Komponen Belanja	2013	2014	2015	2016
Belanja Operasi	75,68	75,68	88,67	90,07
Belanja Modal	90,30	90,30	94,43	95,62
Belanja Tidak Terduga	74,31	74,31	67,75	99,93
Transfer Bantuan Keuangan	54,00	80,67	98,50	76,63
Total Belanja Daerah	80,67	80,67	90,85	92,06

Sumber : DPKAD Kabupaten Dogiyai, 2017 (data diolah)

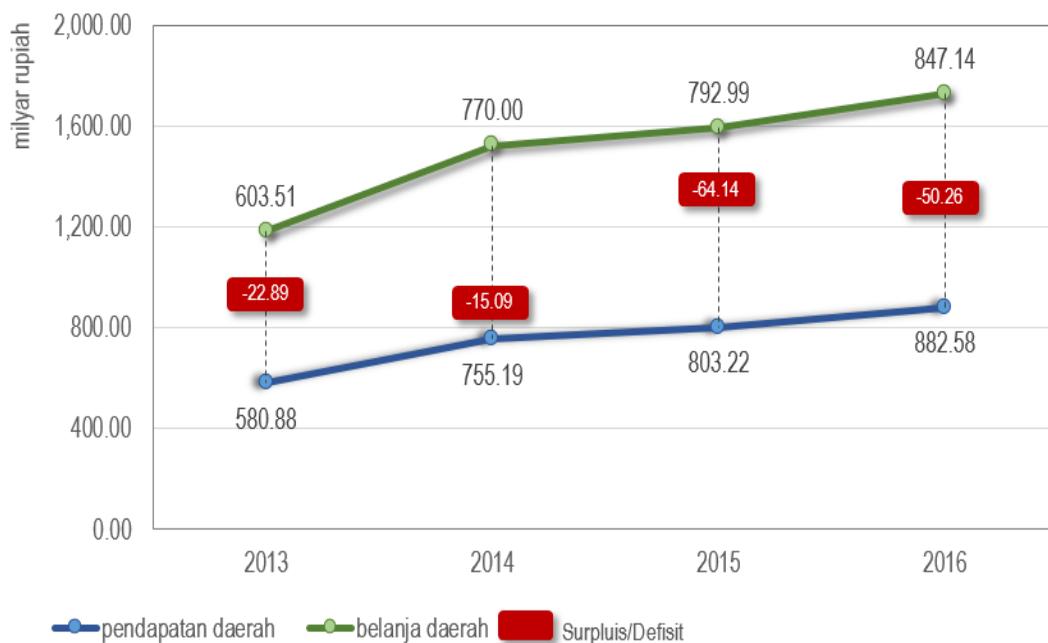
Pada tahun 2014 realisasi belanja cenderung sama atau tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2015 kinerja OPD pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai mulai menunjukkan peningkatan dengan jumlah realisasi belanja meningkat menjadi 90,85 persen dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 92,06 persen realisasi belanja. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya serap anggaran mengalami

perubahan yang cukup baik meskipun belum mampu menyerap anggaran hingga 100 persen.

3.1.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, sehingga anggaran pembiayaan merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Adapun arah dan kebijakan pembiayaan daerah dimaksud untuk menutup defisit anggaran dan membiayai program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2011-2015 melalui peningkatan manajemen pembiayaan daerah guna mendukung akurasi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 3.5.
Perkembangan Surplus/Defisit APBD Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016



Sumber : DPKAD Kabupaten Dogiyai, 2017 (data diolah)

Kondisi pembiayaan daerah dipengaruhi oleh sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Kabupaten Dogiyai sepanjang tahun 2013-2016 mengalami defisit anggaran. Pada tahun 2013, APBD Kabupaten Dogiyai mengalami defisit anggaran mencapai Rp22,894 miliar kemudian mengalami defisit yang paling tinggi pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Defisit tahun 2014 sebesar Rp15,093 miliar, tahun 2015 sebesar Rp64,144 miliar dan pada tahun 2016 sebesar Rp50,261 milyar.

Kondisi APBD yang mengalami defisit tersebut berpengaruh dominan terhadap jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap total penerimaan pembiayaan pada tahun selanjutnya. Selain itu penerimaan pembiayaan juga didapat dari pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah. Selain itu pengeluaran pembiayaan juga dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dan pemberian pinjaman daerah.

Tabel 3.5.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016
A. Surplus/Defisit	-22.894.986.418	-15.093.576.890	-64.144.995.305	-50.261.996.185
B. Pembiayaan Netto	178.475.495.747	152.580.509.329	131.616.932.439	62.277.534.634
1. Penerimaan Pembiayaan	180.475.495.747	155.580.509.329	137.486.932.439	64.277.534.634
SiLPA TA sebelumnya	180.475.495.747	155.580.509.329	137.486.932.439	64.277.534.634
Pencairan dana cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
2. Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	3.000.000.000	5.870.000.000	2.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.000.000.000	3.000.000.000	2.370.000.000	
Pembayaran Pokok Utang			3.500.000.000	2.000.000.000
Pemberian Pinjaman Daerah				
Pembayaran Kegiatan Lanjutan				

Uraian	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga				
C. SILPA	155.580.509.329	137.486.932.439	67.471.937.134	12.015.538.449

Sumber : DPKAD Kabupaten Dogiyai, 2017 (data diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan PP 24/2005. Laporan ini sangat penting artinya bagi manajemen pemerintah daerah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Seperti halnya dalam dunia usaha banyak pihak yang sangat berkepentingan terhadap Neraca daerah, bukan hanya pihak eksekutif daerah saja tetapi juga legislatif, masyarakat dan pengguna lainnya untuk mengetahui kualitas aset yang dimiliki oleh daerah dan bagaimana pengelolaannya apakah telah dilakukan secara efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 3.6.
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016
TOTAL ASET	849.443.069.837	1.139.503.283.077	1.189.086.615.215	1.374.622.658.073
ASET LANCAR	162.544.987.038	140.802.637.557	71.432.771.789	19.332.382.124
Kas di Kas Daerah	153.752.640.542	136.959.408.048	63.407.643.090	13.267.478.222
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.313.768.000	2.535.290.500	4.144.148.100	1.389.845.037
Kas di Bendahara Penerimaan		33.622.408		33.833.256
Piutang Pajak				19.475.000
Piutang Lainnya	6.478.578.496	867.867	598.302.035	526.972.094
Persediaan		1.273.448.734	3.282.678.564	4.094.778.515
INVESTASI JANGKA PANJANG	8.000.000.000	11.000.000.000	13.370.000.000	13.370.000.000
Investasi Nonpermanen				
Investasi Permanen	8.000.000.000	11.000.000.000	13.370.000.000	13.370.000.000
Penyertaan Modal pada BUMD	8.000.000.000	11.000.000.000	13.370.000.000	
Investasi Permanen Lainnya				13.370.000.000
ASET TETAP	675.305.135.799	984.107.698.520	1.100.690.896.426	1.317.150.671.413
Tanah	50.209.630.000	60.417.730.000	71.116.174.000	88.561.674.074
Peralatan dan Mesin	120.074.161.920	145.237.680.462	180.097.168.141	213.672.669.218
Gedung dan Bangunan	285.416.092.826	400.529.334.238	497.053.186.488	554.148.358.958

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	202.384.448.528	357.255.530.295	510.829.652.259	689.232.727.760
Aset Tetap Lainnya	17.220.802.525	20.667.423.525	21.066.387.325	25.327.765.525
Konstruksi dalam Pengerjaan			20.885.500.000	23.913.167.000
Akumulasi Penyusutan			-200.357.171.787	-277.705.691.122
DANA CADANGAN				
ASET LAINNYA	3.592.947.000	3.592.947.000	3.592.947.000	24.769.604.536
Aset Lain-Lain	3.592.947.000	3.592.947.000	3.592.947.000	24.769.604.536
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	849.443.069.837	1.139.503.283.077	1.189.086.615.215	1.374.622.658.073
KEWAJIBAN	485.899.213	2.041.388.517	4.173.522.257	4.509.718.444
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	485.899.213	2.041.388.517	4.173.522.257	4.509.718.444
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	485.899.213	2.041.388.517	79.854.056	2.501.810.892
Utang Jangka Pendek Lainnya			4.093.668.201	2.007.907.552
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
EKUITAS DANA	848.957.170.624	1.137.461.894.560	1.184.913.092.958	1.370.112.939.629
EKUITAS DANA LANCAR	162.059.087.825	138.761.249.040	1.184.913.092.958	1.370.112.939.629
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	155.580.509.329	137.486.932.439	1.184.913.092.958	1.370.112.939.629
Cadangan Piutang	6.478.578.496	867.867		
Cadangan Persediaan		1.273.448.734		
EKUITAS DANA INVESTASI	686.898.082.799	998.700.645.520		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	8.000.000.000	11.000.000.000		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	675.305.135.799	984.107.698.520		
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	3.592.947.000	3.592.947.000		
EKUITAS DANA CADANGAN				

Sumber : DPKAD Dogiyai (2017) dan DJPK Kemenkeu RI (2017)

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap Neraca yang telah diselenggarakan dan disusun. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah dan Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas antara lain terdiri dari *Current Ratio*, *Cash Ratio*, *Quick Ratio*, dan *Working Capital to*

Total Assets. Rasio lancar merupakan rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Sedangkan Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah. Dan *Working Capital to Total Assets* adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto.

Setelah rasio likuiditas, berikutnya yang juga selalu digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah dari sisi neraca ada rasio solvabilitas. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 3.7.
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
1. Modal Kerja	162.059.087.825	138.761.249.040	67.259.249.532	14.822.663.680
2. Current Ratio	334,52	68,97	17,12	4,29
3. Cash Ratio	321,19	68,35	16,19	3,26
4. Quick Ratio	334,52	68,35	16,33	3,38
5. Working Capital to Total Assets	0,19	0,12	0,06	0,01
6. Rasio Solvabilitas	1748,19	558,20	284,91	304,81
7. Total Debt to Equity Ratio	0,00057	0,00179	0,00352	0,00329
8. Total Debt to Capital Assets Ratio	0,00072	0,00207	0,00379	0,00342

Sumber : DPKAD Dogiyai (2017) dan DJPK Kemenkeu RI (2017), data diolah

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan daerah yang menyajikan informasi mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Dogiyai menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 3.7 kinerja keuangan daerah Kabupaten Dogiyai selama tahun 2013-2016 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Modal Kerja

Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan angka positif yaitu sebesar

Rp162.059.087.825, Rp138.761.249.040, Rp67.259.249.532 dan Rp14.822.663.680. Angka positif tersebut berarti sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan nilai tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dapat menghadapi krisis keuangan.

2) Rasio Lancar (*Curent Ratio*)

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio lancar neraca keuangan pemerintah kabupaten Dogiyai tahun 2013 sebesar 334,52, tahun 2014 sebesar 68,97, tahun 2015 sebesar 17,12 dan tahun 2016 sebesar 4,29. Nilai ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten Dogiyai mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan asset lancarnya namun di sisi lain terjadi penurunan nilai rasio lancar dari tahun ke tahun memberi pertanda yang kurang baik yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah Dogiyai.

3) Rasio Kas

Hasil perhitungan rasio kas pada pemerintah kabupaten Dogiyai pada Tahun 2013 sebesar 321,19. Tahun 2014 sebesar 68,35, Tahun 2015 sebesar 16,19 dan Tahun 2016 sebesar 3,26. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pemerintah kabupaten Dogiyai memiliki masih mampu memenuhi utang yang harus segera dipenuhi dengan kas dan efek. Nilai tersebut sudah baik tetapi pemerintah Dogiyai harus tetap memantau adanya penurunan rasio kas.

4) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai rasio cepat pemerintah kabupaten Dogiyai pada Tahun 2013 sebesar 334,52, Tahun 2014 sebesar 68,35, Tahun 2015 sebesar 16,33 dan Tahun 2016 sebesar 3,38. Hasil perhitungan tersebut memperlihatkan nilai yang baik namun terjadi penurunan kualitas. Hal ini berarti pemerintah Dogiyai memiliki aset yang cukup untuk membayar utang namun perlu mewaspadaai turunnya kemampuan aset di dalam menutup utang.

5) Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset (*Working Capital to Total Assets*)

Hasil perhitungan rasio modal kerja terhadap total aset di atas menunjukkan 0,19 pada Tahun 2013, 0,12 di Tahun 2014, 0,06 di Tahun 2015 dan 0,01 di Tahun 2016. Hal ini menunjukkan modal kerja pemerintah kabupaten Dogiyai cukup baik karena semakin tinggi nilai rasio

modal kerja makin kecil jumlah pinjaman yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

6) Rasio Solvabilitas

Hasil perhitungan rasio solvabilitas pada pemerintah kabupaten Dogiyai Tahun 2013 sebesar 1748,19, Tahun 2014 sebesar 558,20, Tahun 2015 sebesar 284,91 dan Tahun 2016 sebesar 304,81. Dari nilai-nilai rasio solvabilitas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Dogiyai memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang-utangnya baik utang jangka pendek maupun jangka panjang meskipun penurunannya harus diwaspadai.

7) Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

Hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa tahun 2013 rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,00057, Tahun 2014 sebesar 0,00179, Tahun 2015 sebesar 0,00352 dan Tahun 2016 sebesar 0,00329. Jumlah yang sama dengan rasio utang terhadap aset modal tersebut menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten Dogiyai untuk melunasi utang jika melakukan pinjaman kepada kreditur.

8) Rasio Utang terhadap Aset Modal (*Total Debt to Capital Assets Ratio*)

Hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa tahun 2013 rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,00072, Tahun 2014 sebesar 0,00207, Tahun 2015 sebesar 0,00379 dan Tahun 2016 sebesar 0,00342. Jumlah tersebut menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten Dogiyai untuk melunasi utang jika melakukan pinjaman kepada kreditur.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Definisi ini dapat diartikan bahwa semakin besar pendapatan daerah maka semakin besar pula kekayaan bersih pemerintah daerah. Hal ini dapat juga diartikan bahwa semakin besar pendapatan yang diterima akan semakin banyak pula program dan kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung tersedianya sumber pendapatan yang memadai, Pemerintah Kabupaten Dogiyai akan berupaya untuk meningkatkan besarnya sumber-sumber pendapatan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan,

pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Dogiyai selama ini dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang ada, kebijakan umum yang telah dilaksanakan selama tahun 2013-2016 antara lain:

1. Mendorong peningkatan pendapatan daerah dari komponen-komponen penerimaan PAD yang masih memiliki peluang dan potensi intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
2. Mengupayakan tercapainya laju pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10% per tahun dari pencapaian tahun sebelumnya;
3. Dana Perimbangan diharapkan minimal sama besarnya dari realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan asumsi masih terjadi *fiscal gap* antara pendapatan-belanja daerah, dengan mengupayakan ketepatan dan kelancaran dalam realisasinya;
4. Optimalisasi dana APBN dan APBD Provinsi untuk menunjang pembangunan daerah;
5. Optimalisasi aset daerah untuk peningkatan PAD.

Kebijakan pendapatan daerah yang dilaksanakan tetap dalam upaya optimalisasi seluruh potensi pendapatan dan menekan sekecil mungkin kebocoran pendapatan, sehingga kebijakan yang diarahkan dalam upaya tersebut secara spesifik dapat disebutkan yaitu :

1. Perencanaan target PAD didasarkan pada potensi, terukur secara rasional tidak semata-mata didasarkan dari capaian tahun sebelumnya;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
3. Peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia;
4. Peningkatan koordinasi antar OPD pengelola pendapatan;
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
6. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga;

7. Pemenuhan ketentuan-ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam memperoleh dana dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi maupun sumber lainnya;
8. Optimalisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;
9. Melakukan penyempurnaan data base obyek pajak daerah;
10. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah.

3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah selama ini untuk menjamin semua belanja yang dilakukan seoptimal mungkin digunakan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan dan dicapai hasilnya pada tahun berkenaan. Dimana arah pengelolaan belanja daerah selama periode sebelumnya di Kabupaten Dogiyai sebagai berikut :

- a. Pengeluaran didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
- b. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
- c. Semua pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
- d. Semua pengeluaran didukung dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arah pengelolaan belanja tersebut merupakan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam pengelolaan belanja daerah untuk menjaga kontinuitas dan tertib anggaran.

Pada prinsipnya, secara umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis dan prioritas daerah.

Belanja berkaitan erat dengan upaya pengalokasian dana yang diterima sebagai pendapatan untuk melaksanakan kegiatan menuju pencapaian tujuan. Untuk menjaga supaya setiap rupiah yang tersedia benar-benar secara relevan digunakan untuk melaksanakan program prioritas, disusunlah kebijakan umum pengelolaan belanja daerah, yang meliputi:

- a. Peningkatan porsi belanja publik, dimana belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur.
- b. Peningkatan alokasi belanja pembangunan infrastruktur dasar.
- c. Peningkatan alokasi belanja pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan.
- d. Peningkatan alokasi belanja pembangunan sarana dan prasarana di bidang kesehatan.
- e. Peningkatan alokasi belanja untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang proporsional.

Kebijakan belanja daerah tetap diarahkan dalam upaya penyelesaian permasalahan daerah, dan pemberian prioritas pada belanja-belanja pelayanan masyarakat. Kebijakan pengelolaan belanja daerah dalam periode 2013-2016 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja non urusan atau program di setiap OPD digunakan untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan, serta penyediaan fasilitas umum lainnya yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
- c. Belanja dalam rangka peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Hal ini disebabkan minimnya ketersediaan jalan kabupaten yang dapat menghubungkan koneksitas antar Distrik dan antar kampung;

- d. Menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat seperti pasar tradisional;
- f. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- g. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- h. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman, pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
 - 2) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang - undangan;
 - 3) Dana alokasi umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum beserta tunjangan-tunjangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta kinerja pegawai;

- 4) Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping/*cost sharing* pada program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Belanja Pegawai.
- 1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) berdasarkan beban kerja dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai yang direncanakan;
 - 4) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku;
 - 5) Pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.
- j. Hibah dan Bantuan Sosial
- 1) Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dan alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam KUA PPAS;

- 2) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

k. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, pemerintah kampung/desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah kampung atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan atau desa penerima bantuan;
- 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah kampung penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana

pendamping dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan;

- 3) Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, dalam APBD kabupaten, urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan kabupaten tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD Kabupaten, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke kas penerima bantuan.
- 4) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

1. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan antara lain :

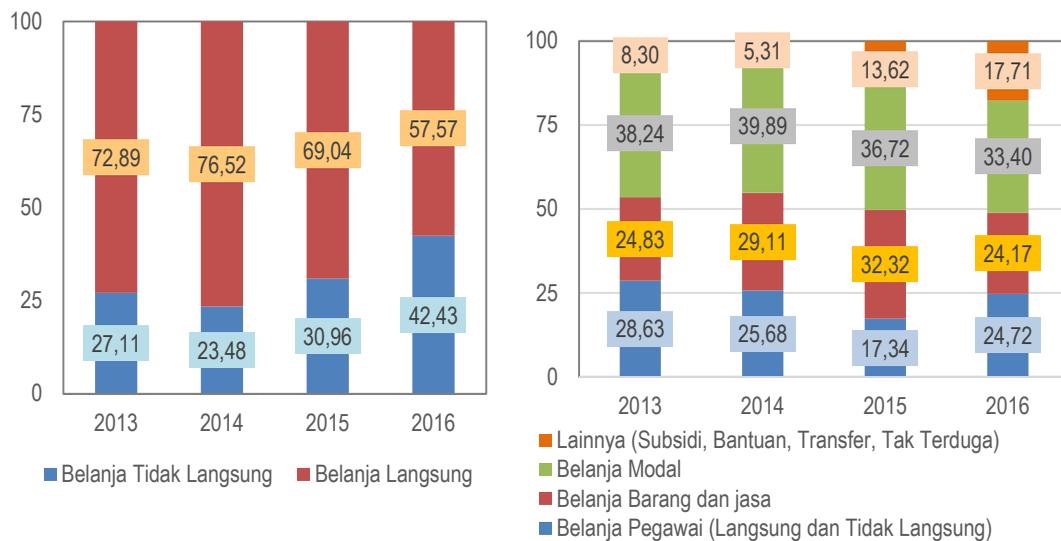
- a) Mengutamakan belanja yang bersifat wajib (*fix-cost*) yaitu belanja pegawai.

- b) Menganggarkan belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja yaitu belanja program di setiap SKPD, belanja urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang disyaratkan;
- d) Kualitas anggaran, dalam alokasi belanja tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan peraturan terkait jumlah alokasi untuk bidang tertentu, namun juga harus memperhatikan kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- e) Terarah, terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia;
- f) Wajib menyediakan anggaran pendamping dan anggaran bantuan operasional bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak lainnya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan sepanjang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik kegiatan yang pelaksanaannya hanya 1 (satu) tahun anggaran maupun kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears);
- g) Selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang;
- h) Kegiatan-kegiatan skala Desa maupun kegiatan skala Dusun akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa Kabupaten, Dana Desa dari APBN dan Bantuan Keuangan;
- i) Kegiatan-kegiatan skala Kelurahan maupun kegiatan skala Lingkungan akan dibiayai melalui Bantuan Operasional Kelurahan program infrastruktur kelurahan;
- j) Pengalokasian belanja kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta prasarana infrastruktur jalan dan jembatan harus memperhatikan aspek pemerataan, keseimbangan antar wilayah dan keterpaduan dengan program/kegiatan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang tengah dilaksanakan.
- k) Penggunaan Anggaran dari Dana Alokasi Umum, diutamakan untuk mencukupi belanja wajib daerah utamanya pembayaran

Gaji Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alokasi belanja daerah Kabupaten Dogiyai sepanjang tahun 2013-2016 lebih besar pada belanja langsung yang terlihat fluktuatif dikisaran angka rata-rata 69 persen per tahun, namun dengan kecenderungan yang menurun semenjak tahun 2014 hingga tahun 2016, dimana pada tahun tersebut proporsi belanja langsung menjadi 57,57 persen dalam struktur belanja daerah.

Gambar 3.6.
Komposisi Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Ekonomi
Di Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam %)



Sumber : DJPK Kemenkeu RI, 2017 (data diolah)

Adapun jika diperhatikan pada komposisi belanja wajib, terlihat komponen belanja modal sangat dominan selama periode 2013-2016. Diperkirakan rata-rata alokasi belanja untuk pengadaan modal mencapai 37,06 persen per tahun, yang tampak mengecil dari tahun 2014. Komponen berikutnya yang juga mendapat porsi terbesar adalah belanja barang dan jasa yang mencapai 27,61 persen per tahun. Berdasarkan komposisi belanja seperti ini, dapatlah dikatakan bahwa alokasi belanja yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai selama ini sudah cukup ideal. Rincian

belanja tidak langsung dan belanja langsung di Kabupaten Dogiyai selama ini disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Dogiyai Tahun 2013-2016
(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
A.	Belanja tidak langsung	98.214,19	108.497,08	161.134,84	237.496,59
	1. Belanja gaji dan tunjangan	82.585,62	95.236,05	142.331,07	204.816,59
	2. Belanja tambahan penghasilan	12.889,98	10.493,05	16.187,05	26.794,15
	3. Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	2.391,26	2.401,80	2.141,49	2.258,91
	4. Belanja Pemungutan Pajak Daerah	347,33	366,18	475,22	626,94
B.	Belanja Langsung	110.021,26	147.364,96	149.700,95	134.253,49
	1. Belanja Honorarium PNS	13.220,73	10.746,07	9.942,87	7.422,96
	2. Belanja uang lembur	1.172,39	1.322,40	1.311,61	1.111,04
	3. Belanja beasiswa Pendidikan PNS	467,57	157,08	328,25	169,86
	4. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.039,94	2.409,54	2.893,73	2.486,00
	5. Belanja premi asuransi kesehatan	327,94	291,44	150,26	62,73
	6. Belanja makan dan minum pegawai	482,40	803,25	333,28	327,57
	7. Belanja pakaian dinas dan atributnya	753,94	860,18	761,98	701,27
	8. Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	510,22	604,81	777,33	764,39
	9. Belanja perjalanan dinas	8.019,80	12.072,98	7.493,21	6.648,89
	10. Belanja perjalanan pindah tugas				
	11. Belanja pemulangan pegawai				
	12. Belanja Modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	83.026,32	118.097,20	125.708,41	114.558,78
	Total	208.235,45	255.862,04	310.835,78	371.750,08

Sumber : DJPK, 2017 (data diolah)

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

Kebijakan pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai selama ini adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).** Besarnya SILPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran berjalan adalah hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya, dengan demikian manakala terdapat angka SILPA adalah bersifat prediksi yang bisa diakibatkan karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah.
- 2) Penerimaan pinjaman daerah.** Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SILPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah.
- 3) Penerimaan pembiayaan yang lain.** Dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah.** Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan atau barang daerah dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Bank Papua.

2) Pembayaran pokok hutang. Pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk pembayaran pokok hutang pemerintah daerah.

3) Pengeluaran pembiayaan yang lain. Pengeluaran berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

3.3. Kerangka Pendanaan

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang.

Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun. Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2013 sampai dengan 2016 yang selanjutnya dijustifikasi dengan dinamika pembangunan di masa mendatang.

Tabel 3.9.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022
(dalam juta rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	954.177,17	1.013.944,17	1.079.939,88	1.148.595,57	1.222.834,31
Pendapatan Asli Daerah	10.129,49	10.969,29	12.047,18	12.606,30	12.774,86
Pajak daerah	1.957,33	2.261,93	3.127,58	3.412,22	3.519,20
Retribusi daerah	142,05	152,98	160,65	173,02	173,21
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.350,57	1.370,13	1.482,36	1.510,14	1.530,21
Lain-lain PAD yang sah	6.679,55	7.184,25	7.276,58	7.510,92	7.552,24
Dana Perimbangan	751.832,99	807.224,65	859.308,99	923.997,23	995.350,72
Dana Bagi Hasil	47.897,84	51.154,03	54.692,01	58.027,38	61.479,77

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Alokasi Umum	528.239,20	577.356,67	614.786,85	672.467,22	738.466,78
Dana Alokasi Khusus	175.695,94	178.713,95	189.830,12	193.502,63	195.404,17
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	192.214,68	195.750,23	208.583,72	211.992,04	214.708,73
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	150.524,35	153.109,98	162.633,56	165.779,91	167.409,02
Lain-lain	41.690,33	42.640,25	45.950,16	46.212,13	47.299,71

Sumber : data diolah (2018)

Berdasarkan penghitungan, proyeksi pendapatan untuk tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp 954.177,17 juta, serta meningkat menjadi Rp 1.013.944,17 juta pada tahun 2019. Dan diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2017-2022 total pendapatan daerah akan menjadi Rp 1.222.834,31 juta. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Guna memperoleh hasil proyeksi kapasitas riil dalam kerangka pendanaan, belanja daerah yang diproyeksi hanya belanja wajib dan mengikat. Dimana mengikuti trend belanja daerah periode sebelumnya, diproyeksikan belanja daerah tersebut untuk periode 2018-2022 mendatang akan mengalami kenaikan, walaupun besaran pertumbuhan berbeda-beda antar waktu, akan tetapi relatif sama setiap tahunnya yaitu rata-rata 9,16 persen per tahun. Selengkapnya proyeksi belanja daerah yang dimaksud untuk periode 2018-2022 sebagai berikut.

Tabel 3.10.
Proyeksi Belanja Daerah Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022
(dalam juta rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1. Belanja tidak langsung	268.582,66	309.538,93	350.657,94	391.688,46	432.886,75
Belanja gaji dan tunjangan	238.894,80	279.048,54	319.439,49	359.819,68	400.397,29
Belanja tambahan penghasilan	24.865,75	25.531,14	26.131,68	26.664,36	27.170,05
Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	4.488,37	4.608,47	4.716,88	4.813,02	4.904,31
Belanja Pemungutan Pajak Daerah	333,74	350,78	369,89	391,39	415,09
2. Belanja Langsung	138.601,21	150.910,86	163.219,48	172.835,02	183.079,47

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Honorarium PNS	14.855,42	15.841,34	16.730,72	17.710,92	18.589,49
Belanja uang lembur	2.951,96	3.062,07	3.145,31	3.238,28	3.304,58
Belanja beasiswa Pendidikan PNS	579,63	654,96	746,64	829,87	887,11
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.326,32	5.652,15	6.333,27	7.758,24	8.615,41
Belanja premi asuransi kesehatan	693,52	760,31	860,91	962,75	1.066,30
Belanja makan dan minum pegawai	659,89	713,75	763,26	824,53	867,03
Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.727,87	1.754,21	1.761,37	1.770,25	1.760,82
Belanja pakaian khusus dan hari- hari tertentu	2.520,46	2.909,89	3.302,94	3.735,25	4.165,51
Belanja perjalanan dinas	6.397,13	9.781,79	13.391,37	8.541,56	6.221,39
Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
Belanja pemulangan pegawai	-	-	-	-	-
Belanja Modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	371.471,68	419.319,33	466.841,65	519.151,84	570.488,58
3. Total Belanja Daerah	407.183,87	460.449,79	513.877,42	564.523,48	615.966,22

Sumber : data diolah (2018)

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Dogiyai diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan data dalam kurun waktu 2013-2016 daya serap belanja langsung rata-rata hanya 87.60 persen per tahun yang menyisakan anggaran yang tidak terserap sebesar 13,49 persen per tahun. Namun demikian, hal ini tidak dapat dikatakan seutuhnya bahwa sekitar 13,49 persen tersebut adalah merupakan efisiensi.

Berdasarkan kecenderungan daya serap di atas, maka dipastikan SILPA akan terus terjadi. Dimana untuk lebih moderatnya, berdasarkan perkembangan SILPA selama periode 2013-2016, diskenariokan SILPA setiap tahunnya rata-rata Rp 640 juta mengikuti kecenderungan periode sebelumnya yang dirasionalkan. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasi di atas Rp 640 juta, selisih tersebut akan diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial.

Perkiraan kapasitas kemampuan daerah ini disajikan secara indikatif, yang tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi

terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Selengkapnya secara indikatif kapasitas riil yang dimaksud tersaji sebagai berikut.

Tabel 3.11.
Perhitungan Kapasitas Riil Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022
(dalam juta rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	954.177.17	1.013.944.17	1.079.939.88	1.148.595.57	1.222.834.31
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	640	640	640	640	640
Total Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	954.817.17	1.014.584.17	1.080.579.88	1.149.235.57	1.223.474.31
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	407.183.87	460.449.79	513.877.42	564.523.48	615.966.22
Kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah	547.633.30	554.134.38	566.702.46	584.712.09	607.508.09
Tingkat Pertumbuhan Kapasitas Riil (dalam %)		1.19	2.27	3.18	3.90

Sumber : data diolah (2018)

3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di atas berupa total penerimaan/pendapatan yang direncanakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III. Dimana Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah dan kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, seperti untuk prioritas bidang pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 15 persen. Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat serta merupakan prioritas belanja wajib yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan program prioritas II merupakan program prioritas dalam menunjang urusan

pelayanan pemerintahan dari masing-masing OPD di Kabupaten Dogiyai. Program prioritas kedua ini sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas utama. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada Distrik dan pemerintahan kampung serta belanja tidak terduga.

Besarnya rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022 untuk pembangunan Prioritas I, II dan III sebagai berikut.

Tabel 3.12.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Keuangan Daerah
Kabupaten Dogiyai Tahun 2018-2022
(dalam juta rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Prioritas I	373.068,66	384.954,80	394.489,30	407.750,60	406.935,60
Prioritas II	130.772,83	132.325,30	135.326,50	139.627,10	145.070,70
Prioritas III	43.791,81	36.854,28	36.886,66	37.334,39	55.501,79
Total	547.633,30	554.134,38	566.702,46	584.712,09	607.508,09

Sumber : data diolah (2018)

Keterangan :

1. Dalam implementasinya Prioritas I diperuntukan sebagai belanja program-program pelayanan publik yang dilaksanakan oleh setiap OPD, seperti untuk urusan kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya;
2. Sedangkan Prioritas II merupakan belanja yang juga untuk pelaksanaan program namun yang dapat mendukung pelaksanaan dari Prioritas I, misalkan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
3. Terakhir untuk Prioritas III terdiri atas komponen belanja seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada Distrik dan pemerintahan kampung serta belanja tidak terduga.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJM atau RPJP). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Berbagai masalah pembangunan daerah yang krusial dan harus segera diatasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang telah berhasil diidentifikasi. Dimana permasalahan pembangunan yang dimaksud berhasil diungkap berdasarkan analisis kondisi faktual dinamika sosial ekonomi makro di Kabupaten Dogiyai sepanjang tahun 2013-2016, sebagaimana yang telah divisualisasikan dalam pembahasan sebelumnya. Berikut ini dipaparkan pokok-pokok permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Dogiyai.

- 1. Bidang Pelayanan Publik.** Rendahnya pelayanan pemerintahan akibat belum efektif dan efisien manajemen pemerintahan, dan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, transparan dan akuntabel.
- 2. Bidang Sumber Daya Manusia.** Rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik pada penyelenggara pemerintahan maupun

masyarakat, yang berdampak terhadap rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat.

- 3. Bidang Pendidikan.** Rendahnya mutu pendidikan dan akses pendidikan bagi masyarakat, serta kurang optimalnya tata kelola terutama yang menyangkut dengan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan.
- 4. Bidang Kesehatan.** Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat akibat rendahnya perilaku hidup sehat, buruknya manajemen kesehatan, rendahnya kualitas dan kuantitas pengelola kesehatan dan tenaga medis, minimnya fasilitas kesehatan dan terbatasnya obat-obatan dan peralatan medis.
- 5. Bidang Ekonomi.** Rendahnya tingkat perekonomian daerah atau tingkat kesejahteraan masyarakat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya etos dan kemampuan berusaha/berwiraswasta bagi masyarakat, kurangnya modal usaha, minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian, kesenjangan ekonomi/peluang usaha antara orang asli Papua dan kaum migran, dan lemahnya kreativitas dan keberpihakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6. Bidang Sarana dan Prasarana.** Terbatasnya infrastruktur umum dan infrastruktur dasar seperti sarana dan prasarana jalan dan jembatan, sarana perkantoran, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana perekonomian, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi, sarana komunikasi, dan sarana rumah layak huni dan sanitasi untuk masyarakat.
- 7. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.** Rendahnya pendapatan keuangan daerah dan lemahnya pengelolaan keuangan daerah, akibat tidak mengembangkan sumber pendapatan asli daerah dan tidak mengikuti prinsip transparansi, efisiensi, efektif, akuntabilitas dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 8. Bidang Keamanan Dan Ketertiban Umum.** Tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tingginya tingkat

pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran nilai-nilai demokrasi, dan maraknya berbagai penyakit sosial.

9. Bidang Perencanaan Pembangunan Dan Tata Ruang. Belum optimalnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMP), dan produk-produk hukum daerah sebagai landasan pokok pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, masih adanya sengketa tapal batas wilayah pemerintahan antara Kabupaten Dogiyai dengan Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Kaimana yang berimbas pada sengketa tanah adat dan penjarahan terhadap sumber daya alam.

10. Bidang Lingkungan Hidup. Tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup, penjarahan terhadap sumber daya alam, penjualan dan pembelian tanah adat, pengrusakan terhadap nilai adat dan budaya, pengrusakan/penerobosan wilayah sakral, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai keagamaan.

11. Bidang Otonomi Khusus. Ketidakpahaman tentang esensi Otonomi Khusus Papua dan pengabaianya dalam proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat, dengan lebih mengutamakan aturan-aturan sektoral sebagai landasan hukum dalam seluruh proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat, yang berakibat pada gagalnya implementasikan Otonomi Khusus Papua.

Seluruh pokok masalah pembangunan tersebut diatas dapat dielaborasi lebih jauh sebagai rumusan isu strategis menurut urusan pembangunan sebagai berikut.

(a). Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf pada penduduk;
- Akses penduduk terhadap Sekolah Dasar dan Menengah (Wajib Belajar Sembilan Tahun) masih rendah;

- Belum idealnya rasio antara guru dengan murid di seluruh jenjang pendidikan;
- Belum idealnya rasio murid ruang belajar untuk jenjang SD dan SMP
- Kesulitan sekolah dalam menerapkan kurikulum, dan Manajemen Berbasis Sekolah yang bermutu;
- Tenaga pengajar/guru masih sangat kurang dan menyebar tidak merata antar Distrik/kampung;
- Rendahnya tingkat kesejahteraan guru;
- Tingkat kemangkiran guru dalam mengajar masih sangat tinggi;
- Belum memadainya tenaga guru sesuai jumlah bidang mata pelajaran;
- Kapasitas sekolah dalam mengelola Dana BOS masih belum efektif dan optimal;
- Minimnya ketersediaan data dan informasi di sektor pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

- Terbatasnya Tenaga Bidang Kesehatan Di unit Pelayanan Puskesmas dan Pustu;
- Belum memadainya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Pustu ;
- Meningkatnya kasus penyakit malaria dan gangguan pernapasan;
- Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak;
- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- Belum optimalnya pengelolaan data-data strategis kesehatan untuk tingkat kampung, Distrik, kabupaten, provinsi dan pusat;
- Minimnya ketersediaan data dan informasi di sektor kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Aksesibilitas dan mobilitas penduduk yang sangat rendah

- Masih banyak Distrik/kampung yang terisolasi, dan belum diterobos oleh jalan dan jembatan;
- Banyaknya jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat;
- Jumlah jalan dalam kondisi mantap dan fungsional masih sedikit;
- Pendirian bangunan dan pelaksanaan konstruksi belum didukung dengan regulasi IMB;
- Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang Daerah Aliran Sungai (DAS);
- Kurangnya prasarana jaringan air bersih layak minum;
- Belum tersedianya jaringan irigasi yang memadai;
- Pelaksanaan Tata Ruang belum dilaksanakan optimal;
- Adanya indikasi konflik batas-batas antar kabupaten dan Distrik;

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- Masih banyaknya jumlah penduduk yang belum memiliki rumah yang layak untuk ditempati;
- Pembangunan kawasan permukiman masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup;
- Minimnya ketersediaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

- Belum memadainya sarana dan prasarana keamanan lingkungan di setiap kampung/Distrik;
- Kurangnya sarana dan prasarana tenaga keamanan Polri dan TNI, Satpol PP dan Linmas;
- Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- Kasus minuman keras (Miras), kekerasan ringan dan berat yang cukup tinggi;
- Belum memadainya Regulasi (Perda) tentang Trantib;

6. Urusan Sosial

- Minimnya penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga adat;
- Tingginya jumlah penduduk miskin, fakir miskin dan keluarga prasejahtera;
- Terbatasnya pengembangan pembangunan fisik, sarana dan prasarana daya angkut tiga denominasi (kelompok) gereja;
- Terbatasnya pendidikan keagamaan nonformal di tiga denominasi gereja;
- Tingginya pengaruh negatif di lingkungan sosial seperti miras, seks bebas, judi dan lain-lain;
- Belum teridentifikasinya dengan baik dan lengkap Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan pada masyarakat adat terpencil;
- Minimnya data dan informasi mengenai jumlah fakir miskin, keluarga prasejahtera, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan lain-lain.

(b). Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

- Tingkat keahlian dan pendidikan tenaga kerja lokal yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar;
- Produktifitas tenaga kerja yang masih rendah;
- Belum banyak terbukanya kesempatan kerja di sektor formal maupun informal di bidang jasa dan industri;
- Adanya ketimpangan kesempatan kerja antara penduduk lokal dan pendatang;
- Belum memadainya data dan informasi tentang ketenagakerjaan.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

- Belum terlaksananya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di berbagai bidang dan sektor;

- Belum memadainya pelatihan, pembinaan dan pendampingan untuk mewujudkan kemandirian perempuan;
- Masih banyaknya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap ibu dan anak;

3. Urusan Pangan

- Rendahnya tingkat ketahanan pangan yang teridentifikasi dengan masih adanya kerentanan dan kerawanan pangan di daerah-daerah Distrik/kampung pelosok;
- Belum terciptanya swasembada pangan;
- Belum berkembangnya upaya keanekaragaman atau diversifikasi pangan lokal;
- Belum terciptanya swasembada pangan;
- Penggunaan teknologi pangan yang belum memadai.

4. Urusan Pertanahan

- Adanya konflik kepentingan pertanahan;
- Belum optimalnya penerapan regulasi hak tanah adat dalam pembangunan;
- Kurang adanya kepastian hukum kepemilikan tanah.
- Belum tersedianya data dan informasi mengenai kepemilikan tanah adat.

5. Urusan Lingkungan Hidup

- Belum tersedianya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah;
- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang limbah/sampah;
- Adanya ancaman perubahan iklim, banjir dan bencana longsor;
- Belum adanya pemetaan titik-titik daerah rawan banjir dan longsor;
- Belum optimalnya penyiapan mitigasi bencana bagi daerah-daerah yang memiliki kerawanan bencana;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia di bidang mitigasi bencana.

6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Cukup tingginya tingkat urbanisasi ke pusat kabupaten seiring dengan pembangunan yang lebih berfokus di pusat kabupaten;
- Belum tertatanya data-data kependudukan secara baik dan benar.
- Masih belum optimalnya pelayanan dokumen kependudukan, dan minimnya sarana dan prasarana terhadap pelayanan publik;
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil;
- Minimnya kualitas dan kuantitas data dan informasi kependudukan dan catatan sipil.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung

- Belum optimalnya kapasitas dan kelembagaan pemerintahan kampung;
- Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur kampung dalam manajemen dan pengelolaan keuangan kampung;
- Belum memadainya partisipasi berbagai golongan masyarakat dalam pembangunan kampung;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan kampung;
- Rentang kendali pemerintahan kampung yang masih panjang dan sulit ditempuh;
- Tingkat kemandirian masyarakat kampung belum memadai;
- Pemberdayaan masyarakat kampung belum dilaksanakan secara optimal.

8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Tingginya arus urbanisasi ke pusat ibukota kabupaten;
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- Belum optimalnya Kesehatan Reproduksi;
- Belum adanya data perempuan usia produktif;
- Belum memadainya Tenaga Penyuluh KB;

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan keluarga yang sejahtera.

9. Urusan Bidang Perhubungan

- Belum memadainya moda transportasi darat, udara dan laut untuk keluar masuk wilayah kabupaten;
- Belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan udara;
- Tingginya biaya transportasi udara dan darat penghubung antar kabupaten;
- Belum tersedianya terminal transportasi darat yang memadai;
- Tidak adanya armada angkutan yang bergerak dari titik asal ibukota kabupaten.

10. Urusan Komunikasi Dan Informatika

- Belum memadainya cakupan dan akses pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat;
- Belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informatika;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan daerah

11. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

- Terbatasnya sarana dan prasarana koperasi dan UMKM;
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap koperasi;
- Terbatasnya akses transportasi ekonomi masyarakat;
- Belum tersedianya Badan Usaha Kampung;
- Terbatasnya pemahaman sistem manajemen usaha yang baik;
- Belum tumbuhnya inisiatif berusaha dalam bidang perdagangan dan UMKM pada penduduk lokal;
- Belum optimalnya upaya pembinaan UMKM;
- Belum berkembangnya usaha-usaha mikro dan kecil yang memanfaatkan potensi unggulan daerah;
- Tidak tersedianya data dan informasi mengenai potensi UMKM yang dapat diunggulkan.

12. Urusan Bidang Penanaman Modal

- Belum optimalnya upaya promosi investasi pada investor domestik maupun asing;
- Belum memadainya Infrastruktur daerah sehingga belum menarik minat investasi;
- Masih rendahnya Daya Saing Daerah;
- Tidak tersedianya data dan informasi yang berkualitas mengenai potensi-potensi investasi unggulan daerah.

13. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

- Pembinaan Pemuda masih sangat kurang;
- Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan rendah kualitasnya;
- Belum memadainya prestasi dan budaya olahraga di kalangan masyarakat;
- Belum tergarapnya potensi dan partisipasi pemuda dalam percepatan pembangunan daerah;
- Adanya kecenderungan budaya luar yang mempengaruhi moral para pemuda;
- Belum tersedianya data dan informasi tentang kepemudaan.

14. Urusan Statistik

- Belum optimalnya ketersediaan data data statistik pembangunan daerah;
- Kurangnya kordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
- Belum memadainya sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam hal pendataan dan statistik daerah.

15. Urusan Kebudayaan

- Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat;
- Kurangnya pembinaan kepada generasi muda tentang etika dan berdasarkan budaya daerah dalam pembentukan kepribadian dan etika dalam kehidupan sosial;

- Budaya Mee yang belum banyak dipromosikan;
- Belum dioptimalkannya peranan kepala suku dan dewan adat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sebagai akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
- Kurangnya pengakuan terhadap peran lembaga adat dan hak ulayat.

16. Urusan Bidang Perpustakaan

- Belum tersedianya fasilitas perpustakaan umum bagi masyarakat, baik di pusat kabupaten maupun di Distrik dan kampung;
- Kurangnya perhatian pemerintah pada urusan perpustakaan;
- Kesadaran masyarakat terhadap budaya membaca masih rendah.

17. Urusan Kearsipan

- Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam mendokumentasikan berbagai kekayaan arsip daerah;
- Belum tertatanya arsip daerah.

(c). Urusan Pilihan

1. Urusan Pertanian

- Masih rendahnya pola budi daya dalam usaha tani;
- Belum berkembangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- Skala Usaha pertanian masyarakat yang masih subsistem;
- Kurang memadainya sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- Belum memadainya tenaga penyuluh pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

2. Urusan Perikanan

- Kurangnya sumber benih unggul;
- Pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam budi daya ikan masih sangat rendah;
- Tenaga penyuluh budi daya ikan yang masih belum memadai;
- Masih tingginya budaya subsisten dan meramu di sektor perikanan;
- Ketersediaan data dan informasi tentang pembudidayaan ikan belum memadai.

3. Urusan Kehutanan

- Masih maraknya pembakaran hutan dalam pembukaan lahan;
- Belum optimalnya upaya konservasi lahan dan pelestarian sumber daya kehutanan;
- Belum optimalnya Pemanfaatan lahan untuk budidaya;
- Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan;
- Tidak tersedianya regulasi yang terkait konservasi hutan.

4. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

- Belum terlaksananya pengembangan pusat-pusat industri mikro dan kecil berbasis kerakyatan;
- Belum tertatanya pedagang kecil;
- Belum adanya upaya Revitalisasi pasar tradisional;
- Tidak optimalnya promosi produk-produk unggulan lokal;
- Tidak adanya subsidi pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil lokal.

5. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral;

- Masih rendahnya pemenuhan listrik bagi masyarakat;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi energi lokal terhadap pengembangan dan pemanfaatan energi yang terbarukan;

- Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan terhadap peraturan dan perundang-undangan di sektor energi dan sumber daya mineral;
- Belum terlaksananya survey/kajian geologi secara keseluruhan terhadap struktur, pergerakan tanah dan potensi, cekungan dan konservasi air tanah.

6. Urusan Pariwisata

- Belum optimalnya Pengembangan destinasi dan objek pariwisata;
- Tidak memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata;
- Belum adanya pemetaan potensi-potensi budaya dan pariwisata yang dapat menjadi unggulan daerah;
- Ketersediaan data dan informasi tentang pariwisata masih belum valid dan lengkap.

(d). Urusan Pemerintahan Penunjang

1. Urusan Bidang Pemerintahan Umum

- Belum optimalnya penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kebutuhan;
- Tupoksi seluruh ODP belum terukur;
- Belum optimalnya jangkauan dan kualitas pelayanan publik;
- Belum optimalnya pembinaan pemerintahan Distrik dan kampung;
- Belum terlaksananya pembudayaan zona integritas;
- Upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan masih belum memadai;
- Belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi yang mendorong terciptanya tatanan pemerintahan yang baik.

2. Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian

- Belum optimalnya penataan dan prosedur dalam kenaikan pangkat, pengurusan jaminan asuransi, dan administrasi kepegawaian;

- Minimnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten, Distrik maupun kampung;
- Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Kepegawaian belum terlaksana secara harmonis dan sinkron;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan
- Masih rendahnya profesionalisme birokrasi
- Belum berkembangnya sistem *reward* dan *punishment* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Masih rendahnya budaya kerja birokrasi.

3. Urusan Keuangan Daerah

- Rendahnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- Belum optimalnya penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan daerah;
- Rendahnya kemandirian keuangan daerah;
- Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
- Rendahnya daya serap belanja untuk semua program;
- Belum terbangunnya unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah;

4. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Belum dilaksanakannya perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*);
- Belum adanya Tenaga Fungsional Perencanaan;
- Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah dan lintas sektor;
- Masih lemahnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal antar OPD, maupun pada tataran horizontal dengan pemerintah pusat, provinsi, Distrik dan kampung;

- Belum tertatanya seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik antar sektoral maupun perwilayahan pembangunan;
- Belum terciptanya keserasian perencanaan pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan kampung;
- Kurangnya data dan informasi dalam mendukung dokumen perencanaan.

4.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa depan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan, gambaran umum kondisi daerah; isu internasional, isu nasional dan isu regional.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

(a). *Sustainable Development Goals*

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara Anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka

akan menjadi basis utama untuk proses antar-pemerintah pasca-2015. Agenda yang dimaksud adalah :

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan
3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia
4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua
7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara Negara-negara
11. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya
14. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayat

16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

(b). ASEAN Economic Community (AEC)

Komunitas ekonomi asean (AEC) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada 2015. Adapun berikut karakteristik kunci dari perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015:

1. Pasar tunggal dan produksi dasar,
2. Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif
3. Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan, dan
4. Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Bidang kerjasama AEC meliputi pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas; pengakuan kualifikasi profesional; konsultasi mengenai kebijakan makroekonomi dan keuangan; langkah-langkah pembiayaan dalam perdagangan; peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi; perkembangan elektronik transaksi melalui e-ASEAN; mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber di daerah; dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk bangunan AEC. Singkatnya, AEC akan mengubah ASEAN ke wilayah dengan pergerakan bebas dari barang, Jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan lebih bebas aliran modal.

Pemberlakuan AEC akan mengakibatkan Barang, jasa, dan tenaga kerja semakin mudah untuk lalu lalang di negara anggota ASEAN. Bagi Indonesia, kesepakatan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Jika diolah dan dikelola dengan baik, produk dan tenaga kerja Indonesia berpotensi merajai pasar Asia Tenggara. Sebaliknya, jika tak siap berkompetisi, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara anggota ASEAN lain.

Demikian juga bagi Kabupaten Dogiyai, *Asean Economy Community* ini menjadi sebuah prospek baru untuk membuka arus investasi seiring dengan keterbukaan Kabupaten Dogiyai yang ramah terhadap investor. Penguatan pasar lokal dan regional menjadi perhatian utama guna

mempersiapkan pasar bebas yang berimplikasi pada eksistensi pengusaha lokal untuk dapat berdaya saing dengan pengusaha asing.

4.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional

Selain memerhatikan isu skala internasional dan regional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan adalah isu strategis nasional yang dalam hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa “Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins.

4.2.3. Isu Pembangunan Regional

Kabupaten Dogiyai merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Papua. Karenanya sangatlah relevan jika permasalahan pembangunan regional yang dijadikan sebagai isu-isu strategis Kabupaten Dogiyai mengacu kepada RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018, yang mana dalam konteks kewilayahan isu strategis pembangunan tingkat regional untuk wilayah Papua meliputi;

1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua sebagai yang terendah di Indonesia;
2. Masih rendahnya akses masyarakat asli Papua pada pendidikan dasar dan menengah termasuk non-formal akibat rendahnya ketersediaan layanan pendidikan untuk masyarakat di daerah terpencil, pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi geografis dan pola permukiman serta budaya masyarakat setempat;
3. Belum tersedianya sistem jaminan pemenuhan biaya pendidikan gratis (operasional dan personal) dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah khususnya bagi Orang Papua Asli sesuai mandat UU Otsus, menyebabkan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat;
4. Masih rendahnya akses masyarakat asli Papua pada pemenuhan kesehatan dasar akibat rendahnya ketersediaan sarana kesehatan, rendahnya distribusi tenaga kesehatan dan non kesehatan, ketersediaan obat-obatan secara merata, serta tingginya biaya kesehatan akibat belum meratanya distribusi jaminan kesehatan masyarakat;
5. Masih tingginya angka kematian ibu, kematian bayi baru lahir dan balita, angka balita kurang Gizi, serta penyakit endemis malaria dan menular berbahaya;
6. Masih rendahnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau dengan sanitasi lingkungan dan air bersih yang bermutu dan ketersediaan listrik yang merata;
7. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat perkotaan dan pedesaan karena pemberdayaan ekonomi yang belum sepenuhnya bertumpu pada kekuatan ekonomi kerakyatan dalam memastikan adanya mata pencaharian (livelihood) yang

menyebabkan rendahnya nilai tambah dan produktivitas di wilayah pedesaan;

8. Masih rendahnya angka kemandirian fiskal akibat belum optimalnya pemanfaatan sumber pendapatan asli daerah dari produk unggulan daerah non migas diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta sumber pendapatan un-conventional lainnya;
9. Dis-harmony hubungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota akibat *miss-management* dalam penetapan orientasi dan strategi pembangunan sehingga meninggalkan peran kabupaten/kota sebagai jenjang pemerintahan dengan kewenangan tersendiri
10. Terbaikannya peran masyarakat Adat termasuk perempuan Papua dalam pembangunan;
11. Pembangunan infrastruktur strategis yang tidak berkesinambungan sehingga koneksitas antar daerah masih terhambat;
12. Pengendalian dan pengurangan aksi korupsi, kolusi dan nepotisme belum berjalan dengan baik
13. Tidak jelasnya *mind set* dan *culture-set* birokrasi pemerintah daerah yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas pelayanan publik dalam pencapaian prioritas pembangunan
14. Penataan dan pemanfaatan ruang bagi pembangunan tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten/ Kota maupun stakeholder lainnya;
15. Belum optimalnya pengembangan potensi olahraga, prestasi dan perlindungan nyata atas kekayaan intelektual serta kebudayaan luhur asli Papua;
16. Rendahnya kepercayaan investor karena belum adanya upaya konstruktif dalam penegakan hukum, pengembangan sistem informasi pembangunan daerah yang mendukung pertumbuhan investasi daerah yang berorientasi pada pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

4.3. Telaah Dokumen Perencanaan Terkait

4.3.1. Telaah RPJP Nasional, RPJPD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten

Rencana Pembangunan Jangka Panjang baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten wajib untuk dijadikan dasar dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022. Berdasarkan telaah yang dilakukan, periode perumusan RPJMD Kabupaten Dogiyai beririsan dengan RPJP Nasional pada tahap Ketiga (2015-2019), RPJPD Provinsi Papua pada tahap Ketiga (2015-2019), dan RPJPD tahap Ketiga (2005-2025).

Tabel 4.1.
Telaah RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten

RPJP Nasional 2005-2025		RPJP Provinsi Papua 2005-2025		RPJPD Kabupaten 2005-2025 *	
Tahapan	Prioritas	Tahapan	Prioritas	Tahapan	Prioritas
Tahapan Ketiga (2015-2019)	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat	Tahapan Ketiga (2017-2022)	Memantapkan Pembangunan yang didukung SDM yang Berkualitas dan Kemapanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Lingkungan	Tahapan Ketiga (2015-2020)	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia

* Masih mengacu pada RPJPD Kabupaten Induk (Kabupaten Nabire)

Sesuai dengan telaah pada Tabel 4.1 diatas prioritas pembangunan jangka panjang pada tahap ketiga, baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten merumuskan prioritas yang sama yaitu: *“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas”*.

Prioritas RPJP ini harus dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perumusan Visi RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 yang secara substansial memuat upaya untuk lebih meningkatkan pembangunan secara menyeluruh dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, dan menggunakan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tinggi.

4.3.2. Telaah RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Papua

Disamping melakukan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang di tingkat nasional, provinsi dan daerah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022, juga harus beririsan dengan RPJM Nasional dan Provinsi Papua. Penyesuaian ini disamping untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, juga menjadi pendorong pencapaian rencana pembangunan di Kabupaten Dogiyai.

Berdasarkan telaah yang dilakukan, terdapat benang merah yang kuat antara dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi Papua. Dari visi yang ditetapkan, antara RPJMN dan RPJMD Provinsi Papua memiliki aspek yang identik pada perwujudan kemandirian dan kepribadian/berakhlak. Sedangkan jika diturunkan pada misi, antara nasional dan Provinsi Papua juga memiliki kesamaan dan irisan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Telaah RPJM Nasional 2015-2019 Dan RPJMD Provinsi Papua 2013-2018

Visi RPJMN 2015-2019 : Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong		Visi RPJMD Provinsi Papua 2013- 2018 : Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera	
No.	Misi	No.	Misi
1.	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	1.	Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI
2.	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus
4.	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	3.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia
5.	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	4.	Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis

Visi RPJMN 2015-2019 : Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong		Visi RPJMD Provinsi Papua 2013- 2018 : Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera	
No.	Misi	No.	Misi
			Potensi Lokal
		5.	Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Hasil penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi ini akan menjadi kerangka acuan pada saat merumuskan visi dan misi RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022.

4.3.3. Telaah RTRW Provinsi Papua Dan RTRW Kabupaten Dogiyai

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang tata ruang lestari, aman, nyaman dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem Papua.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Papua secara garis besarnya mencakup : (1) wilayah, (2) struktur ruang, (3) pola ruang, dan (4) kawasan strategis, yang dijabarkan kedalam 9 (sembilan) strategi kebijakan yaitu :

1. Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
2. Strategi pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Strategi perlindungan serta peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal;
4. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional;

5. Strategi perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi, dan lintas kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan, keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara;
6. Strategi pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
7. Strategi peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang;
8. Strategi peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat;
9. Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya dari sudut pandang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan kawasan lainnya

Berdasarkan perencanaan kewilayahan Papua, Kabupaten Dogiyai masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berpusat pada Distrik Kigamani. Selain itu juga ditempatkan sebagai kawasan yang strategis yang mencakup : (1) Kawasan Strategis Ekonomi bagian barat bersama dengan Kabupaten Deyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Paniai, (2) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup wilayah pantai utara dan kepulauan bersama dengan Kabupaten Nabire, Waropen, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori, Sarmi, Jayapura, Mamberamo Raya, dan Kota Jayapura, dan (3) Kawasan strategis lainnya, yaitu wilayah bagian tengah yang merupakan wilayah bergambut, ekosistem alpin, dan ekosistem sub-alpin bersama dengan Kabupaten Paniai, Puncak, Intan Jaya, Puncak Jaya, Tolikara, Memberamo Tengah, dan Yalimo.

Tujuan Penataan ruang wilayah Kabupaten Dogiyai adalah *“Mewujudkan Kabupaten Dogiyai yang berbasis potensi dan keunggulan komoditas lokal melalui pembangunan infrastruktur dengan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan serta memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan”*. Dimana secara garis besar rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2034 meliputi sistem pusat kegiatan dan rencana pengembangan sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Telaah RTRW Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2034

No.	Rencana Struktur Ruang Wilayah	Sistem Pusat Kegiatan	Rencana Pengembangan
-----	--------------------------------	-----------------------	----------------------

No.	Rencana Struktur Ruang Wilayah	Sistem Pusat Kegiatan	Rencana Pengembangan
1.	Pusat-Pusat Kegiatan	Sistem Perkotaan	Pusat Kegiatan Lokal
			Pusat Kegiatan Lokal Promosi
			Pusat Pelayanan Kawasan
		Sistem Perkampungan	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
2.	Sistem Prasarana Utama	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Jaringan Jalanan
			Jaringan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
		Sistem Jaringan Transportasi Udara	Bandara Pengumpan
			Ruang Udara Untuk Penerbangan
			Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
3.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Jaringan Energi	Pembangkit Tenaga Listrik;
			Jaringan Prasarana Energi
		Sistem Jaringan Telekomunikasi	Sistem Jaringan Terrestrial
			Sistem Jaringan Nirkabel
		Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Wilayah Sungai (WS)
			Cekungan Air Tanah (CAT)
			Daerah Irigasi (DI)
			Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih
			Jaringan Air Minum Ke Kelompok Pengguna
			Sistem Pengendalian Banjir Erosi, dan Longsor
		Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan	Sistem Pengelolaan Persampahan
			Sistem Jaringan Air Minum
			Jaringan Air Minum Ke Kelompok Pengguna
			Sistem Pengelolaan Limbah
			Sistem Jaringan Drainase
			Jalur Evakuasi Bencana.

4.3.3. Telaah RPJMD Kabupaten Lainnya Yang Berbatasan

Secara geografis wilayah Kabupaten Dogiyai dikelilingi oleh 5 (lima) kabupaten lainnya yang berdekatan, yaitu di sebelah utara dengan Kabupaten Nabire, sebelah Timur dengan Kabupaten Paniai dan Deyai, sebelah selatan dengan Kabupaten Mimika, dan sebelah barat dengan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai dan Mimika, ditemukan adanya kesamaan substansi misi pembangunan sebagai berikut.

Tabel 4.4.
Telaah RPJMD Kabupaten Berbatasan Yang Masih Berlaku
Di Wilayah Papua

Misi Kabupaten Deiyai 2013-2018	Misi Kabupaten Paniai 2013-2018	Misi Kabupaten Mimika 2014-2019	Misi Kabupaten Nabire 2016-2021
<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Tenram, Serta Berbudaya Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa Serta Taat Hukum; Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat; Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat; Meningkatkan kesejahteraan Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dan Non Lokal; Membangun Infrastruktur Dasar Yang Mendukung Pembangunan Di Segala Bidang Berdasarkan Asas Pemerataan Dan Manfaat Bagi Masyarakat; Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender, Serta Peningkatan Peran Pemuda Dan Pembinaan Olah Raga 	<ol style="list-style-type: none"> Menciptakan Paniai Pintar Membangun Paniai Sehat Mewujudkan Paniai Kenyang Dengan Produksi Sendiri Terbukanya Isolasi Daerah Sampai Di Tingkat Distrik Hinga Ke Kampung Menjadikan Paniai Terang Membangun Masyarakat Yang Religius Menciptakan Aparatur Yang Profesional Dan Bebas KKN Menciptakan Paniai Aman Dan Tertib Mengangkat Budaya Dan Kearifan Lokal Guna Memperkuat Jati Diri Orang Mee Sebagai Manusia Sejati 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Meningkatkan Modal Sosial Dan Kapasitas Kelembagaan Sosial Berbasis Kebersamaan. Mendorong Penegakan Hukum Dan HAM Untuk Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah; Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel; Membangun Perekonomian Lokal Berbasis Potensi Sumberdaya Strategis Melalui Pengembangan Inovasi Dan Investasi; Membangun Sarana Prasarana Pelayanan Dasar Dan Infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> Mempercepat Pengembangan Dan Pembangunan Infrastruktur Serta Konektivitas Daerah Berbasis Mitigasi Bencana Dengan Tetap Mempertahankan Fungsi Lingkungan. Mewujudkan Rasa Aman, Nyaman, Dan Tenram Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Dan Kelembagaan Melalui Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Yang Berorientasi Pada Pembangunan Berkelanjutan. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Mendorong Kinerja Ekonomi Berbasis Kerakyatan. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berilmu, Berbudaya, Dan Berdaya Saing Serta Berwawasan Lingkungan

Dari Tabel 4.4 di atas teridentifikasi bahwa ada 6 (enam) aspek/bidang pembangunan yang perlu mendapat perhatian dalam perumusan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022, terkait dengan

misi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Paniai, Deiyai, Nabire dan Mimika. Keenam bidang yang dimaksud adalah : (1) keamanan dan ketertiban, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) infrastruktur, (5) ekonomi kerakyatan, dan (6) *good and clean governance*.

Keempat daerah ini merupakan daerah yang rawan dengan gangguan keamanan, termasuk juga dengan Dogiyai. Oleh karenanya dengan menempatkan misi yang sama yaitu meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan tertib, maka setiap daerah yang berbatasan dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan lebih baik dalam upaya mengatasi, mencegah dan memberantas gangguan keamanan yang dapat melintasi wilayah administrasi masing-masing daerah.

Kualitas pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Mee Pago, termasuk Kabupaten Dogiyai, terkategori rendah untuk wilayah Papua. Sehingga upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan, mutu dan akses pendidikan menjadi pilihan misi bersama di setiap wilayah kabupaten tersebut. Dengan adanya kesamaan misi ini maka kerjasama pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas antarkabupaten dapat lebih mudah diwujudkan.

Setiap daerah kabupaten yang berbatasan dengan Dogiyai, semuanya memiliki prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang sama, yaitu sistem ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi lokal dan berkelanjutan. Adanya kesamaan ini karena daerah-daerah tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang tidak berbeda jauh satu sama lainnya dimana seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia adalah milik rakyat, oleh sebab itu pengelolaannya harus dari rakyat dan untuk rakyat.

Keterisolasian yang menjadi sumber kemiskinan dan ketimpangan pembangunan wilayah sangat dirasakan sekali di daerah-daerah Mee Pago. Bahkan di daerah yang kaya akan tambang seperti di Kabupaten Mimika, kemiskinan masih terlihat mencolok di sana akibat kurangnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu dalam upaya membuka keterisolasian yang dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah pada kantong-kantong kemiskinan, peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi, mulai dari transportasi darat, udara dan laut menjadi misi bersama dari keempat daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Dogiyai tersebut. Sudah tentu hal ini patut diperhatikan oleh Kabupaten Dogiyai dalam merumuskan RPJMD tahun 2017-2022.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi Kebijakan

Dalam rangka menciptakan pembangunan Kabupaten Dogiyai lima tahun kedepan (2017-2022) yang lebih terarah, visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan serta telah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam strategi yang akan menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), dengan tahapannya meliputi:

- a. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats) dan mengkaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. Setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan di ketahui alternatif-kebijakan, dari alternatif strategi di rumuskan satu strategi utama untuk mencapai sasaran serta memecahkan masalah dan isu strategis;
- b. Menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.
- c. Untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif yaitu :
 - 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
 - 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process);
 - 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
 - 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost- effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan

dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan berbagai langkah dan pemetaan strategi yang merujuk kepada Analisa SWOT dan lintas empat perspektif di atas telah dapat dirumuskan strategi-strategi kebijakan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan guna mewujudkan visi Kabupaten Dogiyai periode 2017-2022, yang diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan bidang pembangunan yaitu Bidang Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Pembangunan Ekonomi, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Lingkungan Hidup dan *Good Governance*, sebagai berikut.

1. Bidang Good Governance, dengan strategi :

- a. Mengoptimalkan sistem pelayanan dan kinerja layanan publik yang responsif, representatif, dan bertanggung jawab, serta adil dan merata;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- c. Mengembangkan sistem pelayanan kependudukan yang profesional;
- d. Menciptakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil pada warga;
- e. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel;
- g. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah;
- h. Mengoptimalkan fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Membuat birokrasi yang efisien dengan menekan seminimal mungkin struktur-struktur yang tidak diperlukan di dalam birokrasi;
- j. Menempatkan dasar penilaian pada kinerja atau *performance based*;
- k. Netralisasi birokrasi tanpa intervensi politik;
- l. Menciptakan sistem pengawasan yang mampu memberikan peluang bagi inovasi-inovasi kebijakan pelayanan publik;

- m. Meningkatkan kapasitas OPD dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi;
- n. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan pemerintahan kampung.

2. Bidang Kesehatan, dengan strategi

- a. Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, kontinu dan berkualitas;
- b. Meningkatkan kesehatan ibu dan bayi;
- c. Meningkatkan kesehatan dan lingkungan masyarakat;
- d. Meningkatkan gizi ibu dan anak;
- e. Meningkatkan promosi kesehatan masyarakat;
- f. Meningkatkan kapasitas Puskesmas dalam melaksanakan P2M (Pemberantasan Penyakit Menular).

3. Bidang Pendidikan, dengan strategi :

- a. Meningkatkan pendidikan non formal;
- b. Mengoptimalkan penerapan MBS pada semua sekolah;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan;
- d. Meningkatkan akses pendidikan untuk semua jenjang pendidikan;
- e. Standarisasi pendidikan dasar sembilan tahun;
- f. Mengembangkan Sistem Pendataan dan Informasi Pendidikan berbasis teknologi.

4. Bidang Ekonomi, dengan strategi :

- a. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian;
- b. Mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan;
- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada semua sektor
- d. Meningkatkan daya beli rumahtangga;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang;
- f. Mervitalisasi pengakuan hak-hak adat tentang kepemilikan modal produktif dalam pembangunan wilayah;

- g. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya;

5. Bidang Sarana dan Prasarana, dengan strategi :

- a. Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap secara merata dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas melalui perhubungan udara secara merata;
- c. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, berkualitas dan memenuhi standar minimal;
- d. Mengoptimalkan tata ruang sesuai daya dukung lahan dan wilayah;
- e. Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar yang prima.

6. Bidang Sosial Budaya, dengan strategi :

- a. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan kriminalitas
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan agama di tingkat sekolah;
- c. Mengoptimalkan penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tempat-tempat ibadah
- e. Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama;
- f. Merevitalisasi kampung adat berbasis kearifan lokal;
- g. Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan kearifan lokal;
- h. Meningkatkan pendidikan berkarakter dan berbudaya lokal;
- i. Mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal;
- j. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal ;
- k. Menempatkan pengarusutamaan gender pada seluruh aspek pembangunan;
- l. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan rumah tangga;
- m. Mencegah dan mengurangi pekerja anak yang masih dibawah umur;
- n. Menjamin kesejahteraan penduduk usia lanjut;
- o. Meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam keluarga;

- p. Mengembangkan SDM pemuda melalui kelembagaan pemuda dan penyediaan sarana dan prasarana kemajuan pemuda;
- q. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas remaja secara preventif dan persuasif;
- r. Melaksanakan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan proses tumbuh kembang remaja;
- s. Memberikan konseling realitas untuk mengurangi kecemasan pada korban pelecehan dan kekerasan seksual;
- t. Menumbuhkembangkan dan memberdayakan bakat dan kapasitas pemuda dalam seni budaya dan olah raga.

7. Bidang Lingkungan Hidup, dengan strategi :

- a. Mengurangi eksploitasi yang berlebihan terhadap alam melalui penggunaan sumber daya alam secara efisien;
- b. Meningkatkan pemanfaatan citra satelit dalam pengelolaan hutan lestari;
- c. Mengimplementasikan arsitektur akuntabilitas pelaksanaan SDGs;
- d. Meningkatkan kualitas kawasan hijau melalui refungsi kondisi kawasan eksisting dan daya dukung lahan;
- e. Meningkatkan kesadaran penduduk untuk menjaga ekologi dan ekosistem daerah aliran sungai;
- f. Mengoptimalkan perlindungan dan pencegahan kerusakan hutan;
- g. Mengendalikan pemanfaatan kawasan konservasi hutan melalui penguatan hukum konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati;
- h. Mengimplementasikan rencana aksi keanekaragaman hayati.

Seluruh strategi kebijakan di atas, jika diselaraskan dengan misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 6.1.
Keselarasan Misi dengan Strategi Kebijakan**

Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berasaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan prinsip pelayanan yang prima		

Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalisme penyelenggara pelayanan publik	Mengoptimalkan sistem pelayanan dan kinerja layanan publik yang responsif, representatif, dan bertanggung jawab, serta adil dan merata
		Meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna
	Optimalnya pelayanan kependudukan yang prima kepada masyarakat, dengan mengutamakan kepuasan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan hak-hak dan kewajiban kependudukan warga Negara	Mengembangkan sistem pelayanan kependudukan yang profesional
		Menciptakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil pada warga
Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
		Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
		Mengoptimalkan fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatkan manajemen pemerintahan daerah otonom baru	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran kampung yang berkualitas	Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
	Optimalnya pelayanan distrik	Mengoptimalkan fungsi pelayanan distrik
	Optimalnya manajemen penataan daerah otonom baru	Mengoptimalkan manajemen penataan daerah otonom baru
Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan kesehatan yang prima		
Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkesinambungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, kontinu dan berkualitas
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan	Meningkatnya status dan derajat kesehatan	Meningkatkan kesehatan ibu dan bayi

Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi
kesehatan masyarakat	masyarakat	Meningkatkan kesehatan dan lingkungan masyarakat
		Meningkatkan gizi ibu dan anak
Meningkatkan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit	Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan promosi kesehatan masyarakat
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kemampuan intelektual, emosional dan spiritual secara berimbang		
Meningkatkan pendidikan yang berkualitas merata	Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat	Meningkatkan pendidikan non formal
		Mengoptimalkan penerapan MBS pada semua sekolah
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan
	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan dasar 9 Tahun yang merata	Meningkatkan akses pendidikan untuk semua jenjang pendidikan
Optimalisasi tata kelola pendidikan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan
		Standarisasi pendidikan dasar sembilan tahun
		Mengembangkan Sistem Pendataan dan Informasi Pendidikan berbasis teknologi
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan investasi yang berpihak kepada masyarakat		
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan pemerataan pendapatan	Berkembangnya sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian/ peternakan/perikanan yang efisien dan berdaya saing	Meningkatkan produktifitas sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian/ peternakan/perikanan
	Meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Mengentaskan kemiskinan
		Mereduksi ketimpangan pendapatan
Meningkatkan kemampuan konsumsi	Meningkatnya daya beli rumah tangga	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada semua sektor
		Meningkatkan daya beli rumah tangga

Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi
penduduk	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketahanan pangan lokal	Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang
Mengimplementasikan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pengembangan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
Misi 5 : Mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian nilai dan kehidupan beragama, adat dan kebudayaan sebagai landasan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat		
Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama	Meningkatnya aktivitas pengamalan nilai-nilai agama	Meningkatkan kualitas pelayanan agama di tingkat sekolah
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tempat-tempat ibadah
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelestarian budaya dan adat istiadat lokal	Merevitalisasi pembangunan kampung kearifan lokal
		Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan kearifan lokal
		Meningkatkan pendidikan berkarakter dan berbudaya lokal
	Mengembangkan kuantitas dan kualitas seni budaya serta melestarikan kebudayaan daerah	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal
Misi 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam pembangunan berkelanjutan		
Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan pengrusakan lingkungan	Meningkatkan kualitas kawasan hijau melalui refungsi kondisi kawasan eksisting dan daya dukung lahan
		Meningkatkan kesadaran penduduk untuk menjaga ekologi dan ekosistem daerah aliran sungai
	Terkendalinya eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan penyebab bencana longsor	Mengurangi eksploitasi yang berlebihan terhadap alam melalui penggunaan sumber daya alam secara efisien

Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi
	dan banjir	
Misi 7 : Mengembangkan infrastruktur umum dan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pelestarian adat dan kebudayaan, serta lingkungan hidup secara berkelanjutan		
Meningkatkan konektivitas antarwilayah secara optimal	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan dalam menghubungkan antarwilayah serta akses distribusi produk utama	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap secara merata dan berkelanjutan
	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi udara	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas melalui perhubungan udara secara merata
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan perumahan layak huni	Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, berkualitas dan memenuhi standar minimal
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya berdasarkan tata ruang	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal berdasarkan tata ruang wilayah	Meningkatkan kepatuhan terhadap tata ruang dalam pembangunan wilayah
Misi 8 : Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta kesenian dan olah raga		
Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Menempatkan pengarusutamaan gender pada seluruh aspek pembangunan
Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan perempuan	Meningkatnya kualitas kehidupan dan kesejahteraan perempuan dan keluarga	Meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam keluarga
Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap pemuda dan remaja	Meningkatnya pemberdayaan pemuda	Mengembangkan SDM pemuda melalui kelembagaan pemuda dan penyediaan sarana dan prasarana kemajuan pemuda
	Meningkatnya perlindungan terhadap remaja	Melaksanakan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan proses tumbuh kembang remaja
		Memberikan konseling realitas untuk mengurangi kecemasan pada korban pelecehan dan kekerasan seksual
Meningkatkan	Meningkatnya prestasi olah	Menumbuhkembangkan dan memberdayakan bakat dan kapasitas

Misi / Tujuan	Sasaran	Strategi
kapasitas olah raga	raga	pemuda dalam olahraga
Misi 9 : Mengoptimalkan produk hukum daerah, jaminan keamanan, dan penegakan hak asasi manusia dan kehidupan berdemokrasi		
Optimalisasi produk-produk hukum daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum daerah	Meningkatkan penguasaan dan keterampilan aparaturnya dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat	Meningkatkan sinergitas dengan aparaturnya keamanan dalam mencegah dan menanggulangi kriminalitas
Menegakan Hak Asasi Manusia dan kehidupan berdemokrasi	Terwujudnya penegakan Hak Asasi Manusia	Meningkatkan pembangunan daerah yang peduli dengan HAM
	Meningkatnya kehidupan berdemokrasi	Meningkatkan penerapan demokrasi yang partisipatif
Misi 10 : Merevitalisasi Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua dalam segala aspek kehidupan sebagai implementasi dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Khusus Papua		
Menegakan hak-hak dasar Orang Asli Papua	Meningkatnya pembangunan yang peduli terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua	Merevitalisasi dan mengaktualisasi hak-hak dasar Orang Asli Papua
		Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kesejahteraan Orang Asli Papua
	Tingkat Kemiskinan Orang Asli Papua	Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan Orang Asli Papua
		Meningkatkan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berpihak pada Orang Asli Papua
		Meningkatkan fokus pembangunan infrastruktur dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua

6.2. Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama

lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinerjian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan. Adapun langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun;
3. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
4. Merumuskan draft arah kebijakan;
5. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
6. Memutuskan arah kebijakan.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Perumusan arah kebijakan harus memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, dimana setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Kesesuaian arah kebijakan terhadap strategi dapat lebih memfokuskan capaian sasaran dan tujuan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Dogiyai selama periode 2017-2022. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tema pembangunan merupakan payung utama pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada masing-masing tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Dogiyai selama 5 (lima) tahun pelaksanaan (2017-2022), yang dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

1. Tema Pertama Tahun 2018 :

Akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan merata yang didukung oleh tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang prima.

Tahun 2018 merupakan tonggak pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dogiyai 2017-2022, oleh sebab itu harus memiliki landasan yang kuat menjadi pondasi pembangunan untuk tahap-tahap berikutnya. Guna mewujudkan hal tersebut, dan berdasarkan pertimbangan bahwa tingkat kesejahteraan pada tahap pembangunan lima tahun sebelumnya menjadi basis yang mencukupi, maka akselerasi (percepatan) peningkatan kesejahteraan masyarakat mutlak dilaksanakan pada tahap awal ini yang mencakup peningkatan kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur dasar. Sudah barang tentu semua ini akan berhasil ditingkatkan apabila pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dilaksanakan dengan prima yang didukung dengan tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel, serta memperhatikan pengarusutamaan gender, pembangunan berkelanjutan dan kearifan lokal, yang juga diperkuat dengan regulasi daerah agar dapat berjalan *on the right track* sesuai visi dan misi yang ditetapkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tema Kedua Tahun 2019 :

Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan kearifan lokal yang didukung dengan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kehidupan sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Pada saat ini seluruh sumberdaya yang ada merupakan milik rakyat, dan diusahakan oleh rakyat. Oleh karena itu sudah sepatutnya pengembangan ekonomi kerakyatan ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Melalui program ekonomi kerakyatan diharapkan dapat terwujud masyarakat yang bahagia, serta dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, dengan memegang teguh aturan-aturan mengenai apa yang menjadi hak dan mana yang bukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk menumbuhkembangkan perilaku yang berbudaya dan memperhatikan pelestarian lingkungan. Beranjak dari konsep pemikiran itu semua, maka fokus pembangunan pada tahun kedua ini adalah menjamin pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan sepenuhnya, semakin ditingkatkan dan diperluas keseluruhan sektor produktif menggunakan berbagai potensi sumber daya wilayah yang tersedia yaitu kekayaan sumber daya alam, tenaga kerja lokal, modal yang dimiliki masyarakat adat, dan penggunaan teknologi tepat guna, serta didukung dengan kearifan para investor untuk memperhatikan dan melibatkan masyarakat adat dalam pengembangan usaha ekonomi.

3. Tema Ketiga Tahun 2020 :

Optimalisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, pemerataan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

Secara garis besarnya hak-hak dasar masyarakat tersebut melingkupi beberapa hal yaitu : (a) hak pribadi, hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan; (b) hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; (c) kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; (d) hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Semua hak dasar tersebut sudah dimiliki manusia sejak kelahiran pertama, hingga akhir hayatnya. Jika pemenuhan segala hak yang dimaksud ini dibiarkan mengikuti mekanisme liberal maka dipastikan akan terjadi ketimpangan yang tinggi, pengurusan sumber daya yang berlebihan, dan ketidakseimbangan dalam pembangunan

yang dapat mendistorsi pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu intervensi pemerintah kabupaten sebagai agen dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan guna mengoptimalkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tersebut antara lain berupa hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan, lingkungan yang berkelanjutan, berbudaya, beragama dan berdemokrasi. Agar pemenuhan hak-hak dasar dapat dilaksanakan dengan memuaskan dan sempurna, sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera dan bahagia, maka pemerintah kabupaten harus mewujudkannya secara adil dan merata, mengajak peran serta masyarakat, dan transparan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

4. Tema Keempat Tahun 2021 :

Peningkatan daya saing wilayah melalui pengembangan dan pemberdayaan segala potensi sumber daya yang unggul.

Dalam era kebebasan (globalisasi) yang saat ini dapat melintasi daerah pembangunan secara administrasi dan sektoral, sehingga kompetisi yang tinggi tidak dapat dihindari, maka sangat diperlukan adanya peningkatan keunggulan wilayah dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, tahun keempat ini merupakan moment pembangunan yang sangat tepat untuk meningkatkan daya saing wilayah (keunggulan kompetitif) yang sebelumnya sudah terbentuk di tahap pembangunan pertama, kedua dan ketiga (keunggulan komparatif). Peningkatan daya saing wilayah bukan hanya mencakup daya saing ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi dan informasi semata, namun yang penting juga meningkatkan daya saing di bidang sosial mencakup olah raga, seni budaya, kepemudaan, ketenagakerjaan, perempuan dan anak. Semua ini adalah potensi sumber daya yang dimiliki wilayah Kabupaten Dogiyai yang harus dikembangkan dan ditingkatkan keunggulannya menjadi lebih kompetitif melalui proses pembangunan yang memperhatikan kearifan lokal dan lingkungan hidup agar daya saing yang diwujudkan dapat berkelanjutan.

5. Tema Kelima Tahun 2022 :

Pemantapan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat yang taat beribadah dan patuh terhadap norma-norma agama.

Tahun ini merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dogiyai periode 2017-2022, yang juga sekaligus merupakan tahap yang paling penting dan strategis menjelang berakhirnya masa pembangunan jangka panjang 25 tahun. Dikatakan penting dan strategis, karena pada tahun ini dapat dinilai apakah hasil-hasil pembangunan yang dicapai sepanjang 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah sebelumnya bisa menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang 2005-2025. Terkait dengan hal tersebut maka di tahun terakhir ini Pemerintah Kabupaten Dogiyai akan lebih fokus memantapkan capaian pembangunan yang telah mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi sehingga masyarakat menjadi lebih bahagia secara fisik, memiliki pengetahuan, menghargai dan menciptakan keindahan seni budaya, dan berbagi kasih dengan orang lain, yang mana semuanya ini disempurnakan dengan taatnya masyarakat beribadah dan patuh terhadap ajaran agama.

Setelah di rumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan di rumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Tetapi, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Berikut ini disampaikan pemetaan horizon waktu perumusan arah kebijakan untuk Kabupaten Dogiyai selama periode 2017-2022 berdasarkan tema pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 6.3.
Pemetaan Waktu Arah Kebijakan

Arah Kebijakan	Tema I	Tema II	Tema III	Tema IV	Tema V
	2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik	x	x			
Peningkatan Sistem Kerasipan dan Perpustakaan Daerah	x	x			
Penerapan Sistem Rekrutmen Pegawai yang selektif dan kompetitif	x	x			

Arah Kebijakan	Tema I	Tema II	Tema III	Tema IV	Tema V
	2018	2019	2020	2021	2022
Penetapan Indikator Kerja dan Sistem Penilaian Kinerja ASN	x	x			
Pencegahan pembuangan limbah sampah rumah tangga di sungai	x	x			
Efisiensi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	x	x			
Peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial	x	x			
Peningkatan kesadaran penduduk terhadap pentingnya <i>legal identity</i> dalam kehidupan bernegara	x	x			
Pelaporan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan yang mengacu kepada prinsip-prinsip konsistensi, auditable, obyektif, komprehensif, informatif, dan akurat	x	x			
Penerapan sistem pelaporan berbasis pencapaian kinerja	x	x			
Penerapan perencanaan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan dan evaluatif	x	x			
Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, akuntabel dan komprehensif	x	x			
Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pemerintahan kampung	x	x			
Pemantapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah otonomi baru	x	x			
Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat	x	x			
Peningkatan upaya kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas	x	x			
Peningkatan kesehatan seribu hari pertama kehidupan bayi	x	x			
Pengembangan pendidikan keaksaraan dan kejar paket	x	x			
Revitalisasi kekuatan dan potensi pemuda untuk berkarya dalam segala aspek pembangunan	x	x			
Pemberian pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui penerapan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	x	x			

Arah Kebijakan	Tema I	Tema II	Tema III	Tema IV	Tema V
	2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana untuk beribadah	x	x			
Pemberdayaan institusi keagamaan	x	x			
Harmonisasi siar agama yang damai dan rukun	x	x			
Optimalisasi nilai-nilai adat istiadat dalam pengembangan upaya kesehatan masyarakat	x	x			
Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan aktivitas seni budaya lokal	x	x			
Pengembangan kapasitas pemuda untuk berkarya seni dan budaya lokal	x	x			
Pembinaan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan peraturan daerah	x	x			
Percepatan implementasi pembangunan yang peduli dengan HAM	x	x			
Pengembangan dan pemberdayaan institusi demokrasi baik secara formal maupun nonformal	x	x			
Peningkatan pengakuan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua	x	x			
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang layak dan memadai untuk kesejahteraan Orang Asli Papua	x	x			
Penguatan Kapasitas Kelambagaan Dewan	x	x	x		
Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat di setiap distrik/kampung	x	x	x		
Penanganan dan pencegahan penyakit sepuluh terbesar	x	x	x		
Penguatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	x	x	x		
Pengembangan sekolah mengacu pada standar pendidikan nasional	x	x	x		
Penguatan pendataan pendidikan pada semua sekolah	x	x	x		
Pengembangan struktur manajemen pelayanan administrasi kependudukan yang prima	x	x	x		
Perluasan lapangan kerja pada semua sektor produktif	x	x	x		
Pengendalian tingkat kemahalan harga	x	x	x		
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	x	x	x		
Peningkatan perlindungan penyandang	x	x	x		

Arah Kebijakan	Tema I	Tema II	Tema III	Tema IV	Tema V
	2018	2019	2020	2021	2022
disabilitas dalam ketenagakerjaan					
Peningkatan pengamalan dan penunaian ajaran agama	x	x	x		
Peningkatan kualitas dan kuantitas kapasitas masyarakat, kelembagaan dan promosi seni budaya lokal	x	x	x		
Promosi pemanfaatan sungai berbasis lingkungan hidup	x	x	x		
Peningkatan dan perluasan pembangunan jalan dan jembatan secara merata dan berkelanjutan	x	x	x		
Peningkatan preservasi jalan dan jembatan secara merata	x	x	x		
Pemenuhan kebutuhan air baku	x	x	x		
Pemberdayaan perempuan dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga	x	x	x		
Peningkatan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	x	x	x		
Pengembangan sumber daya aparatur dalam penyusunan peraturan daerah yang berkualitas	x	x	x		
Optimalisasi potensi dan peran aparatur keamanan dalam pencegahan, penanggulangan dan perlindungan terhadap masyarakat	x	x	x		
Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara merata dan berkelanjutan	x	x	x	x	
Pengarustamaan gender dalam perencanaan, penganggaran dan implementasi pembangunan sektoral	x	x	x	x	
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan Orang Asli Papua	x	x	x	x	
Pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi Orang Asli Papua	x	x	x	x	
Peningkatan derajat dan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua	x	x	x	x	
Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN sesuai dengan bidangnya	x	x	x	x	x
Penerapan layanan kependudukan yang cepat, murah dan transparan berdasarkan standard dan spesifikasi yang telah ditetapkan	x	x	x	x	x
Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	x	x	x	x	x
Peningkatan dan perluasan produk-produk hasil pertanian/peternakan/	x	x	x	x	x

Arah Kebijakan	Tema I	Tema II	Tema III	Tema IV	Tema V
	2018	2019	2020	2021	2022
perikanan					
Penguatan pembangunan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan, kemiskinan dan kearifan lokal	x	x	x	x	x
Reorientasi pengembangan industri mikro, kecil dan menengah yang berbasis kerakyatan	x	x	x	x	x
Pemeliharaan tempat-tempat ibadah secara merata dan meluas keseluruhan umat beragama	x	x	x	x	x
Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah dengan pelaksanaan pembangunan wilayah	x	x	x	x	x
Pemberian konseling pasca trauma pada korban pelecehan dan kekerasan seksual	x	x	x	x	x
Peningkatan kewaspadaan serta kesadaran masyarakat terhadap ancaman kriminalitas	x	x	x	x	x
Peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur perencana dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berkualitas yang berpihak pada Orang Asli Papua	x	x	x	x	x
Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat antardaerah		x	x	x	x
Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan		x	x	x	x
Optimalisasi peran tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam pengamalan ajaran-ajaran agama di sekolah		x	x	x	x
Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi			x	x	x
Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah			x	x	x
Penegakan tindak lanjut atas rekomendasi legal / hukum hasil pengawasan/audit yang dilakukan secara transparan dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			x	x	x
Revitalisasi pendidikan vokasional			x	x	x
Peningkatan tenaga kerja lokal yang berpendidikan tinggi			x	x	x
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan tenaga kerja yang siap pakai			x	x	x

Arah Kebijakan	Tema I	Tema II	Tema III	Tema IV	Tema V
	2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan jalan dan jembatan pada kawasan sentra produksi komoditi unggulan			x	x	x
Peningkatan sarana dan prasarana bandar udara			x	x	x
Pemberdayaan keluarga di bidang kesehatan dan gizi			x	x	x
Penguatan sistem pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan daerah otonom baru			x	x	x
Peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah terhadap MBS			x	x	x
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dalam pemberdayaan PMKS			x	x	x
Pengintegrasian pendidikan formal dan non formal terhadap nilai-nilai budaya Suku Mee			x	x	x
Perluasan kawasan hijau dan reboisasi lahan kritis			x	x	x
Pembinaan kesehatan reproduksi yang dilakukan secara terpadu			x	x	x
Harmonisasi produk-produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya			x	x	x
Optimalisasi fungsi dan peran lembaga HAM			x	x	x
Peningkatan layanan penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				x	x
Peningkatan sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas				x	x
Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan wilayah				x	x
Optimalisasi penyediaan sumber daya kesehatan				x	x
Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat mandiri				x	x
Peningkatan budaya sekolah (<i>school culture</i>) yang demokratis, transparan, dan akuntabel				x	x
Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian				x	x
Pengembangan kampung adat berbasis nilai-nilai budaya yang luhur				x	x

Arah Kebijakan	Tema I	Tema II	Tema III	Tema IV	Tema V
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengembangan sistem monitoring pencemaran udara berbasis teknologi				x	x

Keterangan :

1. Deskripsi setiap tema pembangunan sebagai berikut :

Tema I : Akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan merata yang didukung oleh tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang prima.

Tema II : Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan kearifan lokal yang didukung dengan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kehidupan sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Tema III : Optimalisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, pemerataan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

Tema IV : Peningkatan daya saing wilayah melalui pengembangan dan pemberdayaan segala potensi sumber daya yang unggul.

Tema V : Pemantapan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat yang taat beribadah dan patuh terhadap norma-norma agama.

2. Penempatan kebijakan yang berurutan bukan menunjukkan urutan kepentingan, oleh karena semua kebijakan adalah penting dan prioritas.

6.3. Program Pembangunan Daerah Dan Kerangka Pendanaannya

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Seperti halnya perumusan sebelumnya, dalam tahap perumusan program pembangunan daerah, proses pendampingan, masukan, kritik dan koreksi dari pusat terhadap provinsi, dan pendampingan, masukan, kritik dan koreksi oleh pusat dan/atau provinsi terhadap kabupaten/kota sangat penting untuk dilakukan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, rumusan program pembangunan daerah dapat dituangkan dalam bentuk Tabel 6.4 sebagai berikut:

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, dan Pendanaan Daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan, sebagaimana Tabel 6.5 dibawah ini

Selanjutnya perhitungan pagu program dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu :

1. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan pada program terkait;
2. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
3. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya; dan
4. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Hasil perhitungan pagu program dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 6.6.
Perhitungan Pagu Program

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah	Terselenggaranya Penyusunan rancangan RPJMD	1.034.000.000	42.865.968.080	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Terlaksananya Penyelenggaraan musrenbang RKPD	712.000.000		
	Terselenggaranya Penyusunan Rancangan RTRW	1.034.000.000		
	Terselenggaranya Desain Masterplan Jalan dan Jembatan	1.800.000.000		
	Terselenggaranya Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah	2.182.793.080		
	Terselenggaranya Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	422.000.000		
	Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan (DDA, PDRB, IKK)	762.000.000		
	Terlaksananya Penyelenggaraan musrenbang RPJMD (tahun 2017)	252.675.000		
	Terselenggaranya Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah (Tahun 2017)	6.500.000		
	Program Pengembangan data/informasi	Terselenggaranya Pengadaan sistem e-Planning		
Terselenggaranya Pengadaan sistem e-Monitoring		607.470.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Penyusunan rencana karier ASN	1.200.000.000	25.596.300.000	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol II dan III Formasi Umum	2.600.000.000		
	Terlaksananya Diklat PIM II	600.000.000		
	Terselenggaranya Pelantikan kepala-kepala distrik	500.000.000		
Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	300.000.000	6.732.150.000	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Terselenggaranya Seleksi penerimaan CPNSD Tahun 2018	688.750.000		
	Terselenggaranya Penyusunan analisis jabatan (Anjab)	300.000.000		
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terselenggaranya Penyebaran informasi pemerintah daerah	11.604.822	60.504.822	Badan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1.123.597.200	52.836.405.900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Terselenggaranya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1.911.564.800		
	Terselenggaranya Penyusunan Rancangan PERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	906.796.000		
	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan	678.480.000		
	Terselenggaranya Pelayanan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Administrasi Perbendaharaan	1.021.274.500		
	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kas	788.663.300		
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Penggajian PNS	822.152.100		
	Terselenggaranya Administrasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	289.638.000		
	Terselenggaranya Administrasi Pemeliharaan dan Penghapusan Barang	313.078.000		
	Terselenggaranya Peningkatan Manajemen Aset/Barang	613.500.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Daerah			
	Terselenggaranya Penyusunan Anggaran Kas	395.962.000		
	Terlaksananya Penyusunan standar satuan harga kabupaten dogiyai	250.000.000		
	Terselenggaranya Penyusunan data dasar optimalisasi dana perimbangan	1.000.000.000		
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terselenggaranya Pengadaan aplikasi sistem e-Budgeting	607.500.000	24.560.870.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Terselenggaranya Pengadaan aplikasi sistem e-Penatausahaan dan e-Accounting di BPKAD	1.007.500.000		
	Terselenggaranya Pengadaan aplikasi sistem Kasda online di BPKAD	707.500.000		
	Terselenggaranya Pengadaan aplikasi sistem informasi barang daerah di BPKAD	707.500.000		
	Terlaksananya Pendampingan pertanggungjawaban SKPD dan pengelolaan aset daerah	757.470.000		
	Terlaksananya Pengadaan tower dan jaringan wifi	607.500.000		
	Terselenggaranya Pengadaan aplikasi simbansos	306.800.000		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.343.030.300	15.461.594.300	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Terlaksananya Pengadaan Blangko F1 - 01 OAP	300.000.000		
	Terselenggaranya Pelayanan dokumen kependudukan	1.316.864.000		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan kesehatan masyarakat	4.842.000.000	146.610.434.100	Dinas Kesehatan
	Terselenggaranya Peningkatan manajemen puskesmas	470.100.000		
	Terselenggaranya Peningkatan kualitas pelayanan	750.000.000		
	Terselenggaranya Pelayanan kaki telanja daerah terpencil	870.948.100		
	Terlaksananya Pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas Apouwo	1.145.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas	1.145.000.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Unito			
	Terselenggaranya Pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas Abouyaga	1.020.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas Denemani	1.445.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas Timeepa	1.145.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas Moenamani	1.275.000.000		
	Terlaksananya Pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas Idakebo	1.696.809.000		
	Terlaksananya Manajemen BOK Kabupaten	403.955.700		
	Terlaksananya Peningkatan puskesmas akreditasi	350.000.000		
	Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten	661.266.000		
	Terlaksananya Indonesia sehat melalui pendekatan keluarga	1.170.900.000		
	Terselenggaranya Upaya kesehatan masyarakat esensial	4.309.591.050		
	Terselenggaranya Upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan lainnya	735.000.000		
	Terselenggaranya Pelaksanaan fungsi manajemen (P1, P2, dan P3)	1.459.667.250		
	Terselenggaranya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (Tahun 2017)	2.154.000.000		
	Terselenggaranya Peningkatan Puskesmas Akreditasi (DAK Non Fisik) (Tahun 2017)	134.217.000		
	Terselenggaranya Pengelolaan BOK Dinas (Dak Non Fisik) (Tahun 2017)	618.300.000		
	Terlaksananya Menejemen BOK Kabupaten (Dak Non Fisik) (Tahun 2017)	264.480.000		
Program Kemitraan peningkatan pelayanan	Terselenggaranya Kemitraan pengobatan lanjutan bagi	1.140.000.000	5.955.300.000	Dinas Kesehatan

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
kesehatan	pasien rujukan			
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Terselenggaranya Penyediaan peralatan laboratorium untuk fasilitas pelayanan kesehatan	175.000.000	913.900.000	Dinas Kesehatan
Program sumberdaya kesehatan	Terlaksananya Peningkatan kualitas tenaga kesehatan puskesmas dan jaringannya	151.500.000	791.100.000	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya Peningkatan kualitas kesehatan	500.000.000	2.612.100.000	Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	150.000.000	293.560.391.000	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pembangunan baru puskesmas Apouwo	5.860.000.000		
	Terlaksananya Pembangunan baru puskesmas Unito	7.009.955.000		
	Terlaksananya Pembangunan baru puskesmas Abouyaga	4.761.031.000		
	Terlaksananya Pembangunan baru puskesmas Denemani	6.473.955.000		
	Terlaksananya Pembangunan baru puskesmas Timeepa	5.721.000.000		
	Terlaksananya Pembangunan baru puskesmas Moenamani	6.754.000.000		
	Terlaksananya Pembangunan baru puskesmas Idakebo	5.659.250.000		
	Terselenggaranya Pengadaan puskesmas keliling Apouwo	135.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan puskesmas keliling Unito	110.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan puskesmas keliling Abouyaga	711.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan puskesmas keliling Denemani	711.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan puskesmas keliling Timeepa	674.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan puskesmas keliling Moenamani	111.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan puskesmas keliling Idakebo	185.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan sarana dan prasarana listrik puskesmas Apouwo	1.000.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan sarana dan prasarana listrik	1.114.000.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	puskesmas Unito			
	Terselenggaranya Pengadaan sarana dan prasarana listrik puskesmas Abouyaga	850.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan sarana dan prasarana listrik puskesmas Denemani	600.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan sarana dan prasarana listrik puskesmas Timeepa	750.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan sarana dan prasarana listrik puskesmas Moenamani	250.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan sarana dan prasarana listrik puskesmas Idakebo	500.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan prasarana air bersih untuk puskesmas Apouwo	350.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan prasarana air bersih untuk puskesmas unito	350.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan prasarana air bersih untuk puskesmas Abouyaga	300.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan prasarana air bersih untuk puskesmas Denemani	250.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan prasarana air bersih untuk puskesmas Timeepa	300.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan prasarana air bersih untuk puskesmas Moenamani	300.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan prasarana air bersih untuk puskesmas Idakebo	350.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK) (Tahun 2017)	1.300.300.000		
	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Afirmasi) (Tahun 2017)	2.365.600.000		
	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK Afirmasi) (Tahun 2017)	74.300.000		
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan obat dan pengiriman ke Puskesmas dan jaringannya termasuk obat	2.100.000.000	35.676.566.120	Dinas Kesehatan

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	ARV			
	Terlaksananya Penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di kab/kota	2.653.000.000		
	Terlaksananya Distribusi obat	400.000.000		
	Terlaksananya E-Logistik	335.225.000		
	Terlaksananya Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan (Tahun 2017)	152.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) (Tahun 2017)	598.041.120		
	Terselenggaranya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (OTSUS) (Tahun 2017)	591.500.000		
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Terselenggaranya Pengembangan posyandu lansia (Pelatihan Kader)	250.000.000	2.493.900.000	Dinas Kesehatan
	Terselenggaranya Pengembangan posyandu lansia (lansia)	227.400.000		
Program Upaya Kesehatan Perorangan	Terselenggaranya Peningkatan pelayanan di Rumah Sakit (POM)	275.000.000	3.317.300.000	Dinas Kesehatan
	Terselenggaranya Peningkatan pelayanan di Rumah Sakit (Imunisasi)	360.000.000		
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan kesehatan ibu dan bayi baru lahir OAP	350.000.000	13.981.160.000	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Jaminan persalinan (Jampersal)	2.326.460.000		
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terselenggaranya Imunisasi pada balita OAP tepat waktu	225.000.000	4.889.400.000	Dinas Kesehatan
	Terselenggaranya Peningkatan peran posyandu	711.000.000		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terselenggaranya Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS (peralatan)	275.000.000	7.282.000.000	Dinas Kesehatan
	Terselenggaranya Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS (jumlah kasus yang ditangani)	250.000.000		
	Terselenggaranya Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS (tenaga terampil)	275.000.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Terselenggaranya Penanggulangan TBC, Malaria, Filaria, frambusia, kusta, tersiesis, penyakit tidak menular (Diare)	175.000.000		
	Terselenggaranya Penanggulangan TBC, Malaria, Filaria, frambusia, kusta, tersiesis, penyakit tidak menular (Malaria)	225.000.000		
	Terselenggaranya Penanggulangan TBC, Malaria, Filaria, frambusia, kusta, tersiesis, penyakit tidak menular (PPTM)	185.000.000		
	Terselenggaranya Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Tahun 2017)	9.000.000		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan kepada ibu hamil	350.000.000	4.740.070.000	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan kepada bayi/balita	350.000.000		
	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (Tahun 2017)	40.600.000		
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Keluarga sadar Gizi (Gerbang mas) 2017	166.870.000		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Terselenggaranya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	320.000.000	6.849.450.000	Dinas Kesehatan
	Terselenggaranya Pelatihan Asuhan Persalinan Normal	250.000.000		
	Terlaksananya Penyuluhan langsung kepada masyarakat	225.000.000		
	Terlaksananya Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (Tahun 2017)	516.250.000		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terlaksananya Pengembangan lingkungan sehat	175.000.000	913.900.000	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau lainnya	Terselenggaranya Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya (DBH CukaiRokok) (Tahun 2017)	803.550.000	4.197.750.000	Dinas Kesehatan

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Asli Papua	Terselenggaranya Penanggulangan masalah kesehatan masyarakat asli papua	250.000.000		Dinas Kesehatan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Terselenggaranya Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	718.000.000	6.018.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Terlaksananya Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	434.000.000		
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Terselenggaranya Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	2.700.000.000	43.142.312.500	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
	Terselenggaranya Perluasan Areal dan Intensifikasi/Lehabilitas Lahan Perkebunan	1.800.000.000		
	Terselenggaranya Perluasan areal dan Optimalisasi Lahan Perkebunan Kopi (Gerbang Mas) (Tahun 2017)	2.028.862.500		
	Terselenggaranya Penyediaan sarana produksi pertanian (DAK)	2.048.000.000		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi/ Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/ (Program Penganekaragaman Pangan Spesifik Pangan Lokal)	Terselenggaranya Penganekaragaman Pangan Spesifik Pangan Lokal	1.020.613.500	5.331.313.500	Dinas Ketahanan Pangan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Terselenggaranya Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	59.586.000	311.086.000	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Terselenggaranya Peningkatan Produksi & Produktivitas Tanaman Pangan & Holtikultural	1.309.000.000	1.309.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Terselenggaranya Pengembangan Komoditas Unggulan Hortikultura Spesifik (Perluasan Areal)	1.950.000.000	7.709.200.000	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
	Terselenggaranya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan. Produk pertanian (Perluasan Areal Tanaman Jagung)	3.025.000.000		
	Terselenggaranya Pengadaan Benih Tanaman Pangan dan	1.834.200.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Hortikultura			
	Terlaksananya Pengembangan perbinihan/perbibitan Tanaman Perkebunan	900.000.000		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terselenggaranya Penguatan jaringan telkomsel	2.500.000.000	14.626.700.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Terselenggaranya Pengadaan jaringan internet	300.000.000		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Manajemen Usaha Kecil dan Menengah	230.000.000	1.201.500.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat	500.000.000	5.484.700.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Standar/Ketentuan Pengelolaan Koperasi	550.000.000		
Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Mini, Mikro dan Kecil	500.000.000	57.581.400.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Terlaksananya Penataan pasar dan pengaturan distribusi barang dan jasa	500.000.000		
	Terselenggaranya Pembangunan pasar tradisional	10.023.000.000		
Program Perencanaan Tata Ruang	Terselenggaranya Perencanaan relokasi ibukota Kabupaten Dogiyai	2.000.000.000	10.447.400.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	Terselenggaranya Pengadaan dan pendampingan sistem keuangan desa	757.470.000	14.404.570.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	Terselenggaranya Penataan pemerintah kampung	1.000.000.000		
	Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Kampung	1.000.000.000		
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Rumah Tangga	300.000.000	1.567.400.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Program Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pengadaan dan pendampingan aplikasi sistem	506.690.000	2.646.690.000	Dinas Penanaman Modal Dan

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
Teknologi Informasi	informasi perijinan daerah			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan pendidikan non formal, keaksaraan dasar (KF dan Pelatihan ketrampilan kerja) (PKBM)	160.000.000	31.808.220.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Penyelenggaraan pendidikan non formal, keaksaraan dasar (KF dan Pelatihan ketrampilan kerja) (NF)	450.000.000		
	Penyelenggaraan pendidikan non formal, keaksaraan dasar (KF dan Pelatihan ketrampilan kerja) (Kursus)	525.000.000		
	Penyelenggaraan pendidikan non formal, keaksaraan dasar (KF dan Pelatihan ketrampilan kerja) (Insentif Aksara)	1.920.000.000		
	Penyelenggaraan pendidikan non formal, keaksaraan dasar (KF dan Pelatihan ketrampilan kerja) (Insentif Paket A B C)	2.400.000.000		
	Penyelenggaraan pendidikan non formal, keaksaraan dasar (KF dan Pelatihan ketrampilan kerja) (Diklat Keaksaraan)	120.000.000		
	Penyelenggaraan pendidikan non formal, keaksaraan dasar (KF dan Pelatihan ketrampilan kerja) (Diklat Paket A B C)	150.000.000		
	Penyediaan biaya operasional bagi lembaga penyelenggara pendidikan bagi kelompok adat terpencil	360.000.000		
	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal (OTSUS) (Tahun 2017)	4.220.000		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan		
Peringatan Biaya SPP Siswa dan Mahasiswa (OTSUS) (Tahun 2017)		233.210.000		
Program Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA	261.240.000	1.364.940.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Pendidikan Tinggi	Penyediaan dukungan bidang pendidikan untuk pengembangan potensi wilayah sesuai peta komoditas unggulan daerah	500.000.000	34.476.500.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Kegiatan pendidikan lain yang memenuhi kriteria mendesak dan relevan untuk kepentingan daerah	3.100.000.000		
	Pembangunan asrama mahasiswa di kota study Gorontalo	1.000.000.000		
	Pembangunan asrama mahasiswa di kota study Manado	1.000.000.000		
	Pembangunan asrama mahasiswa di kota study Jakarta	1.000.000.000		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan guru kontrak	432.000.000	144.031.324.200	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan asrama siswa/i SD-SMP Satu Atap Berarاما	1.542.364.200		
	Pembangunan rumah dinas guru dan kepala sekolah serta perlengkapannya	1.760.584.000		
	Pelatihan kompetensi khusus bagi tenaga pendidik dan kependidikan termasuk life skill pencegahan HIV dan AIDS jenjang SD (Kurikulum SD)	425.000.000		
	Pelatihan kompetensi khusus bagi tenaga pendidik dan kependidikan termasuk life skill pencegahan HIV dan AIDS jenjang SD (KKG SD)	600.000.000		
	Pembangunan tempat ibadah, perpustakaan, UKS, kamar mandi, jamban dan jaringan air bersih dengan pipa atau bak penampungan air hujan disesuaikan kondisi lingkungan	450.000.000		
	Penyediaan biaya operasional kegiatan ekstrakurikuler	603.980.000		
	Penyediaan tunjangan khusus guru di daerah terpencil dan terisolir	4.944.000.000		
	Pelatihan kompetensi khusus bagi tenaga pendidik dan kependidikan termasuk life skill pencegahan HIV dan AIDS Jenjang SMP (Diklat Olimpiade)	600.000.000		
	Pelatihan kompetensi khusus bagi tenaga pendidik dan kependidikan termasuk life skill pencegahan HIV dan AIDS Jenjang SMP (MGMP SMP)	150.000.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Penyediaan makan dan minum siswa/siswi SMP Berasrama berbasis komoditas lokal	600.000.000		
	Pengadaan beasiswa melanjutkan (transisi) untuk siswa asli papua	6.577.968.000		
	Rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar (SD)	1.890.000.000		
	Pembangunan ruang kelas baru Sekolah Dasar (SD)	870.000.000		
	Pembangunan jamban Sekolah Dasar (SD)	440.000.000		
	Pengadaan buku koleksi perpustakaan Sekolah Dasar (SD)	564.000.000		
	Pembangunan rumah guru SMP	1.545.000.000		
	Pembangunan jamban guru SMP beserta sanitasi	720.000.000		
	Pembangunan Laboratorium SMP N 2 Mapia Tengah	517.000.000		
	Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SD	456.940.000		
	Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP	812.160.000		
	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (SD) (OTSUS) (Tahun 2017)	280.434.000		
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (OTSUS) (Tahun 2017)	39.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Belajar SMP (DAK Reg Pend SMP) (Tahun 2017)	7.898.000		
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru SMP (DAK Reg Pend SMP) (Tahun 2017)	7.898.000		
	Pembangunan Laboratorium IPA SMP (DAK Reg Pend SPM) (Tahun 2017)	111.298.000		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan kompetensi khusus bagi tenaga pendidik dan kependidikan (MGMP SMK)	70.000.000	2.639.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Pelatihan kompetensi khusus bagi tenaga pendidik dan kependidikan (MGMP	70.000.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	SMA)			
	Pelatihan Guru Olimpiade MIPA (OTSUS) (Tahun 2017)	53.200.000		
	Monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan	312.000.000		
Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Terselenggaranya Kegiatan pemasaran hasil produksi melalui pasar murah (Sumber Dana OTSUS)	1.000.000.000	5.223.900.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Manajemen Usaha Kecil dan Menengah	230.000.000	230.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Terselenggaranya Pembinaan dan pelatihan untuk pengembangan industri noken anggrek (Sumber Dana OTSUS)	1.000.000.000	5.223.900.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			15.671.200.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terlaksananya Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat	500.000.000	5.232.850.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
	Terselenggaranya Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) (Tahun 2017)	501.750.000		
Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah	Terselenggaranya Pembangunan Gudang Bengkel Pemagaran Keliling (Sumber Dana OTSUS)	1.500.000.000	1.500.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Terselenggaranya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	250.000.000	2.570.215.000	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
	Terselenggaranya Pelatihan Tata Cara Pembuatan Pupuk Tanaman Pangan (Pupuk Organik Padat)	100.000.000		
	Terselenggaranya Pelatihan Tata Cara Penggunaan Pupuk Tanaman Pangan	100.000.000		
	Terselenggaranya Pelatihan Tata Cara Pembuatan Pupuk Tanaman Perkebunan	100.000.000		
	Terselenggaranya Pelatihan Tata Cara Penggunaan Pupuk Tanaman Perkebunan	100.000.000		
	Terselenggaranya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	150.000.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Tanaman Pangan			
	Terselenggaranya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Tanaman Hortikultura	150.000.000		
	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	1.600.000.000		
	Terselenggaranya Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan (OTSUS) (Tahun 2017)	10.000.000		
	Terselenggaranya Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan (OTSUS) (Tahun 2017)	5.107.500		
	Terselenggaranya Pelatihan Budidaya Holtikultura (OTSUS) (Tahun 2017)	5.107.500		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			47.108.700.000	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	420.000.000	14.354.569.700	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Terselenggaranya Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	1.000.000.000		
	Terselenggaranya Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	490.000.000		
	Terselenggaranya Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	377.969.700		
Program pengembangan budidaya perikanan	Terselenggaranya Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	500.000.000	12.927.373.050	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Terselenggaranya Pembinaan dan pengembangan perikanan	150.000.000		
	Terselenggaranya Pembangunan sarana dan prasarana Unit Pembenihan Ikan (UPTD)	1.800.000.000		
	Terselenggaranya Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (OTSUS) (Tahun 2017)	24.773.050		
Program pengembangan	Terselenggaranya Pendampingan pada kelompok	500.000.000	2.612.100.000	Dinas Peternakan

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
perikanan tangkap	nelayan perikanan tangkap			dan Perikanan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin OAP	382.000.000	1.995.600.000	Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Pengajuan dan penanggulangan masalah-masalah sosial	700.000.000	3.656.600.000	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Afirmasi Lembaga Agama	2.500.000.000	13.059.500.000	Dinas Sosial
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terselenggaranya Pelatihan kerja dan penyediaan modal usaha bagi orang asli papua	600.000.000	5.750.493.080	Dinas Tenaga Kerja
	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja OAP	500.793.080		
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselenggaranya Monitoring pelaksanaan APB Kampung	200.000.000	1.044.900.000	Distrik DOGIYAI
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan APB Kampung	200.000.000	1.044.900.000	Distrik KAMU
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan APB Kampung	200.000.000	1.044.900.000	Distrik KAMU SELATAN
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan APB Kampung	200.000.000	1.044.900.000	Distrik KAMU TIMUR
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan APB Kampung	200.000.000	1.044.900.000	Distrik KAMU UTARA
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan APB Kampung	200.000.000	1.044.900.000	Distrik MAPIA
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan APB Kampung	250.000.000	250.000.000	Distrik Mapia Barat
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan APB Kampung	250.000.000	250.000.000	Distrik MAPIA TENGAH
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan APB Kampung	250.000.000	250.000.000	Distrik PIYAIYE
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan APB Kampung	250.000.000	250.000.000	Distrik SUKIKAI SELATAN
Program Peningkatan Sistem Pengendalian Kebijakan KDH	Terlaksananya Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	920.000.000	15.329.055.500	Inspektorat
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	194.255.500		
	Terselenggaranya Rapat Koodinasi Program Kerja	290.200.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Pengawasan Daerah/Nasional			
	Terselenggaranya Pemutakhiran data dan tindak lanjut hasil temuan	300.000.000		
	Terselenggaranya Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Eksternal Melalui Majelis Pertimbangan TP-TGR	700.000.000		
	Terlaksananya Iventarisasi Temuan Pengawasan	530.000.000		
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terselenggaranya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	770.000.000	7.645.600.000	Inspektorat
	Terselenggaranya Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	297.300.000		
	Terlaksananya Tindak lanjut Temuan BPK RI dan Perwakilan BPKP Papua	396.400.000		
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman pasien	729.000.000	25.489.036.300	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terlaksananya Penyediaan obat-obatan	1.366.776.600		
	Terselenggaranya Pengadaan bahan habis pakai	951.473.400		
	Terselenggaranya Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (OTSUS) (Tahun 2017)	1.236.151.400		
	Terselenggaranya Pembangunan Unit Bank Darah (DAK) (Tahun 2017)	277.375.600		
	Terselenggaranya Pembangunan Rumah Diesel (OTSUS) (Tahun 2017)	318.759.300		
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terlaksananya Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.600.000.000	8.357.900.000	Sekretariat Daerah
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terlaksananya Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	3.140.000.000	43.977.700.000	Sekretariat Daerah
	Terselenggaranya Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	1.000.000.000		
	Terselenggaranya Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	596.000.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Terselenggaranya Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	2.400.000.000		
	Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1.282.800.000		
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya asilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	1.500.000.000	13.451.100.000	Sekretariat Daerah
	Terselenggaranya Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dogiyai	400.000.000		
	Terselenggaranya Konsultasi dan koordinasi kebijakan penanaman modal	150.000.000		
	Terselenggaranya Koordinasi dan monitoring perkembangan harga sembako	150.000.000		
	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan raskin 2018	75.000.000		
	Terlaksananya Meningkatkan pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dogiyai	300.000.000		
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terlaksananya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	9.690.000.000	125.210.230.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Terselenggaranya Rapat-Rapat alat Kelengkapan Dewan	78.000.000		
	Terselenggaranya Rapat-Rapat Paripurna	391.800.000		
	Terlaksananya Kegiatan reses	1.290.000.000		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	12.519.730.000		
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya Penegakan perda dan pengamanan kantor	1.652.400.000	8.631.700.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Daerah Bencana	Terselenggaranya Rekonstruksi jembatan kali Wani Pugatadi I	776.206.000	4.054.806.000	Badan Pengelola Bencana Daerah
Program Peningkatan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan Sepanjang Jalan	650.000.000	4.910.200.000	Dinas Lingkungan

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
Hidup	Utama dan Lahan Pekarangan Fasilitas Umum Dalam Ibu Kota Kabupaten dengan Tanaman Bibit Pohon Pucuk Merah dan Cemara Kipas			Hidup
	Terlaksananya Pemeliharaan Tahun Pertama Bibit Pohon Penghijauan Lingkungan	290.000.000		
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya /Program Pemulihan Kondisi Sungai (Restorasi)	Terlaksananya Penanaman Bagian Kanan Kiri Tepi Sungai/Kali Tuka dan Mapia	500.000.000	2.612.100.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	600.000.000	4.074.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengadaan kendaraan pengangkut sampah	180.000.000		
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Ekimani - Obayo	10.000.000.000	184.792.760.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Terlaksananya Pembangunan jalan piyaiye tahap II	5.204.000.000		
	Terlaksananya Pembangunan jembatan gantung sungai Nemogago di Widumeno	2.000.000.000		
	Terlaksananya Pembangunan jembatan gantung kali pona	2.000.000.000		
	Terlaksananya Peningkatan struktur ruas jalan Magoo	7.110.000.000		
	Terlaksananya Pembangunan ruas jalan Yotapuga tahap VI	4.500.000.000		
	Terlaksananya Pembangunan ruas jalan Lembah tahap V	4.500.000.000		
	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kali Tokapo Tahap II (Tahun 2017)	61.660.000		
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terlaksananya Pembangunan Halte bus. taxi gedung terminal	1.000.000.000	10.447.400.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Terlaksananya Pembangunan Peningkatan Fasilitas Terminal	1.000.000.000		
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya Pembangunan Peningkatan Bandara Perintis Kampung Unito/Distrik SukikaiSelatan	600.000.000	31.326.800.000	Dinas Perhubungan
	Terlaksananya Pembangunan Peningkatan Bandara Perintis	600.000.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Kampung Gabaikunu/Timepa			
	Terlaksananya Peningkatan ruas jalan Kamuu Utara	4.797.000.000		
Program Pengembangan Perumahan Rakyat dan Penyediaan Air Bersih	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Asli Papua	10.087.930.800	52.696.730.800	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terlaksananya Pembangunan Penyediaan Sarana Air Minum Kampung Abamaida Distrik Mapia	1.207.500.000	12.615.400.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Terlaksananya Pembangunan Penyediaan Sarana Air Minum Kampung Putapa Distrik Kamuu	1.207.500.000		
Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat - OTSUS (Tahun 2017)	3.128.000	16.428.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Kampung Orang Asli Papua	Terlaksananya Pembangunan Saluran Tanah Kampung Kuyakago	300.000.000	23.157.550.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Terlaksananya Pembangunan Saluran Tanah Kampung Idakebo	300.000.000		
	Terlaksananya Pembangunan Saluran Tanah Kampung Pouwouda	300.000.000		
	Terlaksananya Pembangunan Saluran Tanah Kampung Ikebo	300.000.000		
	Terlaksananya Pembangunan Bidang Ketenagalistrikan PLTS Tersebar (OTSUS) (Tahun 2017)	22.400.000		
	Terlaksananya Pembangunan Listrik Pedesaan Kampung Puweta (Gerbang Mas) (Tahun 2017)	2.519.750.000		
	Terlaksananya Pembangunan Listrik Pedesaan Kampung Bukapa (Gerbang Mas) (Tahun 2017)	691.000.000		
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kampung Boduda	1.700.000.000	18.283.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Terlaksananya Pembangunan Jalan Obayo - Nuwa Tahap II	1.800.000.000		
Program Peningkatan peran serta dan	Terselenggaranya Kegiatan pembinaan organisasi	454.879.240	4.232.779.240	Dinas Pemberdayaan

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
kesetaraan gender dalam pembangunan	perempuan			Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Terselenggaranya Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak OAP	350.000.000		
	Terselenggaranya Pelatihan Manjahit Tingkat Mahir Bagi Ibu - Ibu (Tahun 2017)	5.400.000		
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Terselenggaranya Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	1.200.000.000	6.268.400.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Terlaksananya Biaya operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD)	663.600.000	3.466.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana	Terselenggaranya Pembinaan Keluarga Berencana	1.450.000.000	19.256.366.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Terselenggaranya Penyuluhan bagi Ibu-ibu rumah tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera	550.600.000		
	Terselenggaranya Sosialisasi Keluarga Berencana	299.996.000		
	Terselenggaranya Operasional balai penyuluhan keluarga berencana	255.000.000		
	Terlaksananya Biaya operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di kampung KB	1.000.000.000		
	Terlaksananya Dukungan media KIE dan manajemen BOKB	130.670.000		
	Program pelayanan kontrasepsi	Terlaksananya Biaya operasional distribusi Alokon		
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Seleksi Paskibraka Tingkat Pelajar Kabupaten Dogiyai (OTSUS) (Tahun 2017)	221.160.000	1.155.360.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	144.000.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Pembinaan Cabang Olahraga Bola Volley (OTSUS) (Tahun 2017)	65.000.000		
	Pembinaan Cabang Usia Dini (OTSUS) (Tahun 2017)	79.000.000		
Program Kesehatan Reproduksi Remaja			3.834.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pembinaan Cabang Olahraga Bola Volley (OTSUS) (Tahun 2017)	65.000.000	751.800.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Pembinaan Cabang Usia Dini (OTSUS) (Tahun 2017)	79.000.000		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda dan Perbup	102.500.000	5.759.100.000	Sekretariat Daerah
	Terselenggaranya Pembentukan Produk Hukum Daerah	1.000.000.000		
Program Afirmasi Lembaga Masyarakat Adat	Terselenggaranya Mengadakan Kegiatan LMA Dalam Temu karya	500.000.000	4.701.600.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Terlaksananya Pembinaan Group Band Lokal Makamo	400.000.000		
Program Pendidikan Anak Usia Dini			19.639.835.100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan OAP	Penanggulangan masalah kesehatan masyarakat asli papua	250.000.000	250.000.000	Dinas Kesehatan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	216.000.000		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1.075.000.000		
	Penyediaan tunjangan khusus guru di daerah terpencil dan terisolir	1.098.000.000		
	Pengadaan alat permainan edukatif indoor dan outdoor	257.000.000		
	Pengadaan makanan tambahan siswa berbahan lokal sesuai usia tumbuh kembang anak	500.000.000		
	Pembangunan ruang kelas baru	460.000.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Pemberian biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	120.000.000		
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (OTSUS) (Tahun 2017)	6.199.100		
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (diklat berjenjang pendidik PAUD) (OTSUS) (Tahun 2017)	27.336.000		
Program Lintas Sektor				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	13.000.000	463.519.374.015	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	652.800.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	62.327.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	39.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	735.500.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	92.000.000		SMP N 1 Mapia
	Penyediaan alat tulis kantor	30.390.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	25.000.000		SMP Negeri 1 Kamu
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	44.950.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	93.799.920		
	Penyediaan alat tulis kantor	37.102.500		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.610.000		SMP Negeri Kammu
	Penyediaan bahan logistik kantor	20.910.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	76.000.000		
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	29.956.000			

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	80.840.000		Selatan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.318.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	18.704.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.000.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	4.490.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	41.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000		SMP Negeri 1 Kamu Utara
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	39.850.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.890.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.200.000		SMP Negeri 1 Mapia Tengah
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	36.732.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	15.286.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.600.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180.200.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	106.092.000		SMP Negeri 1 Mapia Barat
	Penyediaan alat tulis kantor	31.875.350		
	Penyediaan bahan logistik kantor	23.750.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.200.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000		SMP Negeri 1 Dogiyai
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	139.927.600		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Penyediaan alat tulis kantor	8.545.400		
	Penyediaan makanan dan minuman	7.292.750		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	87.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000		SMA Negeri 1 Dogiyai
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	3.964.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	28.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	5.200.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	124.500.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000		SMA Negeri 2 Dogiyai
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	128.040.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	4.010.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	109.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000		SMP Negeri 1 Kamu Timur
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	20.150.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	6.900.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140.200.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000		SMP Negeri 2 Kamu Selatan
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	27.130.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	9.500.000		
	Penyediaan makanan dan	9.000.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	minuman			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	144.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000		SMP Negeri 2 Mapia Tengah
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.880.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	11.081.500		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.200.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	8.250.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	13.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	139.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000		SMP Negeri 1 Piyaiye
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	129.000.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.374.350		
	Penyediaan alat tulis kantor	12.771.590		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.600.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	4.414.790		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000		SMK Negeri 1 Dogiyai
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	21.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	14.250.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	116.200.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Penyediaan jasa surat menyurat	14.000.000		Dinas Kesehatan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5.352.000.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.200.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	70.433.740		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	71.709.260		
	Penyediaan bahan logistik kantor	240.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	54.125.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.187.410.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	728.980.000		Rumah Sakit Umum Daerah
	Penyediaan alat tulis kantor	28.700.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	448.900.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	326.400.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	48.374.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	29.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	44.450.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	756.100.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.680.000		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.105.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	50.735.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.265.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Penyediaan bahan logistik kantor	40.020.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	507.800.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	11.400.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	4.809.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.100.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000		Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	336.000.000		
	enyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	49.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	76.500.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	670.400.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000		Dinas Sosial
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	192.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	64.571.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	48.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	80.100.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.078.800.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.800.000		Dinas Tenaga Kerja
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.105.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	50.735.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.265.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	59.520.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	507.800.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	7.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	99.500.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	288.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	27.434.600		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.000.000		
	enyediaan bahan logistik kantor	59.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	65.500.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.103.200.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000		Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	312.000.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.105.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	49.709.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.265.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	82.250.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	28.375.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	589.500.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.992.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan alat tulis kantor	52.200.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	28.200.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan	731.600.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	konsultasi ke luar daerah			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.398.000.000		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan alat tulis kantor	41.657.700		
	Penyediaan bahan logistik kantor	78.040.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	442.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	434.400.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.025.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	30.072.860		
	Penyediaan bahan logistik kantor	100.040.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.007.900.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000		Dinas Perhubungan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	672.000.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.960.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	45.045.820		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.500.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	19.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	158.830.800		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	534.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.800.000		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Penyediaan alat tulis kantor	50.735.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.265.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Penyediaan bahan logistik kantor	399.920.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	507.800.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.800.000		Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.105.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	50.735.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.265.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	59.520.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	507.800.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.800.000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24.000.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.105.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	50.735.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.265.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	59.520.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	512.800.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.800.000		Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.000.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.105.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	50.735.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.765.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	59.520.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	435.300.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000		Dinas Peternakan

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	816.000.000		dan Perikanan
	Penyediaan alat tulis kantor	76.486.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	20.400.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.330.200.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	4.200.000		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	192.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	16.770.490		
	Penyediaan bahan logistik kantor	28.710.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	729.500.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	576.000.000		Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
	Penyediaan alat tulis kantor	26.483.960		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	37.500.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	747.300.000		
	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	100.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	48.155.000		Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.750.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	138.540.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.031.500.000		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	240.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	59.000.000		Sekretariat Daerah
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.766.002.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	65.905.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	618.183.700		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	267.000.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	500.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	3.223.283.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.235.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	100.000.000		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.834.800.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.432.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	55.604.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.000.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	1.219.308.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	1.530.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.844.136.000		
	Penyediaan jasa kesehatan	600.000.000		
	Pemasangan Jaringan Internet Kantor	200.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000		Badan Pengelola Bencana Daerah
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	50.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	288.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	9.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.300.000		
	Penyediaan bahan logistik	28.750.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	kantor			
	Penyediaan makanan dan minuman	27.540.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.022.100.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000		Distrik KAMU
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	126.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	30.630.985		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54.800.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	143.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	28.800.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	145.200.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.700.000		Distrik MAPIA
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	5.806.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.200.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	28.900.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	319.200.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000		Distrik KAMU UTARA
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	323.090.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	23.960.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	124.700.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000		Distrik PIYAIYE

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	2.523.120		
	Penyediaan makanan dan minuman	11.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	330.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000		Distrik KAMU SELATAN
	Penyediaan alat tulis kantor	10.250.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	33.300.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	11.300.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	339.300.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000		Distrik Mapia Barat
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	168.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	12.338.120		
	Penyediaan bahan logistik kantor	28.900.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	67.500.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	205.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000		Distrik KAMU TIMUR
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	144.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	12.338.120		
	Penyediaan bahan logistik kantor	27.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	230.400.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	4.600.000		Distrik MAPIA TENGAH
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	119.520.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Penyediaan alat tulis kantor	26.315.500		
	Penyediaan bahan logistik kantor	39.850.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	57.180.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	425.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.600.000		Distrik SUKIKAI SELATAN
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	36.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	168.000.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.710.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	10.250.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	47.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	91.500.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000		Distrik DOGIYAI
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	168.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	10.250.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.400.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	43.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	384.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	210.504.000		Inspektorat
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.978.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	15.784.740		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	267.400.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Penyediaan jasa surat menyurat	11.700.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	456.000.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.027.250		
	Penyediaan alat tulis kantor	71.150.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	67.046.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	103.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.006.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	20.400.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.470.964.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.560.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	70.819.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	336.510.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	1.008.270.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	997.700.000		
	Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	65.261.600		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	541.524.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.914.380		
	Penyediaan alat tulis kantor	24.281.140		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.400.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	19.600.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	8.135.000		

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	262.100.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	30.000.000		Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	296.395.880		
	Penyediaan alat tulis kantor	223.283.500		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	117.362.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	164.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	163.800.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.838.200.000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan rumah jabatan Dokter, Perawat dan Bidan puskesmas Apouwo	1.100.000.000	167.418.163.000	
	Pembangunan rumah jabatan Dokter, Perawat dan Bidan puskesmas Unito	1.250.000.000		
	Pembangunan rumah jabatan Dokter, Perawat dan Bidan puskesmas Abouyaga	1.000.000.000		
	Pembangunan rumah jabatan Dokter, Perawat dan Bidan puskesmas Denemani	1.500.000.000		
	Pembangunan rumah jabatan Dokter, Perawat dan Bidan puskesmas Timeepa	1.000.000.000		
	Pembangunan rumah jabatan Dokter, Perawat dan Bidan puskesmas Moenamani	750.000.000		
	Pembangunan rumah jabatan Dokter, Perawat dan Bidan puskesmas Idakebo	750.000.000		
	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	100.000.000		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	100.000.000		Dinas Sosial
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.500.000		Dinas Ketahanan Pangan
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	3.000.000.000		Dinas Perhubungan

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional sekolah	2.400.000.000		
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAK Non Fisik) (Tahun 2017)	901.200.000		
	Pemeliharaan Tower Telkomsel Mapia	60.000.000		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000		Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	2.200.000.000		Sekretariat Daerah
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000		
	Penyediaan sewa rumah jabatan	150.000.000		
	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	140.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	500.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.128.519.000		
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	500.000.000		
	Penyediaan Jaringan Internet dan Wifi	850.000.000		
	Pengadaan alat absensi sidik jari	600.000.000		
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Gerbang Mas) (Tahun 2017)	118.800.000		
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	386.100.000		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	335.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.188.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	89.520.000		Inspektorat
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	39.600.000		Badan Perencanaan

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.000.000		Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Pengadaan Server dan Jaringan Wifi	406.100.000		
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	2.174.400.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	200.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	150.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	400.000.000		
	Pengadaan Tanah Kantor (Bid Aset)	5.174.824.000		Badan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
	Sewa gedung kantor	100.000.000		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Insentif tenaga medis dan paramedis	1.452.000.000	22.537.120.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pelatihan tenaga kamar operasi	360.750.000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Daerah	100.000.000		
	Sosialisasi Pelatihan Jurnalistik bagi Pegawai Humas	221.570.000		Sekretariat Daerah
	Penataan Pemerintahan Distrik	500.000.000		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Pendidikan dan penjenjangan struktural	760.000.000		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	140.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pendidikan dan penjenjangan struktural	180.000.000		
	Sosialisasi peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara	600.000.000		Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program peningkatan	Pengadaan pakaian dinas		11.782.000

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
disiplin aparatur	beserta perlengkapannya			Mapia Tengah
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	611.000.000		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	63.700.000		Dinas Ketahanan Pangan
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	376.000.000		Sekretariat Daerah
	Perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan	1.500.000.000		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	169.300.000		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.750.000		Distrik KAMU
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.750.000		Distrik MAPIA
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.750.000		Distrik KAMU UTARA
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.750.000		Distrik PIYAIYE
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.750.000		Distrik KAMU SELATAN
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.750.000		Distrik Mapia Barat
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.750.000		Distrik KAMU TIMUR
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.750.000		Distrik MAPIA TENGAH
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.750.000		Distrik DOGIYAI
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	52.932.000		Inspektorat
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	77.000.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	122.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengadaan mesin/kartu absensi	200.000.000		Badan Kepegawaian Daerah Dan

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
				Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	122.838.500	12.507.762.900	Sekretariat Daerah
	Penataan dan Peningkatan Administrasi Kelembagaan	390.704.000		
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Dogiyai	225.000.000		
	Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Dogiyai	250.000.000		
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Dogiyai	300.000.000		
	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten Dogiyai	300.000.000		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000		Distrik KAMU
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000		Distrik MAPIA
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000		Distrik KAMU UTARA
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000		Distrik PIYAIYE
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000		Distrik KAMU SELATAN
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000		Distrik Mapia Barat
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000		Distrik KAMU TIMUR
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000		Distrik MAPIA TENGAH
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000		Distrik DOGIYAI
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100.000.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	69.829.400		Badan Pengelolaan

Program	Keluaran	Standar Belanja	Pagu Program	Perangkat Daerah
	kinerja SKPD			Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	135.991.000		

Setelah pagu setiap kegiatan diketahui, kemudian perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang dituangkan dalam Tabel 6.7.

6.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

6.4.1. Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai

(a) Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban

1. Upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang prima, menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Dogiyai perlu lebih ditingkatkan;
2. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja harus ditekan seoptimal mungkin untuk menciptakan iklim pembangunan yang lebih kondusif, yang akhirnya dapat mendorong keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Dogiyai;
3. Konflik tapal batas yang terjadi baik itu antarwilayah distrik/kampung maupun dengan kabupaten berbatasan harus diselesaikan dengan bijaksana dan berkoordinasi yang baik agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari;
4. Klaim ganda atas kepemilikan tanah hak ulayat perlu diatur dalam regulasi hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum positif;
5. Permasalahan Hak Asasi manusia (HAM) yang terjadi selama ini perlu diselesaikan segera dengan bijaksana oleh pemerintah daerah dan institusi penegakan HAM yang terkait;
6. Dalam rangka pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi perlu ditingkatkan aspek pengelolaan aset daerah, baik perencanaan, pemanfaatan, penyimpanan, dan penghapusan, agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

7. Pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, hingga monitoring dan evaluasi perlu lebih ditingkatkan baik itu kuantitasnya maupun kualitasnya;
8. Perencanaan pembangunan harus disusun dengan lebih berkualitas dan tepat waktu agar tidak menjadi penghambat kelancaran pembangunan;
9. Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang lebih berpihak pada kesejahteraan Orang Asli Papua khususnya Suku Mee harus lebih ditingkatkan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Suku Mee;
10. Perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak harus menjadi salah satu basis dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan implementasinya.

(b) Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Sarana dan prasarana pendidikan, terutama gedung sekolah, fasilitas sekolah, buku-buku pelajaran, perpustakaan sekolah, usaha kesehatan sekolah sangat minim, sehingga berpengaruh kepada peningkatan kualitas siswa disemua jenjang pendidikan;
2. Mendukung seluruh program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang prima dan berkualitas;
3. Kemitraan dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan dengan mengajak peran serta pihak-pihak swasta maupun LSM yang berkompeten di bidangnya masing-masing;
4. Rendahnya kuantitas dan kualitas guru yang memberi pengajaran dan pendidikan di sekolah perlu menjadi perhatian lebih serius dan menjadi prioritas dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan di bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan agar terlaksana lebih merata;

5. Tingkat kemangkiran guru dalam mengajar di sekolah harus dikurangi, terutama di daerah-daerah yang terisolasi dan kekurangan guru;
6. Kesejahteraan guru di daerah terisolasi, menyangkut, anggaran, kesehatan, perumahan perlu menjadi prioritas setiap tahun anggaran. Pelayanan bagi para guru di daerah ini perlu dilakukan secara serius dan tuntas oleh pemerintah kabupaten, agar guru mengajar lebih serius dan tidak meninggal tempat tugas;
7. Buta aksara pada penduduk Dogiyai harus dituntaskan segera melalui peningkatan dan pengembangan pendidikan nonformal yang melibatkan peran serta masyarakat dan LSM semaksimal mungkin;
8. Pemberiaan beasiswa pendidikan di semua jenjang harus dilakukan lebih transparan dan akuntabel, agar pemberiannya dapat lebih merata dan dipertanggungjawabkan dengan lebih baik;
9. Perlunya perhatian terhadap kesejahteraan dokter maupun tenaga medis lainnya yang melaksanakan tugas didaerah terpencil.
10. Manambah tenaga kesehatan untuk menjangkau kampung-kampung yang belum dapat menikmati kesehatan yang layak
11. Peningkatan kesehatan bagi masyarakat serta pelayanan yang layak bagi masyarakat yang ada di kampung-kampung perlu menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
12. Pemerintah perlu memperhatikan peningkatan pengembangan rumah sakit dan pembangunan puskesmas di distrik-distrik untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah dalam pelayanan terhadap publik.
13. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan diseluruh distrik-distrik maupun di kampung-kampung untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.
14. Peningkatan gizi yang baik dan berkualitas bagi masyarakat merupakan hal yang penting dan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat.

15. Peningkatan pendapatan masyarakat perlu diupayakan melalui pengembangan aktivitas sektor-sektor produktif yang dapat memberi nilai tambah yang lebih tinggi;
16. Terbatasnya Orang Asli Papua yang bekerja di berbagai sektor jasa perdagangan atau perusahaan, perlu dikaji lebih mendalam untuk dicarikan jalan keluar yang tepat sehingga Orang Asli Papua juga dapat berperan secara optimal dalam pembangunan ekonomi. Hal ini sebagai perwujudan afirmasi di era otonomi khusus;
17. Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak.
18. Pemerintah perlu memperhatikan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
19. Perlunya peningkatan kesejahteraan petani agar para petani lebih bersemangat untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya guna memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Dogiyai.

(c) Bidang Infrastruktur

1. Pengembangan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu kiranya dapat dilakukan dengan pendataan yang lebih baik agar tepat sasaran.
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan di seluruh distrik dan kampung-kampung untuk mempermudah akses transportasi bagi masyarakat yang ada di kampung-kampung.
3. Pembangunan Jalan dan Jembatan yang baik dan merata untuk masyarakat di kampung-kampung agar masyarakat di kampung-kampung juga dapat menikmati pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah.
4. Pembangunan rumah ibadah bagi seluruh umat yang ada di Kabupaten Dogiyai dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam hal kerohanian serta memberikan kenyamanan bagi umat untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan.

Berdasarkan hasil rekomendasi berupa pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai yang dimuat dalam 3 (tiga) komisi masing-masing bidang yang kemudian diselaraskan ke dalam program-program prioritas Kabupaten Dogiyai periode 2017-2022, berikut ini adalah matriks (tabel 6.8) pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai dan program-program usulan yang dimuat ke dalam prioritas pembangunan 5 (lima) tahun.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Dogiyai

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		2018	2019	2020	2021	2022
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	547.633,30	554.134,38	566.702,46	584.712,09	607.508,09
	BELANJA	547.633,30	554.134,38	566.702,46	584.712,09	607.508,09
	Belanja Tidak Langsung	234.617,16	232.860,18	227.286,18	227.239,43	231.340,07
	Belanja Pegawai	130.515,25	131.702,04	130.807,17	134.515,18	139.540,28
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	6.426,29	6.592,85	6.640,99	6.909,29	4.925,34
	Belanja Hibah	11.140,16	8.723,49	8.496,52	3.986,62	4.035,84
	Belanja Bantuan Sosial	8.132,87	8.067,67	5.590,96	5.624,42	5.693,86
	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	77.770,72	77.147,30	75.140,04	75.589,77	76.523,00
	Belanja Tidak Terduga	631,89	626,82	610,51	614,17	621,75
	Belanja Langsung	313.016,14	321.274,20	339.416,28	357.472,66	376.168,02
	Belanja Pegawai	46.890,67	41.027,22	36.012,82	33.743,98	31.547,37
	Belanja Modal	147.472,30	162.301,10	177.273,26	187.571,98	197.644,07
	Belanja Barang dan Jasa	118.653,16	117.945,89	126.130,19	136.156,70	146.976,58

Berlandaskan kerangka belanja daerah di atas, selanjutnya diturunkan ke indikasi pendanaan program-program pembangunan baik itu yang merupakan prioritas I, II maupun III sebagai berikut.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1 sebagai berikut :

**Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Dogiyai**

No.	Indikator		Target Tahun Ke				
	Deskripsi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	predikat	C	C	B	B	A
2	Rasio ASN terhadap total penduduk	per penduduk	55	57	60	64	68
3	Rata-rata Nilai Prestasi Kerja ASN	nilai	79.915	81.58	84.91	88.24	91.57
4	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat profesi tertentu terhadap total ASN	persen	20.00	24.00	33.00	42.00	50.00
5	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	predikat	C	B	B	A	A
6	Tingkat kepatuhan penduduk terhadap tertib administrasi	persen	80.34	83.37	85.56	87.25	88.70

No.	Indikator		Target Tahun Ke				
	Deskripsi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	kependudukan						
7	Opini BPK	predikat	Disclaimer	WDP	WDP	WTP	WTP
8	Predikat Akuntabilitas Kinerja	predikat	C	CC	CC	B	B
9	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	persen	52	58	70	83	95
10	Cakupan elemen data SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	persen	30	43	55	68	80
11	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran kampung yang berkualitas	persen	25.00	28.00	50.00	75.00	100.00
12	Capaian realisasi kinerja pelayanan distrik	persen	30	44	58	72	100
13	Capaian realisasi tata kelola daerah otonom baru	persen	70	75	80	85	90
14	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Index	0.4516	0.4883	0.5365	0.5922	0.6685
15	Rasio tenaga medis terhadap total penduduk	Per 100.000 penduduk	168	197	233	276	298
16	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas	persen	85.00	85.00	87.00	88.00	90.00
17	Angka Harapan Hidup	Tahun	65.57	65.95	66.22	66.59	66.93
18	Angka prevalensi gizi buruk	persen	18.37	17.50	16.12	15.13	13.30
19	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	persen	20.00	30.00	50.00	60.00	70.00
20	Angka Melek Huruf	Persen	92.17	93.10	93.91	94.90	95.75
21	Cakupan Sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Persen	25	25	25	30	30
22	Persentase tenaga kerja yang berpendidikan menengah ke	persen	1.48	1.60	1.78	3.22	5.83

No.	Indikator		Target Tahun Ke				
	Deskripsi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	atas/kejuruan dan tinggi						
23	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	5.0	5.1	5.4	5.9	6.5
24	Persentase peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	persen	5	5	7	7	10
21	Pertumbuhan ekonomi	persen	8.00	8.25	8.50	9.00	9.25
22	Tingkat Kemiskinan	Persen	31.19	30.85	30.20	29.28	28.38
23	Angka Gini Ratio	Indeks	0.2406	0.2307	0.2173	0.2070	0.1925
24	Pendapatan Per Kapita	Rp juta per kapita	8,34	8,60!	9,31!	10,27	11,58
25	Pengeluaran per kapita	Rp ribu per kapita	6.040,47	6,206,58	6.662,89	7.339,18	8.272,10
26	Cakupan penduduk tahan pangan berdasarkan AKG (Angka Kecukupan Gizi)	persen	32.00	36.00	38.00	40.00	42.00
27	Cakupan rehabilitasi PMKS melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	persen	40	50	2017	55	55
28	Indeks Pelayanan Agama di Sekolah	predikat	C	C	B	A	A
29	Rasio tempat ibadah terhadap total penduduk	Per 1000 penduduk	67.98	68.30	68.76	69.92	70.65
30	Tingkat kerukunan beragama berdasarkan Indeks KUB (Kerukunan Umat Beragama)	kategori	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
31	Persentase peningkatan penerapan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat	persen	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0
32	Persentase seni budaya suku Mee yang dilestarikan dan diberdayakan	persen	5	10	20	30	50
33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	90.00	90.00	92.00	92.00	95.00
34	Volume limbah sampah rumah tangga di sungai	meter kubik per hari	9.67	7.21	6.10	4.12	2.66

No.	Indikator		Target Tahun Ke				
	Deskripsi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
35	Indeks Risiko Bencana	kelas bencana	sedang	rendah	rendah	rendah	rendah
36	Persentase peningkatan panjang jalan dan jembatan	persen	11.44	12.19	12.99	14.05	15.51
37	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	persen	10.25	12.43	14.84	16.33	18.45
38	Rasio penduduk yang memiliki rumah layak huni sendiri	persen	30	40	50	60	70
39	Rasio pemenuhan kebutuhan air baku	persen	25	30	35	40	45
40	Persentase implementasi RTRW	persen	10	25	35	50	65
41	Indeks Pemberdayaan Gender	persen	34.64	35.41	36.20	37.01	37.84
42	Persentase Keluarga Sejahtera III	persen	32.44	26.47	22.21	17.75	12.67
43	Angka Akseptor KB	persen	21.37	22.84	24.70	26.58	29.26
44	Persentase peningkatan pemberdayaan terhadap pemuda	persen	2.5	3.0	3.25	3.6	4.15
45	Cakupan pembinaan remaja terhadap Kesehatan Reproduksi (Kespro)	persen	75	75	80	80	85
46	Persentase perolehan medali dalam event olah raga	medali	2	2	2	4	4
47	Persentase kenaikan produk-produk hukum daerah	persen	2.53	2.70	2.89	3.13	3.38
48	Angka Risiko Penduduk Terkena Kejahatan	Per 100.000 penduduk	20	18	12	10	8
49	Predikat daerah peduli HAM	predikat	mulai peduli	cukup peduli	cukup peduli	peduli HAM	peduli HAM
50	Indeks Demokrasi Indonesia	-	50.98	53.75	56.66	59.74	62.99
51	Persentase hak-hak dasar	persen	25	30	40	50	60

No.	Indikator		Target Tahun Ke				
	Deskripsi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	Orang Asli Papua yang dapat terpenuhi						
52	Tingkat Kemiskinan Orang Asli Papua	persen	30.57	30.24	29.59	28.69	27.81

Catatan:

Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD

Adapun untuk Indikator Kinerja Daerah yang merupakan indikator program prioritas dari setiap perangkat daerah sepanjang tahun 2018-2022 dijabarkan dalam Tabel 8.2 berikut ini.

BAB IX P E N U T U P

RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Dogiyai untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2034, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Papua, dan RPJM Nasional.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam bab penutup ini disajikan kaidah-kaidah transisi dan pelaksanaan yang akan menjadi pedoman dalam mengisi kekosongan RKPD disaat periode RPJMD

berakhir, serta sebagai patokan dalam pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya dalam perencanaan jangka pendek.

9.1. Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah pada periode berikutnya;
2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunanyang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh PD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;

2. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Dogiyai yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
4. Penyusunan RKPD Kabupaten Dogiyai dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kampung/Kelurahan, Distrik dan Musrenbang Kabupaten;
5. RKPD Kabupaten Dogiyai menjadi acuan bagi setiap PD/unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja-PD) dengan pendekatan pencapaian hasil (outcomes);
6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD Kabupaten Dogiyai merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Renja-PD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD) dan menjadi kontrak kinerja Kepala PD/Unit kerja.
8. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB IX

P E N U T U P

RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Dogiyai untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Dogiyai Tahun 2014-2034, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Papua, dan RPJM Nasional.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam bab penutup ini disajikan kaidah-kaidah transisi dan pelaksanaan yang akan menjadi pedoman dalam mengisi kekosongan RKPD disaat periode RPJMD berakhir, serta sebagai patokan dalam pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya dalam perencanaan jangka pendek.

9.1. Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

4. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas program APBD masa transisi yaitutahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah pada periode berikutnya;
5. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah

pembangunanyang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

6. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

9. Seluruh PD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
10. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
11. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Dogiyai yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
12. Penyusunan RKPD Kabupaten Dogiyai dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kampung/Kelurahan, Distrik dan Musrenbang Kabupaten;
13. RKPD Kabupaten Dogiyai menjadi acuan bagi setiap PD/unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja-PD) dengan pendekatan pencapaian hasil (outcomes);

14. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD Kabupaten Dogiyai merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
15. Renja-PD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD) dan menjadi kontrak kinerja Kepala PD/Unit kerja.
16. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Tabel 5.2.
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD

Visi / Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal 2017	Target Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD
		Deskripsi	Satuan Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	
Visi : DOGIYAI BAHAGIA										
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berasaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan prinsip pelayanan yang prima										
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalisme penyelenggara pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	predikat	C	C	C	B	B	A	A
		Rasio ASN terhadap total penduduk	per penduduk	54	55	57	60	64	68	68
		Rata-rata Nilai Prestasi Kerja ASN	nilai	78.25	79.915	81.58	84.91	88.24	91.57	91.57
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat profesi tertentu terhadap total ASN	persen	15.00	20.00	24.00	33.00	42.00	50.00	50.00

Visi / Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal 2017	Target Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD
		Deskripsi	Satuan Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	
	Optimalnya pelayanan kependudukan yang prima kepada masyarakat, dengan mengutamakan kepuasan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan hak-hak dan kewajiban kependudukan warga Negara	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	predikat	-	C	B	B	A	A	A
		Tingkat kepatuhan penduduk terhadap tertib administrasi kependudukan	persen	77.85	80.34	83.37	85.56	87.25	88.70	88.70
Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	predikat	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
		Predikat Akuntabilitas Kinerja	predikat	C	C	CC	CC	B	B	B
		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	persen	45	52	58	70	83	95	95
		Cakupan elemen data SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	persen	-	30	43	55	68	80	80
Meningkatkan manajemen pemerintahan daerah otonom baru	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran kampung yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran kampung yang berkualitas	persen	20.00	25.00	28.00	50.00	75.00	100.00	100.00
	Optimalnya pelayanan distrik	Capaian realisasi kinerja pelayanan distrik	persen	-	30	44	58	72	100	100

Visi / Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal 2017	Target Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD
		Deskripsi	Satuan Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	
	Optimalnya manajemen penataan daerah otonom baru	Capaian realisasi tata kelola daerah otonom baru	persen	65	70	75	80	85	90	90
Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan kesehatan yang prima										
Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkesinambungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Index	-	0.4516	0.4883	0.5365	0.5922	0.6685	0.6685
		Rasio tenaga medis terhadap total penduduk	Per 100.00 penduduk	139	168	197	233	276	298	298
		Rasio Puskesmas terhadap total penduduk	Per 30 ribu penduduk	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	8.00
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas	persen	-	85.00	85.00	87.00	88.00	90.00	90.00
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya status dan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	64.99	65.57	65.95	66.22	66.59	66.93	66.93
		Angka prevalensi gizi buruk	persen	19.10	18.37	17.50	16.12	15.13	13.30	13.30
Meningkatkan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit	Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	persen	-	20.00	30.00	50.00	60.00	70.00	80.00
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kemampuan intelektual, emosional dan spiritual secara berimbang										
Meningkatkan pendidikan	Meningkatnya mutu	Angka Melek Huruf	Perse	92.06	92.17	93.10	93.91	94.90	95.75	95.75

Visi / Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal 2017	Target Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD
		Deskripsi	Satuan Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	
yang berkualitas merata	pendidikan masyarakat	Cakupan Sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Persentase	25	25	25	25	30	30	30
		Persentase tenaga kerja yang berpendidikan menengah ke atas/kejuruan dan tinggi	persentase	1.40	1.48	1.60	1.78	3.22	5.83	5.83
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dasar 9 Tahun secara merata	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	4.9	5.0	5.1	5.4	5.9	6.5	6.5
Optimalisasi tata kelola pendidikan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	persentase	2.5	5	5	7	7	10	10
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan investasi yang berpihak kepada masyarakat										
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan pemerataan pendapatan	Berkembangnya sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian/peternakan/peternakan yang efisien dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi	persentase	7.56	8.00	8.25	8.50	9.00	9.25	9.25
	Meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persentase	31.21	31.19	30.85	30.20	29.28	28.38	28.38
		Angka Gini Ratio	Indeks	0.2500	0.2406	0.2307	0.2173	0.2070	0.1925	0.1925
		Pendapatan Per Kapita	Rp juta per kapita	8.14	8.34	8.60	9.31	10.27	11.58	11.58

Visi / Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal 2017	Target Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD
		Deskripsi	Satuan Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan kemampuan konsumsi penduduk	Meningkatnya daya beli rumah tangga	Pengeluaran per kapita	Rp ribu per kapita	5,954.87	6,040.47	6,206.58	6,662.89	7,339.18	8,272.10	8,272.10
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketahanan pangan lokal	Cakupan penduduk tahan pangan berdasarkan AKG (Angka Kecukupan Gizi)	persen	30.00	32.00	36.00	38.00	40.00	42.00	42.00
Mengimplementasikan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pengembangan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Cakupan rehabilitasi PMKS melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	persen	-	40	50	2017	55	55	55
Misi 5 : Mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian nilai dan kehidupan beragama, adat dan kebudayaan sebagai landasan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat										
Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama	Meningkatnya aktivitas pengamalan nilai-nilai agama	Indeks Pelayanan Agama di Sekolah	predikat		C	C	B	A	A	A
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Rasio tempat ibadah terhadap total penduduk	Per 1000 penduduk	67.98	67.98	68.30	68.76	69.92	70.65	70.65
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Tingkat kerukunan beragama berdasarkan Indeks KUB (Kerukunan Umat Beragama)	kategori	-	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengembangan nilai-nilai budaya dan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelestarian budaya dan adat istiadat	Persentase peningkatan penerapan nilai-nilai budaya dalam	persen	-	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	5.0

Visi / Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal 2017	Target Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD
		Deskripsi	Satuan Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	
kearifan lokal	lokal	kehidupan sosial budaya masyarakat								
	Mengembangkan kuantitas dan kualitas seni budaya serta melestarikan kebudayaan daerah	Persentase seni budaya suku Mee yang dilestarikan dan diberdayakan	persen	0	5	10	20	30	50	50
Misi 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam pembangunan berkelanjutan										
Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan pengrusakan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	-	90.00	90.00	92.00	92.00	95.00	95.00
		Volume limbah sampah rumah tangga di sungai	meter kubik per hari	11.43	9.67	7.21	6.10	4.12	2.66	2.66
	Terkendalinya eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan penyebab bencana longsor dan banjir	Indeks Risiko Bencana	kelas bencana	sedang	sedang	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah
Misi 7 : Mengembangkan infrastruktur umum dan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pelestarian adat dan kebudayaan, serta lingkungan hidup secara berkelanjutan										
Meningkatkan konektivitas antarwilayah secara optimal	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan dalam menghubungkan antarwilayah serta akses distribusi produk utama	Persentase peningkatan panjang jalan dan jembatan	persen	-	11.44	12.19	12.99	14.05	15.51	15.51
	Meningkatnya sarana dan	Persentase peningkatan	persen	-	10.25	12.43	14.84	16.33	18.45	18.45

Visi / Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal 2017	Target Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD
		Deskripsi	Satuan Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	
	prasarana transportasi udara	sarana dan prasarana perhubungan								
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan perumahan layak huni	Rasio penduduk yang memiliki rumah layak huni sendiri	persen	20	30	40	50	60	70	70
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku	Rasio pemenuhan kebutuhan air baku	persen	-	25	30	35	40	45	45
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya berdasarkan tata ruang	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal berdasarkan tata ruang wilayah	Persentase implementasi RTRW	persen	-	10	25	35	50	65	80
Misi 8 : Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta kesenian dan olah raga										
Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	persen		34.64	35.41	36.20	37.01	37.84	37.84
Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan perempuan	Meningkatnya kualitas kehidupan dan kesejahteraan perempuan dan keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera III	persen	35.51	32.44	26.47	22.21	17.75	12.67	12.67
		Angka Akseptor KB	persen	20.88	21.37	22.84	24.70	26.58	29.26	29.26
Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap pemuda dan remaja	Meningkatnya pemberdayaan pemuda	Persentase peningkatan pemberdayaan terhadap pemuda	persen	-	2.5	3.0	3.25	3.6	4.15	4.15
	Meningkatnya perlindungan terhadap remaja	Cakupan pembinaan remaja terhadap Kesehatan Reproduksi (Kespro)	persen		75	75	80	80	85	85

Visi / Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Awal 2017	Target Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD
		Deskripsi	Satuan Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan kapasitas olah raga	Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase perolehan medali dalam event olah raga	medali		2	2	2	4	4	14
Misi 9 : Mengoptimalkan produk hukum daerah, jaminan keamanan, dan penegakan hak asasi manusia dan kehidupan berdemokrasi										
Optimalisasi produk-produk hukum daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum daerah	Persentase kenaikan produk-produk hukum daerah	persen		2.53	2.70	2.89	3.13	3.38	3.38
Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat	Angka Risiko Penduduk Terkena Kejahatan	Per 100.00 penduduk	-	20	18	12	10	8	4
Menegakan Hak Asasi Manusia dan kehidupan berdemokrasi	Terwujudnya penegakan Hak Asasi Manusia	Predikat daerah peduli HAM	predikat		mulai peduli	cukup peduli	cukup peduli	peduli HAM	peduli HAM	peduli HAM
	Meningkatnya kehidupan berdemokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	-	48.35	50.98	53.75	56.66	59.74	62.99	62.99
Misi 10 : Merevitalisasi Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua dalam segala aspek kehidupan sebagai implementasi dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Khusus Papua										
Menegakan hak-hak dasar Orang Asli Papua	Meningkatnya pembangunan yang peduli terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua	Persentase hak-hak dasar Orang Asli Papua yang terpenuhi	persen	-	25	30	40	50	60	60
	Tingkat Kemiskinan Orang Asli Papua	persen	30.59	27.81	30.57	30.24	29.59	28.69	27.81	27.81

Tabel 6.2.
Kesesuaian Arah Kebijakan Terhadap Sasaran, Tujuan dan Misi Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
--------	---------	----------	----------------

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berasaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan prinsip pelayanan yang prima			
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalisme penyelenggara pelayanan publik	Mengoptimalkan sistem pelayanan dan kinerja layanan publik yang responsif, representatif, dan responsibel, serta adil dan merata	Penguatan Kapasitas Kelambagaan Dewan
			Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik
			Peningkatan Sistem Kerasipan dan Perpustakaan Daerah
	Meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna	Penerapan Sistem Rekrutmen Pegawai yang selektif dan kompetitif	Penetapan Indikator Kerja dan Sistem Penilaian Kinerja ASN
			Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN sesuai dengan bidangnya
Optimalnya pelayanan kependudukan yang prima kepada masyarakat, dengan mengutamakan kepuasan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan hak-hak dan kewajiban kependudukan warga Negara	Mengembangkan sistem pelayanan kependudukan yang profesional	Penerapan layanan kependudukan yang cepat, murah dan transparan berdasarkan standard dan spesifikasi yang telah ditetapkan	
		Pengembangan struktur manajemen pelayanan administrasi kependudukan yang prima	
	Menciptakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil pada warga	Peningkatan kesadaran penduduk terhadap pentingnya <i>legal identity</i> dalam kehidupan bernegara	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
			Penegakan tindak lanjut atas rekomendasi legal / hukum hasil pengawasan/audit yang dilakukan secara transparan dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
			Peningkatan layanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Pelaporan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan yang mengacu kepada prinsip-prinsip konsistensi, auditable, obyektif, komprehensif, informatif, dan akurat
			Penerapan sistem pelaporan berbasis pencapaian kinerja
			Peningkatan sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
		Mengoptimalikan fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penerapan perencanaan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan dan evaluatif
			Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, akuntabel dan komprehensif
			Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan wilayah
Meningkatkan manajemen pemerintahan daerah otonom baru	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran kampung yang berkualitas	Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pemerintahan kampung
	Optimalnya pelayanan distrik		Penguatan sistem pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan daerah otonom baru
	Optimalnya manajemen penataan daerah otonom baru		Pemantapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah otonomi baru
Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan kesehatan yang prima			
Optimalisasi ketersediaan sarana	Meningkatnya kualitas dan kuantitas	Meningkatkan ketersediaan, akses dan	Optimalisasi penyediaan sumber daya kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
dan prasarana kesehatan yang berkesinambungan	sarana dan prasarana kesehatan	pemerataan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, kontinu dan berkualitas	Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat di setiap distrik/kampung
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya status dan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kesehatan ibu dan bayi	Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat
			Peningkatan upaya kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas
			Peningkatan kesehatan seribu hari pertama kehidupan bayi
		Meningkatkan kesehatan dan lingkungan masyarakat	Penanganan dan pencegahan penyakit sepuluh terbesar
		Meningkatkan gizi ibu dan anak	Pemberdayaan keluarga di bidang kesehatan dan gizi
Meningkatkan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit	Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan promosi kesehatan masyarakat	Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat mandiri
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kemampuan intelektual, emosional dan spiritual secara berimbang			
Meningkatkan pendidikan yang berkualitas merata	Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat	Meningkatkan pendidikan non formal	Pengembangan pendidikan keaksaraan dan kejar paket
		Mengoptimalkan penerapan MBS pada semua sekolah	Peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah terhadap MBS
			Peningkatan budaya sekolah (<i>school culture</i>) yang demokratis, transparan, dan akuntabe
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan	Revitalisasi pendidikan vokasional	
		Peningkatan tenaga kerja lokal yang berpendidikan tinggi	
Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan dasar 9 Tahun yang merata	Meningkatkan akses pendidikan untuk semua jenjang pendidikan	Penguatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	
Optimalisasi tata kelola pendidikan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Standarisasi pendidikan dasar sembilan tahun	Pengembangan sekolah mengacu pada standar pendidikan nasional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mengembangkan Sistem Pendataan dan Informasi Pendidikan berbasis teknologi	Penguatan pendataan pendidikan pada semua sekolah
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan investasi yang berpihak kepada masyarakat			
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan pemerataan pendapatan	Berkembangnya sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian/ peternakan/perikanan yang efisien dan berdaya saing	Meningkatkan produktifitas sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian/ peternakan/perikanan	Peningkatan dan perluasan produk-produk hasil pertanian/peternakan/ perikanan
	Meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Mengentaskan kemiskinan	Penguatan pembangunan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan, kemiskinan dan kearifan lokal
		Mereduksi ketimpangan pendapatan	Reorientasi pengembangan industri mikro, kecil dan menengah yang berbasis kerakyatan
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada semua sektor	Perluasan lapangan kerja pada semua sektor produktif Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan tenaga kerja yang siap pakai
Meningkatkan kemampuan konsumsi penduduk	Meningkatnya daya beli rumah tangga	Meningkatkan daya beli rumah tangga	Pengendalian tingkat kemahalan harga
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketahanan pangan lokal	Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang	Peningkatan mutu dan keamanan pangan
			Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan
Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian			
Mengimplementasikan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pengembangan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dalam pemberdayaan PMKS
			Peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
			Peningkatan perlindungan penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan
Misi 5 : Mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian nilai dan kehidupan beragama, adat dan kebudayaan sebagai landasan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat			
Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan	Meningkatnya aktivitas pengamalan nilai-nilai agama	Meningkatkan kualitas pelayanan agama di tingkat sekolah	Peningkatan pengamalan dan penunaian ajaran agama

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
beragama			Optimalisasi peran tokoh agama dan lembaga- lembaga keagamaan dalam pengamalan ajaran-ajaran agama di sekolah
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tempat- tempat ibadah	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana untuk beribadah Pemeliharaan tempat- tempat ibadah secara merata dan meluas keseluruh umat beragama
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama	Pemberdayaan institusi keagamaan Harmonisasi siar agama yang damai dan rukun
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengembangan nilai- nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelestarian budaya dan adat istiadat lokal	Merevitalisasi pembangunan kampung kearifan lokal	Pengembangan kampung adat berbasis nilai- nilai budaya yang luhur
		Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan kearifan lokal	Optimalisasi nilai- nilai adat istiadat dalam pengembangan upaya kesehatan masyarakat
		Meningkatkan pendidikan berkarakter dan berbudaya lokal	Pengintegrasian pendidikan formal dan non formal terhadap nilai- nilai budaya Suku Mee
	Mengembangkan kuantitas dan kualitas seni budaya serta melestarikan kebudayaan daerah	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal	Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan aktivitas seni budaya lokal Peningkatan kualitas dan kuantitas kapasitas masyarakat, kelembagaan dan promosi seni budaya lokal
Misi 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam pembangunan berkelanjutan			
Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan pengrusakan lingkungan	Meningkatkan kualitas kawasan hijau melalui refungsi kondisi kawasan eksisting dan daya dukung lahan	Perluasan kawasan hijau dan reboisasi lahan kritis Pengembangan sistem monitoring pencemaran udara berbasis teknologi
		Meningkatkan kesadaran penduduk untuk menjaga ekologi dan ekosistem daerah aliran sungai	Promosi pemanfaatan sungai berbasis lingkungan hidup Pencegahan pembuangan limbah sampah rumah tangga di sungai
	Terkendalinya eksploitasi	Mengurangi eksploitasi yang berlebihan	Efisiensi pengelolaan sumber daya alam secara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan penyebab bencana longsor dan banjir	terhadap alam melalui penggunaan sumber daya alam secara efisien	berkelanjutan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
Misi 7 : Mengembangkan infrastruktur umum dan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pelestarian adat dan kebudayaan, serta lingkungan hidup secara berkelanjutan			
Meningkatkan konektivitas antarwilayah secara optimal	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan dalam menghubungkan antarwilayah serta akses distribusi produk utama	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap secara merata dan berkelanjutan	Peningkatan dan perluasan pembangunan jalan dan jembatan secara merata dan berkelanjutan
			Peningkatan preservasi jalan dan jembatan secara merata
			Peningkatan jalan dan jembatan pada kawasan sentra produksi komoditi unggulan
	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi udara	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas melalui perhubungan udara secara merata	Peningkatan sarana dan prasarana bandar udara Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat antardaerah
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan perumahan layak huni	Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, berkualitas dan memenuhi standar minimal	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara merata dan berkesinambungan
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku		Pemenuhan kebutuhan air baku
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya berdasarkan tata ruang	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal berdasarkan tata ruang wilayah	Meningkatkan kepatuhan terhadap tata ruang dalam pembangunan wilayah	Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah dengan pelaksanaan pembangunan wilayah
Misi 8 : Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta kesenian dan olah raga			
Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Menempatkan pengarusutamaan gender pada seluruh aspek pembangunan	Pengarustamaan gender dalam perencanaan, penganggaran dan implementasi pembangunan sektoral
Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan perempuan	Meningkatnya kualitas kehidupan dan kesejahteraan perempuan dan keluarga	Meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam keluarga	Pemberdayaan perempuan dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga
			Peningkatan dan ketahanan kesejahteraan keluarga
Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan	Meningkatnya pemberdayaan pemuda	Mengembangkan SDM pemuda melalui kelembagaan pemuda	Revitalisasi kekuatan dan potensi pemuda untuk berkarya dalam segala

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
terhadap pemuda dan remaja		dan penyediaan sarana dan prasarana kemajuan pemuda	aspek pembangunan
	Meningkatnya perlindungan terhadap remaja	Melaksanakan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan proses tumbuh kembang remaja	Pembinaan kesehatan reproduksi yang dilakukan secara terpadu Pemberian pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui penerapan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
		Memberikan konseling realitas untuk mengurangi kecemasan pada korban pelecehan dan kekerasan seksual	Pemberian konseling pasca trauma pada korban pelecehan dan kekerasan seksual
Meningkatkan kapasitas olah raga	Meningkatnya prestasi olah raga	Menumbuhkembangkan dan memberdayakan bakat dan kapasitas pemuda dalam olah raga	Pengembangan kapasitas pemuda untuk berprestasi dalam olah raga
Misi 9 : Mengoptimalkan produk hukum daerah, jaminan keamanan, dan penegakan hak asasi manusia dan kehidupan berdemokrasi			
Optimalisasi produk-produk hukum daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum daerah	Meningkatkan penguasaan dan keterampilan aparaturnya dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengembangan sumber daya aparaturnya dalam penyusunan peraturan daerah yang berkualitas
			Harmonisasi produk-produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya
Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat	Meningkatkan sinergitas dengan aparaturnya keamanan dalam mencegah dan menanggulangi kriminalitas	Optimalisasi potensi dan peran aparaturnya keamanan dalam pencegahan, penanggulangan dan perlindungan terhadap masyarakat
			Peningkatan kewaspadaan serta kesadaran masyarakat terhadap ancaman kriminalitas
			Pembinaan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan peraturan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menegakan Hak Asasi Manusia dan kehidupan berdemokrasi	Terwujudnya penegakan Hak Asasi Manusia	Meningkatkan pembangunan daerah yang peduli dengan HAM	Optimalisasi fungsi dan peran lembaga HAM
			Percepatan implementasi pembangunan yang peduli dengan HAM
	Meningkatnya kehidupan berdemokrasi	Meningkatkan penerapan demokrasi yang partisipatif	Pengembangan dan pemberdayaan institusi demokrasi baik secara formal maupun nonformal
Misi 10 : Merevitalisasi Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua dalam segala aspek kehidupan sebagai implementasi dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Khusus Papua			
Menegakan hak-hak dasar Orang Asli Papua	Meningkatnya pembangunan yang peduli terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua	Merevitalisasi dan mengaktualisasi hak-hak dasar Orang Asli Papua	Peningkatan pengakuan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua
		Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kesejahteraan Orang Asli Papua	Peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur perencana dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berkualitas yang berpihak pada Orang Asli Papua
	Tingkat Kemiskinan Orang Asli Papua	Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan Orang Asli Papua	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan Orang Asli Papua
		Meningkatkan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berpihak pada Orang Asli Papua	Pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi Orang Asli Papua
			Peningkatan derajat dan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua
	Meningkatkan fokus pembangunan infrastruktur dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang layak dan memadai untuk kesejahteraan Orang Asli Papua	

Tabel 6.4.
Perumusan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Dogiyai

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berdasarkan pada p					
1	Mengoptimalkan sistem pelayanan dan kinerja layanan publik yang responsif, representatif, dan responsibel, serta adil dan merata	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase penetapan Perda yang tepat waktu	persen	
		Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	persen	
			Persentase implementasi Sistem Pajak On-Line	persen	
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Proporsi penduduk yang terakses media komunikasi telepon seluler	per 10.000 penduduk	
			Cakupan kampung yang telah terakses dengan komunikasi HP	kampung	
			Rasio coverage BTS	per 100 pelanggan	
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Cakupan fasilitasi pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah	persen	
			Cakupan tuntasnya kasus pengaduan masyarakat	persen	
2	Meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan ASN yang mengikuti tugas belajar pendidikan tinggi yang lulus tepat waktu	per 100 ASN	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
	berdayaguna dan berhasilguna		Persentase penerapan penilaian kinerja PNS berbasis UU ASN	persen	
			Tingkat pemahaman PNS dalam penilaian kinerja berbasis ASN	persen	
		Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan (struktural dan fungsional)	persen	
			Persentase CPNSD yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Struktural	persen	
3	Mengembangkan sistem pelayanan kependudukan yang profesional	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata waktu pelayanan administrasi kependudukan	jam perminggu	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan kependudukan	persen	
4	Menciptakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil pada warga		Rasio penduduk usia 17 tahun dan keatas yang ber KTP-el	per 1.000 penduduk	
			Rasio bayi yang berakte kelahiran	per 1.000 bayi	
			Rasio pasangan berakte nikah (catatan sipil)	per 100 pasangan	
			Rasio rumahtangga yang memiliki KK-el (Kartu Keluarga Elektronik)	per 100 KK	
5	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif,	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase Laporan Keuangan berbasis akrual	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
	transparan, dan akuntabel	daerah	Persentase APBD Tepat Waktu	persen	
			Persentase pertumbuhan PAD	persen	
			Cakupan aset daerah yang telah teridentifikasi dan dinilai kembali	persen	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase temuan APIP yang ditindak lanjuti	persen	
			Tingkat implementasi SPIP	persen	
			Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	predikat	
			Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	predikat	
			Cakupan aset daerah yang telah teridentifikasi dan dinilai kembali	persen	
6	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Peningkatan Level Internal Audit Capability Model (IA-CM) pada APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)	tingkat	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemeriksaan	persen	
		Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase implementasi pengelolaan belanja dan aset daerah berbasis IT	persen	
7	Mengoptimalkan fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase penerapan e-planning dan e-musrenbang	persen	
			Persentase tenaga fungsional perencanaan pembangunan	persen	
			Persentase dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA-PD) yang berkualitas	persen	
			Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berkualitas (RKPD, RENJA-PD, RKA-PD, KUA-PPAS, DPA, RAPBD)	persen	
			Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	persen	
			Tersusunnya Dokumen URD Otsus yang tepat waktu	predikat	Ter
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang berkualitas	dokumen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang berkualitas	dokumen	
			Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang berkualitas	dokumen	
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana yang berkualitas	dokumen	
			Persentase usulan hasil musrenbang yang dimuat dalam perencanaan tahunan	persen	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase penerapan RTRW	persen	
			Jumlah RDTR Distrik yang berkualitas	dokumen	
			Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan RTRW	persen	
		Program Pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan kualitas SIPD	persen	
			Persentase realisasi PD yang melengkapi indikator sesuai hasil pemetaan SIPD	persen	
			Cakupan indikator SIPD yang memenuhi kriteria dan berkualitas	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Persentase penerapan data dan informasi pembangunan berbasis IT	persen	
8	Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	persen	
			Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	persen	
			Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan	persen	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	
			Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	
			Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	
			Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	
			Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	
			Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	
			Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	
			Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	
			Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	
			Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	
			Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	
			Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	
			Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	
			Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	
			Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	
			Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	
			Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	
			Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	
			Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah (kabupaten/ distrik/kampung)	persen	
			Persentase penerapan SOTK baru	persen	
			Persentase penerapan RTL (Rencana Tindak Lanjut) hasil koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar daerah	persen	
Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan kes					
9	Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, kontinu dan berkualitas	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Puskesmas terhadap kesehatan dasar (kesehatan ibu, anak dan KB; gizi; pencegahan dan pengendalian penyakit; kesehatan lingkungan; dan promosi kesehatan)	persen	
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin yang terlayani JKN	persen	
			Akses penduduk terhadap layanan BPJS	per 100.000 penduduk	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/	Persentase peningkatan sarana dan prasarana di rumah sakit	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
		rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan	persen	
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas terhadap total penduduk	Per 30 ribu penduduk	
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana puskesmas	persen	
		Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Persentase kenaikan rujukan teknis laboratorium puskesmas dan rumah sakit	persen	
			Cakupan pemeriksaan sampel	sampel	
		Program sumberdaya kesehatan	Rasio dokter terhadap penduduk	per 100.000 penduduk	
			Rasio perawat/bidan terhadap penduduk	per 100.000 penduduk	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang telah memenuhi standar layanan	puskesmas	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemenuhan obat-obatan untuk menghilangkan simptomatik/gejala, meredakan nyeri (antibiotik, analgesik, dll)	persen	
			Persentase pemenuhan obat-obatan untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit (vaksin, serum, dll)	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Persentase pemenuhan obat-obatan untuk menambah atau mengganti fungsi fungsi zat yang kurang (vitamin, hormon, dll)	persen	
			Proporsi pelayanan farmasi yang berkualitas	persen	
10	Meningkatkan kesehatan ibu dan bayi	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan	persen	
			Cakupan Pos Yandu Lansia	per 100 penduduk lansia	
			Jumlah Kader Lansia yang terlatih dan terampil	orang	
		Program Upaya Kesehatan Perseorangan	Tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat di Puskesmas	persen	
			Jumlah puskesmas yang berfungsi sebagai UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) yang berkualitas (Poliklinik, UGD, bersalin)	puskesmas	
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu	per 1.000 kelahiran hidup	
			Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN)	persen	
			Rasio Bidan Terlatih yang memenuhi standar terhadap total penduduk	per 30.000 penduduk	
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran bayi	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
		balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	persen	
			Cakupan SDKN Posyandu	persen	
11	Meningkatkan kesehatan dan lingkungan masyarakat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan Penduduk	persen	
			Cakupan balita dan anak sekolah yang memperoleh vaksin dan imunisasi	per 10.000 balita dan anak	
			Persentase Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	persen	
12	Meningkatkan gizi ibu dan anak	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	persen	
			Cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin terhadap balita dan anak	per 10.000 balita dan anak	
			Cakupan Ibu Hamil yang diberikan tambahan makanan dan vitamin	per 10.000 ibu hamil	
13	Meningkatkan promosi kesehatan masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	persen	
			Cakupan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	per 10.000 penduduk	
			Persentase kampung/desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Persentase tenaga penyuluh kesehatan yang terdidik dan terlatih	persen	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan kampung/desa yang berstatus Rumah Desa Sehat	desa/kampung	
			Persentase kampung/desa yang memperoleh penyuluhan lingkungan sehat	persen	
			Persentase rumahtangga yang dapat mengakses air bersih	persen	
		Program Peningkatan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau lainnya	Cakupan kampung/desa yang bebas asap rokok	desa/kampung	
			Persentase penduduk yang merokok	persen	
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kemampuan intelektual, emosional dan spiritual secara					
14	Meningkatkan pendidikan non formal	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang memenuhi standar	PKBM	
			Persentase peserta PKBM yang lulus Kejar (Kelompok Belajar) paket (A, B dan C)	persen	
			Persentase penerapan Keaksaraan Fungsional Dasar Dewasa	persen	
			Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (Perpustakaan) yang berkualitas	taman bacaan	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
14	Mengoptimalkan penerapan MBS pada semua sekolah	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	persen	
			Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi B	sekolah	
			Persentase peran Komite Sekolah dalam penerapan MBS	persen	
			Persentase kenaikan budaya dan budaya mutu dalam penerapan MBS	persen	
15	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan	Program Pendidikan Menengah	Proporsi siswa yang lulus pendidikan kejuruan	persen	
			Daya serap lapangan kerja untuk lulusan pendidikan kejuruan	persen	
		Program Pendidikan Tinggi	Persentase peserta beasiswa pendidikan tinggi yang lulus tepat waktu	persen	
			Persentase lulusan pendidikan tinggi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	
16	Meningkatkan akses pendidikan untuk semua jenjang pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	persen	
			APM Pendidikan Anak Usia Dini	persen	
			Cakupan guru PAUD yang bersertifikasi	per 100 guru	
			Rasio ruang kelas murid PAUD	murid per kelas	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD dan sederajat	persen	
			APM SMP dan sederajat	persen	
			APK SD dan sederajat	persen	
			APK SMP dan sederajat	persen	
			Angka Kelulusan SD dan sederajat	persen	
			Angka Kelulusan SMP dan sederajat	persen	
			Angka Melanjutkan Sekolah ke SMP	persen	
			Angka Melanjutkan Sekolah ke SMA/SMK	persen	
			Jumlah Sekolah Satu Atap Berasrama yang berkualitas	sekolah	
17	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Bersertifikasi terhadap murid SD/SMP	murid per guru bersertifikasi	
			Proporsi tenaga kependidikan yang terlatih dan terampil	persen	
18	Standarisasi pendidikan dasar sembilan tahun		Rasio Guru Murid jenjang SD dan sederajat	murid per guru	
			Rasio Guru Murid jenjang SMP dan sederajat	murid per guru	
			Rasio Sekolah Murid jenjang SD dan sederajat	murid per sekolah	
19	Mengembangkan Sistem Pendataan dan Informasi Pendidikan berbasis teknologi		Cakupan Sekolah yang memberikan DAPODIK secara rutin dan berkelanjutan	persen	

Misi 4 : Mengembangkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pe

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
20	Meningkatkan produktifitas sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian/ peternakan/perikanan	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Tingkat produktifitas tanaman pangan	ton per hektar	
			Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	ton per hektar	
			Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi	persen	
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	persen	
			Kontribusi sektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi	persen	
		Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi budidaya perikanan	persen	
			Kontribusi subsektor budidaya perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	persen	
		Program pengembangan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	persen	
			Kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap pertumbuhan ekonomi	persen	
			Persentase peningkatan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil	persen	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase hasil produk unggulan yang terserap di pasar regional (ibu kota provinsi)	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Tingkat daya saing produk-produk unggulan ekonomi kerakyatan	indeks LQ	
			Jumlah komoditi unggulan ekonomi kerakyatan yang dapat dipromosikan di ibu kota provinsi	komoditi	
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase peningkatan sistem informasi penanaman modal	persen	
			Rata-rata waktu pelayanan perijinan penanaman modal (investasi)	hari	
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase peningkatan pembinaan kemampuan Teknologi Tepat Guna (TTG) di industri mikro dan kecil	persen	
			Cakupan pengusaha industri mikro, kecil dan menengah yang menerapkan TTG	persen	
			Persentase penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) pada produk-produk hasil industri mikro, kecil dan menengah	persen	
21	Mengentaskan kemiskinan	Program Peningkatan	Nilai Tukar Petani	indeks	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
		Kesejahteraan Petani	Persentase petani/peternak /nelayan yang menguasai dan terampil melaksanakan usaha agribisnis	persen	
			Cakupan Kelompok petani yang diberdayakan dan dibina	persen	
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah keluarga miskin dan PMKS yang terampil berusaha secara mandiri	orang	
			Cakupan KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang diberdayakan	persen	
			Proporsi keluarga miskin yang memperoleh sarana dan prasarana pendukung KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) yang memadai	persen	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pengusaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri melalui pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	persen	
			Jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah yang dapat bermitra dengan perusahaan menengah dan besar	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Persentase produk unggulan usaha industri mikro, kecil dan menengah yang dapat dipasarkan antarpulau	persen	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan SHU Koperasi	persen	
			Persentase peningkatan Anggota Koperasi	persen	
			Jumlah Koperasi yang terkategori mandiri	koperasi	
22	Mereduksi ketimpangan pendapatan	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan)	Persentase kenaikan nilai produksi usaha ekonomi kerakyatan	persen	
			Persentase peningkatan nilai tambah usaha ekonomi kerakyatan	persen	
			Kontribusi usaha industri berbasis ekonomi kerakyatan terhadap PDRB	persen	
			Proporsi OAP suku Mee yang memiliki usaha industri mikro dan kecil	persen	
			Cakupan pengusaha OAP suku Mee yang dibina	orang	
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase peningkatan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah	persen	
			Persentase usaha mikro dan kecil yang berbadan usaha	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Persentase pengusaha industri mikro, kecil dan menengah yang diberdayakan	persen	
23	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada semua sektor	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	
			Jumlah BLK yang terakreditasi	BLK	
			Persentase lulusan BLK yang terserap dalam lapangan kerja	persen	
24	Meningkatkan daya beli rumah tangga	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Margin perdagangan bahan-bahan pokok	rasio	
			Tingkat inflasi	persen	
			Indeks Kemahalan Kontruksi	indeks	
25	Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang	Program Penganekaragaman Pangan Spesifik Pangan Lokal	Jumlah komoditi lokal yang memenuhi standar menjadi alternatif pangan bermutu	komoditi	
			Rasio konsumsi penduduk terhadap komoditi pangan alternatif	persen	
			Persentase kenaikan produksi pangan lokal alternatif	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang terdidik dan terlatih	persen	
			Cakupan pembinaan dan pendampingan pada kelompok petani tanaman pangan	kelompok petani	
			Rasio tenaga penyuluh pertanian yang terlatih terhadap total petani	per 1.000 petani	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Indeks Ketahanan Pangan Agregat Rumah tangga	indeks	
			Angka Kecukupan Gizi (AKG)	persen	
			Angka Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	
			Ketersediaan pangan per kapita	kg per kapita	
26	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi PMKS	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Persentase penyandang PMKS binaan yang terampil berusaha secara mandiri	persen	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan PMKS	persen	
			Proporsi tenaga penyuluh kesejahteraan sosial yang terlatih dan terampil	persen	
			Rasio keluarga dalam KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang mengikuti PKH (Program Keluarga Harapan)	persen	
			Persentase tenaga kerja penyandang disabilitas yang dilindungi	persen	
Misi 5 : Mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian nilai dan kehidupan beragama, adat dan kebudayaan seba					
27	Meningkatkan kualitas pelayanan agama di tingkat sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase ketersediaan buku-buku agama di sekolah	persen	
			Cakupan sekolah dasar yang memiliki ruang ibadah	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Persentase peningkatan kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga keagamaan	persen	
28	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tempat-tempat ibadah	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pembangunan tempat-tempat ibadah	persen	
			Persentase tempat ibadah yang terpelihara	persen	
29	Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Proporsi lembaga keagamaan yang dibina dan diberdayakan	persen	
			Persentase berfungsinya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	persen	
30	Merevitalisasi pembangunan kampung kearifan lokal	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan kampung adat	kampung	
31	Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan kearifan lokal	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase dukun bayi yang memperoleh pelatihan persalinan dan perawatan masa nifas	persen	
		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase tanaman obat-obatan lokal yang dikembangkan dalam upaya kesehatan masyarakat	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
32	Meningkatkan pendidikan berkarakter dan berbudaya lokal	Program Pengembangan Nilai Budaya	Porsi muatan budaya dan adat Suku Mee dalam kurikulum pendidikan sekolah	persen	
33	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan sanggar seni yang dibina dan diberdayakan	sanggar	
			Frekwensi juara dalam lomba seni budaya tingkat regional/nasional	kali	
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Persentase penerapan bentuk kemitraan usaha profesi seni dan budaya antar daerah dengan pihak swasta / LSM	persen	
			Cakupan potensi daerah wisata seni budaya yang dipromosikan	daerah wisata	
Misi 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam pembangunan b					
34	Meningkatkan kualitas kawasan hijau melalui refungsi kondisi kawasan eksisting dan daya dukung lahan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan Ruang terbuka hijau (RTH)	persen	
			Kategori Tingkat Pencemaran Udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	kategori	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
35	Meningkatkan kesadaran penduduk untuk menjaga ekologi dan ekosistem daerah aliran sungai	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya /Program Pemulihan Kondisi Sungai (Restorasi)	Cakupan normalisasi sungai	persen	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pelayanan persampahan di perkotaan Dogiyai	persen	
			Cakupan pemenuhan TPA di perkotaan Dogiyai	persen	
36	Mengurangi eksploitasi yang berlebihan terhadap alam melalui penggunaan sumber daya alam secara efisien	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pemahaman warga dalam mendeteksi dini dan menghadapi bencana alam	persen	
			presentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	persen	
Misi 7 : Mengembangkan infrastruktur umum dan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pelestarian ada					
37	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap secara merata dan berkelanjutan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cakupan panjang jalan dan jembatan terhadap penduduk (Mobilitas)	Km / 100 penduduk	
			Cakupan panjang jalan dan jembatan terhadap luas wilayah (Aksesibilitas)	Km/Km ²	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang (kondisi mantap)	persen	
			Rasio panjang jalan dan jembatan dalam kawasan sentra produksi	persen	
38	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas melalui perhubungan udara secara merata	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase kenaikan penumpang datang dan pergi di bandar udara	persen	
			Persentase kenaikan bongkar muat barang di bandar udara	persen	
			Cakupan distrik yang memiliki bandar udara perintis yang memadai	distrik	
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rasio kendaraan bermotor terhadap penduduk	per 10.000 penduduk	
		Cakupan terminal penumpang yang memadai	per distrik		
39	Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, berkualitas dan memenuhi standar minimal	Program Pengembangan Perumahan	Backlog kepemilikan rumah layak huni	rumah	
			Tingkat Elektrifikasi penduduk	persen	
			Akses rumahtangga terhadap air bersih	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	persen	
			Rasio jaringan irigasi kondisi baik	persen	
40	Meningkatkan kepatuhan terhadap tata ruang dalam pembangunan wilayah	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tingkat kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW	persen	
			Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	persen	
Misi 8 : Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta kesenian dan olah raga					
41	Menempatkan pengarusutamaan gender pada seluruh aspek pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Porsi muatan gender dalam perencanaan dan penganggaran	persen	
			Rata-rata Lama Sekolah perempuan	tahun	
			Angka Melek Huruf perempuan	persen	
42	Meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam keluarga	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase perempuan di perdesaan yang terampil dalam bidang usaha ekonomi produktif	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Persentase kenaikan pendapatan mama-mama papua yang mendapat pendampingan usaha ekonomi	persen	
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase berfungsinya kelompok peduli KB	persen	
			Cakupan kader KB terlatih dan terdidik	kader	
		Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak per KK	
			Rasio akseptor KB	persen	
			Cakupan peserta KB aktif	persen	
		Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	persen	
			Cakupan Ketersediaan alat kontrasepsi untuk keluarga miskin	persen	
43	Mengembangkan SDM pemuda melalui kelembagaan pemuda dan penyediaan sarana dan prasarana kemajuan pemuda	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan organisasi kepemudaan yang dibina	persen	
			Cakupan pengusaha muda yang mandiri	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
44	Melaksanakan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan proses tumbuh kembang remaja	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase peningkatan pemahaman remaja terhadap reproduksi	persen	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	persen	
45	Memberikan konseling realitas untuk mengurangi kecemasan pada korban pelecehan dan kekerasan seksual		Cakupan bimbingan konseling terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual	persen	
46	Menumbuhkembangkan dan memberdayakan bakat dan kapasitas pemuda dalam seni budaya dan olah raga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase cabang olahraga prestasi yang terbina	persen	
			Proporsi peserta kompetisi olahraga daerah yang berprestasi di tingkat regional/ nasional	persen	
			Persentase atlet berprestasi yang diberikan penghargaan	persen	
			Persentase peningkatan kemitraan bina olahraga dengan lembaga/ instansi lainnya	persen	
Misi 9 : Mengoptimalkan produk hukum daerah, jaminan keamanan, dan penegakan hak asasi manusia dan kehidupan					
47	Meningkatkan penguasaan dan keterampilan aparatur dalam penyusunan peraturan daerah sesuai	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Naskah Akademik yang berkualitas	persen	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
	dengan ketentuan yang berlaku		Cakupan tenaga fungsional <i>legal drafting</i> yang berkualitas	orang	
			Cakupan produk-produk hukum daerah yang diterima oleh kementerian dalam negeri	persen	
48	Meningkatkan sinergitas dengan aparaturnya keamanan dalam mencegah dan menanggulangi kriminalitas	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase hasil penertiban penyakit masyarakat (Pekat)	persen	
			Rasio Satpol PP terhadap total penduduk	Per 10.000 penduduk	
			Rasio Linmas terhadap total penduduk	Per 10.000 penduduk	
			Angka Kekerasan Dalam Rumahtangga (KDRT)	per 10.000 perempuan	
			Persentase kasus pelanggaran terhadap Perda	persen	
49	Meningkatkan pembangunan daerah yang peduli dengan HAM	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase penanganan pelanggaran HAM	persen	
			Persentase peningkatan pelayanan publik peduli HAM	persen	
			Indeks Kebahagiaan	indeks	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
			Cakupan dokumen laporan penegakanHAM yang berkualitas	dokumen	
50	Meningkatkan penerapan demokrasi yang partisipatif	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peserta pilkada/pemilu	persen	
			Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kehidupan politik dan berdemokrasi	persen	
Misi 10 : Merevitalisasi Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua dalam segala aspek kehidupan sebagai implementasi dalam					
51	Merevitalisasi dan mengaktualisasi hak-hak dasar Orang Asli Papua	Program Afirmasi Lembaga Masyarakat Adat	Persentase peran masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan	persen	
52	Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kesejahteraan Orang Asli Papua	Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan dokumen Rencana Definitif Otsus yang berkualitas	dokumen	
			Cakupan pendataan Orang Asli Papua	persen	
53	Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan Orang Asli Papua	Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan	Rasio jumlah penduduk OAP yang memiliki usaha sendiri skala mikro dan kecil	per 1.000 rumah tangga OAP	
54	Meningkatkan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berpihak pada Orang Asli Papua	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rata-rata Lama Sekolah Orang Asli Papua	tahun	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program		Kin Per
			Deskripsi	Satuan Indikator	
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Harapan Hidup Orang Asli Papua	tahun	
55	Meningkatkan fokus pembangunan infrastruktur dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumahtangga Orang Asli Papua yang memiliki rumah layak huni	persen	
			Tingkat elektrifikasi pada rumahtangga Orang Asli Papua	persen	

Tabel 6.5.
Perumusan Program Prioritas

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Pendidikan Non Formal	1. Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf pada penduduk; 2. Akses penduduk		Jumlah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang memenuhi standar	PKBM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Pendidikan

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		terhadap Sekolah Dasar dan Menengah (Wajib Belajar Sembilan Tahun) masih rendah; 3. Belum idealnya rasio antara guru dengan murid di seluruh jenjang pendidikan; 4. Belum tersedianya sekolah yang bermutu terakreditasi A dan B; 5. Kesulitan sekolah dalam menerapkan kurikulum, dan Manajemen Berbasis Sekolah yang bermutu;		Persentase peserta PKBM yang lulus Kejar (Kelompok Belajar) paket (A, B dan C)	persen	90,00	92,00	95,00	98,00	100,00	100,00	
				Persentase penerapan Keaksaraan Fungsional Dasar Dewasa	persen	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	
				Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (Perpustakaan) yang berkualitas	taman bacaan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	kurikulum, dan Manajemen Berbasis Sekolah yang bermutu; 6. Tenaga pengajar/guru masih sangat kurang dan menyebar tidak merata antar Distrik/kampung; 7. Rendahnya tingkat kesejahteraan		Persentase penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	persen	50,00	55,00	60,00	65,00	75,00	75,00	
				Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi B	sekolah	-	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
				Persentase peran Komite Sekolah dalam	persen	50,00	55,00	60,00	70,00	80,00	80,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Program Pendidikan Menengah	guru; 8. Tingkat kemangkiran guru dalam mengajar masih sangat tinggi; 9. Belum memadainya tenaga guru sesuai jumlah bidang mata pelajaran; 10. Kapasitas sekolah dalam mengelola Dana BOS masih belum efektif dan optimal; 11. Minimnya ketersediaan data dan informasi di sektor pendidikan.		penerapan MBS								
				Persentase kenaikan budaya dan budaya mutu dalam penerapan MBS	persen	2,50	2,50	3,00	4,00	5,00	5,00	
				Proporsi siswa yang lulus pendidikan kejuruan	persen	90,00	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	
4	Program Pendidikan Tinggi			Daya serap lapangan kerja untuk lulusan pendidikan kejuruan	persen	60,00	75,00	85,00	95,00	100,00	100,00	
				Persentase peserta beasiswa pendidikan tinggi yang lulus tepat waktu	persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	
				Persentase lulusan pendidikan tinggi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini			APK PAUD	persen	50,00	86,25	87,75	88,32	90,23	90,23	
				APM Pendidikan Anak Usia Dini	persen	50,00	51,36	54,33	58,20	61,77	61,77	
				Cakupan guru PAUD yang bersertifikasi	per 100 guru	50,50	52,50	54,50	56,50	60,00	60,00	
				Rasio ruang kelas murid PAUD	murid per kelas	10,50	13,50	15,50	17,50	20,00	20,00	
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			APM SD dan sederajat	persen	86,02	89,50	92,50	95,50	98,20	98,20	
				APM SMP dan sederajat	persen	75,00	80,00	82,00	83,00	88,00	88,00	
				APK SD dan sederajat	persen	98,73	98,80	99,20	99,90	101,50	101,50	
				APK SMP dan sederajat	persen	94,72	95,50	96,50	96,00	97,85	97,85	
				Angka Kelulusan SD dan sederajat	persen	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	
				Angka Kelulusan SMP dan sederajat	persen	86,00	88,00	90,00	92,00	95,00	95,00	
				Angka Melanjutkan Sekolah ke SMP	persen	50,00	98,74	98,82	98,94	99,52	99,52	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Angka Melanjutkan Sekolah ke SMA/SMK	persen	20,00	94,84	95,73	95,96	96,67	96,67	
				Jumlah Sekolah Satu Atap Berasrama yang berkualitas	sekolah	-	-	1,00	-	1,00	1,00	
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			Persentase ketersediaan buku-buku agama di sekolah	persen	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	10,00	
				Cakupan sekolah dasar yang memiliki ruang ibadah	persen	32,00	44,00	56,00	68,00	80,00	80,00	
				Persentase peningkatan kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga keagamaan	persen	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00	20,00	
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			Rata-rata Lama Sekolah Orang Asli Papua	tahun	4,89	4,99	5,35	5,79	6,39	6,39	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			Rasio Guru Bersertifikasi terhadap murid SD/SMP	murid per guru bersertifikasi	10,00	10,00	10,00	15,00	20,00	20,00	
				Proporsi tenaga kependidikan yang terlatih dan terampil	persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	
				Rasio Guru Murid jenjang SD dan sederajat	murid per guru	26,00	26,00	24,00	22,00	20,00	20,00	
				Rasio Guru Murid jenjang SMP dan sederajat	murid per guru	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	20,00	
				Rasio Sekolah Murid jenjang SD dan sederajat	murid per sekolah	247,00	245,00	245,00	245,00	240,00	240,00	
				Cakupan Sekolah yang memberikan DAPODIK secara rutin dan berkesinambungan	persen	85,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Terbatasnya Tenaga Bidang Kesehatan Di unit Pelayanan Puskesmas dan Pustu; 2. Belum memadainya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Pustu ; 3. Meningkatnya kasus penyakit malaria dan gangguan pernapasan; 4. Tingginya Angka Kematian		Cakupan Pelayanan Puskesmas terhadap kesehatan dasar (kesehatan ibu, anak dan KB; gizi; pencegahan dan pengendalian penyakit; kesehatan lingkungan; dan promosi kesehatan)	persen	50,00	55,00	65,00	75,00	80,00	80,00	Kesehatan
11	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Ibu dan Anak; 5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan;		Persentase penduduk miskin yang terlayani JKN	persen	50,00	60,00	65,00	75,00	80,00	80,00	
				Akses penduduk terhadap layanan BPJS	per 100.000 penduduk	200,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00	1.000,00	
12	Program pengadaan, peningkatan	6. Belum optimalnya pengelolaan data-data strategis		Persentase peningkatan sarana dan prasarana di rumah sakit	persen	3,60	4,70	5,80	6,90	8,00	8,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	kesehatan untuk tingkat kampung, Distrik, kabupaten, provinsi dan pusat; 7. Minimnya ketersediaan data dan informasi di sektor kesehatan.		Rasio ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan	persen	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	
13	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			Rasio Puskesmas terhadap total penduduk	Per 30 ribu penduduk	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00	
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana puskesmas	persen	1,50	2,45	3,76	4,50	5,80	5,80	
14	Program Peningkatan Pelayanan			Persentase kenaikan rujukan teknis	persen	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	n Laboratorium			laboratorium puskesmas dan rumah sakit								
				Cakupan pemeriksaan sampel	sampel	3.400,00	5.300,00	7.200,00	9.100,00	10.000,00	10.000,00	
15	Program sumberdaya kesehatan			Rasio dokter terhadap penduduk	per 100.000 penduduk	4,43	5,63	6,83	8,03	9,00	9,00	
				Rasio perawat/bidan terhadap penduduk	per 100.000 penduduk	26,60	42,45	58,30	74,15	90,00	90,00	
16	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			Jumlah puskesmas yang telah memenuhi standar layanan	puskesmas	2,00	4,00	6,00	8,00	11,00	11,00	
17	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			Persentase pemenuhan obat-obatan untuk menghilangkan simtomatik/gejala, meredakan nyeri (antibiotik, analgesik, dll)	persen	75,00	80,00	85,00	95,00	100,00	100,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase pemenuhan obat-obatan untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit (vaksin, serum, dll)	persen	55,00	60,00	65,00	75,00	80,00	80,00	
				Persentase pemenuhan obat-obatan untuk menambah atau mengganti fungsi fungsi zat yang kurang (vitamin, hormon, dll)	persen	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	100,00	
				Proporsi pelayanan farmasi yang berkualitas	persen	60,00	75,00	85,00	95,00	100,00	100,00	
18	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan	persen	25,00	35,00	45,00	55,00	60,00	60,00	
				Cakupan Pos Yandu Lansia	per 100 penduduk lansia	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah Kader Lansia yang terlatih dan terampil	orang	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	
19	Program Upaya Kesehatan Perseorangan			Tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat di Puskesmas	persen	60,00	75,00	85,00	95,00	100,00	100,00	
				Jumlah puskesmas yang berfungsi sebagai UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) yang berkualitas (Poliklinik, UGD, bersalin)	puskesmas	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	7,00	
20	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			Angka Kematian Ibu	per 1.000 kelahiran hidup	5,70	5,23	4,69	3,68	2,63	2,63	
				Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN)	persen	40,00	55,00	65,00	70,00	75,00	75,00	
				Rasio Bidan Terlatih yang memenuhi	per 30.000 penduduk	6,50	8,29	10,07	11,86	13,64	13,64	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				standar terhadap total penduduk	orang							
21	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			Angka Harapan Hidup Orang Asli Papua	tahun	65,57	65,95	66,22	66,59	66,93	66,93	
22	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran bayi	18,00	16,00	14,00	12,00	10,00	10,00	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00	
				Cakupan SDKN Posyandu	persen	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	60,00	
23	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			Angka Kesakitan Penduduk	persen	65,00	64,00	59,00	53,00	45,00	45,00	
				Cakupan balita dan anak sekolah yang memperoleh vaksin dan imunisasi	per 10.000 balita dan anak	350,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	
				Persentase Peningkatan surveillance	persen	3,00	5,00	8,00	10,00	12,00	12,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				epidemiologi dan penanggulangan wabah								
24	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	persen	60,00	75,00	85,00	95,00	100,00	100,00	
				Cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin terhadap balita dan anak	per 10.000 balita dan anak	2.500,00	3.500,00	4.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
				Cakupan Ibu Hamil yang diberikan tambahan makanan dan vitamin	per 10.000 ibu hamil	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	250,00	
25	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			Persentase peningkatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	persen	3,00	6,00	9,00	13,00	15,00	15,00	
				Cakupan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	per 10.000 penduduk	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase kampung/desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)	persen	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	
				Persentase tenaga penyuluh kesehatan yang terdidik dan terlatih	persen	15,00	25,00	35,00	45,00	50,00	50,00	
26	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			Cakupan kampung/desa yang berstatus Rumah Desa Sehat	desa/kampung	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	
				Persentase kampung/desa yang memperoleh penyuluhan lingkungan sehat	persen	20,00	40,00	60,00	75,00	80,00	80,00	
				Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	persen	52,00	59,00	66,00	73,00	80,00	80,00	
27	Program Peningkatan Pengend			Cakupan kampung/desa yang bebas asap rokok	desa/kampung	-	-	1,00	-	1,00	2,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	alihan Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau lainnya			Persentase penduduk yang merokok	persen		45,00	35,00	25,00	15,00	15,00	
28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			Persentase dukun bayi yang memperoleh pelatihan persalinan dan perawatan masa nifas	persen	20,00	30,00	30,00	40,00	50,00	50,00	
29	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia			Persentase tanaman obat-obatan lokal yang dikembangkan dalam upaya kesehatan masyarakat	persen	10,00	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya /Program Pemulihan Kondisi Sungai (Restorasi)	1. Aksesibilitas dan mobilitas penduduk yang sangat rendah 2. Masih banyak Distrik/kampung yang terisolasi, dan belum diterobos oleh jalan dan jembatan; 3. Banyaknya jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat; 4. Jumlah jalan dalam kondisi mantap dan fungsional masih sedikit; 5. Pendirian bangunan dan pelaksanaan konstruksi belum didukung dengan regulasi IMB; 6. Belum tersedianya regulasi yang mengatur		Cakupan normalisasi sungai	persen	88,00	88,00	91,00	91,00	95,00	95,00	Pekerjaan Umum
31	Program Pembangunan Jalan	tentang Daerah Aliran Sungai (DAS);		Cakupan panjang jalan dan jembatan terhadap	Km / 100 penduduk	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan Jembatan	7. Kurangnya prasarana jaringan air bersih layak minum; 8. Belum tersedianya jaringan irigasi yang memadai; 9. Pelaksanaan Tata Ruang belum dilaksanakan optimal; 10. Adanya indikasi konflik batas-batas antar kabupaten dan Distrik; 11. Masih banyaknya jumlah penduduk yang belum memiliki rumah yang layak untuk ditempati;		penduduk (Mobilitas)								
				Cakupan panjang jalan dan jembatan terhadap luas wilayah (Aksesibilitas)	Km/Km ²	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	
				Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang (kondisi mantap)	persen	1,25	1,40	1,60	2,25	3,00	3,00	
				Rasio panjang jalan dan jembatan dalam kawasan sentra produksi	persen	20,00	20,00	25,00	25,00	30,00	30,00	
32	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	12. Pembangunan kawasan permukiman masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan		Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	persen	15,00	25,00	35,00	45,00	50,00	50,00	
				Rasio jaringan irigasi kondisi baik	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	hidup; 13. Minimnya ketersediaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat. 14. Masih rendahnya pemenuhan listrik bagi masyarakat;		Tingkat kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW	persen	40,00	42,14	44,96	48,63	50,36	50,36	
				Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	persen	20,43	27,33	38,74	58,62	66,46	66,46	
34	Program Perencanaan Tata Ruang	15. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi energi lokal terhadap pengembangan dan pemanfaatan energi yang terbarukan;		Persentase penerapan RTRW	persen	30,00	45,00	60,00	75,00	80,00	80,00	Penataan Ruang
				Jumlah RDTR Distrik yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
				Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan RTRW	persen	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00	
35	Program Pengembangan Perumahan			Persentase peningkatan pembangunan tempat-tempat ibadah	persen	2,12	2,84	3,56	4,28	5,00	5,00	Perumahan
				Persentase tempat ibadah yang terpelihara	persen	34,50	44,00	53,50	63,00	75,00	75,00	
36	Program Pengem			Backlog kepemilikan	rumah	4.3	3.2	2.2	1.5	1.0	1.50	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	bangan Perumahan			rumah layak huni		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	
				Tingkat Elektrifikasi penduduk	persen	15,18	18,21	20,60	21,40	21,40	21,40	
				Akses rumahtangga terhadap air bersih	persen	54,50	64,00	73,50	75,00	80,00	80,00	
37	Program Pengembangan Perumahan			Cakupan rumahtangga Orang Asli Papua yang memiliki rumah layak huni	persen	30,00	30,00	35,00	35,00	40,00	40,00	
				Tingkat elektrifikasi pada rumahtangga Orang Asli Papua	persen	11,08	12,57	14,20	16,89	17,20	17,20	
38	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1. Belum memadainya sarana dan prasarana keamanan lingkungan di setiap kampung/Distrik; 2. Kurangnya sarana dan prasarana tenaga		Proporsi lembaga keagamaan yang dibangun dan diberdayakan	persen	80,67	86,34	92,01	97,68	103,35	100,00	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
				Persentase berfungsinya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	persen	85,70	91,40	97,10	98,00	100,00	100,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	keamanan Polri dan TNI, Satpol PP dan Linmas; 3. Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan; 4. Kasus minuman keras (Miras), kekerasan ringan dan berat yang cukup tinggi;		Persentase pemahaman warga dalam mendeteksi dini dan menghadapi bencana alam	persen	40,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
				presentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	persen	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00	45,00	
40	Program pemeliharaan kantranti bmas dan pencegahan tindak kriminal	5. Belum memadainya Regulasi (Perda) tentang Trantib;		Persentase hasil penertiban penyakit masyarakat (Pekat)	persen	56,24	63,83	71,52	75,19	76,95	76,95	
				Rasio Satpol PP terhadap total penduduk	Per 10.000 penduduk	3,37	3,72	4,61	5,08	5,71	5,71	
				Rasio Linmas terhadap total penduduk	Per 10.000 penduduk	9,89	11,24	12,60	13,95	15,30	15,30	
				Angka Kekerasan Dalam Rumahtangga (KDRT)	per 10.000 perempuan	30,00	25,00	20,00	15,00	10,00	10,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase kasus pelanggaran terhadap Perda	persen	20,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
41	Program pengembangan wawasan kebangsaan			Persentase penanganan pelanggaran HAM	persen	70,00	77,50	85,50	100,00	100,00	100,00	
				Persentase peningkatan pelayanan publik peduli HAM	persen	6,00	8,00	10,00	12,00	12,00	12,00	
				Indeks Kebahagiaan	indeks	54,35	56,17	60,29	66,53	70,13	70,13	
				Cakupan dokumen laporan penegakan HAM yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
42	Program pendidikan politik masyarakat			Persentase peserta pilkada/pemilu	persen	90,00	95,00					
				Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kehidupan politik dan	persen	2,50	5,00	6,00	7,50	10,00	10,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				berdemokrasi								
43	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1. Minimnya penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga adat; 2. Tingginya jumlah penduduk miskin, fakir miskin dan keluarga prasejahtera; 3. Terbatasnya pengembangan pembangunan fisik, sarana dan prasarana daya angkut tiga denominasi (kelompok) gereja; 4. Terbatasnya pendidikan keagamaan nonformal di tiga denominasi gereja; 5. Tingginya pengaruh negatif di lingkungan sosial seperti miras, seks bebas, judi dan		Jumlah keluarga miskin dan PMKS yang terampil berusaha secara mandiri	orang	2.700,00	3.900,00	5.100,00	6.300,00	7.500,00	7.500,00	Sosial
				Cakupan KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang diberdayakan	persen	55,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00	
				Proporsi keluarga miskin yang memperoleh sarana dan prasarana pendukung KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) yang memadai	persen	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	
44	Program Pelayanan dan	social seperti miras, seks bebas, judi dan		Persentase pelayanan, sarana dan	persen	45,00	55,00	70,00	85,00	100,00	100,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	lain-lain; 6. Belum teridentifikasinya dengan baik dan lengkap Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan pada masyarakat adat terpencil;		prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi PMKS								
		yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan pada masyarakat adat terpencil;		Persentase penyandang PMKS binaan yang terampil secara mandiri	persen	10,00	15,00	29,00	35,00	40,00	40,00	
45	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7. Minimnya data dan informasi mengenai jumlah fakir miskin, keluarga prasejahtera, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan lain-lain.		Persentase peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan PMKS	persen	4,50	5,70	6,90	7,60	8,00	8,00	
				Proporsi tenaga penyuluh kesejahteraan sosial yang terlatih dan terampil	persen	55,00	65,00	68,00	75,00	80,00	80,00	
				Rasio keluarga dalam KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang mengikuti	persen	22,60	35,20	45,80	56,00	60,00	60,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PKH (Program Keluarga Harapan)								
				Persentase tenaga kerja penyandang disabilitas yang dilindungi	persen	20,00	40,00	60,00	75,00	80,00	80,00	
46	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Tingkat keahlian dan pendidikan tenaga kerja lokal yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar; 2. Produktivitas		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	0,73	0,69	0,64	0,60	0,56	0,56	Tenaga Kerja
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	94,80	95,60	96,40	97,20	98,00	98,00	
				Jumlah BLK yang terakreditasi	BLK	-	1,00	-	1,00	2,00	2,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		tenaga kerja yang masih rendah; 3. Belum banyak terbukanya kesempatan kerja di sektor formal maupun informal di bidang jasa dan industri; 4. Adanya ketimpangan kesempatan kerja antara penduduk lokal dan pendatang; 5. Belum memadainya data dan informasi tentang		Persentase lulusan BLK yang terserap dalam lapangan kerja	persen	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	50,00	
47	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Belum terlaksananya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di berbagai bidang dan sektor; 2. Belum memadainya pelatihan, pembinaan dan pendampingan untuk		Porsi muatan gender dalam perencanaan dan penganggaran	persen	5,50	10,50	20,50	30,50	40,00	40,00	Pemberdayaan Perempuan
				Rata-rata Lama Sekolah perempuan	tahun	4,63	5,22	5,82	6,41	7,00	7,00	
				Angka Melek Huruf perempuan	persen	51,50	60,00	66,00	72,50	80,00	80,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	mewujudkan kemandirian perempuan; 3. Masih banyaknya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap ibu dan anak;		Persentase perempuan di pedesaan yang terampil dalam bidang usaha ekonomi produktif	persen	28,00	36,00	44,00	52,00	60,00	60,00	Pemberdayaan Perempuan
				Persentase kenaikan pendapatan mama-mama papua yang mendapat pendampingan usaha ekonomi	persen	2,50	2,50	3,00	3,50	5,00	5,00	
49	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Belum tersedianya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah; 2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang limbah/sampah; 3. Adanya ancaman perubahan iklim, banjir dan bencana longsor; 4. Belum adanya		Persentase ketersediaan Ruang terbuka hijau (RTH)	persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Lingkungan Hidup
				Kategori Tingkat Pencemaran Udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	kategori	baik	baik	baik	baik	baik	baik	
50	Program Pengembangan Kinerja Pengelola			Cakupan pelayanan persampahan di perkotaan Dogiyai	persen	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	aan Persampahan	<p>pemetaan titik-titik daerah rawan banjir dan longsor;</p> <p>5. Belum optimalnya penyiapan mitigasi bencana bagi daerah-daerah yang memiliki kerawanan bencana;</p> <p>6. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia di bidang mitigasi bencana.</p> <p>7. • Masih maraknya pembakaran hutan dalam pembukaan lahan;</p> <p>8. Belum optimalnya upaya konservasi lahan dan pelestarian sumber daya kehutanan;</p>		Cakupan pemenuhan TPA di perkotaan Dogiyai	persen	18,00	26,00	34,00	42,00	50,00	50,00	
51	Program Penataan	1. Cukup tingginya tingkat urbanisasi ke		Rata-rata waktu pelayanan	jam perminggu	24,00	27,00	30,00	33,00	35,00	35,00	Kependudukan dan

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan		
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Administrasi Kependudukan	pusat kabupaten seiring dengan pembangunan yang lebih berfokus di pusat kabupaten; 2. Belum tertatanya data-data kependudukan secara baik dan benar. 3. Masih belum optimalnya pelayanan dokumen kependudukan, dan minimnya sarana dan prasarana terhadap pelayanan publik; 4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil; 5. Minimnya kualitas dan kuantitas data dan informasi kependudukan		administrasi kependudukan								Catatan Sipil	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan kependudukan	persen	34,00	48,00	62,00	76,00	80,00	80,00		
				Rasio penduduk usia 17 tahun dan keatas yang ber KTP-el	per 1.000 penduduk	460,00	550,00	640,00	730,00	750,00	750,00		
				Rasio bayi yang berakte kelahiran	per 1.000 bayi	380,00	560,00	740,00	920,00	1.000,00	1.000,00		
				Rasio pasangan berakte nikah (catatan sipil)	per 100 pasangan	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	100,00		
				Rasio rumahtangga yang memiliki KK-el (Kartu Keluarga Elektronik)	per 100 KK	59,50	71,50	83,50	95,50	100,00	100,00		

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dan catatan sipil.										
52	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1. Belum optimalnya kapasitas dan kelembagaan pemerintahan kampung; 2. Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur kampung dalam manajemen dan pengelolaan keuangan kampung; 3. Belum memadainya partisipasi berbagai golongan masyarakat dalam pembangunan kampung; 4. Belum		Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	persen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen	persen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan kampung; 5. Rentang kendali pemerintahan kampung yang masih panjang dan sulit ditempuh; 6. Tingkat kemandirian masyarakat		pemerintahan desa								
		kampung belum memadai; 7. Pemberdayaan masyarakat kampung belum dilaksanakan secara optimal.		Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatus desa dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan	persen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
53	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			Cakupan kampung adat	kampung	-	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00	
54	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR	1. Tingginya arus urbanisasi ke pusat ibukota kabupaten; 2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak;		Persentase berfungsinya kelompok peduli KB	persen	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00	keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
				Cakupan kader KB terlatih dan terdidik	kader	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Program Keluarga Berencana yang mandiri	3. Belum optimalnya Kesehatan Reproduksi; 4. Belum adanya data perempuan usia produktif; 5. Belum memadainya Tenaga Penyuluh KB; 6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan keluarga yang sejahtera.		Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak per KK	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	
				Rasio akseptor KB	persen	20,88	44,53	56,35	68,18	80,00	80,00	
				Cakupan peserta KB aktif	persen	24,50	34,00	43,50	53,00	60,00	60,00	
56	Program pelayanan kontrasepsi			Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	persen	45,00	46,50	47,00	48,80	50,00	50,00	
				Cakupan Ketersediaan alat kontrasepsi untuk keluarga miskin	persen	50,00	50,00	65,00	65,00	70,00	70,00	
57	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			Persentase peningkatan pemahaman remaja terhadap reproduksi	persen	1,25	2,23	3,21	4,19	5,25	5,25	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	persen	60,00	60,00	75,00	80,00	80,00	80,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				(PKPR)								
				Cakupan bimbingan konseling terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual	persen	15,00	30,00	50,00	60,00	70,00	70,00	
58	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1. Belum memadainya moda transportasi darat, udara dan laut untuk keluar masuk wilayah kabupaten; 2. Belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan udara; 3. Tingginya biaya transportasi udara dan darat penghubung antar kabupaten;		Persentase kenaikan penumpang datang dan pergi di bandar udara	persen	15,51	16,31	17,63	18,22	20,66	20,66	Perhubungan
				Persentase kenaikan bongkar muat barang di bandar udara	persen	5,00	6,00	6,00	7,00	8,00	8,00	
				Cakupan distrik yang memiliki bandar udara perintis yang memadai	distrik	-	-	1,00	-	1,00	3,00	
59	Program Pembangunan Prasarana dan	4. Belum tersedianya		Rasio kendaraan bermotor terhadap penduduk	per 10.000 penduduk	348,47	381,41	414,36	447,30	480,25	480,25	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitas Perhubungan	terminal transportasi darat yang memadai; 5. Tidak adanya armada angkutan yang bergerak dari titik asal ibukota kabupaten.		Cakupan terminal penumpang yang memadai	per distrik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
60	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Belum memadainya cakupan dan akses pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat; 2. Belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informatika; 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan daerah		Proporsi penduduk yang terakses media komunikasi telepon seluler	per 10.000 penduduk	2.000,00	2.375,00	3.250,00	4.125,00	5.000,00	5.000,00	Komunikasi dan Informatika
				Cakupan kampung yang telah terakses dengan komunikasi HP	kampung	5,00	9,00	13,00	17,00	20,00	20,00	Komunikasi dan Informatika
				Rasio coverage BTS	per 100 pelanggan	0,15	0,17	0,18	0,20	0,20	0,20	Komunikasi dan Informatika
61	Program Pengembangan	1. Terbatasnya sarana dan prasarana		Persentase hasil produk unggulan	persen	5,00	6,00	7,00	8,00	10,00	10,00	Koperasi dan Usaha

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	koperasi dan UMKM; 2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap koperasi; 3. Terbatasnya akses transportasi ekonomi masyarakat; 4. Belum tersedianya Badan Usaha Kampung; 5. Terbatasnya pemahaman sistem		yang terserap di pasar regional (ibu kota provinsi)								Kecil Menengah
				Tingkat daya saing produk-produk unggulan ekonomi kerakyatan	indeks LQ	1,00	1,25	1,50	2,00	2,25	2,25	
				Jumlah komoditi unggulan ekonomi kerakyatan yang dapat dipromosikan di ibu kota provinsi	komoditi	1,50	2,00	4,00	6,00	8,00	8,00	
62	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	manajemen usaha yang baik; 6. Belum tumbuhnya inisiatif berusaha dalam bidang perdagangan dan UMKM pada penduduk lokal; 7. Belum optimalnya upaya pembinaan UMKM; 8. Belum berkembangnya usaha-usaha		Persentase pengusaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri melalui pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	persen	30,00	40,00	50,00	55,00	60,00	60,00	
				Jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah yang dapat	persen	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00	10,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		mikro dan kecil yang memanfaatkan potensi unggulan daerah; 9. Tidak tersedianya data dan informasi mengenai potensi UMKM yang dapat diunggulkan. 10. Belum optimalnya upaya promosi investasi pada		bermitra dengan perusahaan menengah dan besar								
		investor domestik maupun asing; 11. Belum memadainya Infrastruktur daerah sehingga belum menarik minat investasi; 12. Masih rendahnya Daya Saing Daerah; 13. Tidak		Persentase produk unggulan usaha industri mikro, kecil dan menengah yang dapat dipasarkan antarpulau	persen	10,00	15,00	20,00	23,50	25,00	25,00	
63	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	tersedianya data dan informasi yang berkualitas mengenai potensi-potensi investasi		Persentase peningkatan SHU Koperasi	persen	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00	10,00	
				Persentase peningkatan Anggota Koperasi	persen	10,00	15,00	20,00	23,50	25,00	25,00	
				Jumlah Koperasi yang terkategori mandiri	koperasi	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	5,00	
64	Program Pengembangan Sistem Pendukung			Persentase kenaikan nilai produksi usaha ekonomi kerakyatan	persen	10,00	15,00	20,00	23,50	25,00	25,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan)	unggulan daerah.		Persentase peningkatan nilai tambah usaha ekonomi kerakyatan	persen	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	5,00	
				Kontribusi usaha industri berbasis ekonomi kerakyatan terhadap PDRB	persen	0,41	0,62	0,83	1,04	1,25	1,25	
				Proporsi OAP suku Mee yang memiliki usaha industri mikro dan kecil	persen	5,00	15,00	25,00	35,00	45,00	45,00	
				Cakupan pengusaha OAP suku Mee yang dibina	orang	250,00	500,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	
65	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			Persentase peningkatan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah	persen	2,00	2,00	1,00	1,00	5,00	5,00	
				Persentase usaha mikro dan kecil yang berbadan	persen	20,00	35,00	45,00	55,00	60,00	60,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				usaha								
				Persentase pengusaha industri mikro, kecil dan menengah yang diberdayakan	persen	27,00	39,00	51,00	63,00	75,00	75,00	
66	Program Pembinaan dan Pemandangan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan			Rasio jumlah penduduk OAP yang memiliki usaha sendiri skala mikro dan kecil	per 1.000 rumah tangga OAP	50,00	75,00	100,00	150,00	200,00	200,00	
67	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Pembinaan Pemuda masih sangat kurang; 2. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan rendah kualitasnya;		Cakupan organisasi kepemudaan yang dibina	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	Pemuda dan Olah Raga
		3. Belum memadainya prestasi dan budaya olahraga di kalangan masyarakat;		Cakupan pengusaha muda yang mandiri	persen	10,00	12,00	15,00	17,00	20,00	20,00	
68	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			Persentase cabang olahraga prestasi yang terbina	persen	50,00	65,00	75,00	75,00	80,00	80,00	
				Proporsi peserta kompetisi	persen	70,00	75,00	86,00	95,00	100,00	100,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4. Belum tergarapnya potensi dan partisipasi pemuda dalam percepatan pembangunan daerah; 5. Adanya kecenderungan budaya luar yang mempengaruhi moral para pemuda; 6. Belum tersedianya data dan informasi tentang kepemudaan.		olahraga daerah yang berprestasi di tingkat regional/nasional								
				Persentase atlet berprestasi yang diberikan penghargaan	persen	70,00	75,00	86,00	95,00	100,00	100,00	
				Persentase peningkatan kemitraan bina olahraga dengan lembaga/instansi lainnya	persen	2,00	2,98	3,96	4,94	5,25	5,25	
69	Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat; 2. Kurangnya pembinaan kepada generasi muda tentang etika dan berdasarkan		Porsi muatan budaya dan adat Suku Mee dalam kurikulum pendidikan sekolah	persen	-	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00	Kebudayaan
70	Program Pengelolaan Keragaman			Cakupan sanggar seni yang dibina dan diberdayakan	sanggar	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budaya	budaya daerah dalam pembentukan kepribadian dan etika dalam kehidupan sosial; 3. Budaya Mee		Frekwensi juara dalam lomba seni budaya tingkat regional/nasional	kali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
71	Program pengambilan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	yang belum banyak dipromosikan; 4. Belum dioptimalkannya peranan kepala suku dan dewan adat sebagai mitra pemerintah dalam		Persentase penerapan bentuk kemitraan usaha profesi seni dan budaya antar daerah dengan pihak swasta / LSM	persen	10,00	15,00	20,00	30,00	50,00	60,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		pembangunan sebagai akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; 5. Kurangnya pengakuan terhadap peran lembaga adat dan hak ulayat. 6. Belum optimalnya Pengembangan destinasi dan objek pariwisata; 7. Tidak memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata; 8. Belum adanya pemetaan potensi-potensi budaya dan pariwisata yang dapat menjadi unggulan daerah; 9. Ketersediaan data dan informasi tentang pariwisata masih		Cakupan potensi daerah wisata seni budaya yang dipromosikan	daerah wisata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		belum valid dan lengkap.										
72	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	1. Masih rendahnya pola budi daya dalam usaha tani; 2. Belum berkembangnya pemanfaatan teknologi tepat		Tingkat produktifitas tanaman pangan	ton per hektar	20,00	40,00	50,00	55,00	60,00	60,00	Pertanian
				Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	ton per hektar	15,00	20,00	25,00	30,00	40,00	40,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		guna dalam bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;		Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi	persen	3,50	3,80	4,00	4,50	5,00	5,00	
73	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3. Skala Usaha pertanian masyarakat yang masih subsistem;		Persentase peningkatan produksi peternakan	persen	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	
		4. Kurang memadainya sarana dan prasarana produksi		Kontribusi sektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi	persen	0,80	1,00	1,20	1,40	1,50	1,50	
74	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	petanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;		Nilai Tukar Petani	indeks	97,53	100,71	103,89	107,07	110,25	110,25	
		5. Belum memadainya tenaga penyuluh pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.		Persentase petani/peternak/nelayan yang menguasai dan terampil melaksanakan usaha agribisnis	persen	20,00	20,50	30,00	30,50	40,00	40,00	
		6. Belum optimalnya Pemanfaatan lahan untuk budidaya;		Cakupan Kelompok petani yang diberdayakan dan dibina	persen	65,00	68,00	74,50	80,00	80,00	80,00	
75	Program Pengane karagam	7. Rendahnya tingkat		Jumlah komoditi lokal yang	komoditi	1,00	1,00	2,00	3,00	5,00	5,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	an Pangan Spesifik Pangan Lokal	kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan;		memenuhi standar menjadi alternatif pangan bermutu								
				Rasio konsumsi penduduk terhadap komoditi pangan alternatif	persen	28,00	35,00	42,00	49,00	56,00	56,00	
				Persentase kenaikan produksi pangan lokal alternatif	persen	1,00	1,85	2,60	3,79	5,00	5,00	
76	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang terdidik dan terlatih	persen	25,00	35,00	45,00	55,00	60,00	60,00	
				Cakupan pembinaan dan pendampingan pada kelompok petani tanaman pangan	kelompok petani	65,00	75,00	85,00	95,00	100,00	100,00	
				Rasio tenaga penyuluh	per 1.000	3,4	6,3	9,2	12,	15,	15,0	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				pertanian yang terlatih terhadap total petani	petani	0	0	0	10	00	0	
77	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			Indeks Ketahanan Pangan Agregat Rumah tangga	indeks	50,00	56,00	63,00	69,00	75,00	75,00	
				Angka Kecukupan Gizi (AKG)	persen	48,98	49,50	50,33	50,92	52,02	52,02	
				Angka Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	65,00	69,00	74,00	79,00	85,00	85,00	
				Ketersediaan pangan per kapita	kg per kapita	69,50	89,00	108,50	128,00	150,00	150,00	
78	Program pengembangan budidaya perikanan	1. Kurangnya sumber benih unggul; 2. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam budi daya ikan masih sangat rendah; 3. Tenaga penyuluh budi daya ikan yang masih belum memadai;		Persentase peningkatan produksi budidaya perikanan	persen	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00	Perikanan
		4. Masih		Kontribusi subsektor budidaya perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	persen	0,25	0,50	0,85	1,00	1,00	1,00	
79	Program pengembangan perikanan			Persentase peningkatan produksi perikanan	persen	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	n tangkap	tingginya budaya subsisten dan meramu di sektor perikanan; 5. Ketersediaan data dan informasi tentang pembudidayaan ikan belum memadai.		tangkap								
				Kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap pertumbuhan ekonomi	persen	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00	
				Persentase peningkatan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil	persen	2,50	3,00	3,50	4,50	5,00	5,00	
80	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1. Belum terlaksananya pengembangan pusat-pusat industri mikro dan kecil berbasis kerakyatan; 2. Belum tertatanya pedagang kecil; 3. Belum adanya upaya Revitalisasi pasar tradisional; 4. Tidak optimalnya promosi produk-		Persentase peningkatan pembinaan kemampuan Teknologi Tepat Guna (TTG) di industri mikro dan kecil	persen	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	Perindustrian
				Cakupan pengusaha industri mikro, kecil dan menengah yang menerapkan TTG	persen	10,00	10,50	20,00	30,00	40,00	40,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		produk unggulan lokal; 5. Tidak adanya subsidi pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil lokal.		Persentase penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) pada produk-produk hasil industri mikro, kecil dan menengah	persen	20,00	22,00	26,00	28,50	30,00	30,00	
81	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			Margin perdagangan bahan-bahan pokok	rasio	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	150,00	Perdagangan
				Tingkat inflasi	persen	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	4,00	
				Indeks Kemahalan Kontruksi	indeks		195,47	187,05	178,99	171,27	171,27	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1. Belum optimalnya penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kebutuhan; 2. Tupoksi seluruh ODP belum terukur; 3. Belum optimalnya jangkauan dan kualitas pelayanan publik;		Persentase penetapan Perda yang tepat waktu	persen	88,00	91,00	94,00	97,00	100,00	100,00	Pemerintahan Umum
83	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	4. Belum optimalnya pembinaan pemerintahan Distrik dan kampung; 5. Belum terlaksananya pembudayaan zona integritas; 6. Upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan masih belum memadai;		Cakupan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	persen	15,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	
		7. Belum optimalnya		Persentase implementasi Sistem Pajak On-Line	persen	50,00	75,00	85,00	95,00	100,00	100,00	
84	Program peningkatan pelayanan kedinasaan kepala			Cakupan fasilitasi pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah	persen	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	100,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	daerah/wakil kepala daerah	pelaksanaan fungsi legislasi yang mendorong terciptanya tatanan		Cakupan tuntasnya kasus pengaduan masyarakat	persen	43,00	61,00	79,00	97,00	100,00	100,00	
85	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	pemerintahan yang baik. 8. Rendahnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah; 9. Belum optimalnya penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan		Persentase Laporan Keuangan berbasis akrual	persen	37,00	45,00	53,00	61,00	65,00	65,00	
				Persentase APBD Tepat Waktu	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Persentase pertumbuhan PAD	persen	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00	
				Cakupan aset daerah yang telah teridentifikasi dan dinilai kembali	persen	53,00	66,00	79,00	92,00	100,00	100,00	
86	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	keuangan daerah; 10. Rendahnya kemandirian keuangan daerah; 11. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah; 12. Rendahnya daya serap belanja untuk semua program;		Presentase temuan APIP yang ditindak lanjuti	persen	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	100,00	
				Tingkat implementasi SPIP	persen	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	
				Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	predikat	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		13. Belum terbangunnya unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah;		(EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)									
				Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	predikat	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi		
				Cakupan aset daerah yang telah teridentifikasi dan dinilai kembali	persen	53,00	66,00	79,00	92,00	100,00	100,00		
87	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriks			Peningkatan Level Internal Audit Capability Model (IA-CM) pada APIP (Aparat	tingkat	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00		

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	a dan aparaturnya			Pengawas Intern Pemerintah)								
				Persentase aparaturnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemeriksaan	persen	33,00	46,00	59,00	72,00	80,00	80,00	
88	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			Persentase implementasi pengelolaan belanja dan aset daerah berbasis IT	persen	45,00	55,00	65,00	75,00	80,00	80,00	
89	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Persentase penataan tapal batas distrik	persen	20,00	30,00	50,00	70,00	80,00	80,00	
				Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
				Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	25,00	50,00	65,00	80,00	100,00	100,00	
90	Program Penataan Daerah			Persentase penataan tapal batas	persen	20,00	30,00	50,00	70,00	80,00	80,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Otonomi Baru			distrik								
				Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
				Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	25,00	50,00	65,00	80,00	100,00	100,00	
91	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Persentase penataan tapal batas distrik	persen	20,00	30,00	50,00	70,00	80,00	80,00	
				Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
				Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	25,00	50,00	65,00	80,00	100,00	100,00	
92	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Persentase penataan tapal batas distrik	persen	20,00	30,00	50,00	70,00	80,00	80,00	
				Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	25,00	50,00	65,00	80,00	100,00	100,00	
93	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Persentase penataan tapal batas distrik	persen	20,00	30,00	50,00	70,00	80,00	80,00	
				Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
				Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	25,00	50,00	65,00	80,00	100,00	100,00	
94	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Persentase penataan tapal batas distrik	persen	20,00	30,00	50,00	70,00	80,00	80,00	
				Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
				Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	25,00	50,00	65,00	80,00	100,00	100,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
95	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Persentase penataan tapal batas distrik	persen	20,00	30,00	50,00	70,00	80,00	80,00		
				Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00		
				Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	25,00	50,00	65,00	80,00	100,00	100,00		
96	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Persentase penataan tapal batas distrik	persen	20,00	30,00	50,00	70,00	80,00	80,00		
				Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00		
				Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	25,00	50,00	65,00	80,00	100,00	100,00		
97	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Persentase penataan tapal batas distrik	persen	20,00	30,00	50,00	70,00	80,00	80,00			
			Jumlah dokumen	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00			

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				distrik dalam angka yang berkualitas		0	0	0	0	0		
				Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	25,00	50,00	65,00	80,00	100,00	100,00	
98	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Persentase penataan tapal batas distrik	persen	20,00	30,00	50,00	70,00	80,00	80,00	
				Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
				Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	25,00	50,00	65,00	80,00	100,00	100,00	
99	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah (kabupaten/distrik/kampung)	persen	45,00	55,00	65,00	75,00	80,00	80,00	
				Persentase penerapan SOTK baru	persen	65,00	75,00	85,00	95,00	100,00	100,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase penerapan RTL (Rencana Tindak Lanjut) hasil koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar daerah	persen	50,00	65,00	75,00	85,00	100,00	100,00	
100	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			Persentase peningkatan sistem informasi penanaman modal	persen	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00	6,00	
				Rata-rata waktu pelayanan perijinan penanaman modal (investasi)	hari	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
101	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			Persentase Naskah Akademik yang berkualitas	persen	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00	100,00	
				Cakupan tenaga fungsional legal drafting yang berkualitas	orang	2,00	3,00	3,00	4,00	5,00	17,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Cakupan produk-produk hukum daerah yang diterima oleh kementerian dalam negeri	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
102	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Belum optimalnya penataan dan prosedur dalam kenaikan pangkat, pengurusan jaminan asuransi, dan administrasi kepegawaian; 2. Minimnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten, Distrik maupun kampung;		Cakupan ASN yang mengikuti tugas belajar pendidikan tinggi yang lulus tepat waktu	per 100 ASN	27,00	44,00	61,00	78,00	80,00	80,00	Kepegawaian
				Persentase penerapan penilaian kinerja PNS berbasis UU ASN	persen	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	100,00	
				Tingkat pemahaman PNS dalam penilaian kinerja berbasis ASN	persen	44,00	58,00	72,00	86,00	100,00	100,00	
103	Program Pendidikan Kedinasaan	3. Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Kepegawaian belum terlaksana secara harmonis dan sinkron;		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan kedinasaan (struktural dan fungsional)	persen	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00	60,00	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan 5. Masih rendahnya profesionalisme birokrasi 6. Belum berkembangnya sistem reward dan punishment dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 7. Masih rendahnya budaya kerja birokrasi.		Persentase CPNSD yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Struktural	persen	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	100,00	
104	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1. Belum dilaksanakannya perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning); 2. Belum adanya Tenaga Fungsional Perencanaan; 3. Belum		Persentase penerapan e-planning dan e-musrenbang Persentase tenaga fungsional perencanaan pembangunan	persen persen	55,00 5,00	65,00 10,00	75,00 15,00	85,00 20,00	100,00 25,00	100,00 25,00	Perencanaan Pembangunan

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah dan lintas sektor; 4. Masih lemahnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal antar OPD, maupun pada tataran horizontal dengan pemerintah pusat, provinsi, Distrik dan kampung; 5. Belum tertatanya seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik antar sektoral maupun perwilayahan pembangunan;		Persentase dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA-PD) yang berkualitas	persen	42,50	60,00	77,50	95,00	100,00	100,00	
				Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berkualitas (RKPD, RENJA-PD, RKA-PD, KUA-PPAS, DPA, RAPBD)	persen	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	100,00	
				Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	persen	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	100,00	
				Tersusunnya Dokumen URD Otsus yang tepat waktu	predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
				Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6. Belum terciptanya keserasian perencanaan pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan kampung; 7. Kurangnya data dan informasi dalam mendukung dokumen perencanaan.		pembangunan ekonomi yang berkualitas								
			Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00		
			Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00		
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00		
			Persentase usulan hasil musrenbang yang dimuat dalam perencanaan tahunan	persen	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00		
10	Program Pengem			Persentase peningkatan	persen	10,	10,	10,	10,	10,	10,0	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja					Urusan	
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022		Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	bangan data/informasi			kualitas SIPD		00	00	00	00	00	0	
				Persentase realisasi PD yang melengkapi indikator sesuai hasil pemetaan SIPD	persen	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00	
				Cakupan indikator SIPD yang memenuhi kriteria dan berkualitas	persen	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00	
				Persentase penerapan data dan informasi pembangunan berbasis IT	persen	30,00	40,00	50,00	60,00	65,00	65,00	
106	Program Afirmasi Lembaga Masyarakat Adat			Persentase peran masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan	persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	80,00	
107	Program perencanaan pembangunan daerah			Cakupan dokumen Rencana Definitif Otsus yang berkualitas	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
				Cakupan pendataan	persen	20,	40,	60,	80,	100	100,	

No	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (Outcome)		Target Kinerja						Urusan
				Deskripsi	Satuan Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir Tahun RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Orang Asli Papua		00	00	00	00	,00	00	

Tabel 6.7.
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Program							
				2018		2019		2020			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Rutin (Urusan Wajib dan Pilihan)											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	persen			32.049.563.000		32.430.100.000				33.16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen			4.314.320.000		4.365.500.000				4.46
Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen			3.281.214.000		3.320.100.000				3.39
Program fasilitas pindah/purna tugas											

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PNS									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen			88.733.374.015		89.786.800.000		91.82
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen			2.394.362.900		2.422.800.000		2.47
Misi 1									
Tujuan 1									
Sasaran 1.1.									
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase penetapan Perda yang tepat waktu	persen	85	88	23.969.530.000	91	24.254.000.000	94	24.80
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	persen	-	15	1.600.000.000	25	1.619.000.000	50	1.65
	Persentase implementasi Sistem Pajak On-Line	persen	-	50	11.604.822	75	11.700.000	85	1
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Proporsi penduduk yang terakses media komunikasi telepon seluler	per 10.000 penduduk	1.500	2.000	2.800.000.000	2.375	2.833.300.000	3.250	2.89
	Cakupan kampung yang telah terakses dengan komunikasi HP	kampung	2	5		9		13	
	Rasio coverage BTS	per 100 pelanggan	0,13	0,15		0,17		0,18	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Cakupan fasilitasi pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah	persen	90	92	8.418.800.000	94	8.518.800.000	96	8.718.800.000
	Cakupan tuntasnya kasus pengaduan masyarakat	persen	25	43		61		79	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan ASN yang mengikuti tugas belajar pendidikan tinggi yang lulus tepat waktu	per 100 ASN	10	27	4.900.000.000	44	4.958.100.000	61	5.078.100.000
	Persentase penerapan penilaian kinerja PNS berbasis UU ASN	persen	80	84		88		92	
	Tingkat pemahaman PNS dalam penilaian kinerja berbasis ASN	persen	30	44		58		72	
Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan (struktural dan fungsional)	persen	45	48	1.288.750.000	51	1.304.100.000	54	1.334.100.000
	Persentase CPNSD yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Struktural	persen	80	84		88		92	
Sasaran 1.2.									
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata waktu pelayanan administrasi kependudukan	jam perminggu	21	24	2.959.894.300	27	2.995.000.000	30	3.060.000.000
	Persentase ketepatan waktu pelayanan kependudukan	persen	20	34		48		62	
	Rasio penduduk usia 17 tahun dan keatas yang ber KTP-el	per 1.000 penduduk	370	460		550		640	
	Rasio bayi yang berakte kelahiran	per 1.000 bayi	200	380		560		740	
	Rasio pasangan berakte nikah	per 100 pasangan	80	84		88		92	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	(catatan sipil)								
	Rasio rumahtangga yang memiliki KK-el (Kartu Keluarga Elektronik)	per 100 KK	47,50	59,50		71,50		83,50	
Tujuan 2									
Sasaran 2.1.									
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Laporan Keuangan berbasis akrual	persen	30	37	10.114.705.900	45	10.234.800.000	53	10.46
	Persentase APBD Tepat Waktu	persen	100	100		100		100	
	Persentase pertumbuhan PAD	persen	5	6		7		8	
	Cakupan aset daerah yang telah teridentifikasi dan dinilai kembali	persen	40	53		66		79	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase temuan APIP yang ditindak lanjuti	persen	80	84	2.934.455.500	88	2.969.300.000	92	3.03
	Tingkat implementasi SPIP	persen	75	80		85		90	
	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	predikat	Rendah	Rendah		Rendah		Tinggi	
	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	predikat	Rendah	Rendah		Rendah		Tinggi	
	Cakupan aset daerah yang telah teridentifikasi dan	persen	40	53		66		79	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	dinilai kembali								
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Peningkatan Level Internal Audit Capability Model (IA- CM) pada APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)	tingkat	1	1	1.463.700.000	1	1.481.000.000	1	1.51
	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemeriksaan	persen	20	33		46		59	
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase implementasi pengelolaan belanja dan aset daerah berbasis IT	persen	40	45	4.701.770.000	55	4.757.600.000	65	4.86
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase penerapan e-planning dan e-musrenbang	persen	-	55	8.205.968.080	65	8.303.400.000	75	8.49
	Persentase tenaga fungsional perencanaan pembangunan	persen	-	5		10		15	
	Persentase dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA-PD) yang berkualitas	persen	25	42,50		60		77,50	
	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berkualitas (RKPD, RENJA-PD, RKA-PD, KUA-PPAS, DPA, RAPBD)	persen	80	84		88		92	
	Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	persen	80	84		88		92	
	Tersusunnya Dokumen URD Otsus yang tepat waktu	predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
	Jumlah dokumen	dokumen	2	1		1		1	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	perencanaan pembangunan ekonomi yang berkualitas								
	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang berkualitas	dokumen	1	1		1		1	
	Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
	Persentase usulan hasil musrenbang yang dimuat dalam perencanaan tahunan	persen	75	80		85		90	
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase penerapan RTRW	persen	10	30	2.000.000.000	45	2.023.700.000	60	2.060.000.000
	Jumlah RDTR Distrik yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan RTRW	persen	-	20		30		35	
Program Pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan kualitas SIPD	persen	-	10	1.214.940.000	10	1.229.400.000	10	1.250.000.000
	Persentase realisasi PD yang melengkapi indikator sesuai hasil pemetaan SIPD	persen	-	50		60		70	
	Cakupan indikator SIPD yang memenuhi kriteria dan berkualitas	persen	-	50		60		70	
	Persentase penerapan data dan informasi pembangunan	persen	-	30		40		50	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	berbasis IT								
Tujuan 3									
Sasaran 3.1.									
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	persen	-	5	2.757.470.000	5	2.790.200.000	5	2.850.000.000
	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	persen	-	5		5		5	
	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatus desa dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan	persen	-	5		5		5	
Sasaran 3.2.									
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	-	20	200.000.000	30	202.400.000	50	200.000.000
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	-	25		50		65	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	-	20	200.000.000	30	202.400.000	50	200.000.000
	Jumlah dokumen distrik dalam angka	dokumen	-	1		1		1	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	yang berkualitas								
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	-	25		50		65	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	-	20	200.000.000	30	202.400.000	50	20
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	-	25		50		65	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	-	20	200.000.000	30	202.400.000	50	20
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	-	25		50		65	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	-	20	200.000.000	30	202.400.000	50	20
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	-	25		50		65	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	-	20	200.000.000	30	202.400.000	50	20
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	-	25		50		65	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	-	20	200.000.000	30	202.400.000	50	20

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	-	25		50		65	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	-	20	200.000.000	30	202.400.000	50	20
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	-	25		50		65	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	-	20	200.000.000	30	202.400.000	50	20
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	-	25		50		65	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	-	20	200.000.000	30	202.400.000	50	20
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	-	25		50		65	
Sasaran 3.3.									
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah (kabupaten/ distrik/kampung)	persen	25	45	2.575.000.000	55	2.605.600.000	65	2.66
	Persentase penerapan SOTK baru	persen	60	65		75		85	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penerapan RTL (Rencana Tindak Lanjut) hasil koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar daerah	persen	-	50		65		75	
Misi 2									
Tujuan 1									
Sasaran 1.1.									
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Puskesmas terhadap kesehatan dasar (kesehatan ibu, anak dan KB; gizi; pencegahan dan pengendalian penyakit; kesehatan lingkungan; dan promosi kesehatan)	persen	25	50	28.066.234.100	55	28.399.400.000	65	29.04
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin yang terlayani JKN	persen	20	50	1.140.000.000	60	1.153.600.000	65	1.17
	Akses penduduk terhadap layanan BPJS	per 100.000 penduduk	-	200		400		600	
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase peningkatan sarana dan prasarana di rumah sakit	persen	2,50	3,60	4.879.536.300	4,70	4.937.400.000	5,80	5.04
	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan	persen	45	50		60		65	
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas terhadap total penduduk	Per 30 ribu penduduk	3	4	56.030.391.000	5	57.340.000.000	6	58.68
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana puskesmas	persen	-	1,50		2,45		3,76	
Program Peninngkatan Pelayanan	Persentase kenaikan rujukan teknis	persen	-	5	175.000.000	10	177.000.000	15	18

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Laboratorium	laboratorium puskesmas dan rumah sakit								
	Cakupan pemeriksaan sampel	sampel	1.500	3.400		5.300		7.200	
Program sumberdaya kesehatan	Rasio dokter terhadap penduduk	per 100.000 penduduk	3,23	4,43	151.500.000	5,63	153.300.000	6,83	15
	Rasio perawat/bidan terhadap penduduk	per 100.000 penduduk	10,75	26,60		42,45		58,30	
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemenuhan obat- obatan untuk menghilangkan simtomatik/gejala, meredakan nyeri (antibiotik, analgesik, dll)	persen	60	75	6.829.766.120	80	6.910.800.000	85	7.06
	Persentase pemenuhan obat- obatan untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit (vaksin, serum, dll)	persen	40	55		60		65	
	Persentase pemenuhan obat- obatan untuk menambah atau mengganti fungsi fungsi zat yang kurang (vitamin, hormon, dll)	persen	80	84		88		92	
	Proporsi pelayanan farmasi yang berkualitas	persen	40	60		75		85	
	Jumlah puskesmas yang telah memenuhi standar layanan	puskesmas	2	2	500.000.000	4	506.000.000	6	51
Tujuan 2									
Sasaran 2.1.									
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan	persen	10	25	477.400.000	35	483.100.000	45	49
	Cakupan Pos Yandu	per 100 penduduk lansia	-	1		2		3	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Lansia								
	Jumlah Kader Lansia yang terlatih dan terampil	orang	-	20		25		30	
Program Upaya Kesehatan Perseorangan	Tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat di Puskesmas	persen	30	60	635.000.000	75	642.600.000	85	65
	Jumlah puskesmas yang berfungsi sebagai UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) yang berkualitas (Poliklinik, UGD, bersalin)	puskesmas	-	1		1		1	
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu	per 1.000 kelahiran hidup	5,70	5,70	2.676.460.000	5,23	2.708.200.000	4,69	2,76
	Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN)	persen	20	40		55		65	
	Rasio Bidan Terlatih yang memenuhi standar terhadap total penduduk	per 30.000 penduduk	4,72	6,50		8,29		10,07	
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran bayi	20	18	936.000.000	16	947.100.000	14	96
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	persen	15	40		45		50	
	Cakupan SDKN Posyandu	persen	40	44		48		52	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan Penduduk	persen	67,52	65	1.394.000.000	64	1.410.600.000	59	1.44
	Cakupan balita dan anak sekolah yang memperoleh vaksin dan imunisasi	per 10.000 balita dan anak	250	350		500		750	
	Persentase Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	persen	-	3		5		8	
Program Perbaikan	Persentase balita gizi buruk mendapat	persen	-	60	907.470.000	75	918.200.000	85	93

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Gizi Masyarakat	perawatan								
	Cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin terhadap balita dan anak	per 10.000 balita dan anak	-	2.500		3.500		4.500	
	Cakupan Ibu Hamil yang diberikan tambahan makanan dan vitamin	per 10.000 ibu hamil	-	50		100		150	
Tujuan 3									
Sasaran 3.1.									
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	persen	-	3	1.311.250.000	6	1.326.800.000	9	1.350.000.000
	Cakupan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	per 10.000 penduduk	-	1.000		2.000		3.000	
	Persentase kampung/desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)	persen	-	5		10		15	
	Persentase tenaga penyuluh kesehatan yang terdidik dan terlatih	persen	5	15		25		35	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan kampung/desa yang berstatus Rumah Desa Sehat	desa/kampung	-	1	175.000.000	2	177.000.000	3	180.000.000
	Persentase kampung/desa yang memperoleh penyuluhan lingkungan sehat	persen	-	20		40		60	
	Persentase rumahtangga yang dapat mengakses air bersih	persen	45	52		59		66	
Program Peningkatan Pengendalian	Cakupan kampung/desa yang	desa/kampung	-	-	803.550.000	-	813.100.000	1	830.000.000

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau lainnya	bebas asap rokok								
	Persentase penduduk yang merokok	persen	45			45		35	
Misi 3									
Tujuan 1									
Sasaran 1.1.									
Program Pendidikan Non Formal	Jumlah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang memenuhi standar	PKBM	1	1	6.089.220.000	1	6.161.500.000	1	6.300.000.000
	Persentase peserta PKBM yang lulus Kejar (Kelompok Belajar) paket (A, B dan C)	persen	90	90		92		95	
	Persentase penerapan Keaksaraan Fungsional Dasar Dewasa	persen	80	80		85		90	
	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (Perpustakaan) yang berkualitas	taman bacaan	-	1		1		1	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	persen	15	50	733.210.000	55	741.900.000	60	750.000.000
	Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi B	sekolah	-	-		1		1	
	Persentase peran Komite Sekolah dalam penerapan MBS	persen	-	50		55		60	
	Persentase kenaikan budaya dan budaya mutu dalam penerapan MBS	persen	2,50	2,50		2,50		3	
Program Pendidikan Menengah	Proporsi siswa yang lulus pendidikan kejuruan	persen	85	90	261.240.000	95	264.400.000	98	270.000.000

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Daya serap lapangan kerja untuk lulusan pendidikan kejuruan	persen	50	60		75		85	
Program Pendidikan Tinggi	Persentase peserta beasiswa pendidikan tinggi yang lulus tepat waktu	persen	50	55	6.600.000.000	60	6.678.300.000	65	6.820.000.000
	Persentase lulusan pendidikan tinggi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	60	60		65		70	
Sasaran 2.1.									
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	persen	50	50	3.759.535.100	86,25	3.804.300.000	87,75	3.890.000.000
	APM Pendidikan Anak Usia Dini	persen	-	50		51,36		54,33	
	Cakupan guru PAUD yang bersertifikasi	per 100 guru	-	50,50		52,50		54,50	
	Rasio ruang kelas murid PAUD	murid per kelas	-	10,50		13,50		15,50	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD dan sederajat	persen	86,02	86,02	27.572.524.200	89,50	27.899.800.000	92,50	28.530.000.000
	APM SMP dan sederajat	persen	61,89	75		80		82	
	APK SD dan sederajat	persen	98,73	98,73		98,80		99,20	
	APK SMP dan sederajat	persen	94,72	94,72		95,50		96,50	
	Angka Kelulusan SD dan sederajat	persen	95	95		96		97	
	Angka Kelulusan SMP dan sederajat	persen	86	86		88		90	
	Angka Melanjutkan Sekolah ke SMP	persen	49,58	50		98,74		98,82	
	Angka Melanjutkan Sekolah ke SMA/SMK	persen	20	20		94,84		95,73	
	Jumlah Sekolah Satu Atap Berasrama yang berkualitas	sekolah	-	-		-		1	
Tujuan 2									

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Sasaran 2.1.									
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Bersertifikasi terhadap murid SD/SMP	murid per guru bersertifikasi	-	10	505.200.000	10	511.200.000	10	52
	Proporsi tenaga kependidikan yang terlatih dan terampil	persen	20	55		60		65	
	Rasio Guru Murid jenjang SD dan sederajat	murid per guru	28	26		26		24	
	Rasio Guru Murid jenjang SMP dan sederajat	murid per guru	12	12		14		16	
	Rasio Sekolah Murid jenjang SD dan sederajat	murid per sekolah	247	247		245		245	
	Cakupan Sekolah yang memberikan DAPODIK secara rutin dan berkesinambungan	persen	-	85		85		90	
Misi 4									
Tujuan 1									
Sasaran 1.1.									
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Tingkat produktifitas tanaman pangan	ton per hektar	12	20	1.152.000.000	40	1.165.700.000	50	1.19
	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	ton per hektar	10	15		20		25	
	Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi	persen	3	3,50		3,80		4	
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	persen	2	3	2.747.969.700	4	2.780.600.000	5	2.84
	Kontribusi sektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi	persen	0,40	0,80		1		1,20	
Program pengembangan	Persentase peningkatan produksi	persen	3	4	2.474.773.050	5	2.504.100.000	6	2.56

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
budidaya perikanan	budidaya perikanan								
	Kontribusi subsektor budidaya perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	persen	0,25	0,25		0,50		0,85	
Program pengembangan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	persen	2	3	500.000.000	4	506.000.000	5	51
	Kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap pertumbuhan ekonomi	persen	1	1		1,50		2	
	Persentase peningkatan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil	persen	2	2,50		3		3,50	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase hasil produk unggulan yang terserap di pasar regional (ibu kota provinsi)	persen	-	5	1.000.000.000	6	1.011.900.000	7	1.03
	Tingkat daya saing produk-produk unggulan ekonomi kerakyatan	indeks LQ	-	1		1,25		1,50	
	Jumlah komoditi unggulan ekonomi kerakyatan yang dapat dipromosikan di ibu kota provinsi	komoditi	-	1,50		2		4	
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase peningkatan sistem informasi penanaman modal	persen	2,50	3	506.690.000	3,50	512.700.000	4	52
	Rata-rata waktu pelayanan perijinan penanaman modal (investasi)	hari	5	4		2		1	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase peningkatan pembinaan kemampuan	persen	-	1	1.000.000.000	2	1.011.900.000	3	1.03

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Teknologi Tepat Guna (TTG) di industri mikro dan kecil								
	Cakupan pengusaha industri mikro, kecil dan menengah yang menerapkan TTG	persen	10	10		10,50		20	
	Persentase penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) pada produk-produk hasil industri mikro, kecil dan menengah	persen	-	20		22		26	
Sasaran 1.2.									
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	indeks	94,35	97,53	11.147.077.500	100,71	11.279.400.000	103,89	11.53
	Persentase petani/peternak /nelayan yang menguasai dan terampil melaksanakan usaha agribisnis	persen	-	20		20,50		30	
	Cakupan Kelompok petani yang diberdayakan dan dibina	persen	50	65		68		74,50	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah keluarga miskin dan PMKS yang terampil berusaha secara mandiri	orang	1.500	2.700	382.000.000	3.900	386.600.000	5.100	39
	Cakupan KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang diberdayakan	persen	20	55		60		70	
	Proporsi keluarga miskin yang memperoleh sarana dan prasarana pendukung KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) yang memadai	persen	10	20		25		30	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pengusaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri melalui pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	persen	-	30	230.000.000	40	232.700.000	50	23
	Jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah yang dapat bermitra dengan perusahaan menengah dan besar	persen	-	2		2		3	
	Persentase produk unggulan usaha industri mikro, kecil dan menengah yang dapat dipasarkan antarpulau	persen	-	10		15		20	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan SHU Koperasi	persen	-	2	1.050.000.000	2	1.062.500.000	3	1.08
	Persentase peningkatan Anggota Koperasi	persen	-	10		15		20	
	Jumlah Koperasi yang terkategori mandiri	koperasi	-	1		1		1	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan)	Persentase kenaikan nilai produksi usaha ekonomi kerakyatan	persen	-	10	11.023.000.000	15	11.153.900.000	20	11.40
	Persentase peningkatan nilai tambah usaha ekonomi kerakyatan	persen	-	1		1		1	
	Kontribusi usaha industri berbasis ekonomi kerakyatan terhadap PDRB	persen	0,20	0,41		0,62		0,83	
	Proporsi OAP suku Mee yang memiliki usaha industri mikro dan kecil	persen	-	5		15		25	
	Cakupan pengusaha OAP suku Mee yang	orang	-	250		500		1.000	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	dibina								
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase peningkatan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah	persen	-	2	3.000.000.000	2	3.035.600.000	1	3.100.000.000
	Persentase usaha mikro dan kecil yang berbadan usaha	persen	-	20		35		45	
	Persentase pengusaha industri mikro, kecil dan menengah yang diberdayakan	persen	15	27		39		51	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	0,77	0,73	1.100.793.080	0,69	1.113.900.000	0,64	1.130.000.000
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	94	94,80		95,60		96,40	
	Jumlah BLK yang terakreditasi	BLK	-	-		1		-	
	Persentase lulusan BLK yang terserap dalam lapangan kerja	persen	-	25		30		35	
Tujuan 2									
Sasaran 2.1.									
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Margin perdagangan bahan-bahan pokok	rasio	300	270	1.001.750.000	240	1.013.600.000	210	1.030.000.000
	Tingkat inflasi	persen	6,50	6		5,50		5	
	Indeks Kemahalan Kontruksi	indeks	204,28			195,47		187,05	
Sasaran 2.2.									
Program Penganekaragaman Pangan Spesifik Pangan Lokal	Jumlah komoditi lokal yang memenuhi standar menjadi alternatif pangan bermutu	komoditi	1	1	1.020.613.500	1	1.032.700.000	2	1.050.000.000
	Rasio konsumsi penduduk terhadap komoditi pangan alternatif	persen	25	28		28		28	
	Persentase kenaikan produksi pangan lokal alternatif	persen	-	1		1,85		2,60	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang terdidik dan terlatih	persen	20	25	59.586.000	35	60.300.000	45	60
	Cakupan pembinaan dan pendampingan pada kelompok petani tanaman pangan	kelompok petani	-	65		75		85	
	Rasio tenaga penyuluh pertanian yang terlatih terhadap total petani	per 1.000 petani	0,50	0,50		0,50		0,50	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Indeks Ketahanan Pangan Agregat Rumah tangga	indeks	-	50	9.018.200.000	56	9.125.200.000	63	9.330
	Angka Kecukupan Gizi (AKG)	persen	48,54	48,98		49,50		50,33	
	Angka Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	65	65		69		74	
	Ketersediaan pangan per kapita	kg per kapita	50	50		50		50	
Tujuan 3									
Sasaran 3.1.									
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi PMKS	persen	40	45	700.000.000	55	708.300.000	70	720
	Persentase penyandang PMKS binaan yang terampil berusaha secara mandiri	persen	10	10		15		29	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan PMKS	persen	3	4,50	2.500.000.000	5,70	2.529.700.000	6,90	2.580

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Proporsi tenaga penyuluh kesejahteraan sosial yang terlatih dan terampil	persen	20	55		65		68	
	Rasio keluarga dalam KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang mengikuti PKH (Program Keluarga Harapan)	persen	10	10		10		45,80	
	Persentase tenaga kerja penyandang disabilitas yang dilindungi	persen	-	20		40		60	
Misi 5									
Tujuan 1									
Sasaran 1.1.									
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase ketersediaan buku-buku agama di sekolah	persen	2,50	4	250.000.000	5,50	250.000.000	7	25
	Cakupan sekolah dasar yang memiliki ruang ibadah	persen	20	32		44		56	
	Persentase peningkatan kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga keagamaan	persen	-	5		10		15	
Sasaran 1.2.									
Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pembangunan tempat-tempat ibadah	persen	1,40	2,12	500.000.000	2,84	500.000.000	3,56	50
	Persentase tempat ibadah yang terpelihara	persen	25	34,50		44		53,50	
Sasaran 1.3.									
Program pengembangan	Proporsi lembaga keagamaan yang dibina dan	persen	75	80,67	250.000.000	86,34	250.000.000	92,01	25

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
wawasan kebangsaan	diberdayakan								
	Persentase berfungsinya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	persen	80	85,70		91,40		97,10	
Tujuan 2									
Sasaran 2.1.									
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan kampung adat	kampung	-	-	500.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase dukun bayi yang memperoleh pelatihan persalinan dan perawatan masa nifas	persen	20	20	150.000.000	30	165.000.000	30	180.000.000
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase tanaman obat-obatan lokal yang dikembangkan dalam upaya kesehatan masyarakat	persen	5	10	75.000.000	20	75.000.000	20	100.000.000
Program Pengembangan Nilai Budaya	Porsi muatan budaya dan adat Suku Mee dalam kurikulum pendidikan sekolah	persen	-	-	150.000.000	5	150.000.000	10	150.000.000
Sasaran 2.2.									
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan sanggar seni yang dibina dan diberdayakan	sanggar	-	2	250.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000
	Frekwensi juara dalam lomba seni budaya tingkat regional/nasional	kali	-	1		1		1	
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Persentase penerapan bentuk kemitraan usaha profesi seni dan budaya antar daerah dengan pihak swasta / LSM	persen	-	10	400.000.000	15	400.000.000	20	400.000.000
	Cakupan potensi daerah wisata seni	daerah wisata	-	1		1		1	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	budaya yang dipromosikan								
Misi 6									
Tujuan 1									
Sasaran 1.1.									
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan Ruang terbuka hijau (RTH)	persen	80	90	940.000.000	90	951.200.000	90	97
	Kategori Tingkat Pencemaran Udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	kategori	baik	baik		baik		baik	
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya /Program Pemulihan Kondisi Sungai (Restorasi)	Cakupan normalisasi sungai	persen	85	88	500.000.000	88	526.000.000	91	54
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pelayanan persampahan di perkotaan Dogiyai	persen	30	40	780.000.000	50	789.200.000	60	80
	Cakupan pemenuhan TPA di perkotaan Dogiyai	persen	10	18		26		34	
Sasaran 1.2.									
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pemahaman warga dalam mendeteksi dini dan menghadapi bencana alam	persen	-	40	776.206.000	55	785.500.000	60	80
	presentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	persen	-	30		35		40	
Misi 7									

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Tujuan 1									
Sasaran 1.1.									
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cakupan panjang jalan dan jembatan terhadap penduduk (Mobilitas)	Km / 100 penduduk	0,24	0,25	35.375.660.000	0,25	35.795.500.000	0,26	36.600.000.000
	Cakupan panjang jalan dan jembatan terhadap luas wilayah (Aksesibilitas)	Km/Km ²	0,03	0,03		0,03		0,04	
	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang (kondisi mantap)	persen	0,05	1,25		1,40		1,60	
	Rasio panjang jalan dan jembatan dalam kawasan sentra produksi	persen	-	20		20		25	
Sasaran 1.2.									
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase kenaikan penumpang datang dan pergi di bandar udara	persen	15	15,51	2.000.000.000	16,31	2.023.700.000	17,63	2.060.000.000
	Persentase kenaikan bongkar muat barang di bandar udara	persen	5	5		6		6	
	Cakupan distrik yang memiliki bandar udara perintis yang memadai	distrik	1	-		-		1	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rasio kendaraan bermotor terhadap penduduk	per 10.000 penduduk	315,52	348,47	650.000.000	381,41	6.068.200.000	414,36	6.200.000.000
	Cakupan terminal penumpang yang memadai	per distrik	1	1		1		1	
Tujuan 2									
Sasaran 2.1.									
Program Pengembangan Perumahan	Backlog kepemilikan rumah layak huni	rumah	5.000	4.300	10.091.058.800	3.200	10.210.900.000	2.200	10.440.000.000
	Tingkat Elektrifikasi penduduk	persen	14,61	15,18		18,21		20,60	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Akses rumahtangga terhadap air bersih	persen	45	54,50		64		73,50	
Sasaran 2.2.									
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	persen	-	15	2.415.000.000	25	2.443.600.000	35	2.49
	Rasio jaringan irigasi kondisi baik	persen	-	60		65		70	
Tujuan 3									
Sasaran 3.1.									
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tingkat kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW	persen	-	40	3.500.000.000	42,14	3.541.600.000	44,96	3.62
	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	persen	-	20,43		27,33		38,74	
Misi 8									
Tujuan 1									
Sasaran 1.1.									
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Porsi muatan gender dalam perencanaan dan penganggaran	persen	-	5,50	810.279.240	10,50	819.900.000	20,50	83
	Rata-rata Lama Sekolah perempuan	tahun	4,04	4,63		5,22		5,82	
	Angka Melek Huruf perempuan	persen	45	51,50		60		66	
Tujuan 2									
Sasaran 2.1.									
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase perempuan di perdesaan yang terampil dalam bidang usaha ekonomi produktif	persen	20	28	1.200.000.000	36	1.214.300.000	44	1.24
	Persentase kenaikan pendapatan mama-mama papua yang mendapat pendampingan usaha ekonomi	persen	-	2,50		2,50		3	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase berfungsinya kelompok peduli KB	persen	-	20	663.600.000	30	671.500.000	40	68
	Cakupan kader KB terlatih dan terdidik	kader	-	4		4		4	
Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak per KK	4	4	3.686.266.000	4	3.730.100.000	4	3.81
	Rasio akseptor KB	persen	20,88	20,88		44,53		56,35	
	Cakupan peserta KB aktif	persen	15	24,50		34		43,50	
Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	persen	-	45	16.000.000	46,50	17.200.000	47	1
	Cakupan Ketersediaan alat kontrasepsi untuk keluarga miskin	persen	-	50		50		65	
Tujuan 3									
Sasaran 3.1.									
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan organisasi kepemudaan yang dibina	persen	-	60	221.160.000	65	223.800.000	70	22
	Cakupan pengusaha muda yang mandiri	persen	-	10		12		15	
Sasaran 3.2.									
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase peningkatan pemahaman remaja terhadap reproduksi	persen	-	1,25	734.000.000	2,23	742.700.000	3,21	75
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	persen	-	60		60		75	
	Cakupan bimbingan konseling terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual	persen	-	15		30		50	
Tujuan 4									

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Sasaran 4.1.									
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase cabang olahraga prestasi yang terbina	persen	-	50	144.000.000	65	145.700.000	75	14
	Proporsi peserta kompetisi olahraga daerah yang berprestasi di tingkat regional/ nasional	persen	-	70		75		86	
	Persentase atlet berprestasi yang diberikan penghargaan	persen	-	70		75		86	
	Persentase peningkatan kemitraan bina olahraga dengan lembaga/ instansi lainnya	persen	-	2		2,98		3,96	
Misi 9									
Tujuan 1									
Sasaran 1.1.									
Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Naskah Akademik yang berkualitas	persen	-	80	1.102.500.000	80	1.115.600.000	90	1.14
	Cakupan tenaga fungsional legal drafting yang berkualitas	orang	-	2		3		3	
	Cakupan produk- produk hukum daerah yang diterima oleh kementerian dalam negeri	persen	-	100		100		100	
Tujuan 2									
Sasaran 2.1.									
Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase hasil penertiban penyakit masyarakat (Pekat)	persen		56,24	1.652.400.000	63,83	1.672.000.000	71,52	1.70
	Rasio Satpol PP terhadap total penduduk	Per 10.000 penduduk	3,25	3,37		3,72		4,61	
	Rasio Linmas	Per 10.000 penduduk	8,54	9,89		11,24		12,60	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	terhadap total penduduk								
	Angka Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT)	per 10.000 perempuan	-	30		25		20	
	Persentase kasus pelanggaran terhadap Perda	persen	24	20		15		10	
Tujuan 3									
Sasaran 3.1.									
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase penanganan pelanggaran HAM	persen	-	70	650.000.000	77,50	700.000.000	85,50	72
	Persentase peningkatan pelayanan publik peduli HAM	persen	-	6		8		10	
	Indeks Kebahagiaan	indeks	-	54,35		56,17		60,29	
	Cakupan dokumen laporan penegakanHAM yang berkualitas	dokumen	-	1		1		1	
Sasaran 3.2.									
Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peserta pilkada/pemilu	persen		90	250.000.000	95	300.000.000		32
	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kehidupan politik dan berdemokrasi	persen		2,50		5		6	
Misi 10									
Tujuan 1									
Sasaran 1.1.									

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Progra					
				2018		2019		2020	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program Afirmasi Lembaga Masyarakat Adat	Persentase peran masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan	persen	-	20	900.000.000	40	910.700.000	60	930.000.000
Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan dokumen Rencana Definitif Otsus yang berkualitas	dokumen	-	1	750.000.000	1	860.000.000	1	990.000.000
	Cakupan pendataan Orang Asli Papua	persen	-	20		40		60	
Sasaran 1.2.									
Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan	Rasio jumlah penduduk OAP yang memiliki usaha sendiri skala mikro dan kecil	per 1.000 rumahtangga OAP	-	50	850.000.000	75	910.000.000	100	970.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rata-rata Lama Sekolah Orang Asli Papua	tahun	4,82	4,89	1.520.000.000	4,99	1.680.000.000	5,35	1.890.000.000
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Harapan Hidup Orang Asli Papua	tahun	63,96	65,57	725.000.000	65,95	800.000.000	66,22	890.000.000
Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumahtangga Orang Asli Papua yang memiliki rumah layak huni	persen	25	30	9.500.000.000	30	10.010.000.000	35	10.550.000.000
	Tingkat elektrifikasi pada rumahtangga Orang Asli Papua	persen	10,23	11,08		12,57		14,20	

Tabel 6.8.
Rumusan Usulan Program Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Dogiyai

No	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Volume (Target Akhir Perencanaan)	Lokasi	Peran Dae Terl
			Deskripsi	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
Komisi Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban							
1	Upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang prima, menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Dogiyai perlu lebih ditingkatkan;	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Proporsi lembaga keagamaan yang dibina dan diberdayakan	persen	100.00	Kabupaten Dogiyai	Kantor Kesatuan Bangsa Perlind Masyara
			Persentase berfungsinya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	persen	100.00		
2	Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja harus ditekan seoptimal mungkin untuk menciptakan iklim pembangunan yang lebih kondusif, yang akhirnya dapat mendorong keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Dogiyai;	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase hasil penertiban penyakit masyarakat (Pekat)	persen	76.95	Kabupaten Dogiyai	Kantor Polisi Praja
			Rasio Satpol PP terhadap total penduduk	Per 10.000 penduduk	5.71		
			Rasio Linmas terhadap total penduduk	Per 10.000 penduduk	15.30		
			Angka Kekerasan Dalam Rumahtangga (KDRT)	per 10.000 perempuan	10.00		
			Persentase kasus pelanggaran terhadap Perda	persen	10.00		
3	Konflik tapal batas yang terjadi baik itu antarwilayah distrik/kampung maupun dengan kabupaten berbatasan harus diselesaikan dengan bijaksana dan berkoordinasi yang baik agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari;	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	persen	80.00	Tersebar di 10 Distrik	1. Distr Kamu 2. Distr Mapia 3. Distr Kamu U 4. Distr Piyaiye 5. Distr Kamu S 6. Distr Mapia E 7. Distr Kamu T 8. Distr
			Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	dokumen	5.00		
			Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	persen	100.00		

No	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Volume (Target Akhir Perencanaan)	Lokasi	Peran Dae Terl
			Deskripsi	Satuan			
							Mapia T 9. Distr Sukikai Selatan 10. Distr Dogiyai
4	Klaim ganda atas kepemilikan tanah hak ulayat perlu diatur dalam regulasi hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum positif;	Program Afirmasi Lembaga Masyarakat Adat	Persentase peran masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan	persen	80.00	Tersebar di 79 Kampung	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
5	Permasalahan Hak Asasi manusia (HAM) yang terjadi selama ini perlu diselesaikan segera dengan bijaksana oleh pemerintah daerah dan institusi penegakan HAM yang terkait;	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase penanganan pelanggaran HAM	persen	100.00	Kabupaten Dogiyai	Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat
			Persentase peningkatan pelayanan publik peduli HAM	persen	12.00		
			Indeks Kebahagiaan	indeks	70.13		
			Cakupan dokumen laporan penegakanHAM yang berkualitas	dokumen	5.00		
6	Dalam rangka pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi perlu ditingkatkan aspek pengelolaan aset daerah, baik perencanaan, pemanfaatan, penyimpanan, dan penghapusan, agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Laporan Keuangan berbasis akrual	persen	65.00	Kabupaten Dogiyai	Badan Pengelola Keuangan Aset Da
7	Pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, hingga monitoring dan evaluasi perlu lebih		Persentase APBD Tepat Waktu	persen	100.00		
			Persentase pertumbuhan PAD	persen	10.00		
			Cakupan aset daerah yang telah teridentifikasi dan	persen	100.00		

No	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Volume (Target Akhir Perencanaan)	Lokasi	Peran Dae Terli
			Deskripsi	Satuan			
	ditingkatkan baik itu kuantitasnya maupun kualitasnya;		dinilai kembali				
8	Perencanaan pembangunan harus disusun dengan lebih berkualitas dan tepat waktu agar tidak menjadi penghambat kelancaran pembangunan;						
9	Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang lebih berpihak pada kesejahteraan Orang Asli Papua khususnya Suku Mee harus lebih ditingkatkan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Suku Mee;						
10	Perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak harus menjadi salah satu basis dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan implementasinya.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Porsi muatan gender dalam perencanaan dan penganggaran	persen	40.00	Kabupaten Dogiyai	Dinas Pember Peremp Perlindu Anak da Keluarg Berenca
			Rata-rata Lama Sekolah perempuan	tahun	7.00		
			Angka Melek Huruf perempuan	persen	80.00		
Komisi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat							
1	Sarana dan prasarana pendidikan, terutama gedung sekolah, fasilitas sekolah, buku-buku pelajaran, perpustakaan sekolah, usaha kesehatan sekolah sangat minim, sehingga berpengaruh kepada peningkatan kualitas siswa disemua jenjang pendidikan;	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	persen	100.00	Tersebar di 79 Kampung	Dinas Pendidi Pemuda Olahrag
2	Mendukung seluruh program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat		APM Pendidikan Anak Usia Dini	persen	66.25		

No	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Volume (Target Akhir Perencanaan)	Lokasi	Peran Dae Terl
			Deskripsi	Satuan			
	melalui pelayanan publik yang prima dan berkualitas;						
3	Kemitraan dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan dengan mengajak peran serta pihak-pihak swasta maupun LSM yang berkompeten di bidangnya masing-masing;		Cakupan guru PAUD yang bersertifikasi	per 100 guru	60.00		
			Rasio ruang kelas murid PAUD	murid per kelas	20.00		
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD dan sederajat	persen	98.20	Tersebar di 10 Distrik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			APM SMP dan sederajat	persen	88.00		
			APK SD dan sederajat	persen	101.50		
			APK SMP dan sederajat	persen	97.85		
			Angka Kelulusan SD dan sederajat	persen	100.00		
			Angka Kelulusan SMP dan sederajat	persen	95.00		
			Angka Melanjutkan Sekolah ke SMP	persen	99.52		
			Angka Melanjutkan Sekolah ke SMA/SMK	persen	96.67		
			Jumlah Sekolah Satu Atap Berasrama yang berkualitas	sekolah	2.00		
		Program Pendidikan Menengah	Proporsi siswa yang lulus pendidikan kejuruan	persen	100.00	Tersebar di 10 Distrik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Daya serap lapangan kerja untuk lulusan pendidikan kejuruan	persen	100.00		
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Puskesmas terhadap kesehatan dasar	persen	80.00	Tersebar di 10 Distrik	Dinas Kesehatan

No	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Volume (Target Akhir Perencanaan)	Lokasi	Peran Dae Terl
			Deskripsi	Satuan			
			(kesehatan ibu, anak dan KB; gizi; pencegahan dan pengendalian penyakit; kesehatan lingkungan; dan promosi kesehatan)				
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin yang terlayani JKN	persen	80.00	Tersebar di 10 Distrik	Rumah Umum Daerah
			Akses penduduk terhadap layanan BPJS	per 100.000 penduduk	1,000.00		
4	Rendahnya kuantitas dan kualitas guru yang memberi pengajaran dan pendidikan di sekolah perlu menjadi perhatian lebih serius dan menjadi prioritas dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan di bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan agar terlaksana lebih merata;	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Bersertifikasi terhadap murid SD/SMP	murid per guru bersertifikasi	20.00	Tersebar di 10 Distrik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5	Tingkat kemangkrakan guru dalam mengajar di sekolah harus dikurangi, terutama di daerah-daerah yang terisolasi dan kekurangan guru;		Proporsi tenaga kependidikan yang terlatih dan terampil	persen	75.00		
6	Kesejahteraan guru di daerah terisolasi, menyangkut, anggaran, kesehatan, perumahan perlu menjadi prioritas setiap tahun anggaran. Pelayanan bagi para guru di daerah ini perlu dilakukan secara serius dan tuntas oleh pemerintah kabupaten, agar guru mengajar		Rasio Guru Murid jenjang SD dan sederajat	murid per guru	20.00		
			Rasio Guru Murid jenjang SMP dan sederajat	murid per guru	20.00		
			Rasio Sekolah Murid jenjang SD dan sederajat	murid per sekolah	240.00		
			Cakupan Sekolah yang memberikan	persen	100.00		

No	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Volume (Target Akhir Perencanaan)	Lokasi	Peran Dae Terl
			Deskripsi	Satuan			
	lebih serius dan tidak meninggal tempat tugas;		DAPODIK secara rutin dan berkesinambungan				
7	Buta aksara pada penduduk Dogiyai harus dituntaskan segera melalui peningkatan dan pengembangan pendidikan nonformal yang melibatkan peran serta masyarakat dan LSM semaksimal mungkin;	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang memenuhi standar	PKBM	5.00	Tersebar di 79 Kampung	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
8	Pemberiaan beasiswa pendidikan di semua jenjang harus dilakukan lebih transparan dan akuntabel, agar pemberiannya dapat lebih merata dan dipertanggungjawabkan dengan lebih baik;		Persentase peserta PKBM yang lulus Kejar (Kelompok Belajar) paket (A, B dan C)	persen	100.00		
			Persentase penerapan Keaksaraan Fungsional Dasar Dewasa	persen	100.00		
		Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (Perpustakaan) yang berkualitas	taman bacaan	5.00			
9	Perlunya perhatian terhadap kesejahteraan dokter maupun tenaga medis lainnya yang melaksanakan tugas di daerah terpencil.	Program sumberdaya kesehatan	Rasio dokter terhadap penduduk	per 100.000 penduduk	9.00	Tersebar di 10 Distrik	Dinas Kesehatan
10	Manambah tenaga kesehatan untuk menjangkau kampung-kampung yang belum dapat menikmati kesehatan yang layak		Rasio perawat/bidan terhadap penduduk	per 100.000 penduduk	90.00		
11	Peningkatan kesehatan bagi masyarakat serta pelayanan yang layak bagi masyarakat yang ada di kampung-kampung perlu menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan						

No	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Volume (Target Akhir Perencanaan)	Lokasi	Peran Dae Terl
			Deskripsi	Satuan			
	pelayanan publik.						
12	Pemerintah perlu memperhatikan peningkatan pengembangan rumah sakit dan pembangunan puskesmas di distrik-distrik untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah dalam pelayanan terhadap publik.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase peningkatan sarana dan prasarana di rumah sakit	persen	8.00	Kabupaten Dogiyai	Dinas Kesehatan
13	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan diseluruh distrik-distrik maupun di kampung-kampung untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.		Rasio ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan	persen	75.00		
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas terhadap total penduduk	Per 30 ribu penduduk	8.00		
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana puskesmas	persen	5.80		
14	Peningkatan gizi yang baik dan berkualitas bagi masyarakat merupakan hal yang penting dan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	persen	100.00	Tersebar di 10 Distrik	Dinas Kesehatan
			Cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin terhadap balita dan anak	per 10.000 balita dan anak	6,000.00		
			Cakupan Ibu Hamil yang diberikan tambahan makanan dan vitamin	per 10.000 ibu hamil	250.00		
15	Peningkatan pendapatan masyarakat perlu diupayakan melalui	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha	Persentase kenaikan nilai produksi usaha ekonomi	persen	25.00	Tersebar di 79 Kampung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

No	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Volume (Target Akhir Perencanaan)	Lokasi	Peran Dae Terl
			Deskripsi	Satuan			
	pengembangan aktivitas sektor-sektor produktif yang dapat memberi nilai tambah yang lebih tinggi;	Mikro Kecil Menengah (Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan)	kerakyatan				Meneng
			Persentase peningkatan nilai tambah usaha ekonomi kerakyatan	persen	5.00		
			Kontribusi usaha industri berbasis ekonomi kerakyatan terhadap PDRB	persen	1.25		
			Proporsi OAP suku Mee yang memiliki usaha industri mikro dan kecil	persen	45.00		
			Cakupan pengusaha OAP suku Mee yang dibina	orang	1,500.00		
16	Terbatasnya Orang Asli Papua yang bekerja di berbagai sektor jasa perdagangan atau perusahaan, perlu dikaji lebih mendalam untuk dicarikan jalan keluar yang tepat sehingga Orang Asli Papua juga dapat berperan secara optimal dalam pembangunan ekonomi. Hal ini sebagai perwujudan afirmasi di era otonomi khusus;		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	0.56	Kabupaten Dogiyai	Dinas T Kerja
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	98.00		
			Jumlah BLK yang terakreditasi	BLK	2.00		
17	Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase perempuan di perdesaan yang terampil dalam bidang usaha ekonomi produktif	persen	60.00	Tersebar di 79 Kampung	Dinas Pember Peremp Perlindu Anak da Keluarg Berenca
			Persentase kenaikan pendapatan mama-mama papua yang mendapat pendampingan	persen	5.00		

No	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Volume (Target Akhir Perencanaan)	Lokasi	Peran Dae Terl
			Deskripsi	Satuan			
			usaha ekonomi			Tersebar di 79 Kampung	Dinas Kesehatan
			Porsi muatan gender dalam perencanaan dan penganggaran	persen	40.00		
			Rata-rata Lama Sekolah perempuan	tahun	7.00		
			Angka Melek Huruf perempuan	persen	80.00		
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu	per 1.000 kelahiran hidup	2.63		
			Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN)	persen	75.00		
			Rasio Bidan Terlatih yang memenuhi standar terhadap total penduduk	per 30.000 penduduk	13.64		
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak per KK	2.00		
			Rasio akseptor KB	persen	80.00		
			Cakupan peserta KB aktif	persen	60.00		
18	Pemerintah perlu memperhatikan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah keluarga miskin dan PMKS yang terampil berusaha secara mandiri	orang	7,500.00	Tersebar di 79 Kampung	Dinas S
			Cakupan KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang diberdayakan	persen	80.00		
			Proporsi keluarga miskin yang memperoleh sarana dan prasarana pendukung KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) yang memadai	persen	40.00		

No	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Volume (Target Akhir Perencanaan)	Lokasi	Peran Dae Terli
			Deskripsi	Satuan			
19	Perlunya peningkatan kesejahteraan petani agar para petani lebih bersemangat untuk meningkatkan hasil produksinya guna memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Dogiyai.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	indeks	110.25	Tersebar di 79 Kampung	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan
			Persentase petani/peternak/nelayan yang menguasai dan terampil melaksanakan usaha agribisnis	persen	40.00		
			Cakupan Kelompok petani yang diberdayakan dan dibina	persen	80.00		

Komisi Bidang Infrastruktur

1	Pengembangan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu kiranya dapat dilakukan dengan pendataan yang lebih baik agar tepat sasaran.	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumahtangga Orang Asli Papua yang memiliki rumah layak huni	persen	40.00	Tersebar di 10 Distrik Kabupaten Dogiyai	Dinas Perumahan Dan Ka Permuk
			Tingkat elektrifikasi pada rumahtangga Orang Asli Papua	persen	17.20		
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan di seluruh distrik dan kampung-kampung untuk mempermudah akses transportasi bagi masyarakat yang ada di kampung-kampung.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase kenaikan penumpang datang dan pergi di bandar udara	persen	20.66	Kabupaten Dogiyai	Dinas Perhubu
			Persentase kenaikan bongkar muat barang di bandar udara	persen	8.00		
			Cakupan distrik yang memiliki bandar udara perintis yang memadai	distrik	3.00		
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rasio kendaraan bermotor terhadap penduduk	per 10.000 penduduk	480.25	Tersebar di 10 Distrik Kabupaten Dogiyai	Dinas Perhubu
Cakupan terminal penumpang yang	per distrik	1.00					

No	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dogiyai	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Volume (Target Akhir Perencanaan)	Lokasi	Peran Dae Terl
			Deskripsi	Satuan			
			memadai				
3	Pembangunan Jalan dan Jembatan yang baik dan merata untuk masyarakat di kampung-kampung agar masyarakat di kampung-kampung juga dapat menikmati pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cakupan panjang jalan dan jembatan terhadap penduduk (Mobilitas)	Km / 100 penduduk	0.28	Tersebar di 10 Distrik	Dinas Pekerja Umum Penataa Ruang
			Cakupan panjang jalan dan jembatan terhadap luas wilayah (Aksesibilitas)	Km/Km ²	0.06		
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang (kondisi mantap)	persen	3.00		
			Rasio panjang jalan dan jembatan dalam kawasan sentra produksi	persen	30.00		
4	Pembangunan rumah ibadah bagi seluruh umat yang ada di Kabupaten Dogiyai dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam hal kerohanian serta memberikan kenyamanan bagi umat untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pembangunan tempat-tempat ibadah	persen	5.00	Tersebar di 79 Kampung	Dinas Peruma Dan Ka Permuk
			Persentase tempat ibadah yang terpelihara	persen	75.00		

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dogiyai Tahun 2017-2022

Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Kondisi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P
---------------	-------------------	---------	--

Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Program (outcome)	Kinerja Awal RPJMD 2017	2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
Kesehatan										
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Puskesmas terhadap kesehatan dasar (kesehatan ibu, anak dan KB; gizi; pencegahan dan pengendalian penyakit; kesehatan lingkungan; dan promosi kesehatan)	25	50.00	28,066,234,100	55.00	28,399,400,000	65.00	29,043,500,000	75.00	29,043,500,000
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin yang terlayani JKN	20	50.00	1,140,000,000	60.00	1,153,600,000	65.00	1,179,800,000	75.00	1,179,800,000
	Akses penduduk terhadap layanan BPJS	0	200.00		400.00		600.00		800.00	
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase peningkatan sarana dan prasarana di rumah sakit	2.5	3.60	4,879,536,300	4.70	4,937,400,000	5.80	5,049,400,000	6.90	5,049,400,000
	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan	45	50.00		60.00		65.00		70.00	
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas terhadap total penduduk	3.00	4.00	56,030,391,000	5.00	57,340,000,000	6.00	58,680,000,000	7.00	58,680,000,000
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana puskesmas	-	1.50		2.45		3.76		4.50	
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Persentase kenaikan rujukan teknis laboratorium puskesmas dan rumah sakit	0	5.00	175,000,000	10.00	177,000,000	15.00	181,000,000	20.00	181,000,000
	Cakupan pemeriksaan sampel	1500	3,400		5,300		7,200		9,100	
Program sumberdaya kesehatan	Rasio dokter terhadap penduduk	3.23	4.43	151,500,000	5.63	153,300,000	6.83	156,700,000	8.03	156,700,000
	Rasio perawat/bidan terhadap penduduk	10.75	26.60		42.45		58.30		74.15	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang telah memenuhi	2	2.00	500,000,000	4.00	506,000,000	6.00	517,500,000	8.00	517,500,000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	standar layanan									
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemenuhan obat-obatan untuk menghilangkan simtomatik/gejala, meredakan nyeri (antibiotik, analgesik, dll)	60	75.00	6,829,766,120	80.00	6,910,800,000	85.00	7,067,500,000	95.00	7
	Persentase pemenuhan obat-obatan untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit (vaksin, serum, dll)	40	55.00		60.00		65.00		75.00	
	Persentase pemenuhan obat-obatan untuk menambah atau mengganti fungsi fungsi zat yang kurang (vitamin, hormon, dll)	80	84.00		88.00		92.00		96.00	
	Proporsi pelayanan farmasi yang berkualitas	40	60.00		75.00		85.00		95.00	
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan	10	25.00	477,400,000	35.00	483,100,000	45.00	494,100,000	55.00	
	Cakupan Pos Yandu Lansia	0	1.00		2.00		3.00		4.00	
	Jumlah Kader Lansia yang terlatih dan terampil	0	20.00		25.00		30.00		35.00	
Program Upaya Kesehatan Perseorangan	Tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat di Puskesmas	30	60.00	635,000,000	75.00	642,600,000	85.00	657,200,000	95.00	
	Jumlah puskesmas yang berfungsi sebagai UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) yang berkualitas (Poliklinik, UGD, bersalin)	0	1.00		1.00		1.00		2.00	
Program peningkatan keselamatan ibu	Angka Kematian Ibu	5.70	5.70	2,676,460,000	5.23	2,708,200,000	4.69	2,769,700,000	3.68	2
	Persentase ibu	20	40.00		55.00		65.00		70.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
melahirkan dan anak	bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN)									
	Rasio Bidan Terlatih yang memenuhi standar terhadap total penduduk	4.72	6.50		8.29		10.07		11.86	
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Bayi	20	18.00	936,000,000	16.00	947,100,000	14.00	968,600,000	12.00	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	15	40.00		45.00		50.00		55.00	
	Cakupan SDKN Posyandu	40	44.00		48.00		52.00		56.00	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan Penduduk	67.52	65.00	1,394,000,000	64.00	1,410,600,000	59.00	1,442,600,000	53.00	1
	Cakupan balita dan anak sekolah yang memperoleh vaksin dan imunisasi	250	350.00		500.00		750.00		1,000.00	
	Persentase Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	0	3.00		5.00		8.00		10.00	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	0	60.00	907,470,000	75.00	918,200,000	85.00	939,000,000	95.00	
	Cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin terhadap balita dan anak	0	2,500.00		3,500.00		4,500.00		5,500.00	
	Cakupan Ibu Hamil yang diberikan tambahan makanan dan vitamin	0	50.00		100.00		150.00		200.00	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	0	3.00	1,311,250,000	6.00	1,326,800,000	9.00	1,356,800,000	13.00	1
	Cakupan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	0	1,000.00		2,000.00		3,000.00		4,000.00	
	Persentase kampung/desa yang	0	5.00		10.00		15.00		20.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	mencapai Universal Child Immunization (UCI)									
	Persentase tenaga penyuluh kesehatan yang terdidik dan terlatih	5	15.00		25.00		35.00		45.00	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan kampung/desa yang berstatus Rumah Desa Sehat	0	1.00	175,000,000	2.00	177,000,000	3.00	181,000,000	4.00	
	Persentase kampung/desa yang memperoleh penyuluhan lingkungan sehat	0	20.00		40.00		60.00		75.00	
	Persentase rumahtangga yang dapat mengakses air bersih	45	52.00		59.00		66.00		73.00	
Program Peningkatan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau lainnya	Cakupan kampung/desa yang bebas asap rokok	0	-	803,550,000	-	813,100,000	1.00	831,600,000	-	
	Persentase penduduk yang merokok	45			45.00		35.00		25.00	
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase dukun bayi yang memperoleh pelatihan persalinan dan perawatan masa nifas	20.00	20.00	150,000,000	30.00	165,000,000	30.00	180,000,000	40.00	
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase tanaman obat-obatan lokal yang dikembangkan dalam upaya kesehatan masyarakat	5.00	10.00	75,000,000	20.00	75,000,000	20.00	100,000,000	30.00	
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Harapan Hidup Orang Asli Papua	63.96	65.57	725,000,000	65.95	800,000,000	66.22	890,000,000	66.59	
Pendidikan										
Program Pendidikan Non Formal	Jumlah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang memenuhi standar	1	1.00	6,089,220,000	1.00	6,161,500,000	1.00	6,301,200,000	1.00	6
	Persentase peserta PKBM yang lulus	90	90.00		92.00		95.00		98.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Kejar (Kelompok Belajar) paket (A, B dan C)									
	Persentase penerapan Keaksaraan Fungsional Dasar Dewasa	80	80.00		85.00		90.00		95.00	
	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (Perpustakaan) yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	15	50.00	733,210,000	55.00	741,900,000	60.00	758,700,000	65.00	
	Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi B	0	-		1.00		1.00		1.00	
	Persentase peran Komite Sekolah dalam penerapan MBS	0	50.00		55.00		60.00		70.00	
	Persentase kenaikan budaya dan budaya mutu dalam penerapan MBS	2.5	2.50		2.50		3.00		4.00	
Program Pendidikan Menengah	Proporsi siswa yang lulus pendidikan kejuruan	85	90.00	261,240,000	95.00	264,400,000	98.00	270,400,000	100.00	
	Daya serap lapangan kerja untuk lulusan pendidikan kejuruan	50	60.00		75.00		85.00		95.00	
Program Pendidikan Tinggi	Persentase peserta beasiswa pendidikan tinggi yang lulus tepat waktu	50	55.00	6,600,000,000	60.00	6,678,300,000	65.00	6,829,800,000	70.00	7
	Persentase lulusan pendidikan tinggi yang terserap dalam lapangan kerja	60	60.00		65.00		70.00		75.00	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	50	50.00	3,759,535,100	86.25	3,804,300,000	87.75	3,890,400,000	88.32	4
	APM Pendidikan Anak Usia Dini		50.00		51.36		54.33		58.20	
	Cakupan guru PAUD yang bersertifikasi	-	50.50		52.50		54.50		56.50	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Rasio ruang kelas murid PAUD	-	10.50		13.50		15.50		17.50	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD dan sederajat	86.02		27,572,524,200	23.37	27,899,800,000	25.40	28,532,600,000	27.48	29.00
	APM SMP dan sederajat	61.89			80.00		82.00		83.00	
	APK Pendidikan Anak Usia Dini	0.00			86.25		87.75		88.32	
	APK SD dan sederajat	98.73			61.94		62.20		62.56	
	APK SMP dan sederajat	94.72			90.00		91.01		92.95	
	Angka Kelulusan SD dan sederajat	95.00			96.00		97.00		98.00	
	Angka Kelulusan SMP dan sederajat	86.00			88.00		90.00		92.00	
	Angka Melanjutkan Sekolah ke SMP	49.58			98.74		98.82		98.94	
	Angka Melanjutkan Sekolah ke SMA/SMK	20.00			94.84		95.73		95.96	
	Jumlah Sekolah Satu Atap Berasrama yang berkualitas	0	-		-		1.00		-	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Bersertifikasi terhadap murid SD/SMP	-	10.00	505,200,000	10.00	511,200,000	10.00	522,800,000	15.00	
	Proporsi tenaga kependidikan yang terlatih dan terampil	20	55.00		60.00		65.00		70.00	
	Rasio Guru Murid jenjang SD dan sederajat	28	26.00		26.00		24.00		22.00	
	Rasio Guru Murid jenjang SMP dan sederajat	12	12.00		14.00		16.00		18.00	
	Rasio Sekolah Murid jenjang SD dan sederajat	247	247.00		245.00		245.00		245.00	
	Cakupan Sekolah yang memberikan DAPODIK secara rutin dan berkesinambungan	-	85.00		85.00		90.00		95.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase ketersediaan buku-buku agama di sekolah	2.5	2.50	250,000,000	2.50	250,000,000	2.50	250,000,000	2.50	
	Cakupan sekolah dasar yang memiliki ruang ibadah	20	20.00		20.00		20.00		20.00	
	Persentase peningkatan kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga keagamaan	0	5.00		10.00		15.00		20.00	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rata-rata Lama Sekolah Orang Asli Papua	4.82	4.89	1,520,000,000	4.99	1,680,000,000	5.35	1,890,000,000	5.79	2
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya /Program Pemulihan Kondisi Sungai (Restorasi)	Cakupan normalisasi sungai	85	85.00	500,000,000	85.00	526,000,000	85.00	547,500,000	85.00	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cakupan panjang jalan dan jembatan terhadap penduduk (Mobilitas)	0.2442	0.25	35,375,660,000	0.25	35,795,500,000	0.26	36,607,400,000	0.27	37
	Cakupan panjang jalan dan jembatan terhadap luas wilayah (Aksesibilitas)	0.0300	0.03		0.03		0.04		0.05	
	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang (kondisi mantap)	0.05	1.25		1.40		1.60		2.25	
	Rasio panjang jalan dan jembatan dalam kawasan sentra produksi	0.00	20.00		20.00		25.00		25.00	
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan	Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	-	15.00	2,415,000,000	25.00	2,443,600,000	35.00	2,499,100,000	45.00	2
	Rasio jaringan irigasi	-	60.00		65.00		70.00		75.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
lainnya	kondisi baik									
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tingkat kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW	-	40.00	3,500,000,000	42.14	3,541,600,000	44.96	3,621,900,000	48.63	3
	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	-	20.43		27.33		38.74		58.62	
Pemuda dan Olah Raga										
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan organisasi kepemudaan yang dibina	-	60.00	221,160,000	65.00	223,800,000	70.00	228,900,000	75.00	
	Cakupan pengusaha muda yang mandiri	-	10.00		12.00		15.00		17.00	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase cabang olahraga prestasi yang terbina	-	50.00	144,000,000	65.00	145,700,000	75.00	148,900,000	75.00	
	Proporsi peserta kompetisi olahraga daerah yang berprestasi di tingkat regional/ nasional	-	70.00		75.00		86.00		95.00	
	Persentase atlet berprestasi yang diberikan penghargaan	-	70.00		75.00		86.00		95.00	
	Persentase peningkatan kemitraan bina olahraga dengan lembaga/ instansi lainnya	-	2.00		2.00		2.00		2.00	
Perumahan										
Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pembangunan tempat-tempat ibadah	1.4	1.40	500,000,000	1.40	500,000,000	1.40	500,000,000	1.40	
	Persentase tempat ibadah yang terpelihara	25	25.00		25.00		25.00		25.00	
Program Pengembangan Perumahan	Backlog kepemilikan rumah layak huni	5000	4,300.00	10,091,058,800	3,200.00	10,210,900,000	2,200.00	10,442,400,000	1,500.00	10
	Tingkat Elektrifikasi penduduk	14.61	15.18		18.21		20.60		21.40	
	Akses rumahtangga	45	45.00		45.00		45.00		75.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	terhadap air bersih									
Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumahtangga Orang Asli Papua yang memiliki rumah layak huni	25.00	30.00	9,500,000,000	30.00	10,010,000,000	35.00	10,550,000,000	35.00	11.00
	Tingkat elektrifikasi pada rumahtangga Orang Asli Papua	10.23	11.08		12.57		14.20		16.89	
Sosial										
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah keluarga miskin dan PMKS yang terampil berusaha secara mandiri	1500	2,700.00	382,000,000	3,900.00	386,600,000	5,100.00	395,300,000	6,300.00	6.00
	Cakupan KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang diberdayakan	20	55.00		60.00		70.00		75.00	
	Proporsi keluarga miskin yang memperoleh sarana dan prasarana pendukung KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) yang memadai	10	20.00		25.00		30.00		35.00	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi PMKS	40	45.00	700,000,000	55.00	708,300,000	70.00	724,400,000	85.00	7.00
	Persentase penyandang PMKS binaan yang terampil berusaha secara mandiri	10	10.00		15.00		29.00		35.00	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan PMKS	3	4.50	2,500,000,000	5.70	2,529,700,000	6.90	2,587,100,000	7.60	2.00
	Proporsi tenaga penyuluh kesejahteraan sosial	20	55.00		65.00		68.00		75.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	yang terlatih dan terampil									
	Rasio keluarga dalam KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang mengikuti PKH (Program Keluarga Harapan)	10	10.00		10.00		45.80		56.00	
	Persentase tenaga kerja penyandang disabilitas yang dilindungi	0	20.00		40.00		60.00		75.00	
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Proporsi lembaga keagamaan yang dibina dan diberdayakan	75	75.00	250,000,000	75.00	250,000,000	75.00	250,000,000	75.00	
	Persentase berfungsinya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	80	80.00		80.00		80.00		98.00	
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pemahaman warga dalam mendeteksi dini dan menghadapi bencana alam	0	40.00	776,206,000	55.00	785,500,000	60.00	803,200,000	60.00	
	presentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana		30.00		35.00		40.00		45.00	
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase hasil penertiban penyakit masyarakat (Pekat)		56.24	1,652,400,000	63.83	1,672,000,000	71.52	1,709,900,000	75.19	1
	Rasio Satpol PP terhadap total penduduk	3.25	3.37		3.72		4.61		5.08	
	Rasio Linmas terhadap total penduduk	8.54	8.54		8.54		8.54		8.54	
	Angka Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT)		30.00		25.00		20.00		15.00	
	Persentase kasus	24.00	20.00		15.00		10.00		10.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	pelanggaran terhadap Perda									
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase penanganan pelanggaran HAM		70.00	650,000,000	77.50	700,000,000	85.50	725,000,000	100.00	
	Persentase peningkatan pelayanan publik peduli HAM		6.00		8.00		10.00		12.00	
	Indeks Kebahagiaan	-	54.35		56.17		60.29		66.53	
	Cakupan dokumen laporan penegakanHAM yang berkualitas	-	1.00		1.00		1.00		1.00	
Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peserta pilkada/pemilu	90	92	250,000,000	95.00	300,000,000		325,000,000		
	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kehidupan politik dan berdemokrasi		2.50		5.00		6.00		7.50	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
Tenaga Kerja										
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	0.77	0.73	1,100,793,080	0.69	1,113,900,000	0.64	1,139,200,000	0.60	1
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	94	94.80		95.60		96.40		97.20	
	Jumlah BLK yang terakreditasi	0	-		1.00		-		1.00	
	Persentase lulusan BLK yang terserap dalam lapangan kerja	0	25.00		30.00		35.00		40.00	
Perhubungan										
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase kenaikan penumpang datang dan pergi di bandar udara	15.00	15.51	2,000,000,000	16.31	2,023,700,000	17.63	2,069,600,000	18.22	2
	Persentase kenaikan bongkar muat barang di bandar udara	5.00	5.00		6.00		6.00		7.00	
	Cakupan distrik yang memiliki bandar	1	-		-		1.00		-	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	udara perintis yang memadai									
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rasio kendaraan bermotor terhadap penduduk	315.52	315.52	650,000,000	315.52	6,068,200,000	315.52	6,205,800,000	315.52	6
	Cakupan terminal penumpang yang memadai	1	1.00		1.00		1.00		1.00	
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase berfungsinya kelompok peduli KB	-	20.00	663,600,000	30.00	671,500,000	40.00	686,700,000	50.00	
	Cakupan kader KB terlatih dan terdidik	-	4.00		4.00		4.00		4.00	
Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	4	4.00	3,686,266,000	4.00	3,730,100,000	4.00	3,814,700,000	2.00	3
	Rasio akseptor KB	20.88	20.88		44.53		44.53		44.53	
	Cakupan peserta KB aktif	15	15.00		15.00		15.00		15.00	
Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	-	45.00	16,000,000	46.50	17,200,000	47.00	18,500,000	48.80	
	Cakupan Ketersediaan alat kontrasepsi untuk keluarga miskin	-	50.00		50.00		65.00		65.00	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase peningkatan pemahaman remaja terhadap reproduksi	-	1.25	734,000,000	1.25	742,700,000	1.25	759,500,000	1.25	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	-	60.00		60.00		75.00		80.00	
	Cakupan bimbingan konseling terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual	-	15.00		30.00		50.00		60.00	
Pemberdayaan perempuan										
Program Peningkatan	Porsi muatan gender	-	5.50	810,279,240	10.50	819,900,000	20.50	838,500,000	30.50	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	dalam perencanaan dan penganggaran									
	Rata-rata Lama Sekolah perempuan	4.04	4.04		4.04		4.04		4.04	
	Angka Melek Huruf perempuan	45.00	45.00		60.00		66.00		66.00	
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase perempuan di perdesaan yang terampil dalam bidang usaha ekonomi produktif	20	20.00	1,200,000,000	20.00	1,214,300,000	20.00	1,241,800,000	20.00	1
	Persentase kenaikan pendapatan mama-mama papua yang mendapat pendampingan usaha ekonomi	-	2.50		2.50		3.00		3.50	
Pemberdayaan Masyarakat Desa										
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	0	5.00	2,757,470,000	5.00	2,790,200,000	5.00	2,853,600,000	5.00	2
	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	0	5.00		5.00		5.00		5.00	
	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat desa dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	5.00		5.00		5.00		5.00	
Program Peningkatan Keberdayaan	Cakupan kampung adat	0	-	500,000,000	2.00	1,000,000,000	2.00	1,000,000,000	3.00	1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Masyarakat Pedesaan										
Lingkungan Hidup										
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan Ruang terbuka hijau (RTH)	80	90.00	940,000,000	90.00	951,200,000	90.00	972,700,000	90.00	1
	Kategori Tingkat Pencemaran Udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	baik	baik		baik		baik		baik	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pelayanan persampahan di perkotaan Dogiyai	30	30.00	780,000,000	30.00	789,200,000	30.00	807,100,000	30.00	
	Cakupan pemenuhan TPA di perkotaan Dogiyai	10	10.00		10.00		10.00		10.00	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase hasil produk unggulan yang terserap di pasar regional (ibu kota provinsi)	0	5.00	1,000,000,000	6.00	1,011,900,000	7.00	1,034,900,000	8.00	1
	Tingkat daya saing produk-produk unggulan ekonomi kerakyatan	0	1.00		1.25		1.50		2.00	
	Jumlah komoditi unggulan ekonomi kerakyatan yang dapat dipromosikan di ibu kota provinsi	0	1.50		2.00		4.00		6.00	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pengusaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri melalui pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	0	30.00	230,000,000	40.00	232,700,000	50.00	238,000,000	55.00	
	Jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah yang dapat bermitra dengan perusahaan menengah dan besar	0	2.00		2.00		3.00		3.00	
	Persentase produk unggulan usaha	0	10.00		15.00		20.00		23.50	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	industri mikro, kecil dan menengah yang dapat dipasarkan antarpulau									
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan SHU Koperasi	0	2.00	1,050,000,000	2.00	1,062,500,000	3.00	1,086,500,000	3.00	1
	Persentase peningkatan Anggota Koperasi	0	10.00		15.00		20.00		23.50	
	Jumlah Koperasi yang terkategori mandiri	0	1.00		1.00		1.00		2.00	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan)	Persentase kenaikan nilai produksi usaha ekonomi kerakyatan	0	10.00	11,023,000,000	15.00	11,153,900,000	20.00	11,406,900,000	23.50	11
	Persentase peningkatan nilai tambah usaha ekonomi kerakyatan	0	1.00		1.00		1.00		2.00	
	Kontribusi usaha industri berbasis ekonomi kerakyatan terhadap PDRB	0.20	0.41		0.62		0.83		1.04	
	Proporsi OAP suku Mee yang memiliki usaha industri mikro dan kecil	0	5.00		15.00		25.00		35.00	
	Cakupan pengusaha OAP suku Mee yang dibina	0	250.00		500.00		1,000.00		1,200.00	
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase peningkatan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah	0	2.00	3,000,000,000	2.00	3,035,600,000	1.00	3,104,400,000	1.00	3
	Persentase usaha mikro dan kecil yang berbadan usaha	0	20.00		35.00		45.00		55.00	
	Persentase pengusaha industri mikro, kecil dan menengah yang diberdayakan	15	27.00		39.00		51.00		63.00	
Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan	Rasio jumlah penduduk OAP yang memiliki usaha sendiri skala mikro	-	50.00	850,000,000	75.00	910,000,000	100.00	970,000,000	150.00	1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	dan kecil									
Komunikasi dan Informatika										
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Proporsi penduduk yang terakses media komunikasi telepon seluler	1500	2,000.00	2,800,000,000	2,375.00	2,833,300,000	3,250.00	2,897,600,000	4,125.00	2
	Cakupan kampung yang telah terakses dengan komunikasi HP	2	5.00		9.00		13.00		17.00	
	Rasio coverage BTS	0.1333	0.15		0.17		0.18		0.20	
Kependudukan dan Catatan Sipil										
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata waktu pelayanan administrasi kependudukan	21	24.00	2,959,894,300	27.00	2,995,000,000	30.00	3,062,900,000	33.00	3
	Persentase ketepatan waktu pelayanan kependudukan	20	34.00		48.00		62.00		76.00	
	Rasio penduduk usia 17 tahun dan keatas yang ber KTP-el	370	460.00		550.00		640.00		730.00	
	Rasio bayi yang berakte kelahiran	200	380.00		560.00		740.00		920.00	
	Rasio pasangan berakte nikah (catatan sipil)	80	84.00		88.00		92.00		96.00	
	Rasio rumahtangga yang memiliki KK-el (Kartu Keluarga Elektronik)	47.5	59.50		71.50		83.50		95.50	
Urusan Pilihan										
Pertanian										
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Tingkat produktifitas tanaman pangan	12	20.00	1,152,000,000	40.00	1,165,700,000	50.00	1,192,200,000	55.00	1
	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	10	15.00		20.00		25.00		30.00	
	Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi	3	3.50		3.80		4.00		4.50	
Program peningkatan produksi hasil	Persentase peningkatan produksi	2	3.00	2,747,969,700	4.00	2,780,600,000	5.00	2,843,600,000	6.00	2

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
peternakan	peternakan									
	Kontribusi sektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi	0.40	0.80		1.00		1.20		1.40	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	94.35	97.53	11,147,077,500	100.71	11,279,400,000	103.89	11,535,200,000	107.07	11,535,200,000
	Persentase petani/peternak /nelayan yang menguasai dan terampil melaksanakan usaha agribisnis	0	20.00		20.50		30.00		30.50	
	Cakupan Kelompok petani yang diberdayakan dan dibina	50	65.00		68.00		74.50		80.00	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (Penganekaragaman Pangan Spesifik Pangan Lokal)	Jumlah komoditi lokal yang memenuhi standar menjadi alternatif pangan bermutu	1	1.00	1,020,613,500	1.00	1,032,700,000	2.00	1,056,100,000	3.00	1,056,100,000
	Rasio konsumsi penduduk terhadap komoditi pangan alternatif	25	28.00		28.00		28.00		28.00	
	Persentase kenaikan produksi pangan lokal alternatif	0	1.00		1.85		2.60		3.79	
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang terdidik dan terlatih	20	25.00	59,586,000	35.00	60,300,000	45.00	61,600,000	55.00	61,600,000
	Cakupan pembinaan dan pendampingan pada kelompok petani tanaman pangan	0	65.00		75.00		85.00		95.00	
	Rasio tenaga penyuluh pertanian yang terlatih terhadap total petani	0.5	0.50		0.50		0.50		0.50	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Indeks Ketahanan Pangan Agregat Rumah tangga	0	50.00	9,018,200,000	56.00	9,125,200,000	63.00	9,332,300,000	69.00	9,332,300,000
	Angka Kecukupan	48.54	48.98		49.50		50.33		50.92	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Gizi (AKG)									
	Angka Pola Pangan Harapan (PPH)	65	65.00		69.00		74.00		79.00	
	Ketersediaan pangan per kapita	50	50.00		50.00		50.00		50.00	
Perdagangan										
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Margin perdagangan bahan-bahan pokok	300	270.00	1,001,750,000	240.00	1,013,600,000	210.00	1,036,600,000	180.00	1
	Tingkat inflasi	6.5	6.00		5.50		5.00		4.50	
	Indeks Kemahalan Kontruksi	204.28			195.47		187.05		178.99	
Perikanan										
Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi budidaya perikanan	3	4.00	2,474,773,050	5.00	2,504,100,000	6.00	2,560,900,000	7.00	2
	Kontribusi subsektor budidaya perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	0.25	0.25		0.50		0.85		1.00	
Program pengembangan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2	3.00	500,000,000	4.00	506,000,000	5.00	517,500,000	6.00	
	Kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap pertumbuhan ekonomi	1.00	1.00		1.50		2.00		2.50	
	Persentase peningkatan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil	2	2.50		3.00		3.50		4.50	
Perindustrian										
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase peningkatan pembinaan kemampuan Teknologi Tepat Guna (TTG) di industri mikro dan kecil	0	1.00	1,000,000,000	2.00	1,011,900,000	3.00	1,034,900,000	4.00	1
	Cakupan pengusaha industri mikro, kecil dan menengah yang menerapkan TTG	10	10.00		10.50		20.00		30.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) pada produk-produk hasil industri mikro, kecil dan menengah	0	20.00		22.00		26.00		28.50	
Kebudayaan										
Program Pengembangan Nilai Budaya	Porsi muatan budaya dan adat Suku Mee dalam kurikulum pendidikan sekolah	0	-	150,000,000	5.00	150,000,000	10.00	150,000,000	15.00	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan sanggar seni yang dibina dan diberdayakan	0	2.00	250,000,000	2.00	300,000,000	2.00	350,000,000	2.00	
	Frekwensi juara dalam lomba seni budaya tingkat regional/nasional	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Persentase penerapan bentuk kemitraan usaha profesi seni dan budaya antar daerah dengan pihak swasta / LSM	0	10.00	400,000,000	15.00	400,000,000	20.00	400,000,000	30.00	
	Cakupan potensi daerah wisata seni budaya yang dipromosikan	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
Pemerintahan Umum										
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase penetapan Perda yang tepat waktu	85	88.00	23,969,530,000	91.00	24,254,000,000	94.00	24,804,100,000	97.00	25
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	0	15.00	1,600,000,000	25.00	1,619,000,000	50.00	1,655,700,000	75.00	1
	Persentase implementasi Sistem	0	50.00	11,604,822	75.00	11,700,000	85.00	12,000,000	95.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Pajak On-Line									
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Cakupan fasilitasi pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah	90	92.00	8,418,800,000	94.00	8,518,800,000	96.00	8,712,000,000	98.00	8
	Cakupan tuntasnya kasus pengaduan masyarakat	25	43.00		61.00		79.00		97.00	
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Laporan Keuangan berbasis akrual	30	37.00	10,114,705,900	45.00	10,234,800,000	53.00	10,466,900,000	61.00	10
	Persentase APBD Tepat Waktu	100	100.00		100.00		100.00		100.00	
	Persentase pertumbuhan PAD	5	6.00		7.00		8.00		9.00	
	Cakupan aset daerah yang telah teridentifikasi dan dinilai kembali	40	53.00		66.00		79.00		92.00	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti	80	84.00	2,934,455,500	88.00	2,969,300,000	92.00	3,036,700,000	96.00	3
	Tingkat implementasi SPIP	75	80.00		85.00		90.00		95.00	
	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Rendah	Rendah		Rendah		Tinggi		Tinggi	
	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Rendah	Rendah		Rendah		Tinggi		Tinggi	
	Cakupan aset daerah yang telah teridentifikasi dan dinilai kembali	40	53.00		66.00		79.00		92.00	
Program Optimalisasi pemanfaatan	Persentase implementasi	40	45.00	4,701,770,000	55.00	4,757,600,000	65.00	4,865,500,000	75.00	5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
teknologi informasi	pengelolaan belanja dan aset daerah berbasis IT									
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Peningkatan Level Internal Audit Capability Model (IA-CM) pada APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)	1	1.00	1,463,700,000	1.00	1,481,000,000	1.00	1,514,600,000	1.00	1
	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemeriksaan	20	33.00		46.00		59.00		72.00	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	0	20.00	200,000,000	30.00	202,400,000	50.00	207,000,000	70.00	
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	0	25.00		50.00		65.00		80.00	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	0	20.00	200,000,000	30.00	202,400,000	50.00	207,000,000	70.00	
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	0	25.00		50.00		65.00		80.00	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	0	20.00	200,000,000	30.00	202,400,000	50.00	207,000,000	70.00	
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	0	25.00		50.00		65.00		80.00	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	0	20.00	200,000,000	30.00	202,400,000	50.00	207,000,000	70.00	
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	0	25.00		50.00		65.00		80.00	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	0	20.00	200,000,000	30.00	202,400,000	50.00	207,000,000	70.00	
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	0	25.00		50.00		65.00		80.00	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	0	20.00	200,000,000	30.00	202,400,000	50.00	207,000,000	70.00	
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	0	25.00		50.00		65.00		80.00	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	0	20.00	200,000,000	30.00	202,400,000	50.00	207,000,000	70.00	
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	0	25.00		50.00		65.00		80.00	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	0	20.00	200,000,000	30.00	202,400,000	50.00	207,000,000	70.00	
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	0	25.00		50.00		65.00		80.00	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	0	20.00	200,000,000	30.00	202,400,000	50.00	207,000,000	70.00	
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	0	25.00		50.00		65.00		80.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru									
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan tapal batas distrik	0	20.00	200,000,000	30.00	202,400,000	50.00	207,000,000	70.00	
	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	0	25.00		50.00		65.00		80.00	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah (kabupaten/ distrik/kampung)	25	45.00	2,575,000,000	55.00	2,605,600,000	65.00	2,664,700,000	75.00	2
	Persentase penerapan SOTK baru	60	65.00		75.00		85.00		95.00	
	Persentase penerapan RTL (Rencana Tindak Lanjut) hasil koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar daerah	0	50.00		65.00		75.00		85.00	
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase peningkatan sistem informasi penanaman modal	2.5	3.00	506,690,000	3.50	512,700,000	4.00	524,300,000	5.00	
	Rata-rata waktu pelayanan perijinan penanaman modal (investasi)	5	4.00		2.00		1.00		1.00	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Naskah Akademik yang berkualitas	-	80.00	1,102,500,000	80.00	1,115,600,000	90.00	1,140,900,000	90.00	1
	Cakupan tenaga fungsional <i>legal drafting</i> yang berkualitas	-	2.00		3.00		3.00		4.00	
	Cakupan produk-produk hukum daerah yang diterima oleh kementerian dalam	-	100.00		100.00		100.00		100.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	negeri									
Kepegawaian										
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan ASN yang mengikuti tugas belajar pendidikan tinggi yang lulus tepat waktu	10	27.00	4,900,000,000	44.00	4,958,100,000	61.00	5,070,600,000	78.00	5
	Persentase penerapan penilaian kinerja PNS berbasis UU ASN	80	84.00		88.00		92.00		96.00	
	Tingkat pemahaman PNS dalam penilaian kinerja berbasis ASN	30	44.00		58.00		72.00		86.00	
Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan (struktural dan fungsional)	45	48.00	1,288,750,000	51.00	1,304,100,000	54.00	1,333,600,000	57.00	1
	Persentase CPNSD yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Struktural	80	84.00		88.00		92.00		96.00	
Perencanaan Pembangunan										
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase penerapan e-planning dan e-musrenbang	0	55.00	8,205,968,080	65.00	8,303,400,000	75.00	8,491,800,000	85.00	8
	Persentase tenaga fungsional perencanaan pembangunan	0	5.00		10.00		15.00		20.00	
	Persentase dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA-PD) yang berkualitas	25	42.50		60.00		77.50		95.00	
	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berkualitas (RKPd, RENJA-PD, RKA-PD, KUA-PPAS, DPA, RAPBD)	80	84.00		88.00		92.00		96.00	
	Persentase	80	84.00		88.00		92.00		96.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD									
	Tersusunnya Dokumen URD Otsus yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang berkualitas	2	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang berkualitas	1	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Persentase usulan hasil musrenbang yang dimuat dalam perencanaan tahunan	75	80.00		85.00		90.00		95.00	
Program Pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan kualitas SIPD	0	10.00	1,214,940,000	10.00	1,229,400,000	10.00	1,257,200,000	10.00	1
	Persentase realisasi PD yang melengkapi indikator sesuai hasil pemetaan SIPD	0	50.00		60.00		70.00		75.00	
	Cakupan indikator SIPD yang memenuhi kriteria dan berkualitas	0	50.00		60.00		70.00		75.00	
	Persentase penerapan data dan informasi pembangunan berbasis IT	0	30.00		40.00		50.00		60.00	
Program Afirmasi Lembaga Masyarakat	Persentase peran masyarakat adat	-	20.00	900,000,000	40.00	910,700,000	60.00	931,400,000	80.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Adat	dalam kebijakan pembangunan									
Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan dokumen Rencana Definitif Otsus yang berkualitas	-	1.00	750,000,000	1.00	860,000,000	1.00	990,000,000	1.00	1
	Cakupan pendataan Orang Asli Papua	-	20.00		40.00		60.00		80.00	
Penataan Ruang										
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase penerapan RTRW	10	30.00	2,000,000,000	45.00	2,023,700,000	60.00	2,069,600,000	75.00	2
	Jumlah RDTR Distrik yang berkualitas	0	1.00		1.00		1.00		1.00	
	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penarapan RTRW	0	20.00		30.00		35.00		40.00	
Program Lintas Sektor										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				32,049,563,000		32,430,100,000		33,165,500,000		34
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4,314,320,000		4,365,500,000		4,464,600,000		4
Program peningkatan disiplin aparatur				3,281,214,000		3,320,100,000		3,395,400,000		3
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS						0				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				88,733,374,015		89,786,800,000		91,823,200,000		94
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2,394,362,900		2,422,800,000		2,477,800,000		2

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Kabupaten Dogiyai 2017-2022

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
	ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI
1	Laju Pertumbuhan Penduduk
2	Jumlah Penduduk
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.2	Pertumbuhan ekonomi
1.3	Tingkat inflasi
1.4	Angka Gini Ratio
1.5	Pendapatan Per Kapita
1.6	Tingkat Kemiskinan
1.7	Tingkat Kemiskinan Orang Asli Papua
1.8	Pengeluaran per kapita
	Fokus Kesejahteraan Sosial
1	Pendidikan
1.1.	Angka Melek Huruf
1.2.	Rata-rata Lama Sekolah
1.3.	Rata-rata Lama Sekolah Orang Asli Papua
2	Kesehatan
2.1	Angka Harapan Hidup
2.2	Angka Harapan Hidup Orang Asli Papua
2.3	Angka prevalensi gizi buruk
2.4	Angka Kematian Ibu
2.5	Angka Kematian Bayi
3	Ketenagakerjaan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka
	ASPEK PELAYANAN UMUM
	Pelayanan urusan wajib
	Terkait pelayanan dasar
1	Pendidikan
1.1	Pendidikan dasar
1.1.1	APK PAUD
1.1.2	APK SD dan sederajat
1.1.3	APK SMP dan sederajat
1.1.4	APM Pendidikan Anak Usia Dini
1.1.5	APM SD dan sederajat
1.1.6	APM SMP dan sederajat
1.1.7	Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi B
1.1.8	Cakupan guru PAUD yang bersertifikasi
1.1.9	Rasio ruang kelas murid PAUD
1.1.10	Angka Kelulusan SD dan sederajat
1.1.11	Angka Kelulusan SMP dan sederajat
1.1.12	Angka Melanjutkan Sekolah ke SMP
1.1.13	Rasio Guru Bersertifikasi terhadap murid SD/SMP
1.1.14	Rasio Guru Murid jenjang SD dan sederajat
1.1.15	Rasio Guru Murid jenjang SMP dan sederajat
1.1.16	Rasio Sekolah Murid jenjang SD dan sederajat
1.1.17	Cakupan Sekolah yang memberikan DAPODIK secara rutin dan berkesinambungan
1.1.18	Jumlah Sekolah Satu Atap Berasrama yang berkualitas
1.2	Pendidikan Menengah
1.2.1	Angka Melanjutkan Sekolah ke SMA/SMK
1.2.2	Proporsi siswa yang lulus pendidikan kejuruan
1.2.3	Daya serap lapangan kerja untuk lulusan pendidikan kejuruan
1.3	Pendidikan Tinggi
1.3.1	Persentase peserta beasiswa pendidikan tinggi yang lulus tepat waktu
1.3.2	Persentase lulusan pendidikan tinggi yang terserap dalam lapangan kerja

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1.4	Pendidikan Non Formal
1.4.1	Jumlah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang memenuhi standar
1.4.2	Persentase peserta PKBM yang lulus Kejar (Kelompok Belajar) paket (A, B, C)
1.4.3	Persentase penerapan Keaksaraan Fungsional Dasar Dewasa
1.4.4	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (Perpustakaan) yang berkualitas
1.5	Persentase penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1.6	Persentase peran Komite Sekolah dalam penerapan MBS
1.7	Persentase kenaikan budaya dan budaya mutu dalam penerapan MBS
1.8	Proporsi tenaga kependidikan yang terlatih dan terampil
1.9	Persentase ketersediaan buku-buku agama di sekolah
1.10	Cakupan sekolah dasar yang memiliki ruang ibadah
1.11	Persentase peningkatan kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga keagamaan
2	Kesehatan
2.1	Cakupan Pelayanan Puskesmas terhadap kesehatan dasar (kesehatan ibu, anak dan KB; gizi; pencegahan dan pengendalian penyakit)
2.2	Persentase penduduk miskin yang terlayani JKN
2.3	Akses penduduk terhadap layanan BPJS
2.4	Persentase peningkatan sarana dan prasarana di rumah sakit
2.5	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan
2.6	Rasio Puskesmas terhadap total penduduk
2.7	Persentase peningkatan sarana dan prasarana puskesmas
2.8	Persentase kenaikan rujukan teknis laboratorium puskesmas dan rumah sakit
2.9	Cakupan pemeriksaan sampel
2.10	Rasio dokter terhadap penduduk
2.11	Rasio perawat/bidan terhadap penduduk
2.12	Jumlah puskesmas yang telah memenuhi standar layanan
2.13	Persentase pemenuhan obat-obatan untuk menghilangkan simptomatik/gejala, meredakan nyeri (antibiotik, analgesik, dll)
2.14	Persentase pemenuhan obat-obatan untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit (vaksin, serum, dll)
2.15	Persentase pemenuhan obat-obatan untuk menambah atau mengganti fungsi zat yang kurang (vitamin, hormon, dll)
2.16	Proporsi pelayanan farmasi yang berkualitas
2.17	Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan
2.18	Cakupan Pos Yandu Lansia
2.19	Jumlah Kader Lansia yang terlatih dan terampil
2.20	Tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat di Puskesmas

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2.21	Jumlah puskesmas yang berfungsi sebagai UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) yang berkualitas (Poliklinik, UGD, bersalin)
2.22	Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN)
2.23	Rasio Bidan Terlatih yang memenuhi standar terhadap total penduduk
2.24	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita
2.25	Cakupan SDKN Posyandu
2.26	Angka Kesakitan Penduduk
2.27	Cakupan balita dan anak sekolah yang memperoleh vaksin dan imunisasi
2.28	Persentase Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
2.29	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan
2.30	Cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin terhadap balita dan anak
2.31	Cakupan Ibu Hamil yang diberikan tambahan makanan dan vitamin
2.32	Persentase peningkatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
2.33	Cakupan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
2.34	Persentase kampung/desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)
2.35	Persentase tenaga penyuluh kesehatan yang terdidik dan terlatih
2.36	Cakupan kampung/desa yang berstatus Rumah Desa Sehat
2.37	Persentase kampung/desa yang memperoleh penyuluhan lingkungan sehat
2.38	Cakupan kampung/desa yang bebas asap rokok
2.39	Persentase penduduk yang merokok
3	Pekerjaan Umum
3.1	Cakupan panjang jalan dan jembatan terhadap penduduk (Mobilitas)
3.2	Cakupan panjang jalan dan jembatan terhadap luas wilayah (Aksesibilitas)
3.3	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang (kondisi mantap)
3.4	Rasio panjang jalan dan jembatan dalam kawasan sentra produksi
3.5	Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat
3.6	Rasio jaringan irigasi kondisi baik
3.7	Tingkat kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW
3.8	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
3.9	Cakupan normalisasi sungai
4	Penataan Ruang
4.1	Persentase penerapan RTRW

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
4.2	Jumlah RDTR Distrik yang berkualitas
4.3	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penarapan RTRW
5	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5.1	Persentase peningkatan pembangunan tempat-tempat ibadah
5.2	Persentase tempat ibadah yang terpelihara
5.3	Backlog kepemilikan rumah layak huni
5.4	Akses rumahtangga terhadap air bersih
5.5	Cakupan rumahtangga Orang Asli Papua yang memiliki rumah layak huni
6	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
6.1	Proporsi lembaga keagamaan yang dibina dan diberdayakan
6.2	Persentase berfungsinya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)
6.3	Persentase pemahaman warga dalam mendeteksi dini dan menghadapi bencana alam
6.4	presentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana
6.5	Persentase hasil penertiban penyakit masyarakat (Pekat)
6.6	Rasio Satpol PP terhadap total penduduk
6.7	Rasio Linmas terhadap total penduduk
6.8	Angka Kekerasan Dalam Rumahtangga (KDRT)
6.9	Persentase kasus pelanggaran terhadap Perda
6.10	Persentase penanganan pelanggaran HAM
6.11	Persentase peningkatan pelayanan publik peduli HAM
6.12	Indeks Kebahagiaan
6.13	Cakupan dokumen laporan penegakanHAM yang berkualitas
6.14	Persentase peserta pilkada/pemilu
6.15	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kehidupan politik dan berdemokrasi
7	Sosial
7.1	Jumlah keluarga miskin dan PMKS yang terampil berusaha secara mandiri
7.2	Cakupan KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang diberdayakan
7.3	Proporsi keluarga miskin yang memperoleh sarana dan prasarana pendukung KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) yang mema
7.4	Persentase pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi PMKS
7.5	Persentase penyandang PMKS binaan yang terampil berusaha secara mandiri
7.6	Persentase peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan PMKS

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
7.7	Proporsi tenaga penyuluh kesejahteraan sosial yang terlatih dan terampil
7.8	Rasio keluarga dalam KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang mengikuti PKH (Program Keluarga Harapan)
7.9	Persentase tenaga kerja penyandang disabilitas yang dilindungi
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar
1	Tenaga Kerja
1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka
1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
1.3	Jumlah BLK yang terakreditasi
1.4	Persentase lulusan BLK yang terserap dalam lapangan kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1	Porsi muatan gender dalam perencanaan dan penganggaran
2.2	Rata-rata Lama Sekolah perempuan
2.3	Angka Melek Huruf perempuan
2.4	Persentase perempuan di perdesaan yang terampil dalam bidang usaha ekonomi produktif
2.5	Persentase kenaikan pendapatan mama-mama papua yang mendapat pendampingan usaha ekonomi
3	Pangan
3.1	Cakupan penduduk tahan pangan berdasarkan AKG (Angka Kecukupan Gizi)
3.2	Jumlah komoditi lokal yang memenuhi standar menjadi alternatif pangan bermutu
3.3	Rasio konsumsi penduduk terhadap komoditi pangan alternatif
3.4	Persentase kenaikan produksi pangan lokal alternatif
3.5	Indeks Ketahanan Pangan Agregat Rumahtangga
3.6	Angka Kecukupan Gizi (AKG)
3.7	Angka Pola Pangan Harapan (PPH)
3.8	Ketersediaan pangan per kapita
4	Pertanahan
4.1	Persentase penataan tapal batas distrik
5	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.1	Persentase ketersediaan Ruang terbuka hijau (RTH)
5.2	Kategori Tingkat Pencemaran Udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
5.3	Cakupan pelayanan persampahan di perkotaan Dogiyai
5.4	Cakupan pemenuhan TPA di perkotaan Dogiyai
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
6.1	Rata-rata waktu pelayanan administrasi kependudukan
6.2	Persentase ketepatan waktu pelayanan kependudukan
6.3	Rasio penduduk usia 17 tahun dan keatas yang ber KTP-el
6.4	Rasio bayi yang berakte kelahiran
6.5	Rasio pasangan berakte nikah (catatan sipil)
6.6	Rasio rumahtangga yang memiliki KK-el (Kartu Keluarga Elektronik)
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
7.1	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan dan pen
7.2	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
7.3	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatus desa dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
7.4	Cakupan kampung adat
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.1	Persentase berfungsinya kelompok peduli KB
8.2	Cakupan kader KB terlatih dan terdidik
8.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga
8.4	Rasio akseptor KB
8.5	Cakupan peserta KB aktif
8.6	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
8.7	Cakupan Ketersediaan alat kontrasepsi untuk keluarga miskin
8.8	Persentase peningkatan pemahaman remaja terhadap reproduksi
8.9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
9	Cakupan bimbingan konseling terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual
9	Perhubungan
9.1	Rasio kendaraan bermotor terhadap penduduk
10	Komunikasi dan Informatika
10.1	Proporsi penduduk yang terakses media komunikasi telepon seluler

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
10.2	Rasio coverage BTS
11	Koperasi dan UKM
11.1	Persentase hasil produk unggulan yang terserap di pasar regional (ibu kota provinsi)
11.2	Tingkat daya saing produk-produk unggulan ekonomi kerakyatan
11.3	Jumlah komoditi unggulan ekonomi kerakyatan yang dapat dipromosikan di ibu kota provinsi
11.4	Persentase pengusaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri melalui pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
11.5	Jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah yang dapat bermitra dengan perusahaan menengah dan besar
11.6	Persentase produk unggulan usaha industri mikro, kecil dan menengah yang dapat dipasarkan antarpulau
11.7	Persentase peningkatan SHU Koperasi
11.8	Persentase peningkatan Anggota Koperasi
11.9	Jumlah Koperasi yang terkategori mandiri
11.10	Persentase kenaikan nilai produksi usaha ekonomi kerakyatan
11.11	Persentase peningkatan nilai tambah usaha ekonomi kerakyatan
11.12	Kontribusi usaha industri berbasis ekonomi kerakyatan terhadap PDRB
11.13	Proporsi OAP suku Mee yang memiliki usaha industri mikro dan kecil
11.14	Cakupan pengusaha OAP suku Mee yang dibina
11.15	Persentase peningkatan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah
11.16	Persentase usaha mikro dan kecil yang berbadan usaha
11.17	Persentase pengusaha industri mikro, kecil dan menengah yang diberdayakan
12	Kepemudaan dan Olahraga
12.1	Cakupan organisasi kepemudaan yang dibina
12.2	Cakupan pengusaha muda yang mandiri
12.3	Persentase cabang olahraga prestasi yang terbina
12.4	Proporsi peserta kompetisi olahraga daerah yang berprestasi di tingkat regional/ nasional
12.5	Persentase atlet berprestasi yang diberikan penghargaan
12.6	Persentase peningkatan kemitraan bina olahraga dengan lembaga/ instansi lainnya
14	Statistik
14.1	Dogiyai Dalam Angka
14.2	IPM Dogiyai
14.3	PDRB Dogiyai
14.4	Cakupan pendataan Orang Asli Papua

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
14.5	Cakupan indikator SIPD yang memenuhi kriteria dan berkualitas
15	Kebudayaan dan Periwisata
15.1	Porsi muatan budaya dan adat Suku Mee dalam kurikulum pendidikan sekolah
15.2	Cakupan sanggar seni yang dibina dan diberdayakan
15.3	Frekwensi juara dalam lomba seni budaya tingkat regional/nasional
15.4	Persentase penerapan bentuk kemitraan usaha profesi seni dan budaya antar daerah dengan pihak swasta / LSM
15.5	Cakupan potensi daerah wisata seni budaya yang dipromosikan
	Pelayanan Urusan Pilihan
1	Pertanian
1.1	Tingkat produktifitas tanaman pangan
1.2	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan
1.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi
1.4	Persentase peningkatan produksi peternakan
1.5	Kontribusi sektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi
1.6	Persentase petani/peternak /nelayan yang menguasai dan terampil melaksanakan usaha agribisnis
1.7	Cakupan Kelompok petani yang diberdayakan dan dibina
1.8	Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang terdidik dan terlatih
1.9	Cakupan pembinaan dan pendampingan pada kelompok petani tanaman pangan
1.10	Rasio tenaga penyuluh pertanian yang terlatih terhadap total petani
2	Perikanan
2.1	Persentase peningkatan produksi budidaya perikanan
2.2	Kontribusi subsektor budidaya perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi
2.3	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
2.4	Kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap pertumbuhan ekonomi
2.5	Persentase peningkatan usaha penangkapan Ikan dan pemberdayaan nelayan kecil
3	Pertambangan dan Energi
3.1	Tingkat elektrifikasi pada rumahtangga Orang Asli Papua
3.2	Tingkat Elektrifikasi penduduk
4	Perdagangan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
4.1	Margin perdagangan bahan-bahan pokok
4.2	Tingkat inflasi
4.3	Indeks Kemahalan Kontruksi
5	Perindustrian
5.1	Persentase peningkatan pembinaan kemampuan Teknologi Tepat Guna (TTG) di industri mikro dan kecil
5.2	Cakupan pengusaha industri mikro, kecil dan menengah yang menerapkan TTG
5.3	Persentase penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) pada produk-produk hasil industri mikro, kecil dan menengah
	Pelayanan Urusan Penunjang
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1	Pemerintahan Umum
1.1.2	Cakupan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
1.1.3	Cakupan fasilitasi pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah
1.1.4	Cakupan tuntasnya kasus pengaduan masyarakat
1.1.5	Jumlah dokumen distrik dalam angka yang berkualitas
1.1.5	Persentase pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
1.1.7	Persentase penataan tapal batas distrik
1.1.8	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah (kabupaten/ distrik/kampung)
1.1.9	Persentase penerapan SOTK baru
1.1.10	Persentase penerapan RTL (Rencana Tindak Lanjut) hasil koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar daerah
1.1.12	Persentase Naskah Akademik yang berkualitas
1.1.13	Cakupan tenaga fungsional <i>legal drafting</i> yang berkualitas
1.1.14	Cakupan produk-produk hukum daerah yang diterima oleh kementerian dalam negeri
1.2	Perencanaan Pembangunan Daerah
1.2.1	Persentase penerapan e-planning dan e-musrenbang
1.2.2	Persentase tenaga fungsional perencanaan pembangunan
1.2.3	Persentase dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA-PD) yang berkualitas
1.2.4	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berkualitas (RKPD, RENJA-PD, RKA-PD, KUA-PPAS, DPA, RAPBD)
1.2.5	Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
1.2.6	Tersusunnya Dokumen URD Otsus yang tepat waktu
1.2.7	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang berkualitas
1.2.8	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang berkualitas

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1.2.9	Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang berkualitas
1.2.10	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana yang berkualitas
1.2.11	Persentase usulan hasil musrenbang yang dimuat dalam perencanaan tahunan
1.2.12	Persentase peningkatan kualitas SIPD
1.2.13	Persentase realisasi PD yang melengkapi indikator sesuai hasil pemetaan SIPD
1.2.14	Persentase penerapan data dan informasi pembangunan berbasis IT
1.2.15	Persentase peran masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan
1.2.16	Cakupan dokumen Rencana Definitif Otsus yang berkualitas
1.3	Keuangan Daerah
1.3.1	Opini BPK
1.3.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja
1.3.3	Persentase Laporan Keuangan berbasis akrual
1.3.4	Persentase APBD Tepat Waktu
1.3.5	Persentase pertumbuhan PAD
1.3.6	Cakupan aset daerah yang telah teridentifikasi dan dinilai kembali
1.3.7	Persentase implementasi pengelolaan belanja dan aset daerah berbasis IT
1.4	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
1.4.1	Rata-rata Nilai Prestasi Kerja ASN
1.4.2	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat profesi tertentu terhadap total ASN
1.4.3	Cakupan ASN yang mengikuti tugas belajar pendidikan tinggi yang lulus tepat waktu
1.4.4	Persentase penerapan penilaian kinerja PNS berbasis UU ASN
1.4.5	Tingkat pemahaman PNS dalam penilaian kinerja berbasis ASN
1.4.6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan (struktural dan fungsional)
1.4.7	Persentase CPNSD yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Struktural
1.5	Pengawasan Daerah
1.5.1	Presentase temuan APIP yang ditindak lanjuti
1.5.2	Tingkat implementasi SPIP
1.5.3	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
1.5.4	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
1.5.5	Cakupan aset daerah yang telah teridentifikasi dan dinilai kembali
1.5.6	Peningkatan Level Internal Audit Capability Model (IA-CM) pada APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1.5.7	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemeriksaan
1.6	Sekretariat Dewan
1.6.1	Persentase penetapan Perda yang tepat waktu
	ASPEK DAYA SAING
	Fokus Kemampuan Ekonomi
2	Pertanian
2.1	Nilai Tukar Petani
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1	Perhubungan
1.1	Persentase kenaikan penumpang datang dan pergi di bandar udara
1.2	Persentase kenaikan bongkar muat barang di bandar udara
1.3	Cakupan distrik yang memiliki bandar udara perintis yang memadai
1.4	Cakupan terminal penumpang yang memadai
2	Pekerjaan Umum
2.1	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih
3	Komunikasi dan Informatika
3.1	Cakupan kampung yang telah terakses dengan komunikasi HP
	Fokus Iklim Berinvestasi
1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.1	Angka Kriminalitas
2	Pemerintahan Umum
2.1	Persentase implementasi Sistem Pajak On-Line

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
3	Penanaman Modal
3.1	Persentase peningkatan sistem informasi penanaman modal
3.2	Rata-rata waktu pelayanan perijinan penanaman modal (investasi)
	Fokus Sumberdaya Manusia
1	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
1.1	Rasio ASN terhadap total penduduk